



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- (2) Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Perencanaan anggaran;
 - c. Penataan organisasi;
 - d. Penyusunan dan penyempurnaan uraian jabatan; dan
 - e. Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.
- (3) Peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional termuat dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis terdiri dari tingkatan sebagai berikut:

- a. Peta Proses Bisnis level 0;
- b. Peta Proses Bisnis level 1;
- c. Peta Proses Bisnis level 2; dan
- d. Peta Proses Bisnis level 3.

Pasal 3

- (1) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari:
 - a. proses bisnis inti;
 - b. proses bisnis pendukung; dan
 - c. proses bisnis lainnya.
- (2) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

- (3) Peta Proses Bisnis level 0 mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan pemangku kepentingan.
- (4) Peta Proses Bisnis level 0 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Peta Proses Bisnis level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0.
- (2) Peta Proses Bisnis level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit kerja dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- (3) Peta Proses Bisnis level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 1.
- (4) Peta Proses Bisnis level 2 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis wilayah dan daerah sebagai penjabaran Peta Proses Bisnis level 1.
- (5) Peta Proses Bisnis level 1 dan level 2 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Peta Proses Bisnis level 3 ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit eselon 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Peta Proses Bisnis level 3 sebagaimana ayat (1) berpedoman pada Peta Proses Bisnis dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

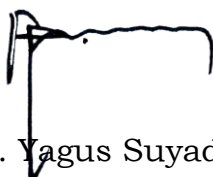
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 895

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Daftar Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peta Proses Bisnis Level 0	Peta Proses Bisnis Level 1		Peta Proses Bisnis Level 2
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	ATR/BPN 07 Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Kompetitif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik	ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
			ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama
			ATR/BPN 07.03 Pembinaan Admintrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN
			ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia
			ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis
			ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat
			ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan,

			Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan
			ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang
			ATR/BPN 07.09 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi
			ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2	ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	ATR/BPN 02.01.01 Penyiapan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
			ATR/BPN 02.01.02 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik
			ATR/BPN 02.01.03 Penyiapan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Pusat dan Daerah serta Pedoman Tata Ruang
	3	ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ATR/BPN 01.01.01 Pengelolaan Data Dasar Pertanahan dan Surveyor
			ATR/BPN 01.01.02 Pengembangan Sistem Geospasial Tematik Multiguna
			ATR/BPN 01.01.03 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
	4	ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang	ATR/BPN 01.03.01 Penetapan Hak Tanah dan Ruang
			ATR/BPN 01.03.02 Pendaftaran Tanah dan Ruang
			ATR/BPN 01.03.03 Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT

			ATR/BPN 01.03.04 Pengaturan Tanah Pemerintah
	5	ATR/BPN 01.02 Penyelenggara Reforma Agraria	ATR/BPN 01.02.01 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			ATR/BPN 01.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria
			ATR/BPN 01.02.03 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
	6	ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	ATR/BPN 01.06.01 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah
		ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan	ATR/BPN 01.07.01 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Tanah
			ATR/BPN 01.07.02 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
	7	ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang	ATR/BPN 02.02.01 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		ATR/BPN 01.05 Pengendalian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	ATR/BPN 02.02.02 Penertiban Pemanfaatan Ruang
			ATR/BPN 01.05.01 Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu
			ATR/BPN 01.05.02 Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah
	8	ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan	ATR/BPN 01.04.01 Penanganan Sengketa Pertanahan

		ATR/BPN 01.04.02 Penanganan Perkara Pertanahan
		ATR/BPN 01.04.03 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
9	ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	ATR/BPN 07.08.01 Pengawasan Internal Berbasis Risiko (<i>Quality Assurance, Consulting</i> dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP))
		ATR/BPN 07.08.02 Penanganan Kasus Administratif dan Disiplin Serta Penanganan Pengaduan
		ATR/BPN 07.08.03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas dan Dukungan Manajemen/Pelaksanaan Tugas Teknis
10	BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah	BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Wilayah
		BPN 01.02 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Wilayah
		BPN 01.03 Penyelenggaraan Reforma Agraria Wilayah
		BPN 01.04 Pengadaan Tanah, Pencadangan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Wilayah
		BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan, Pemanfaatan Tanah dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Wilayah

			BPN 01.06 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Wilayah
			BPN 01.07 Pelaksanaan Koordinasi, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Daerah

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peta Proses Bisnis Level 0 (NoI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

INPUT	PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL					OUTPUT	
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Wilayah Nasional LAPAN Pemanfaatan Data Penginderaan Jarak Jauh	PENDUKUNG	ATR/ BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama	ATR/ BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN	ATR/ BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia	ATR/ BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • RTR Nasional • RTRWN • RTR Pulau/Kepulauan • RTR KSN • Peta Bidang Tanah Kadaster • Peta Dasar Pertanahan • Peta Tematik Pertanahan • NSPK • Bahan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi • Data Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah • Data Tanah Terindikasi Terlantar • Data Pengendalian • Data Penertiban Tanah Terlantar • Data Tanah Objek Reforma Agraria • Data Tanah Hasil Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Non Proyek Strategis Nasional • Data Tanah Cadangan Negara Lainnya • Data Tanah <i>Absentee</i> • Data Tanah Kelebihan Maksimum • Data Penatagunaan Tanah • Kelompok Usaha Bersama • Sertipikat Redistribusi Tanah • Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T (termasuk WP3WT) • Gugus Tugas RA • Penerima Akses Reforma • SK Hak Atas Tanah • Sertipikat Hak Atas Tanah • Penanganan Sengketa dan Konflik • Penanganan Perkara • Pemberian Lisensi 	
KEMENTERIAN/LEMBAGA Kebijakan Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan		ATR/ BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat	ATR/ BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan	ATR/ BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	ATR/ BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis		
PEMERINTAH DAERAH Data Potensi Daerah	INTI	ATR/ BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ATR/ BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria	ATR/ BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang	ATR/ BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan		ATR/ BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
LEMBAGA KEUANGAN Layanan Pebankan, Kebijakan Terkait PNPB		ATR/ BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	ATR/ BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan	ATR/ BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang	ATR/ BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang		BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah
MASYARAKAT Permohonan Layanan		ATR/ BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang	ATR/ BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi	ATR/ BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ATR/ BPN 07.12 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan		BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah
BADAN HUKUM/INDIVIDU PROFESI Permohonan Layanan Lisensi		LAINNYA	ATR/ BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang	ATR/ BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi	ATR/ BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia		ATR/ BPN 07.12 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan
	OUTCOME <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Yang Berkeadilan • Penataan Ruang Yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan • Peningkatan Nilai Ekonomi Pertanahan Bagi Kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berdaya Saing 						

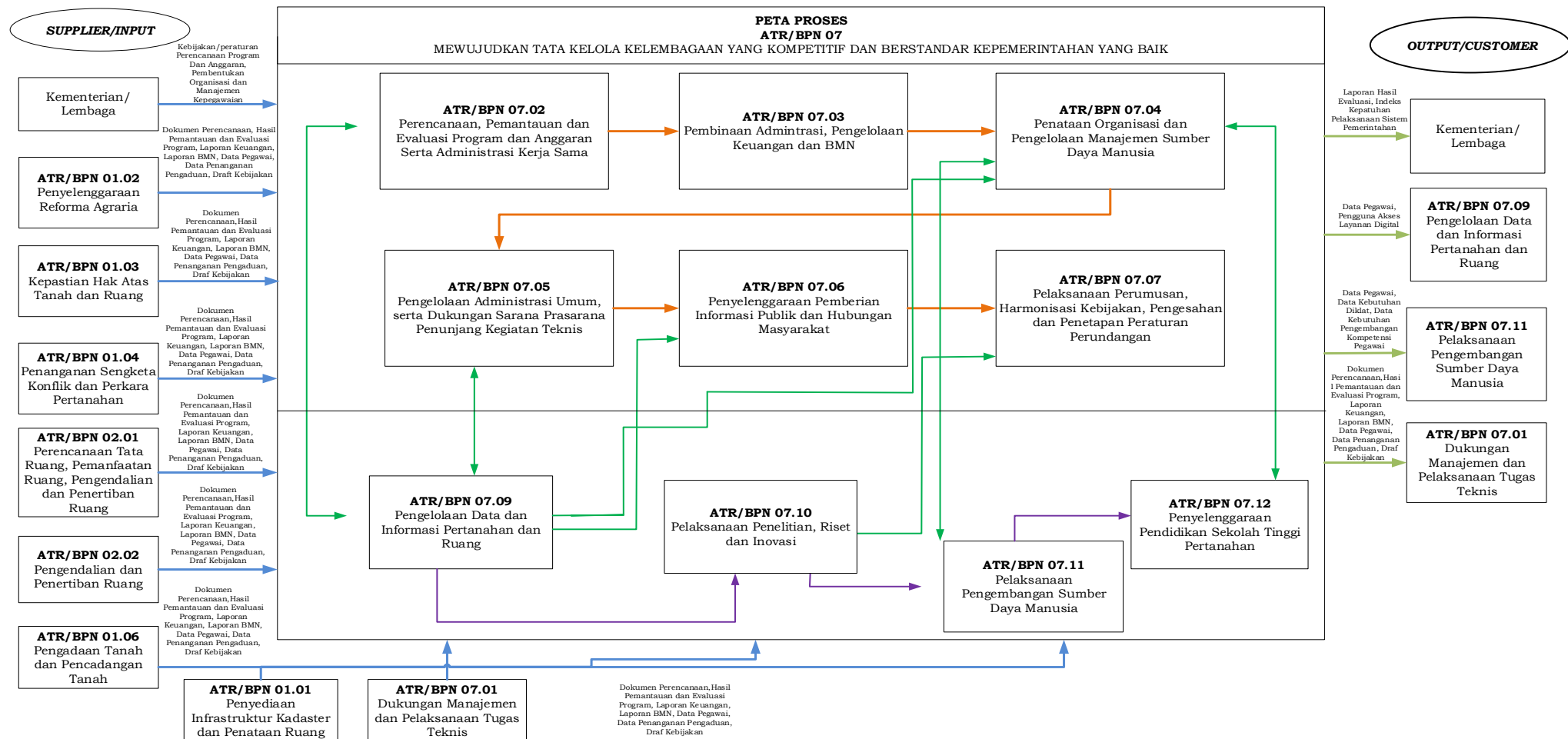
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

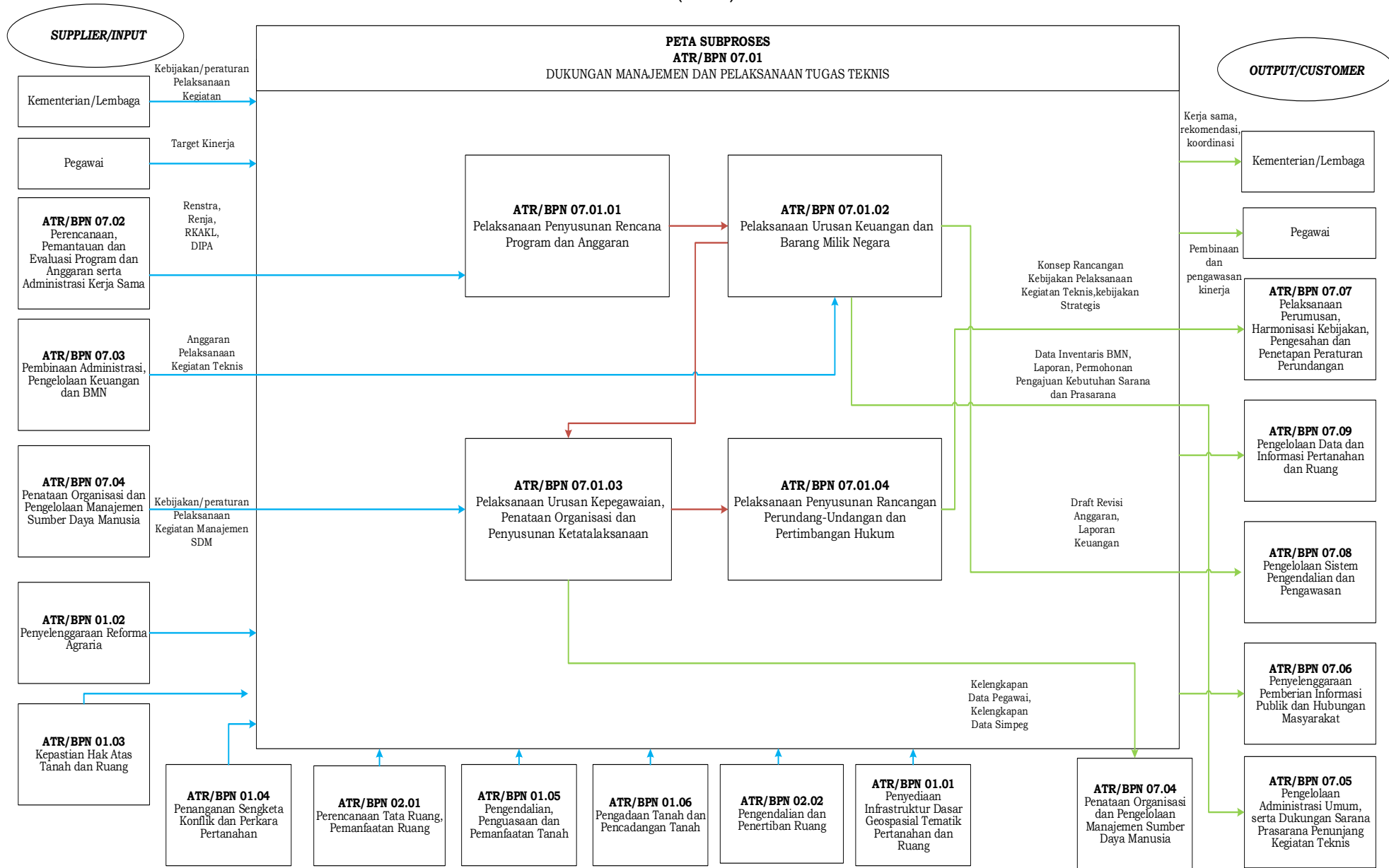
SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

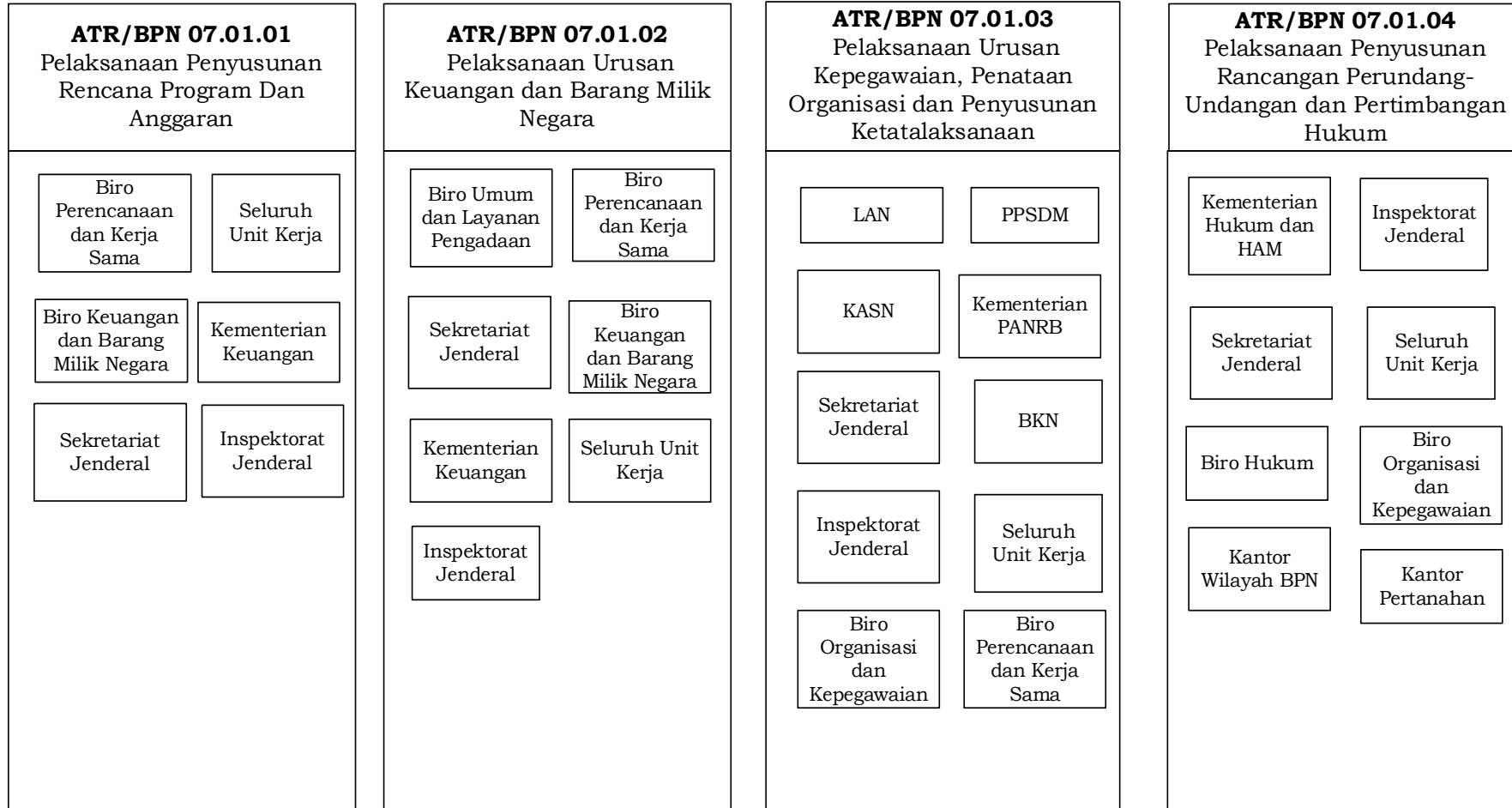
3.1. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Sekretariat Jenderal

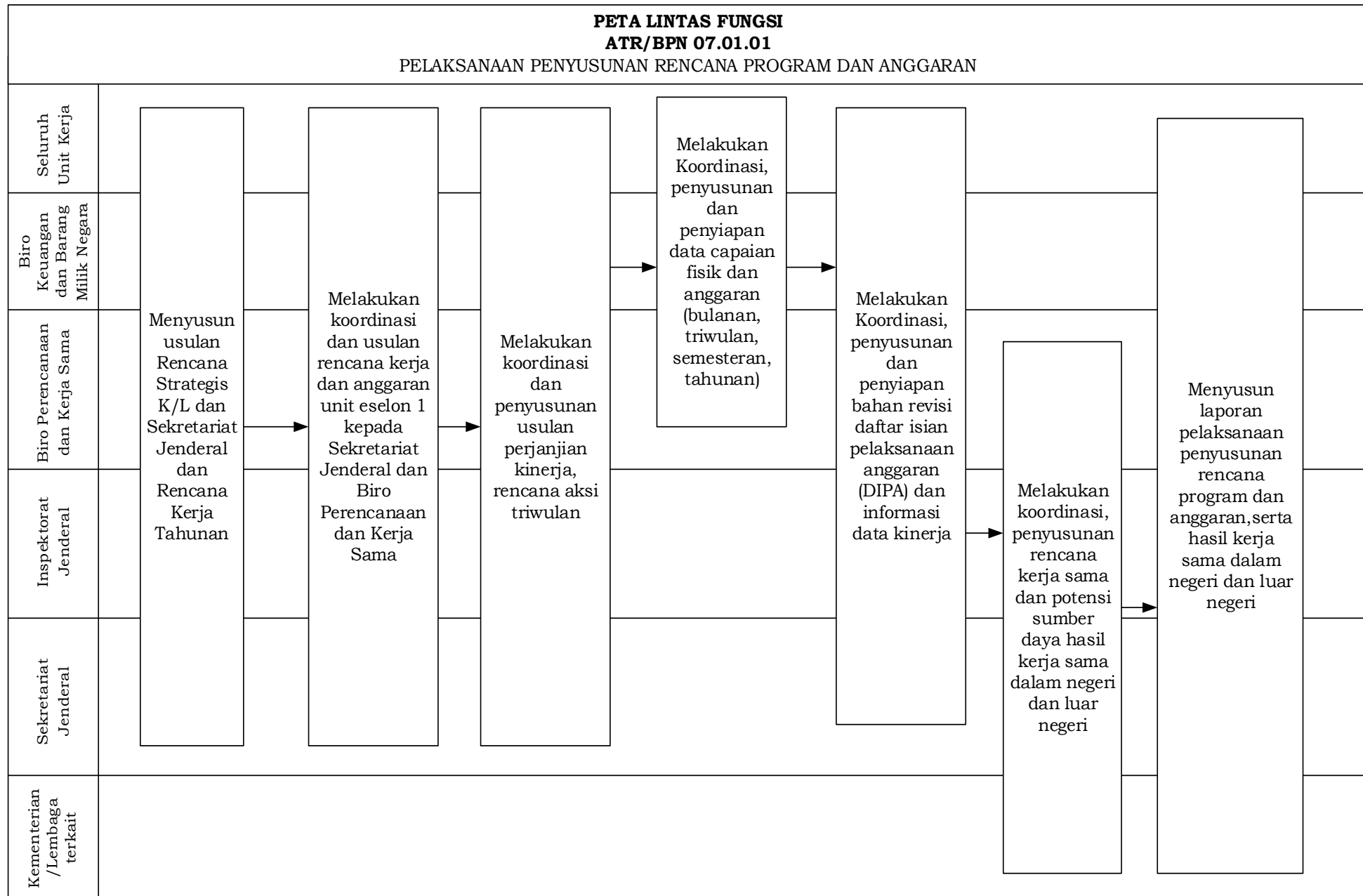


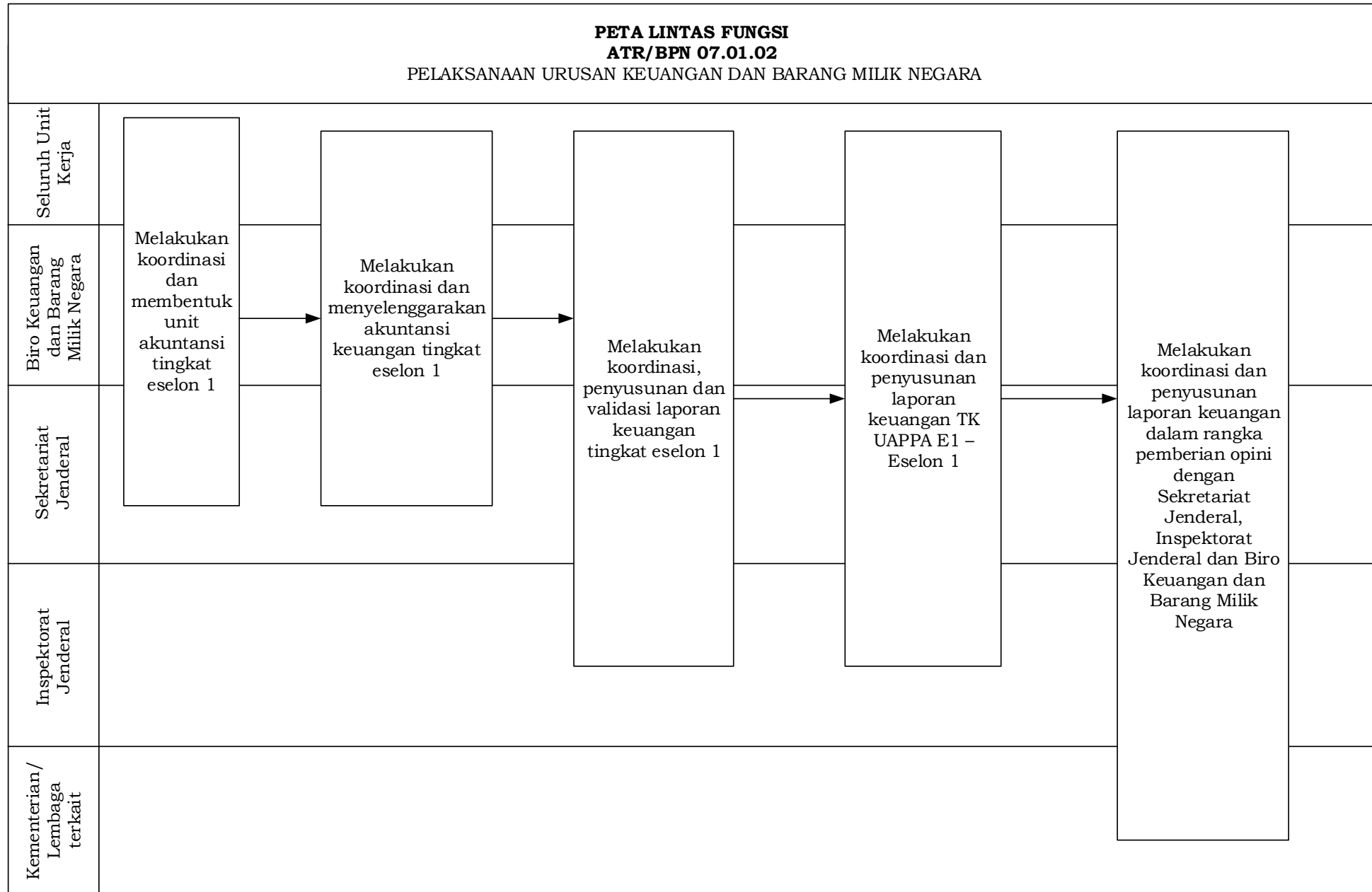
3.1.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sekretariat Direktorat Jenderal

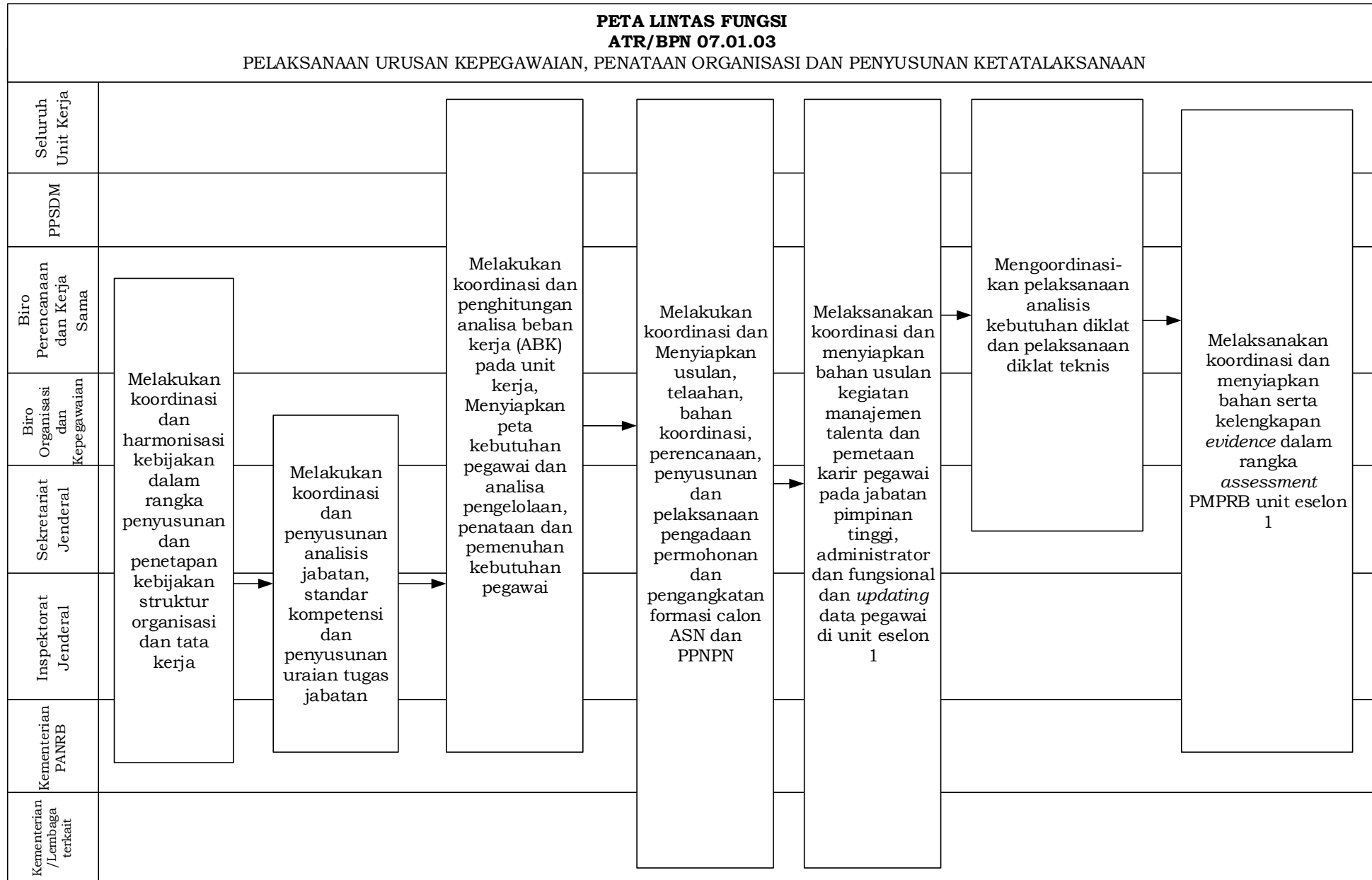


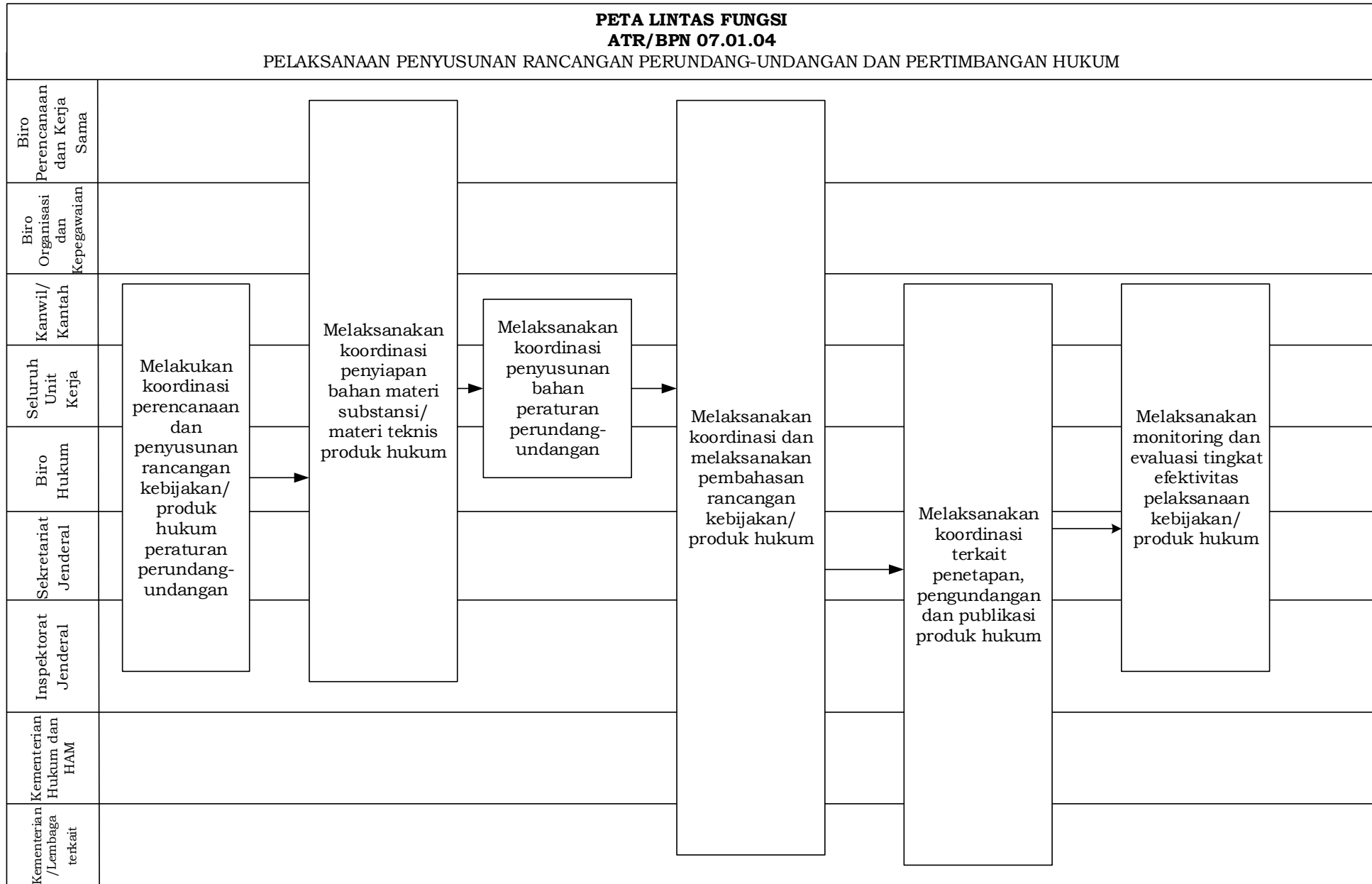
PETA RELASI
ATR/BPN 07.01
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS



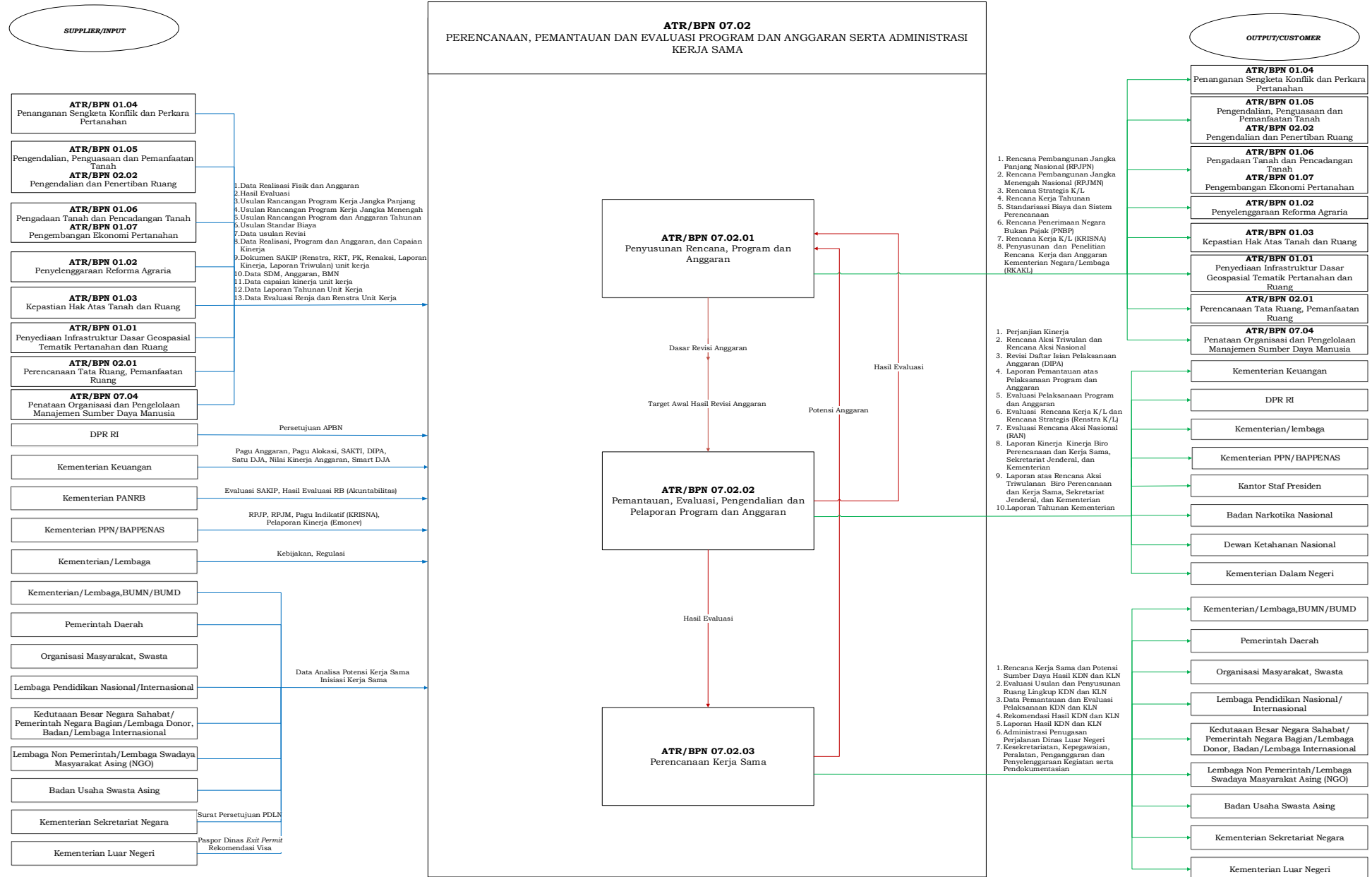






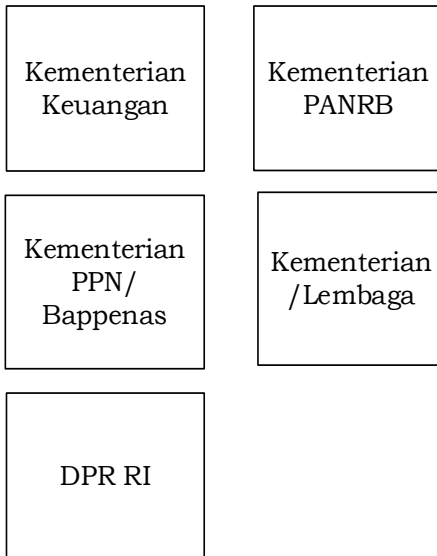


3.1.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Perencanaan dan Kerja Sama

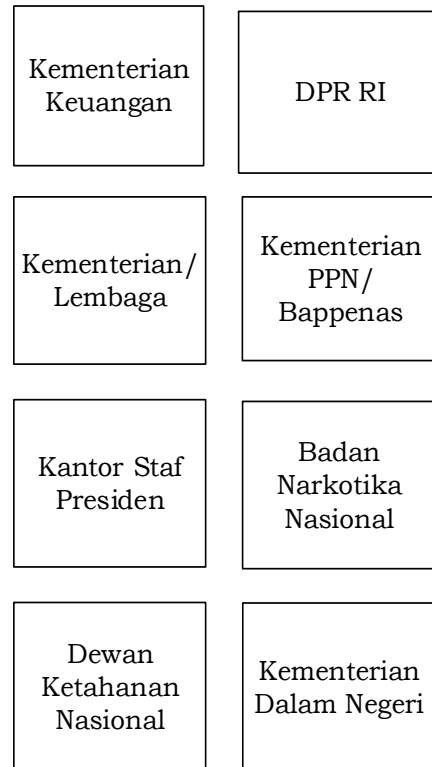


PETA RELASI
ATR/BPN 07.02
PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA ADMINISTRASI KERJA SAMA

ATR/BPN 07.02.01
Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran

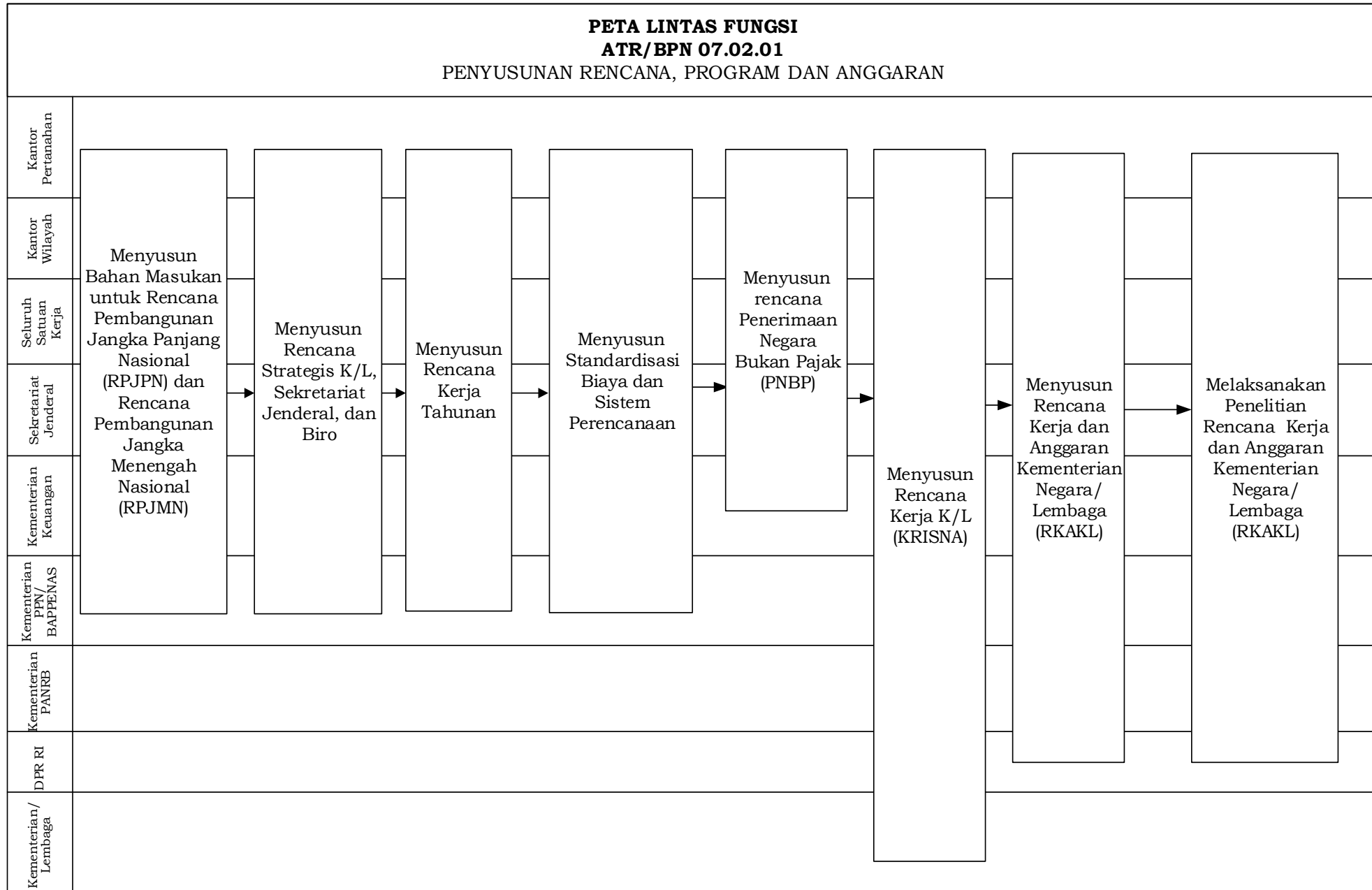


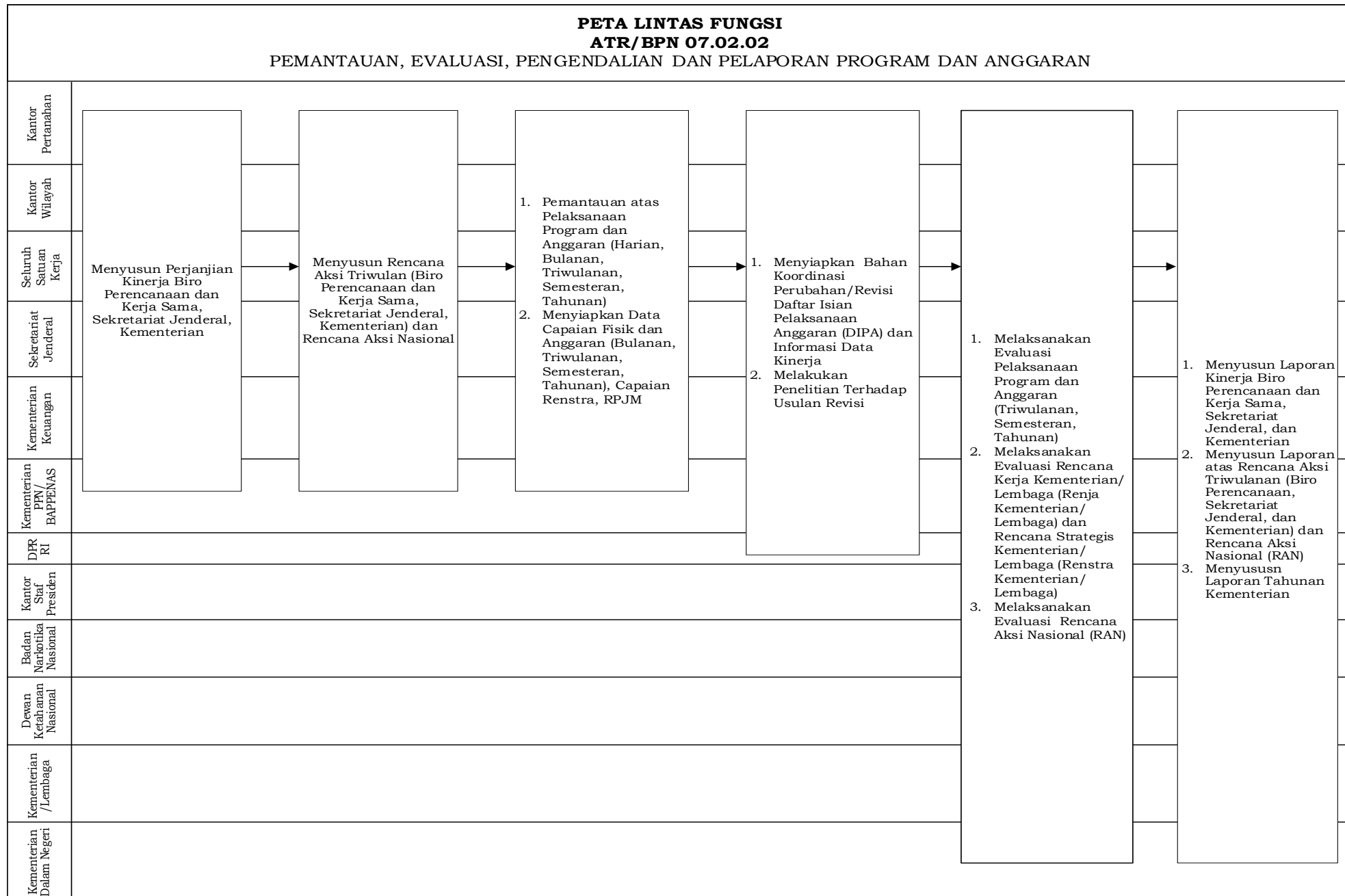
ATR/BPN 07.02.02
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran



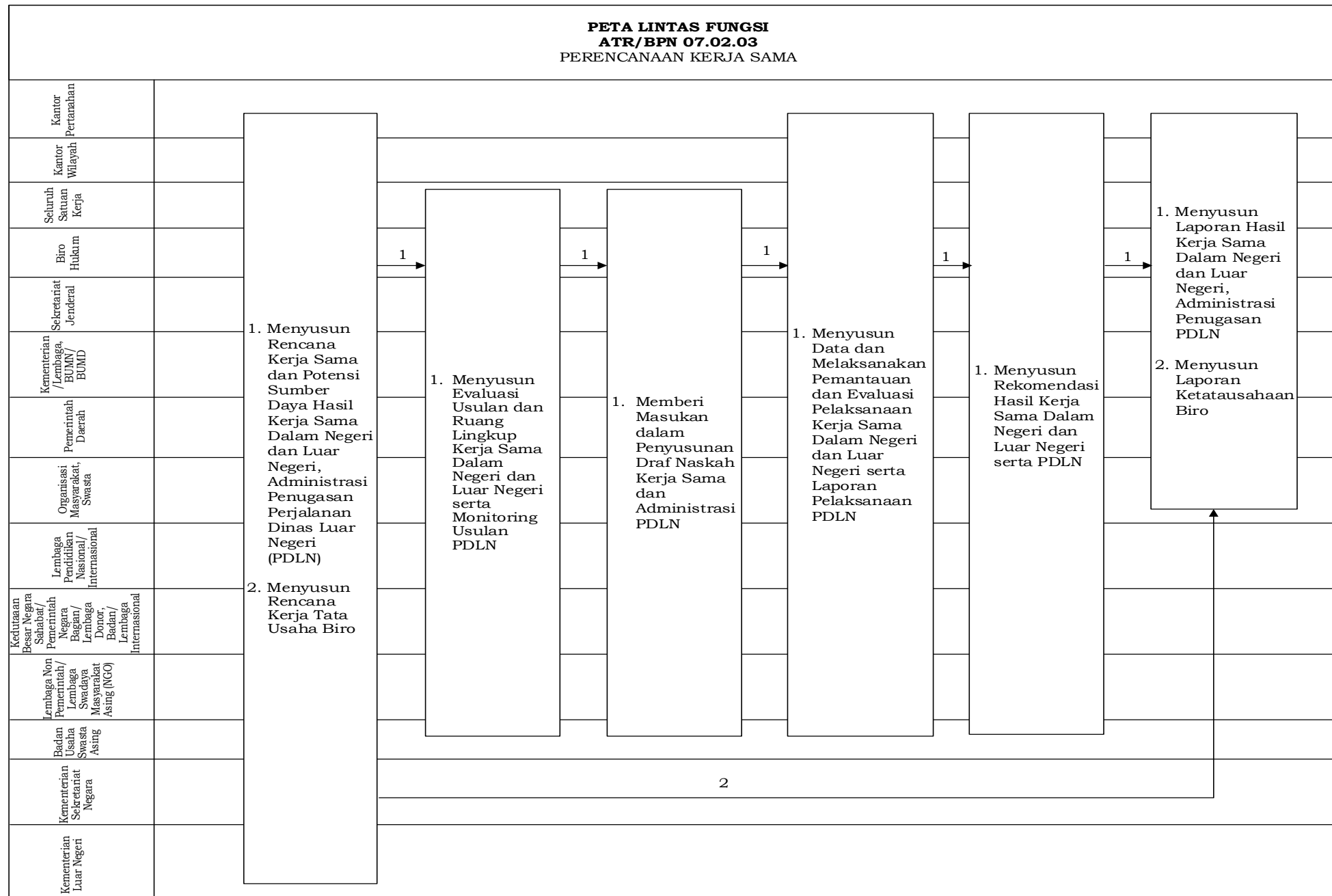
ATR/BPN 07.02.03
Perencanaan Kerja Sama



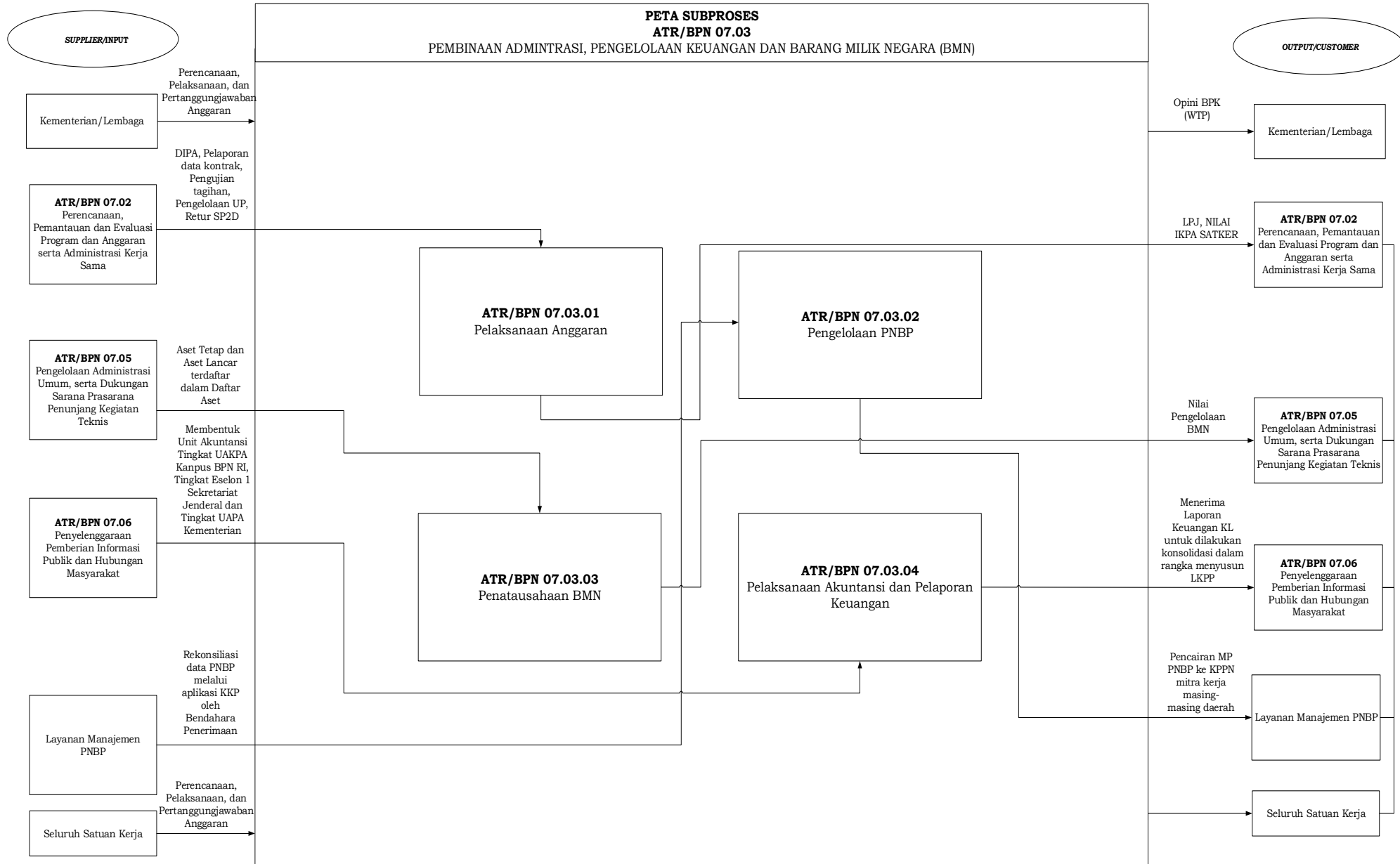




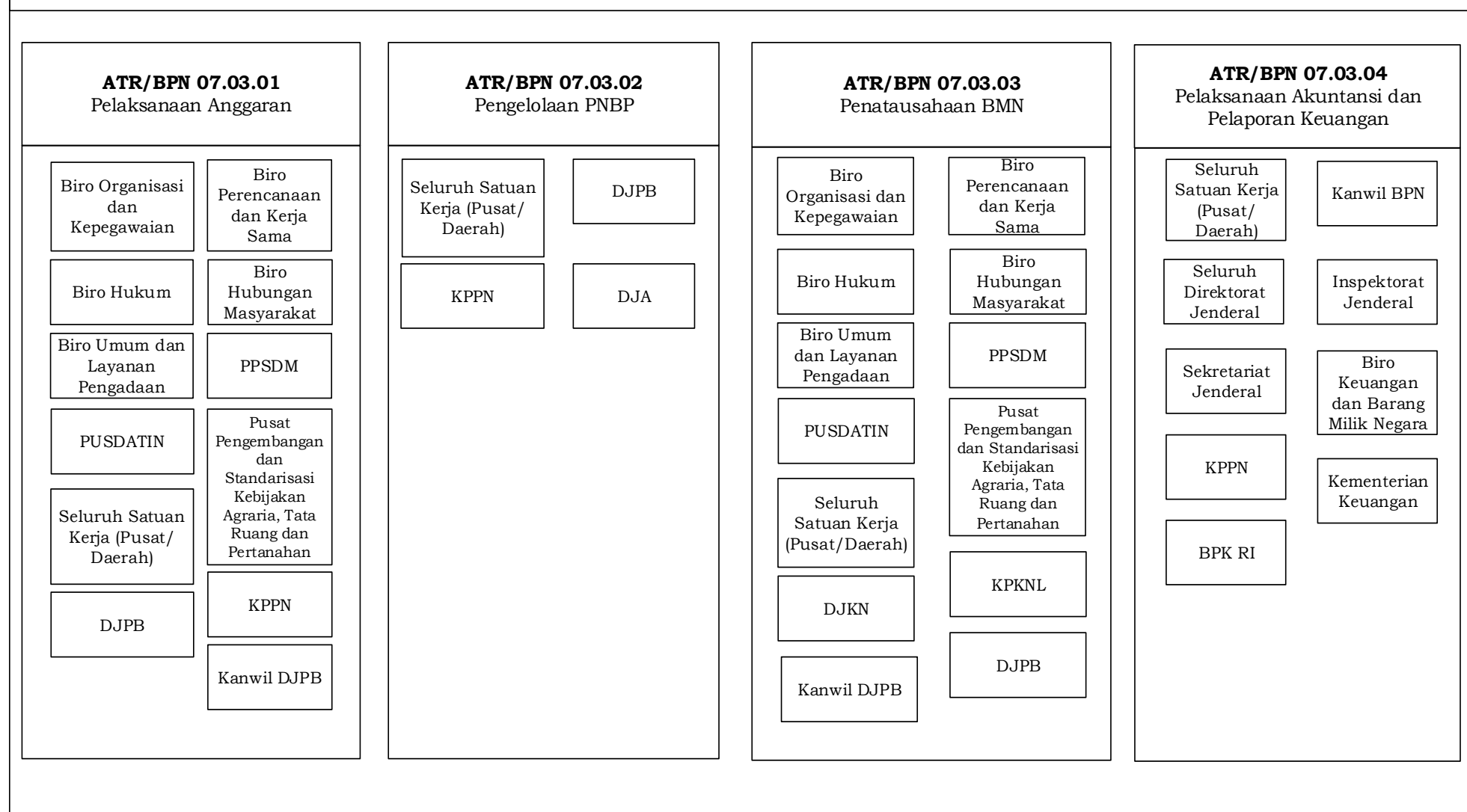
PETA LINTAS FUNGSI
ATR/BPN 07.02.03
PERENCANAAN KERJA SAMA

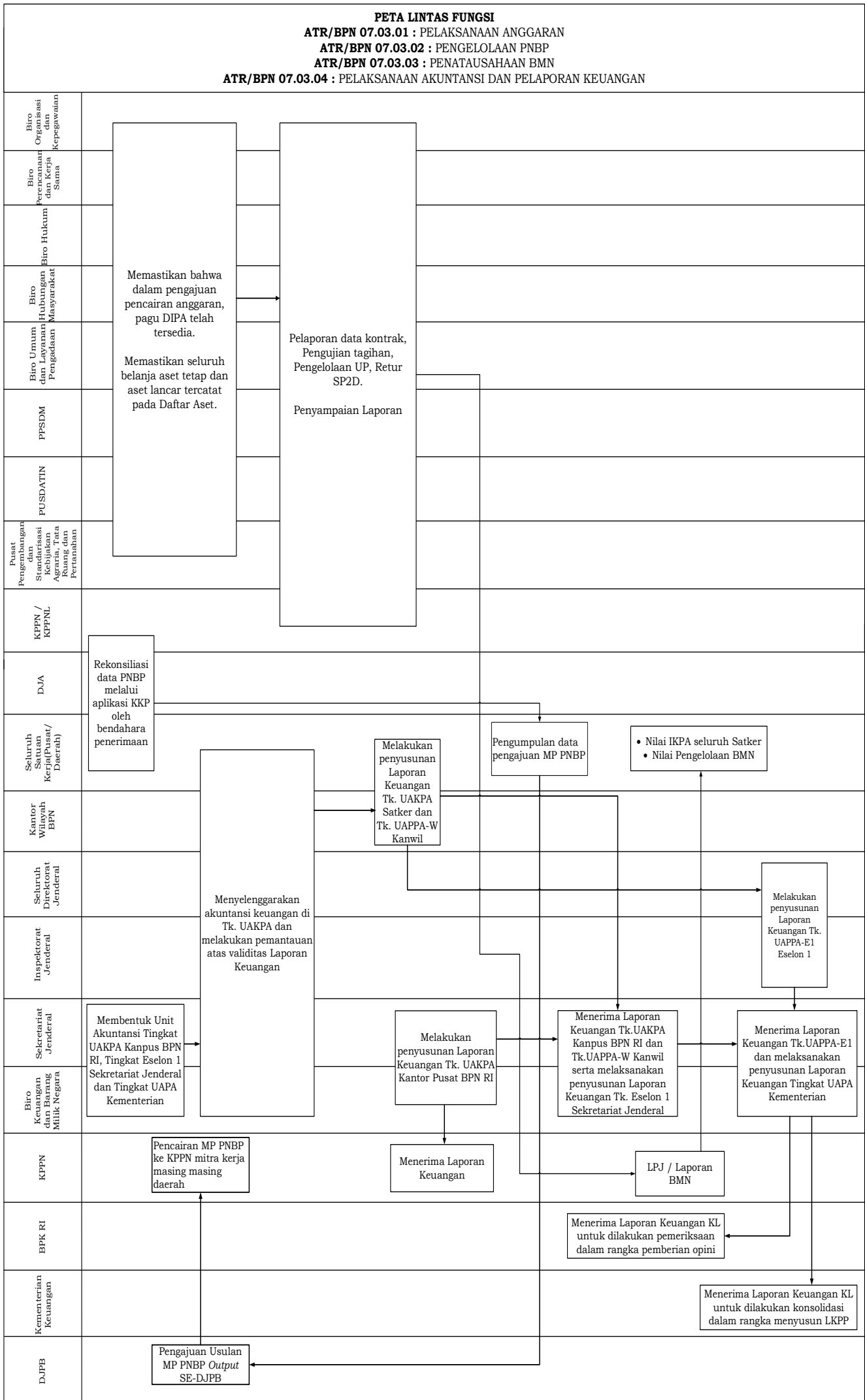


3.1.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

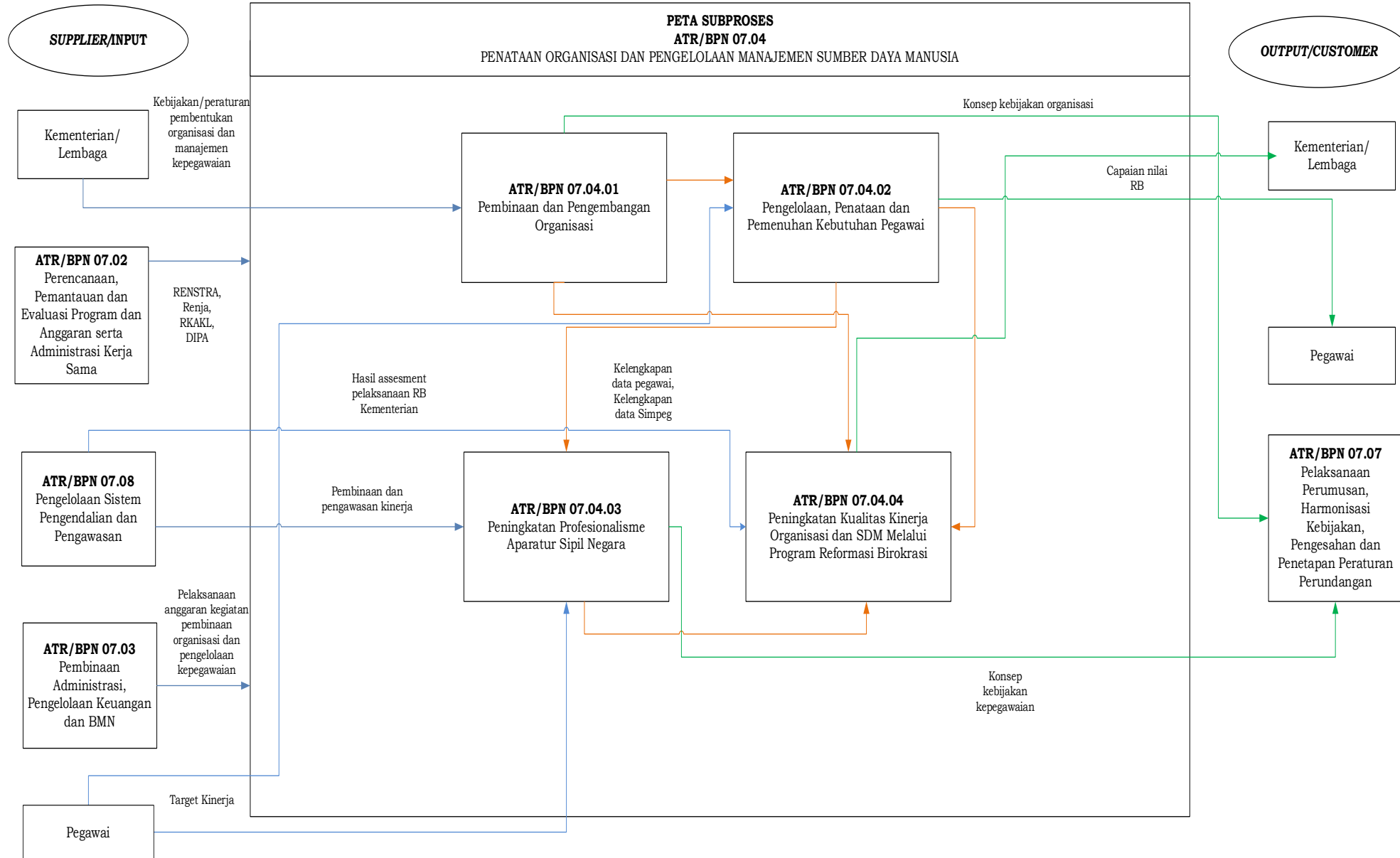


PETA RELASI
ATR/BPN 07.03
PEMBINAAN ADMINISTRASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN

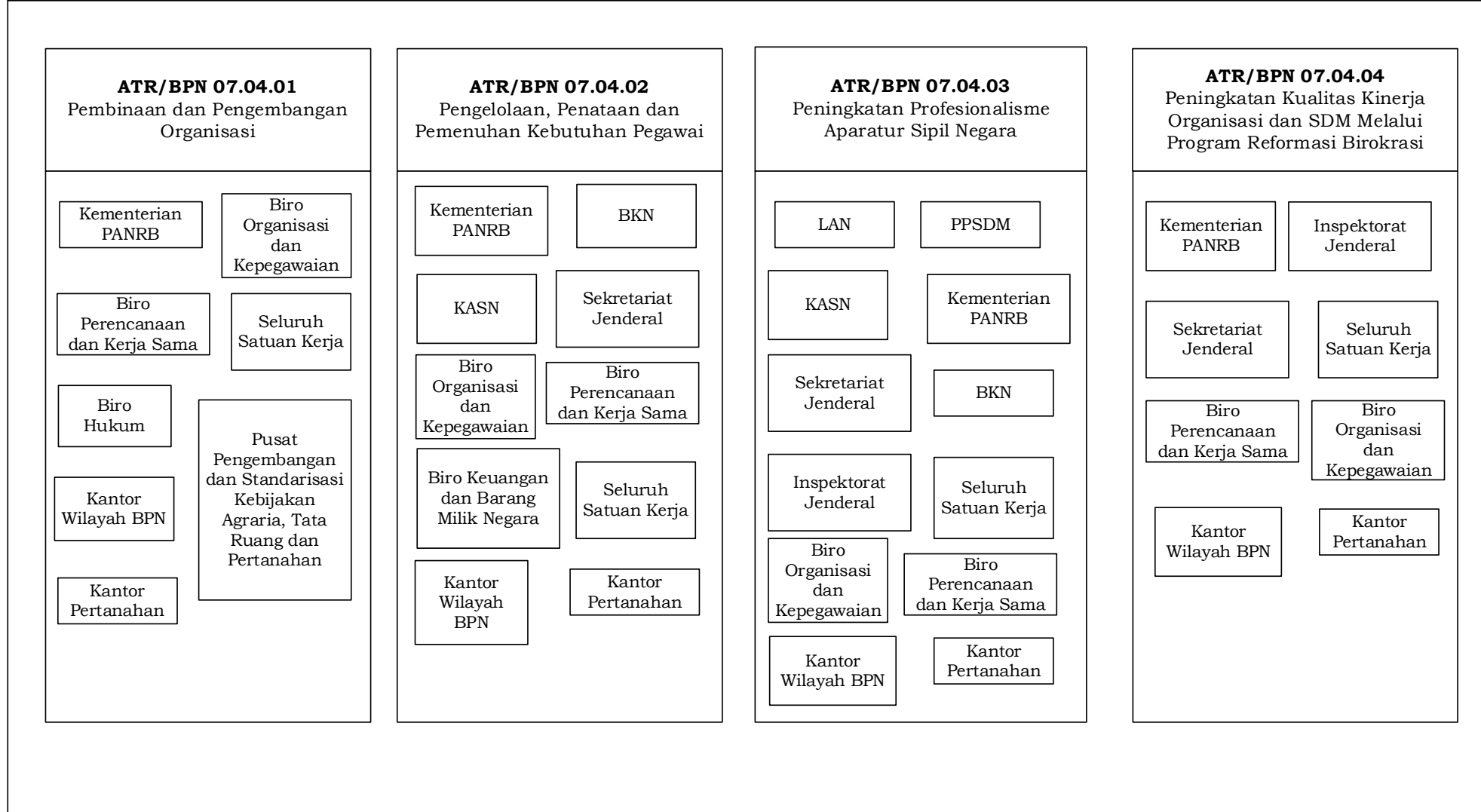


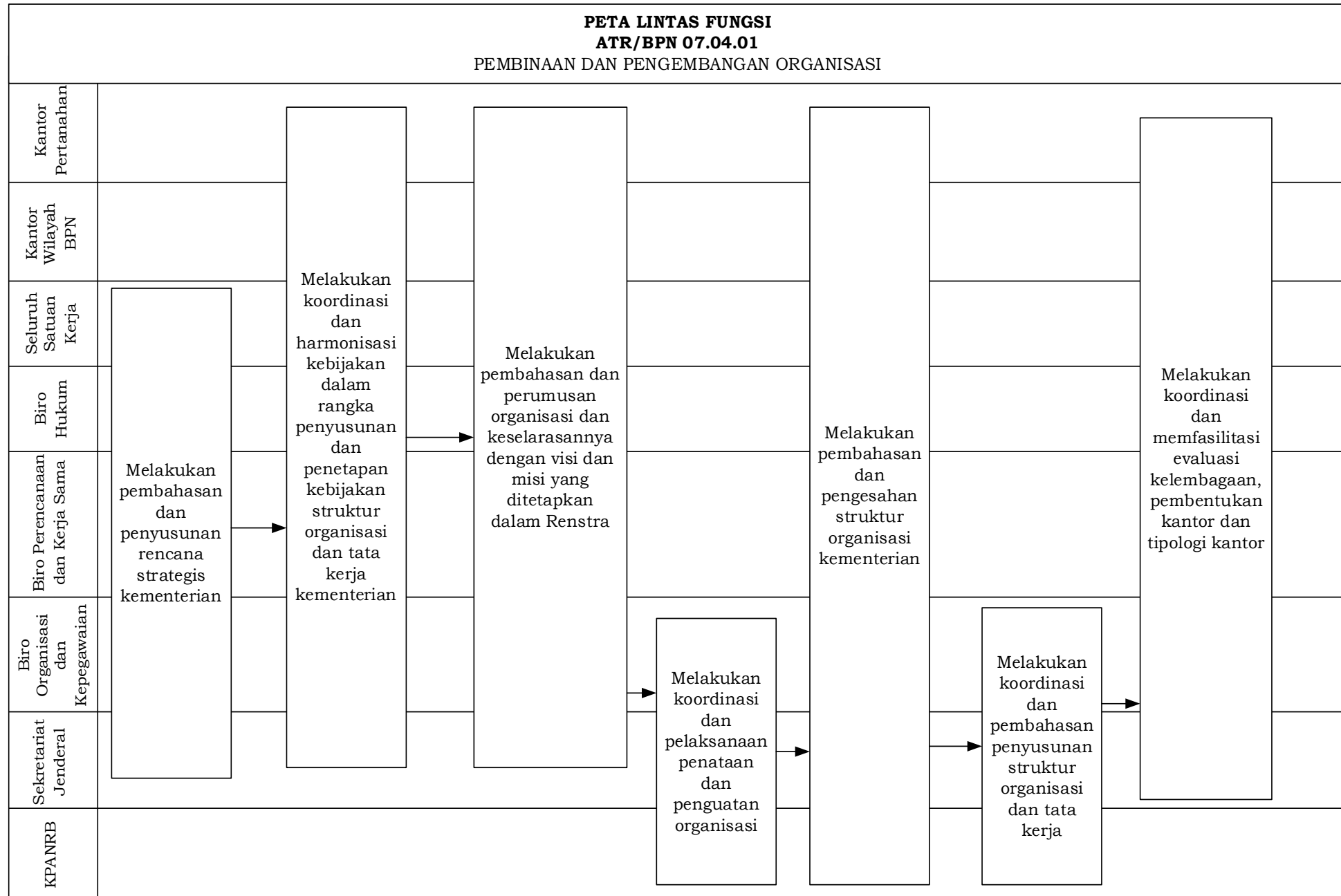


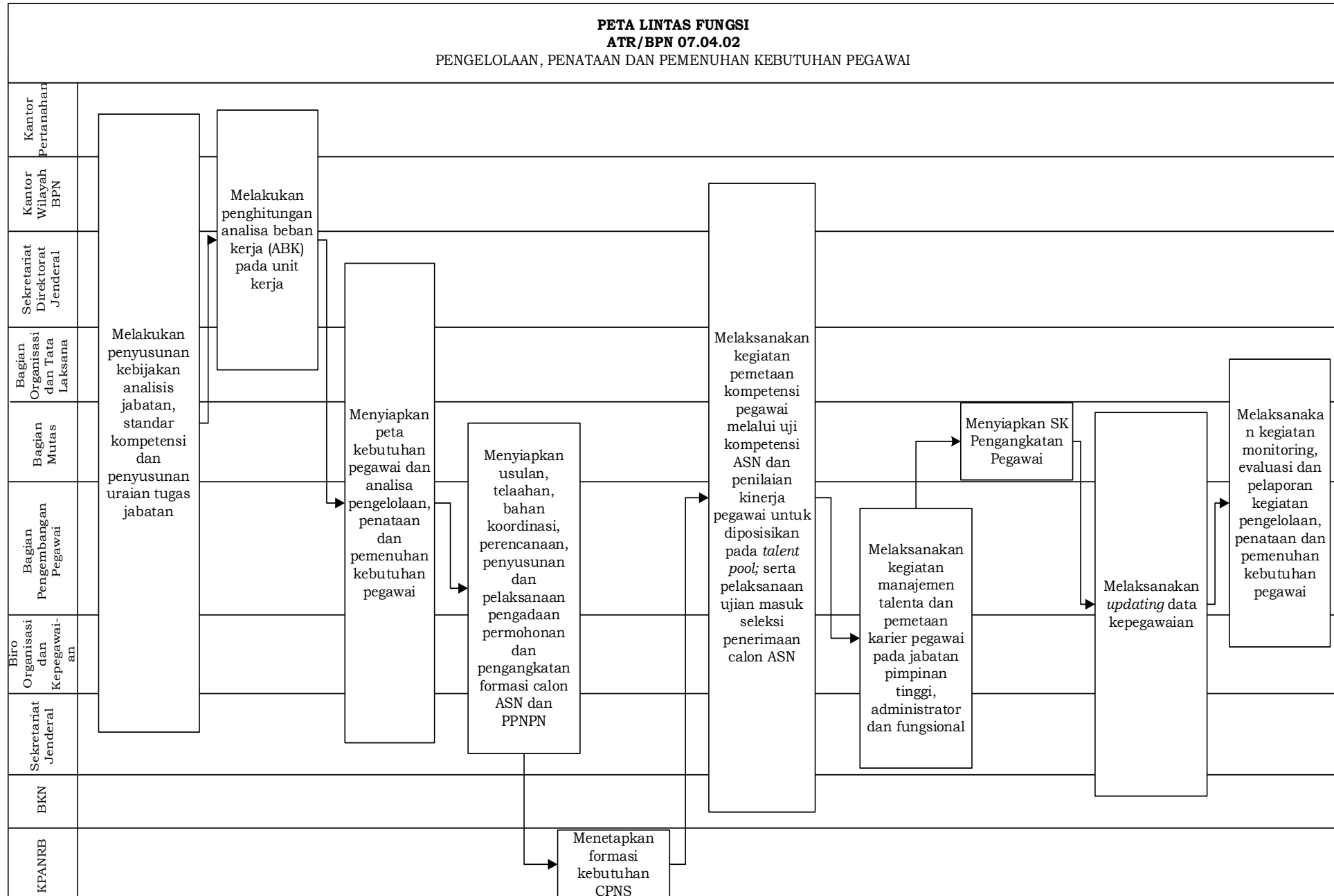
3.1.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Organisasi dan Kepegawaian

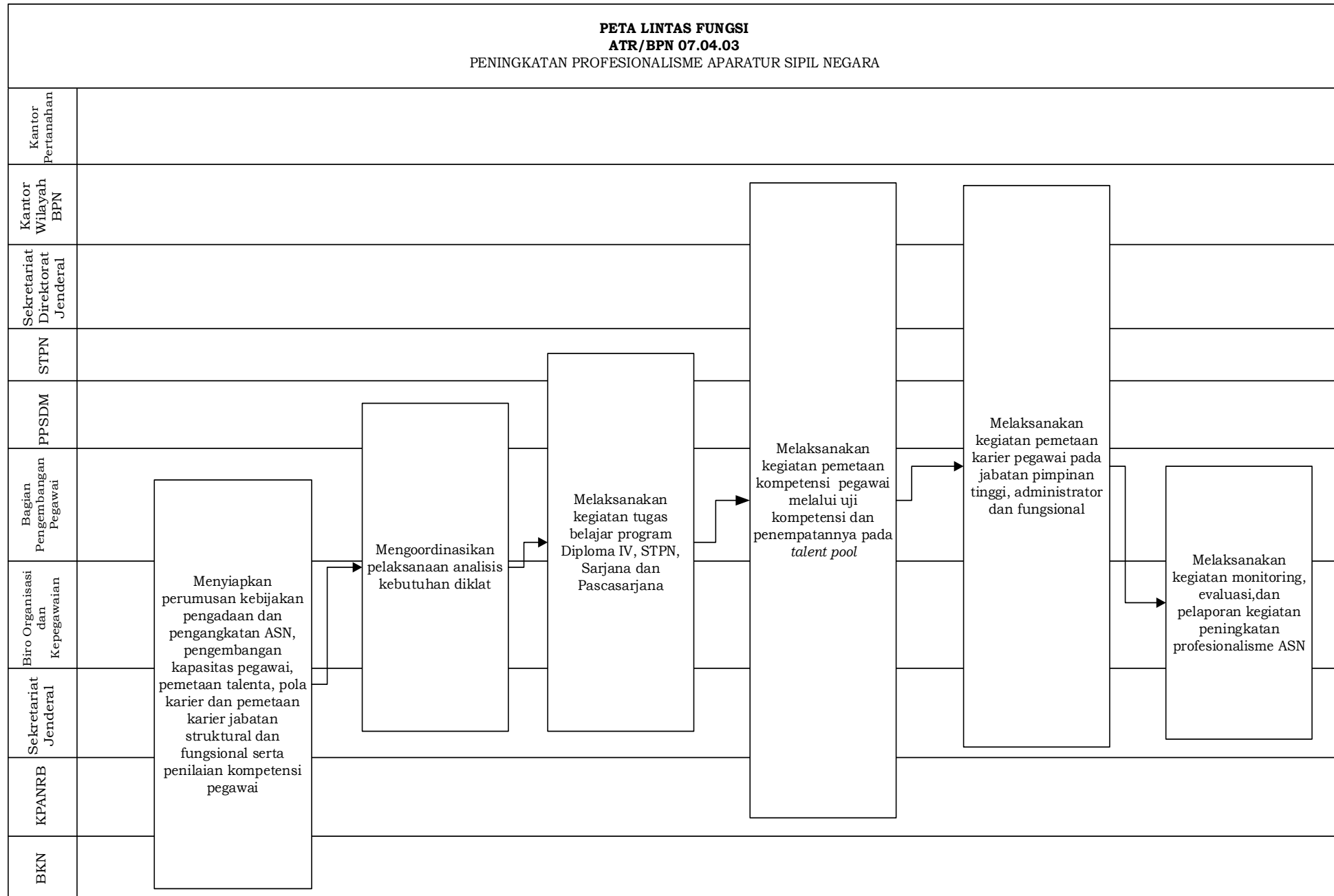


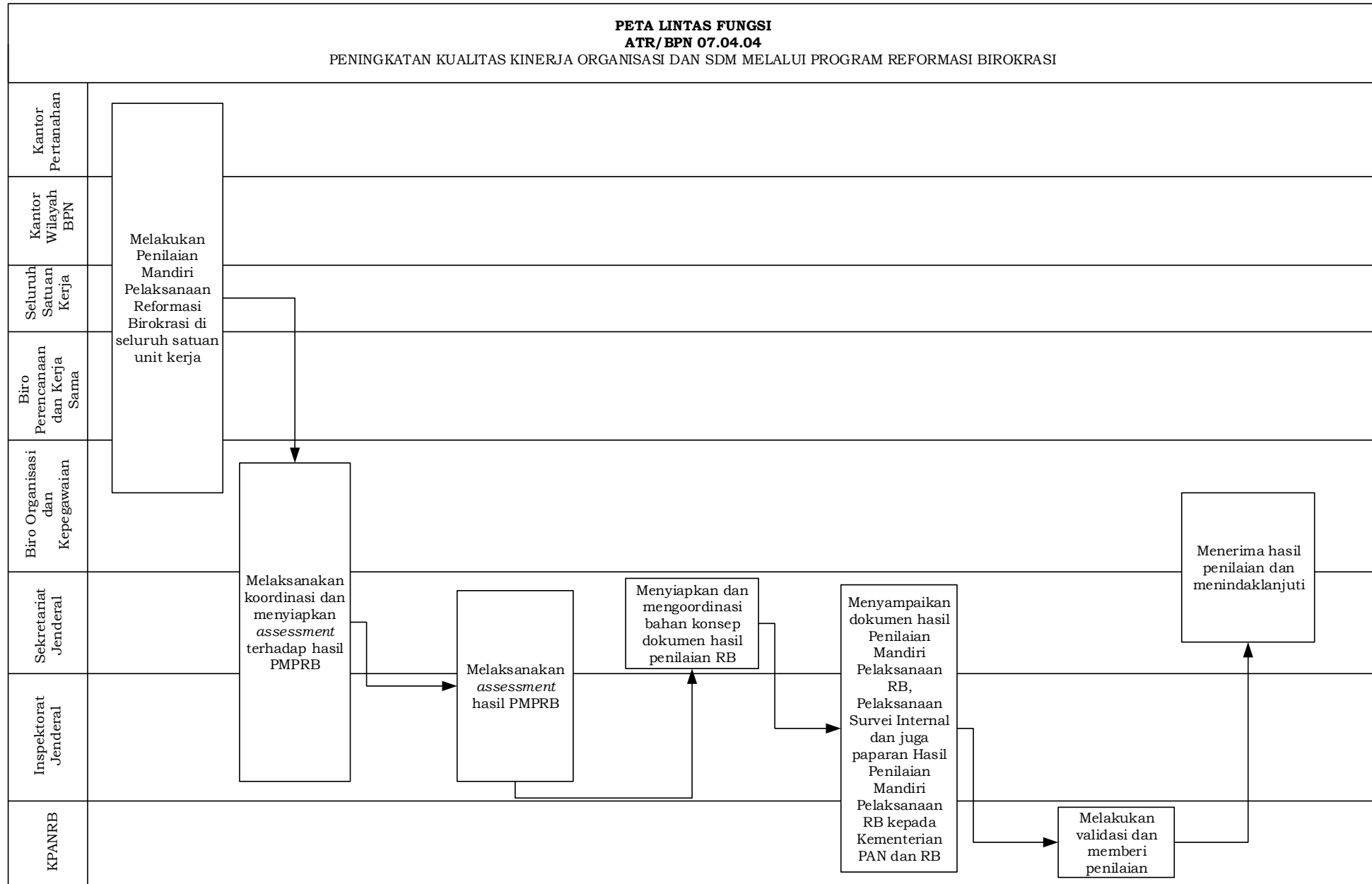
PETA RELASI
ATR/BPN 07.04
PENATAAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA



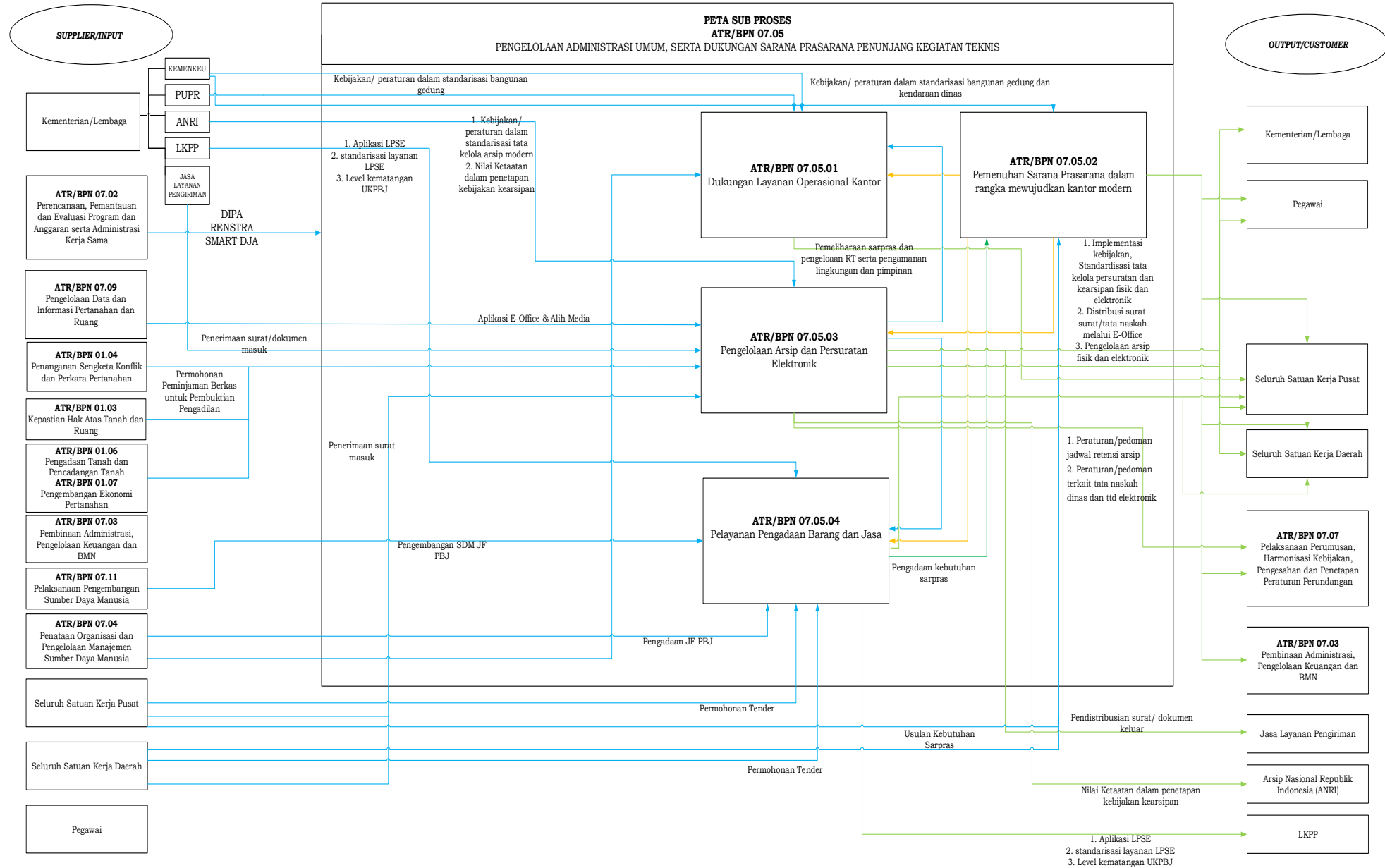






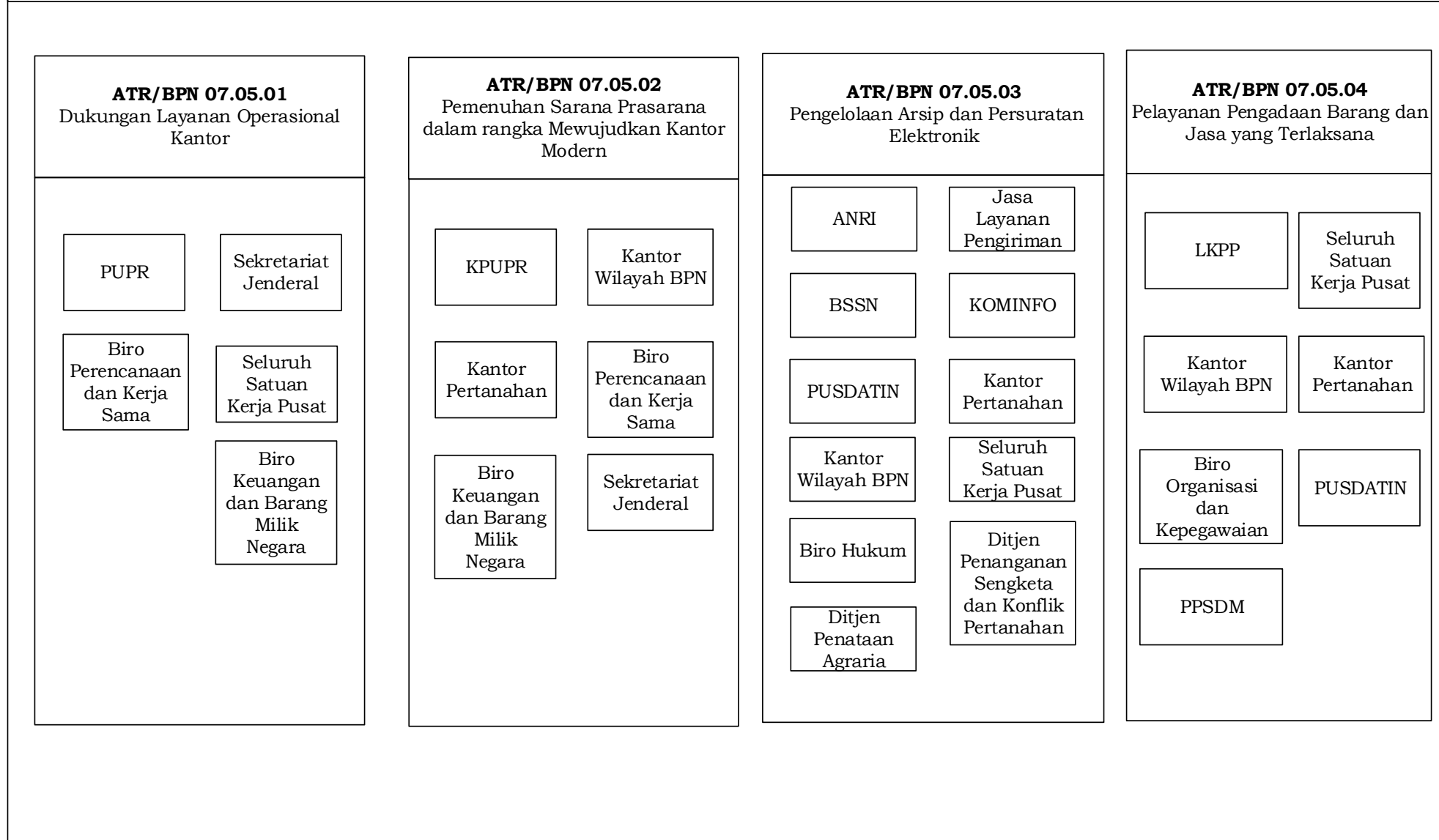


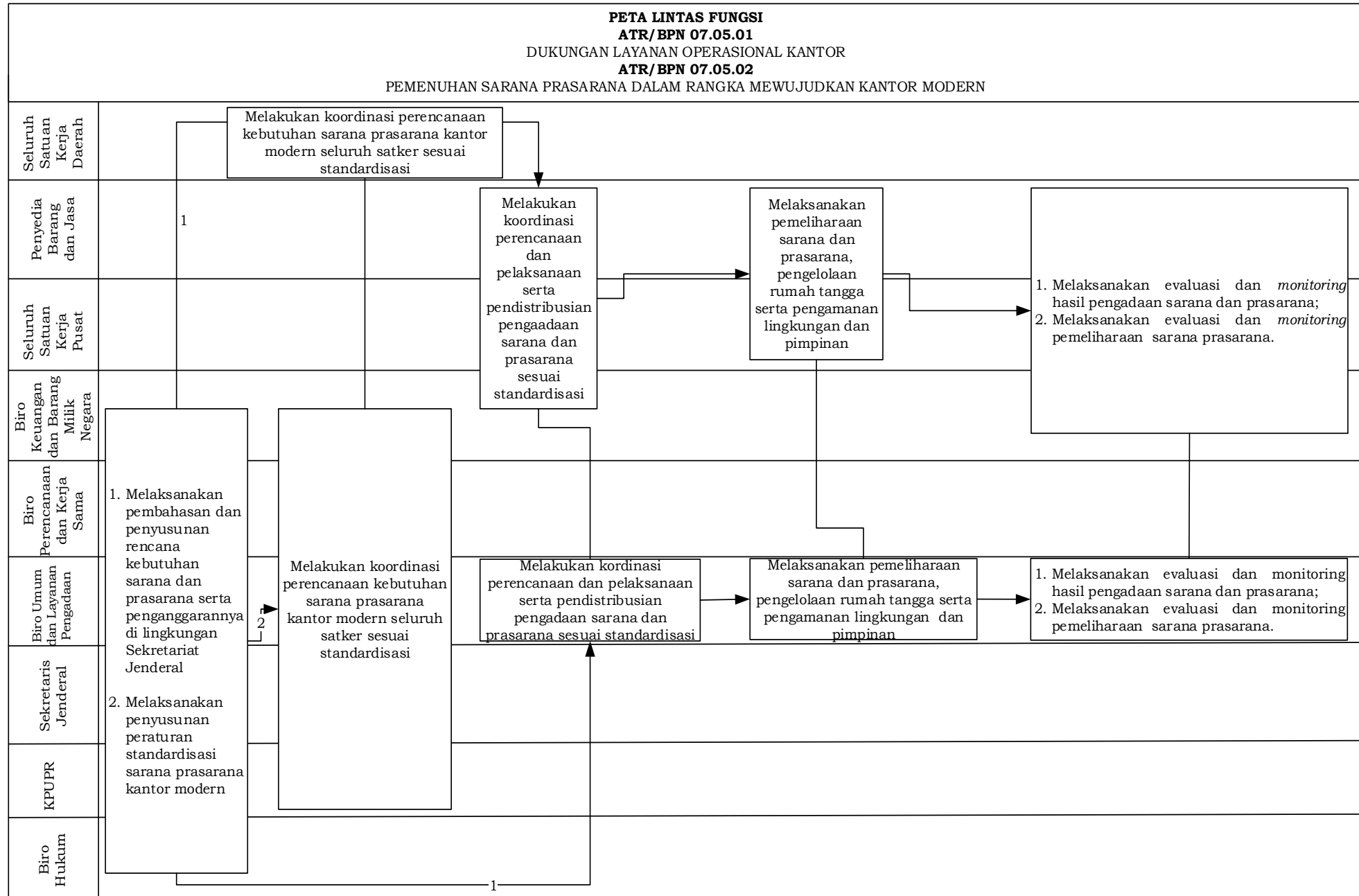
3.1.5. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Umum dan Layanan Pengadaan

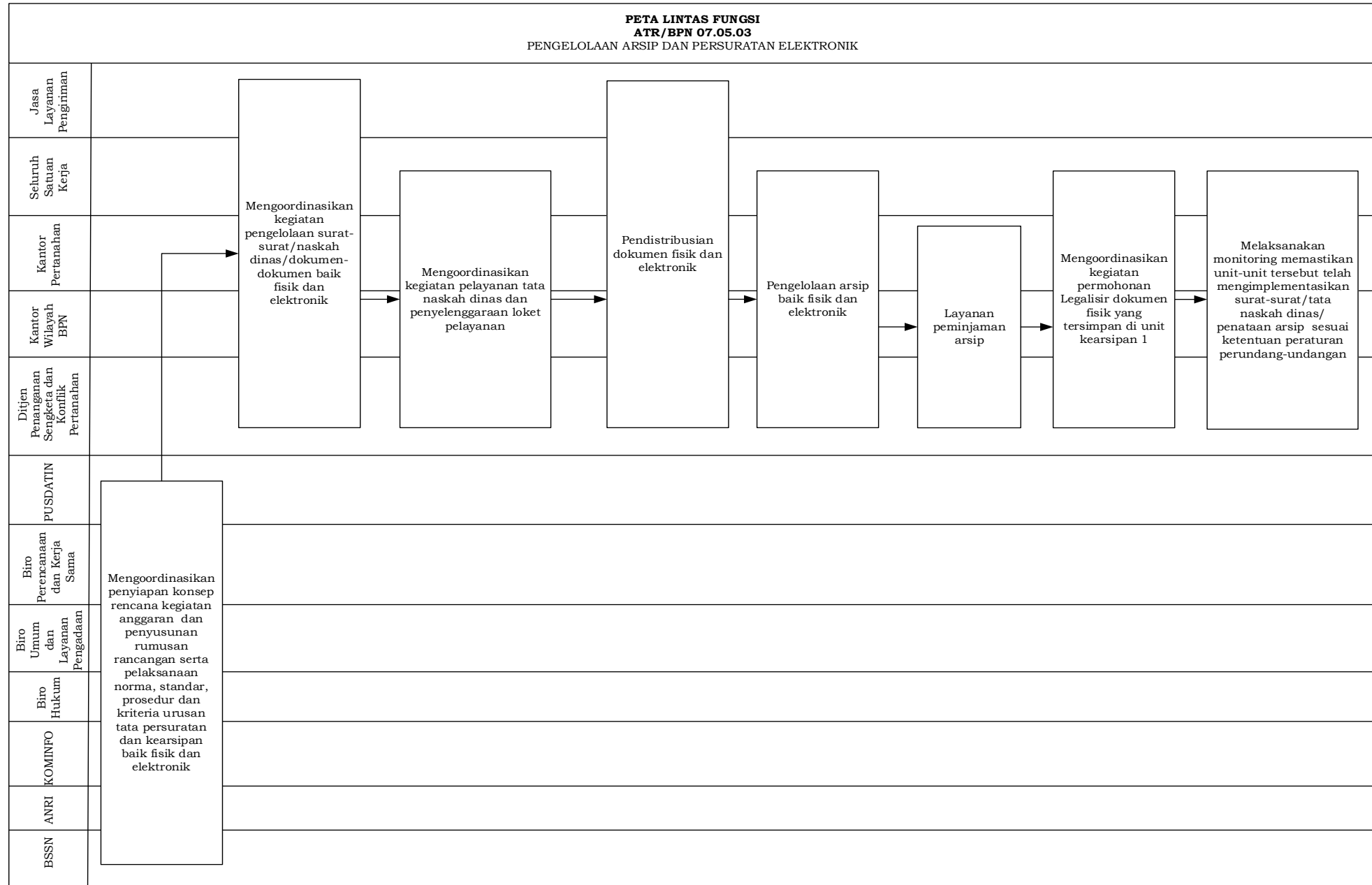


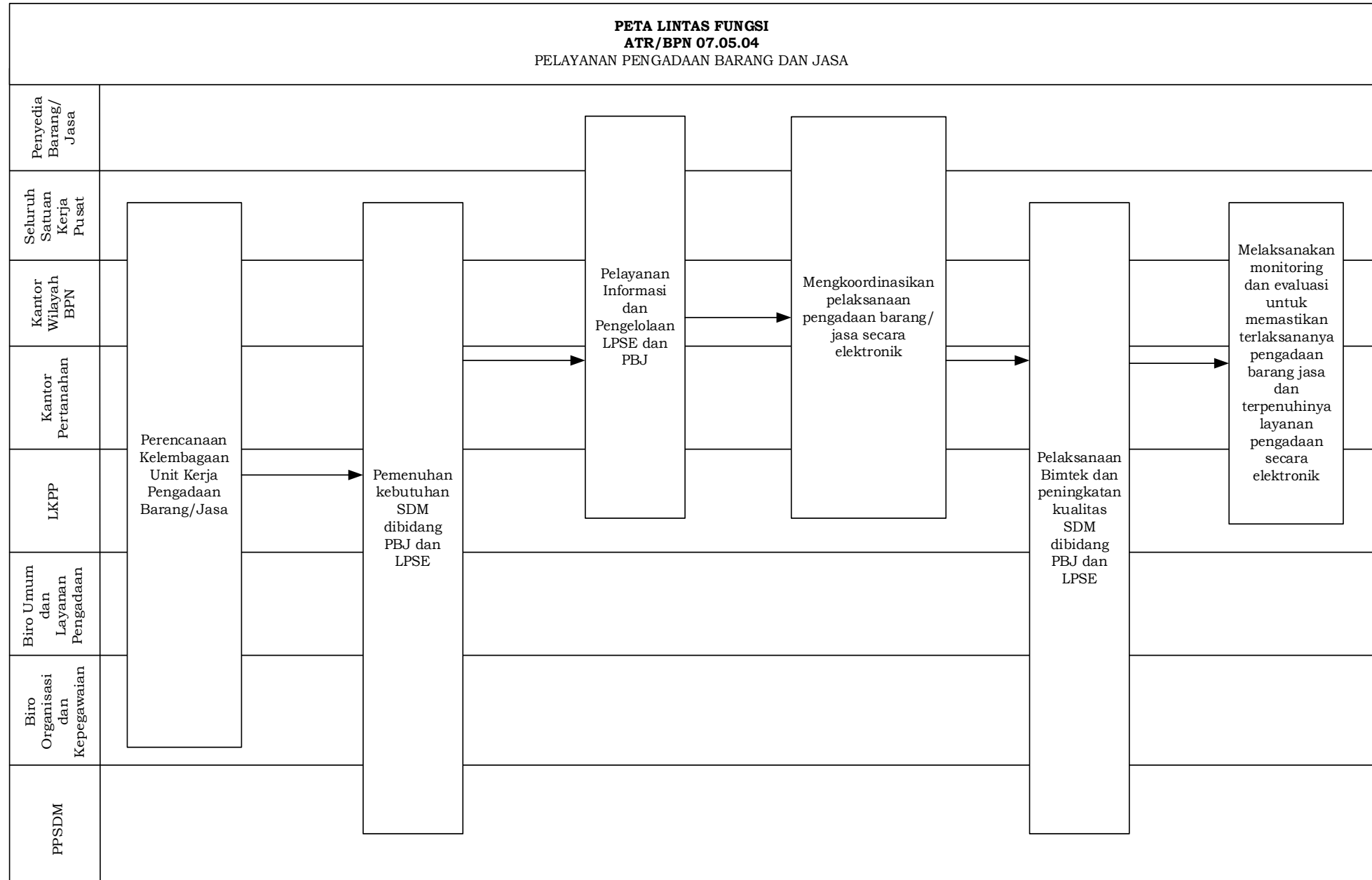
PETA RELASI
ATR/BPN 07.05

PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM, SERTA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN TEKNIS

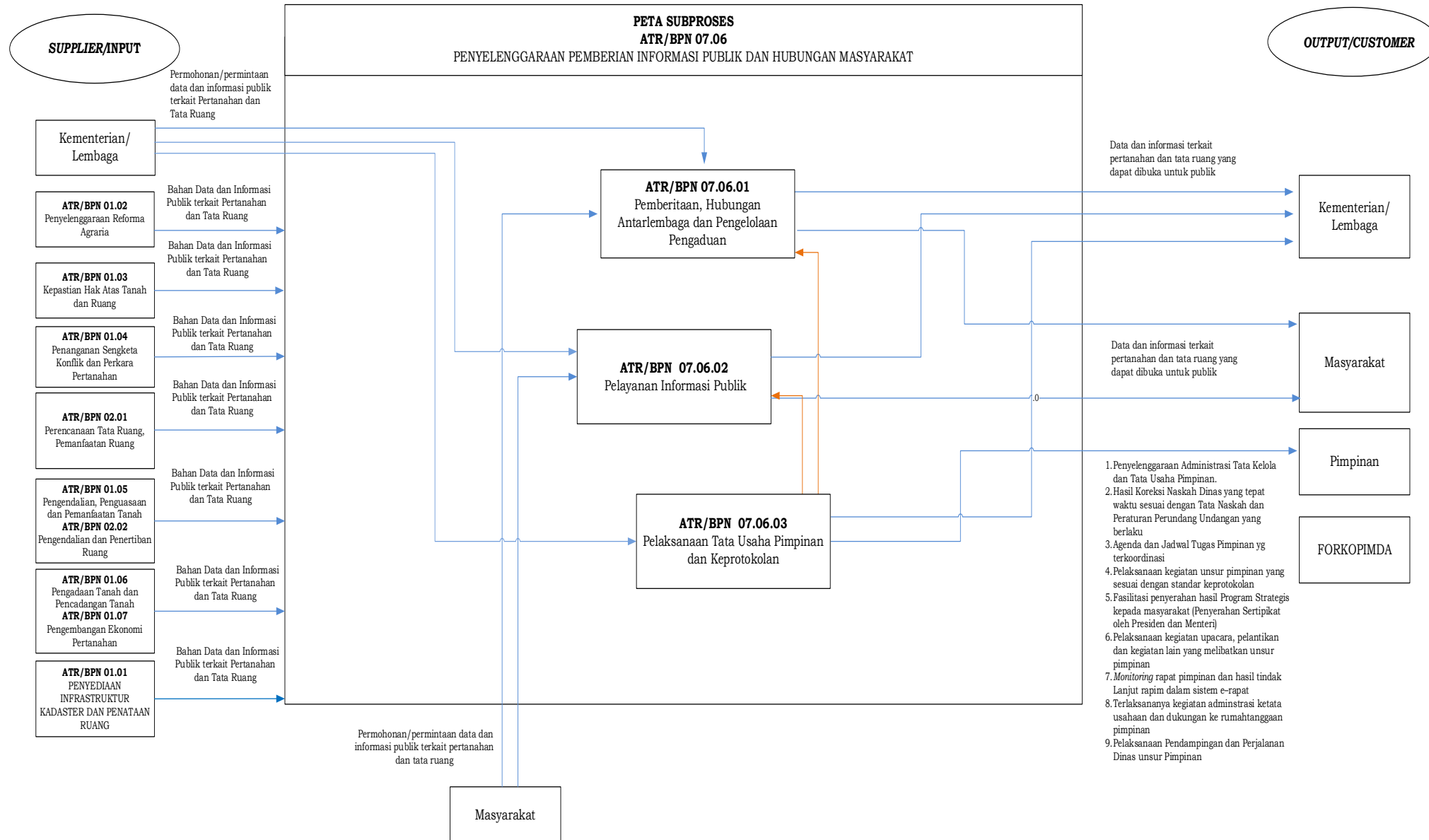




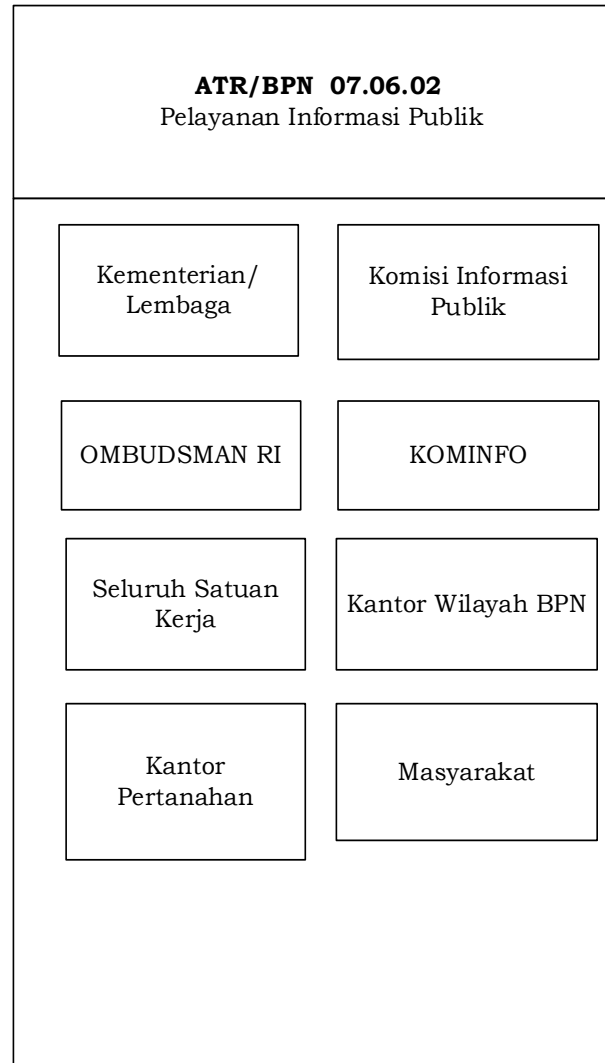
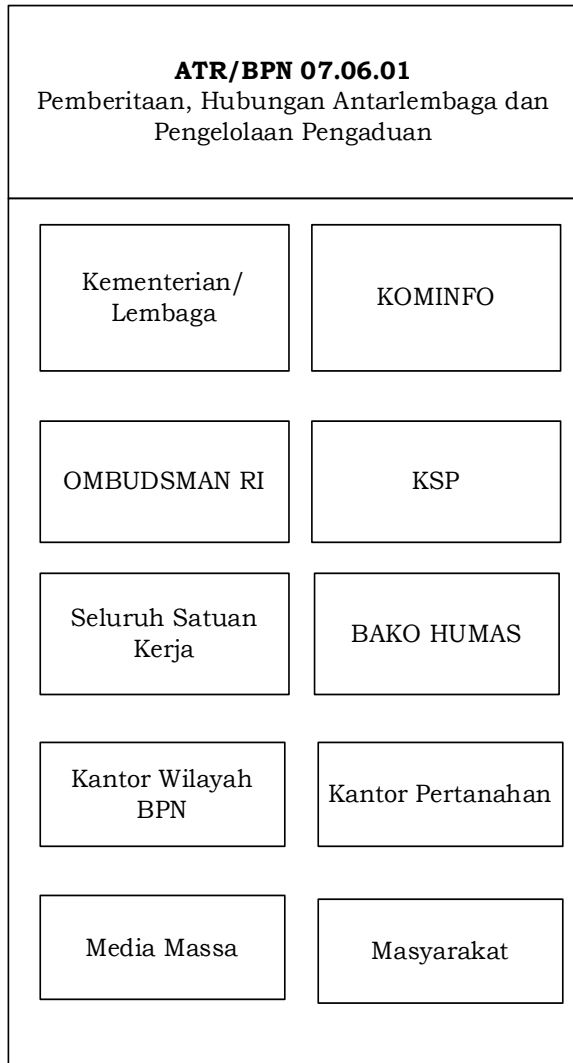


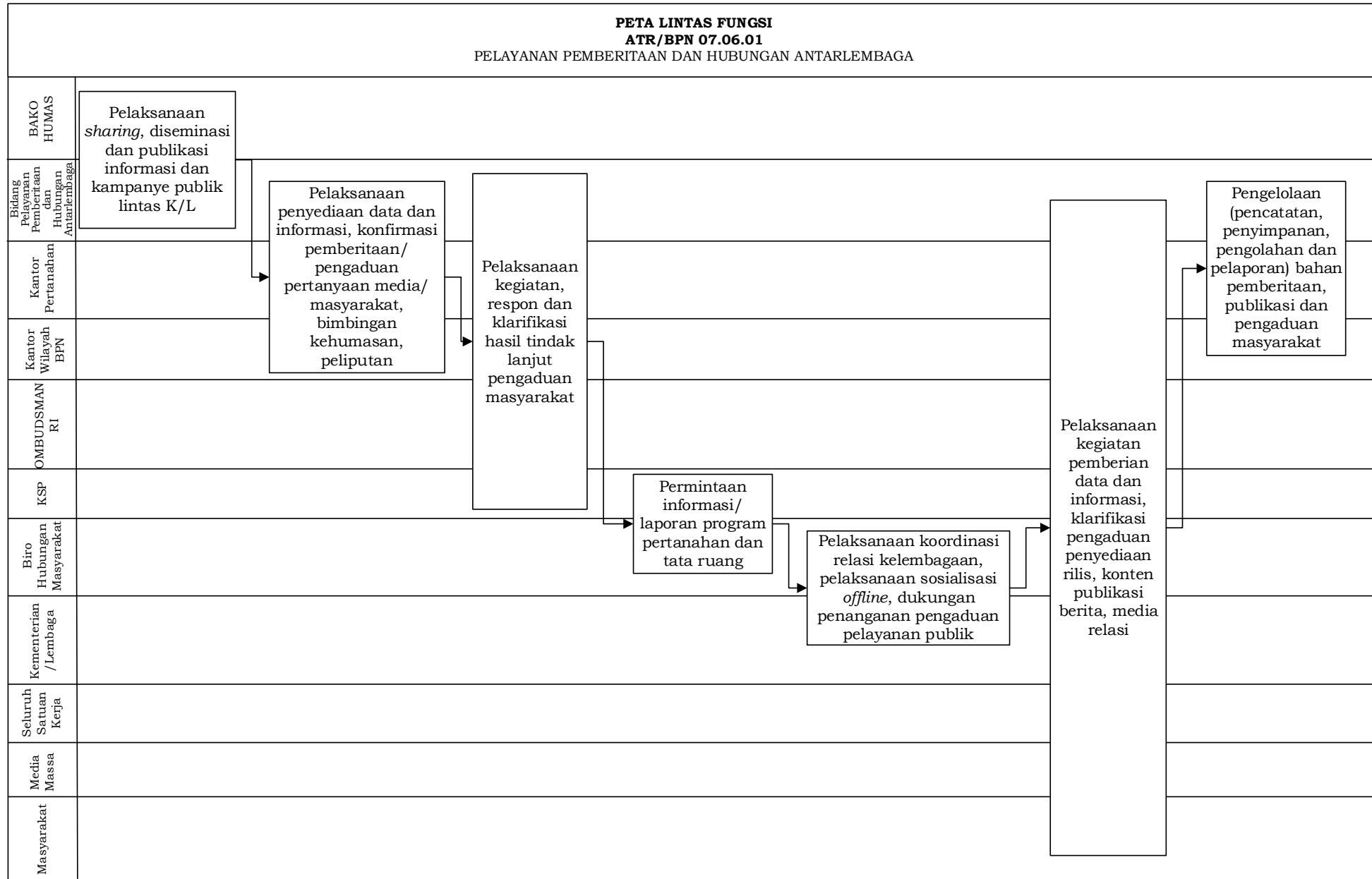


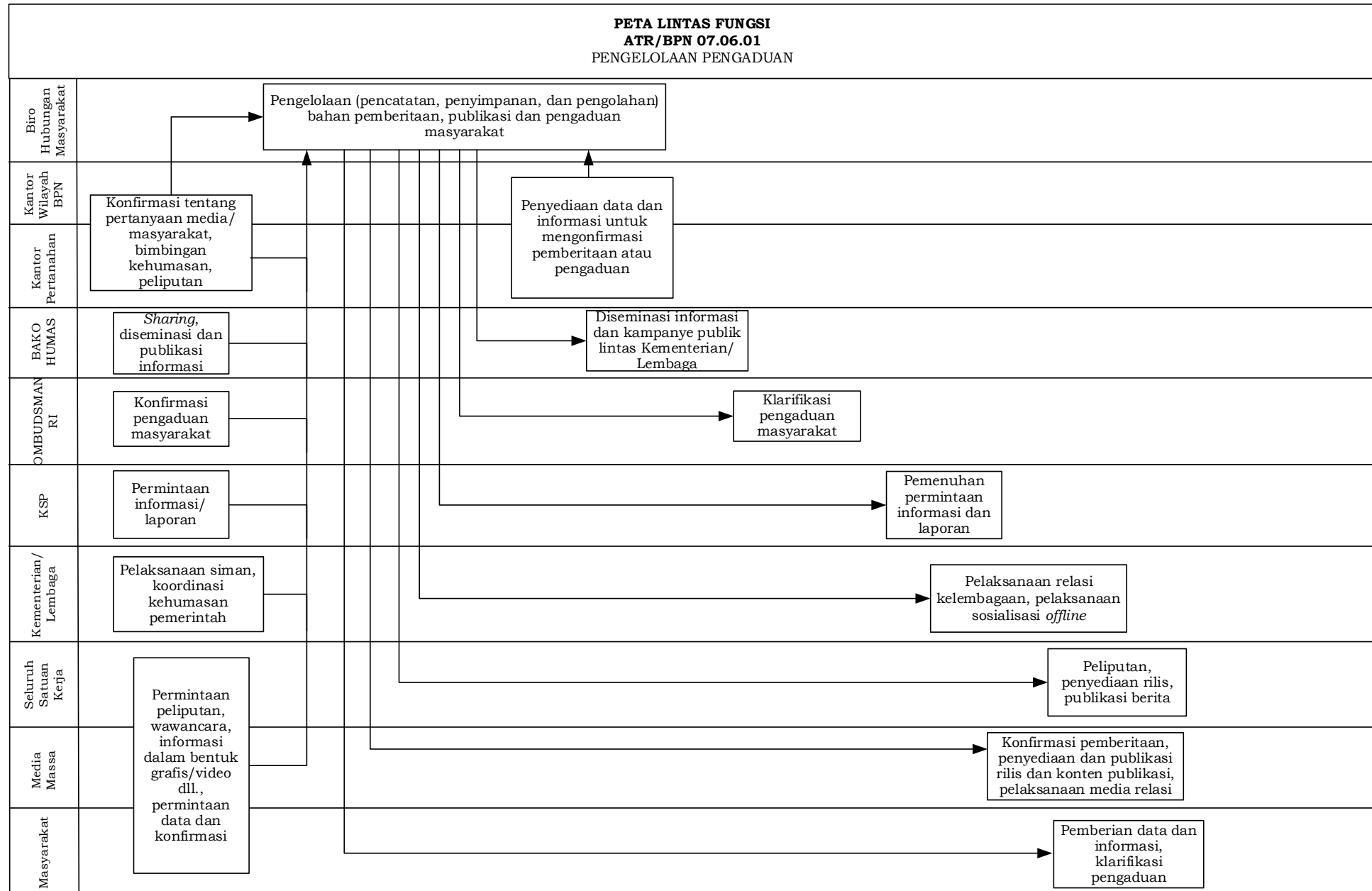
3.1.6. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Hubungan Masyarakat

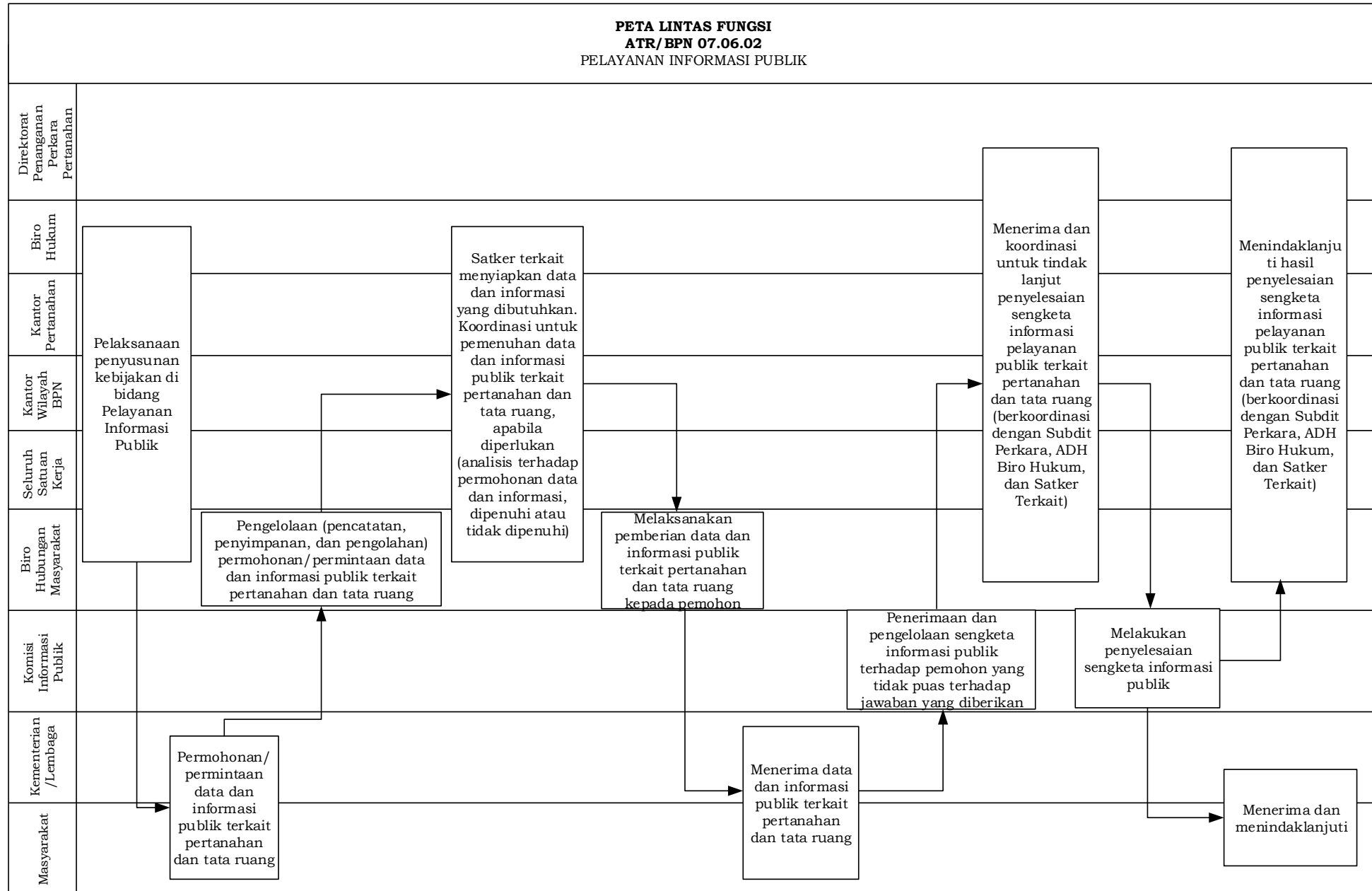


PETA RELASI
ATR/BPN 07.06
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

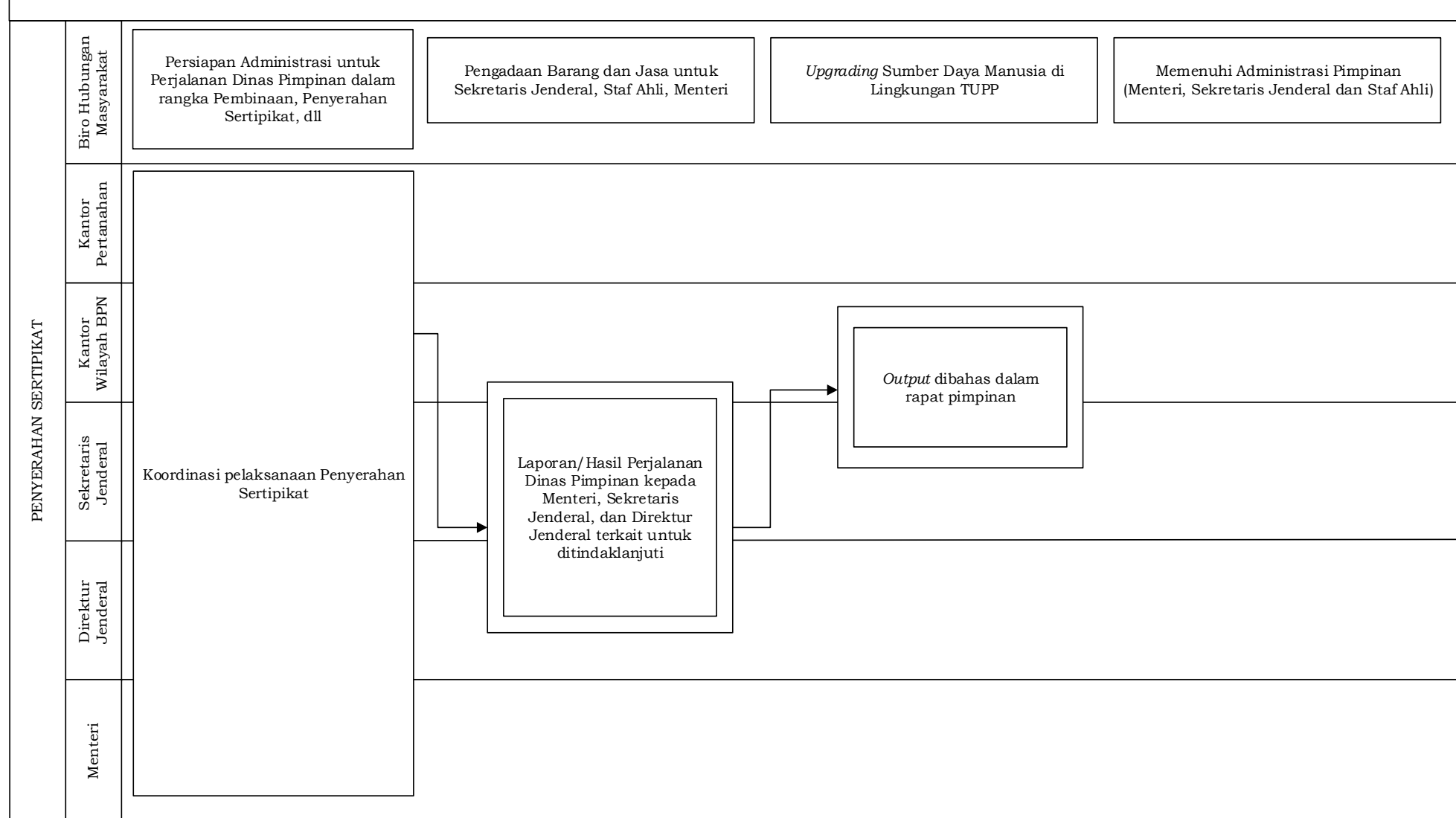


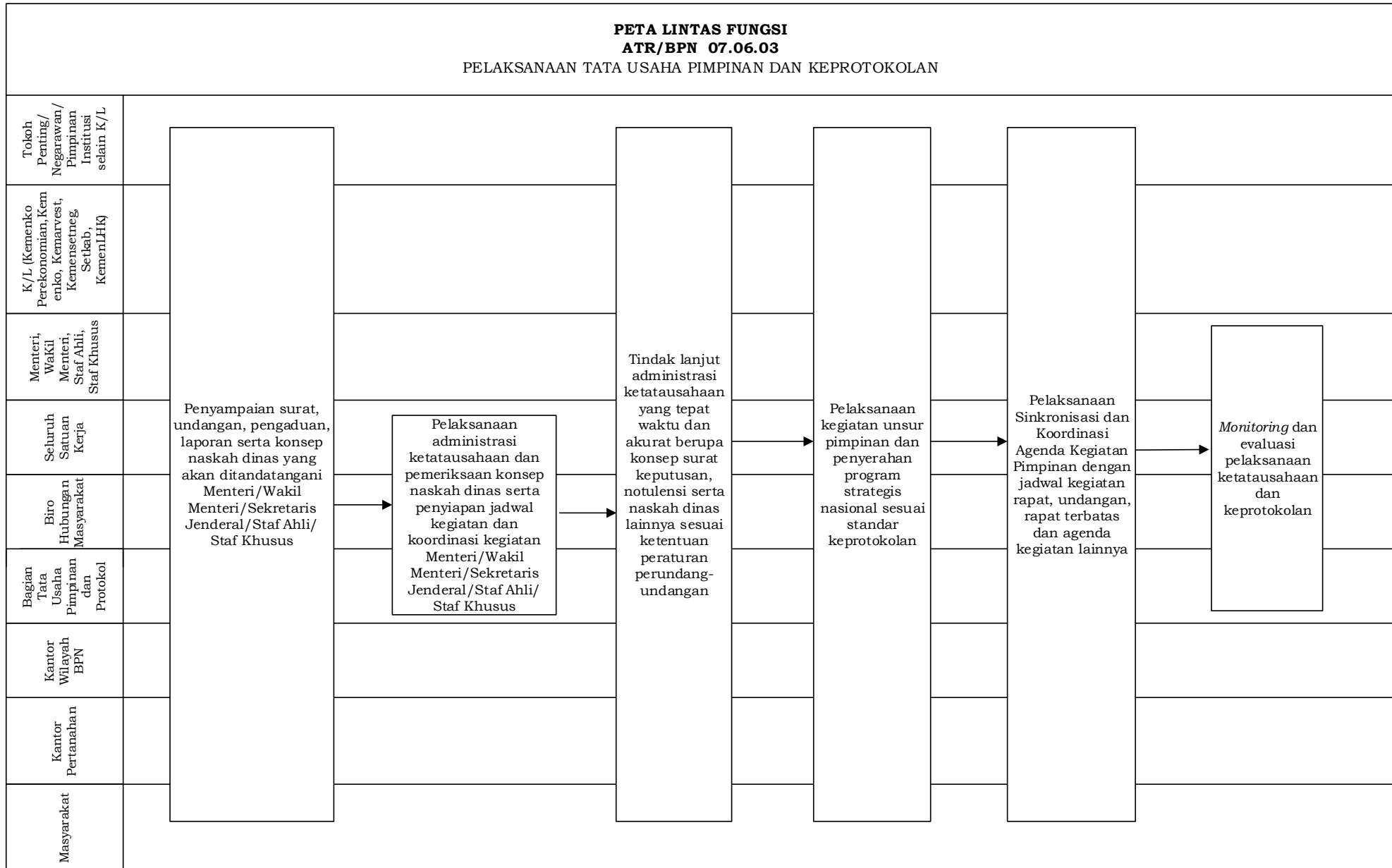




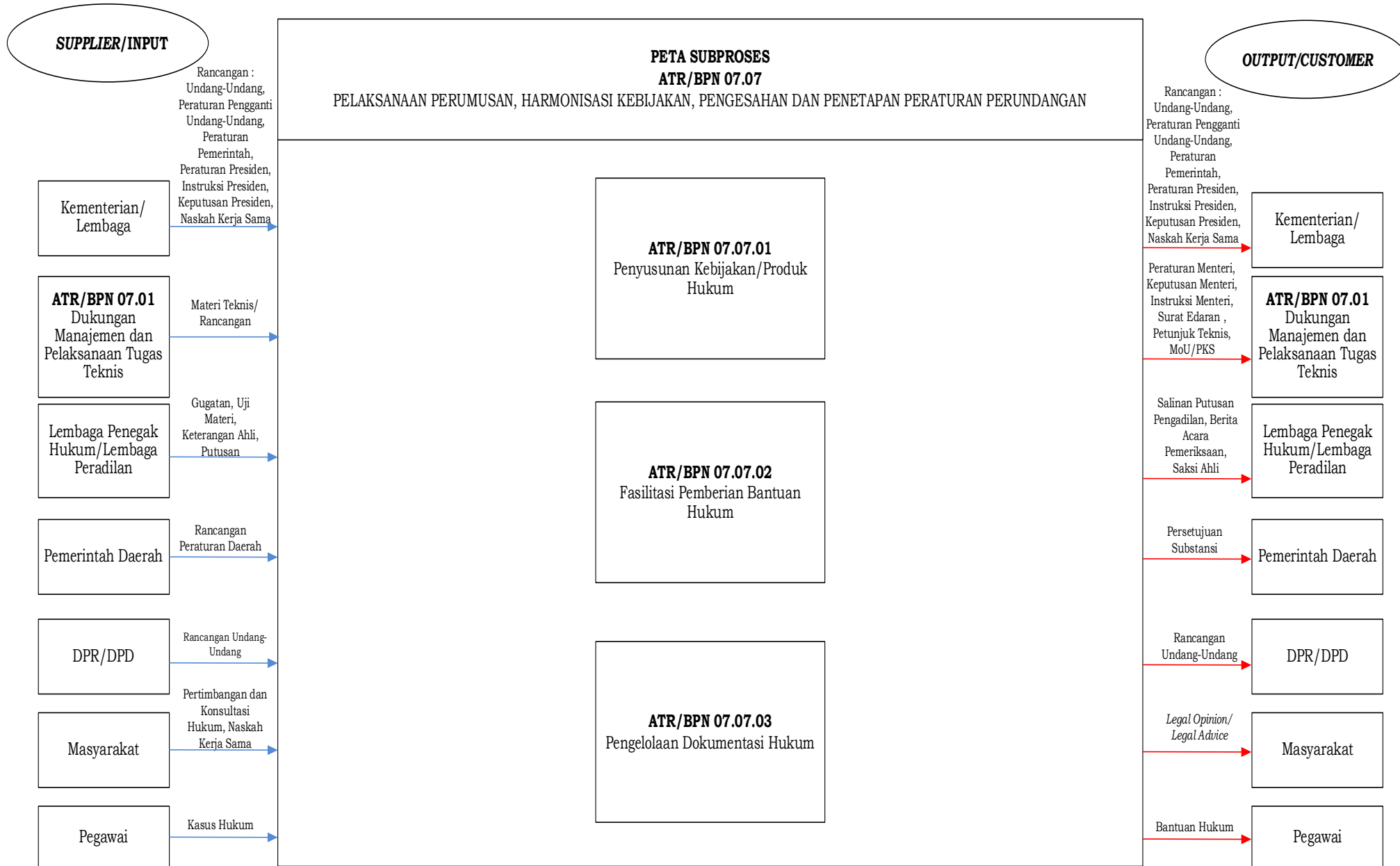


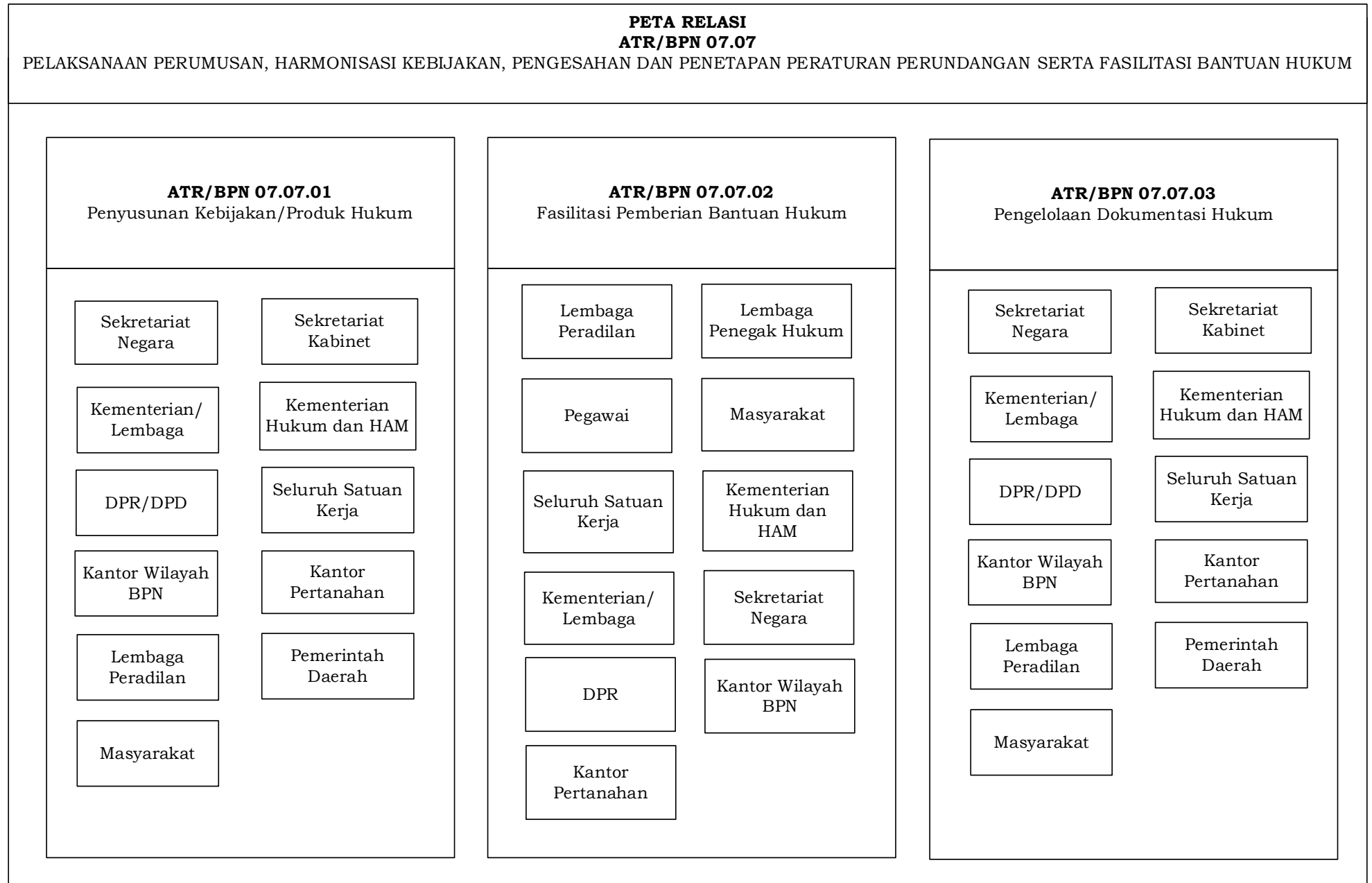
PETA LINTAS FUNGSI
ATR/BPN 07.06.03
 PELAKSANAAN TATA USAHA PIMPINAN DAN KEPROTOKOLAN

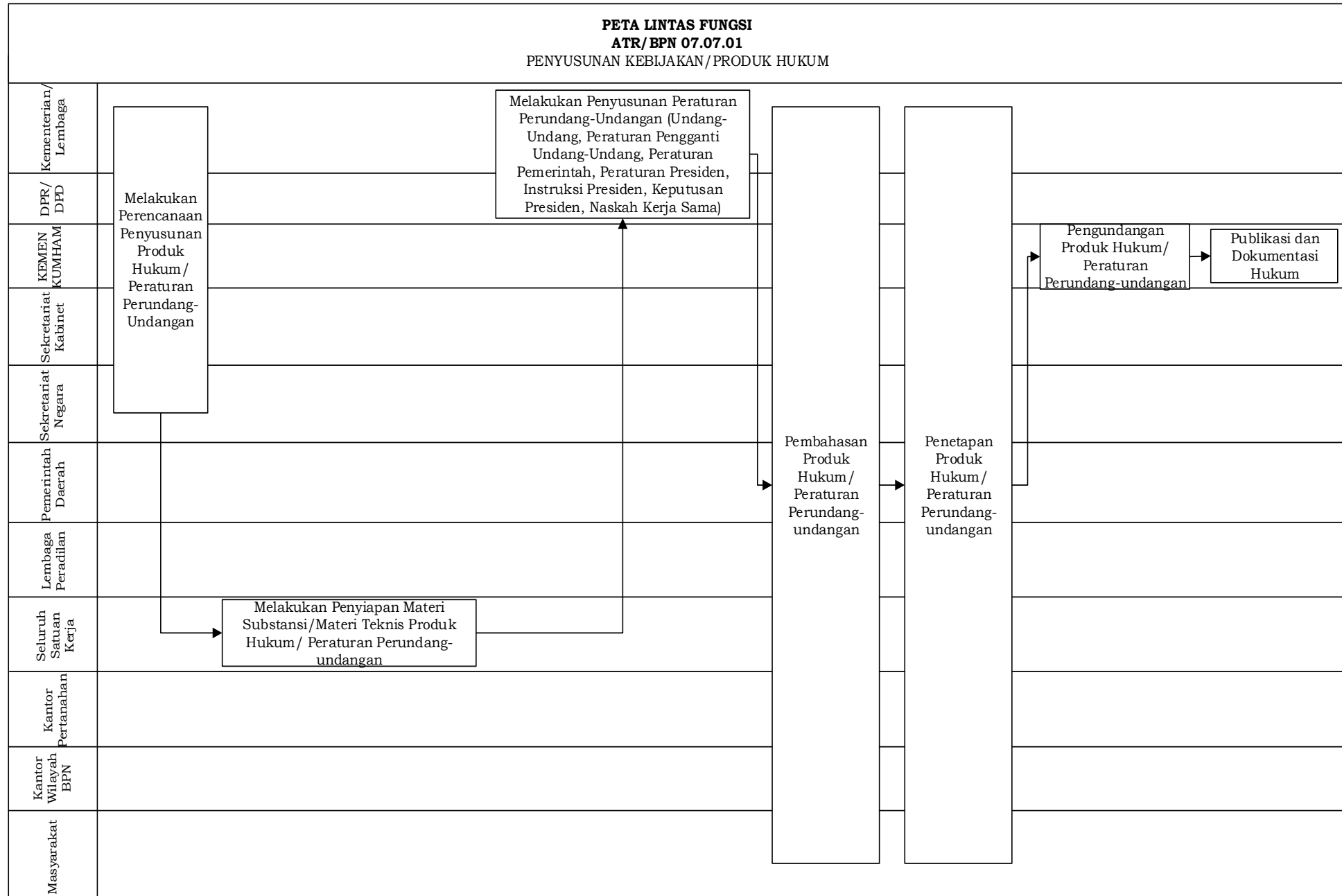


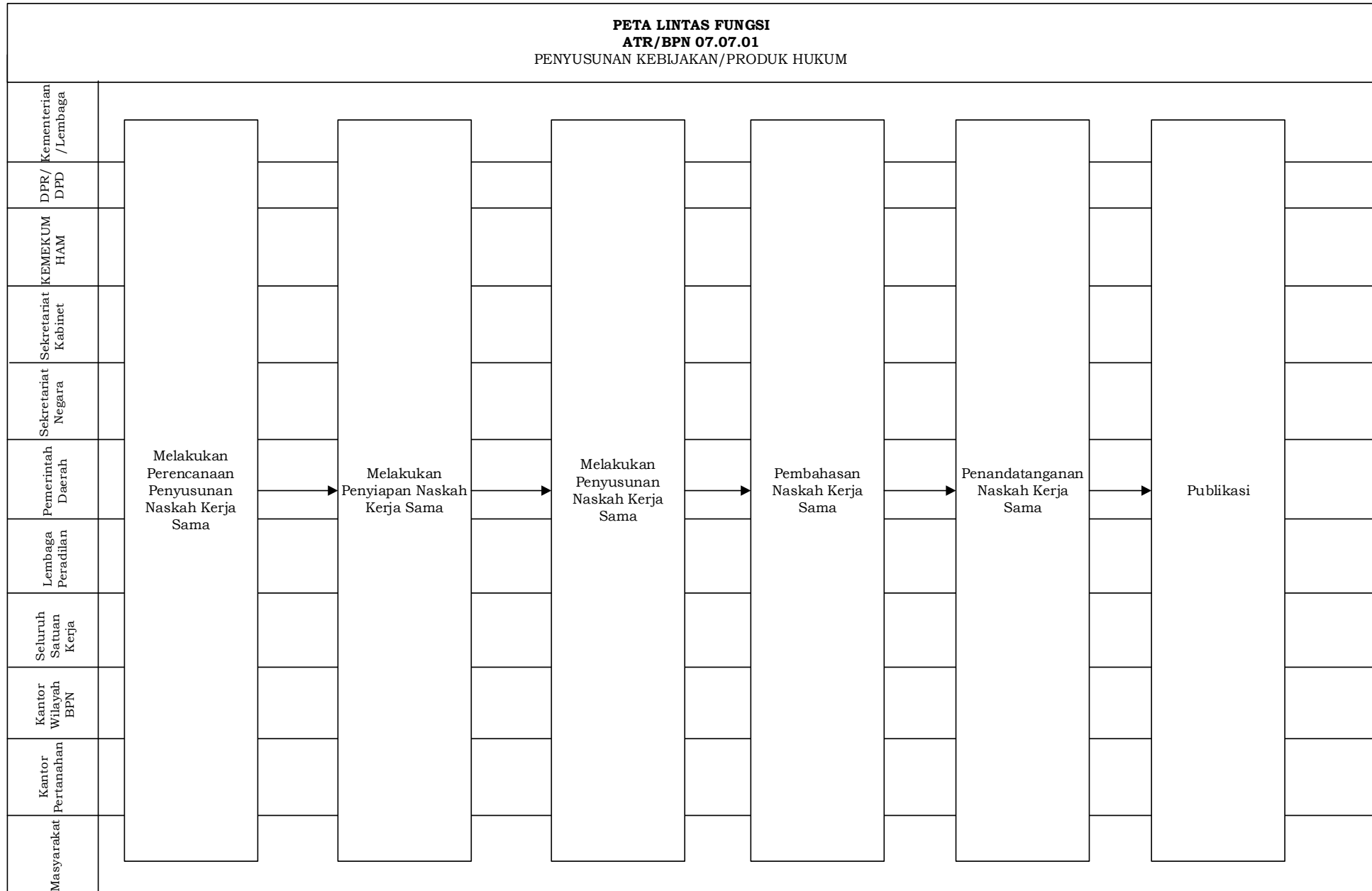


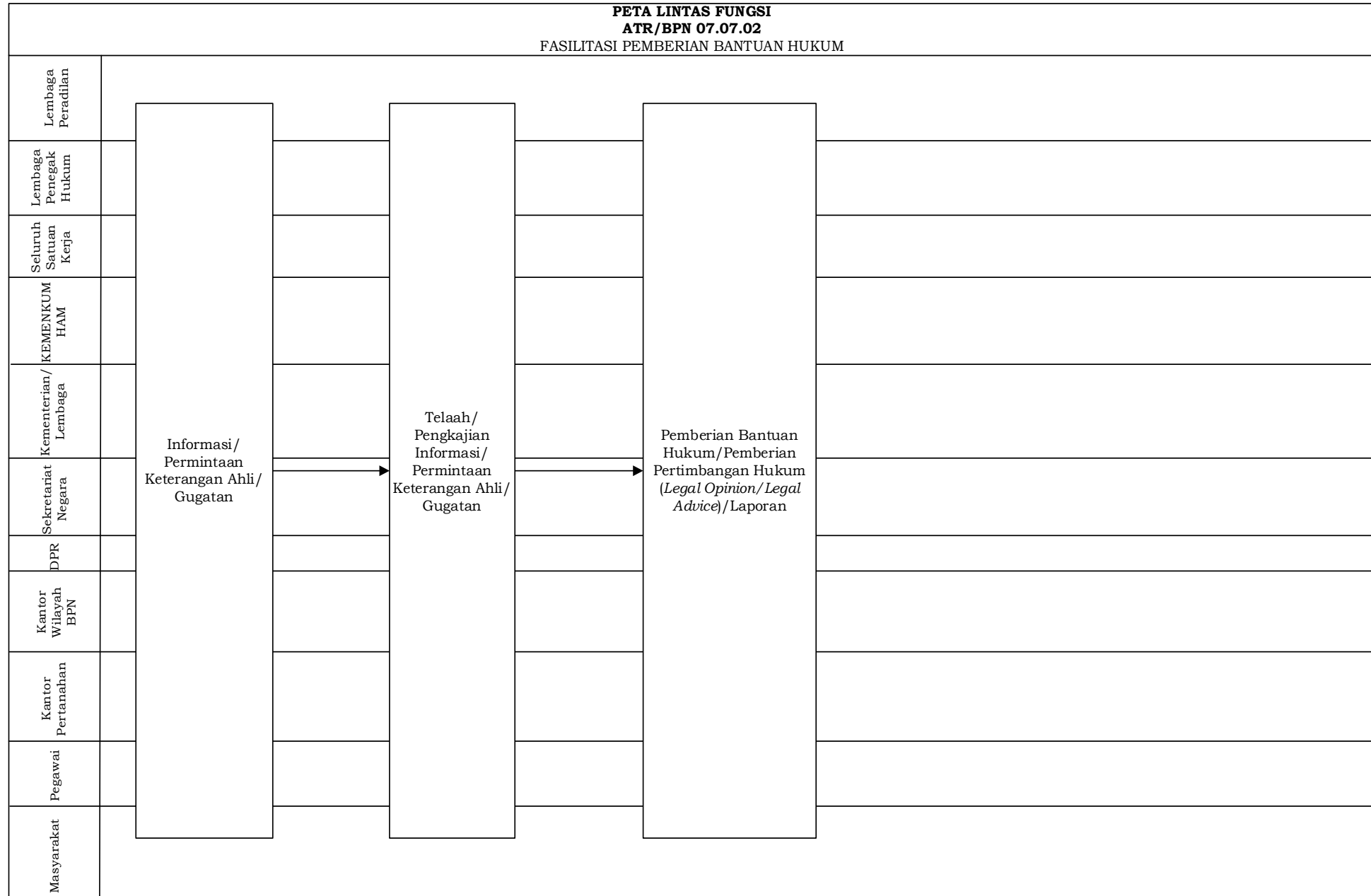
3.1.7. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Hukum

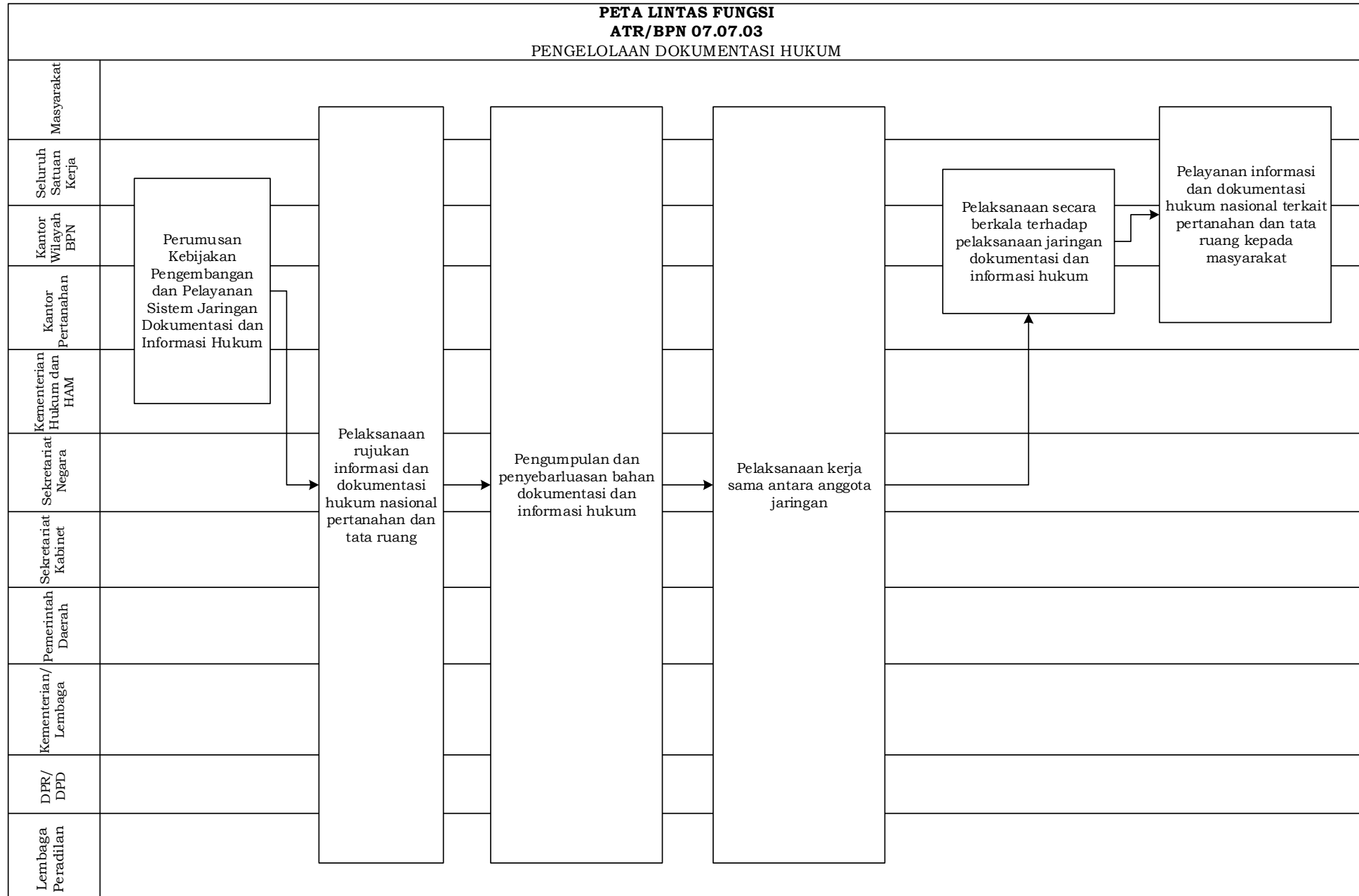








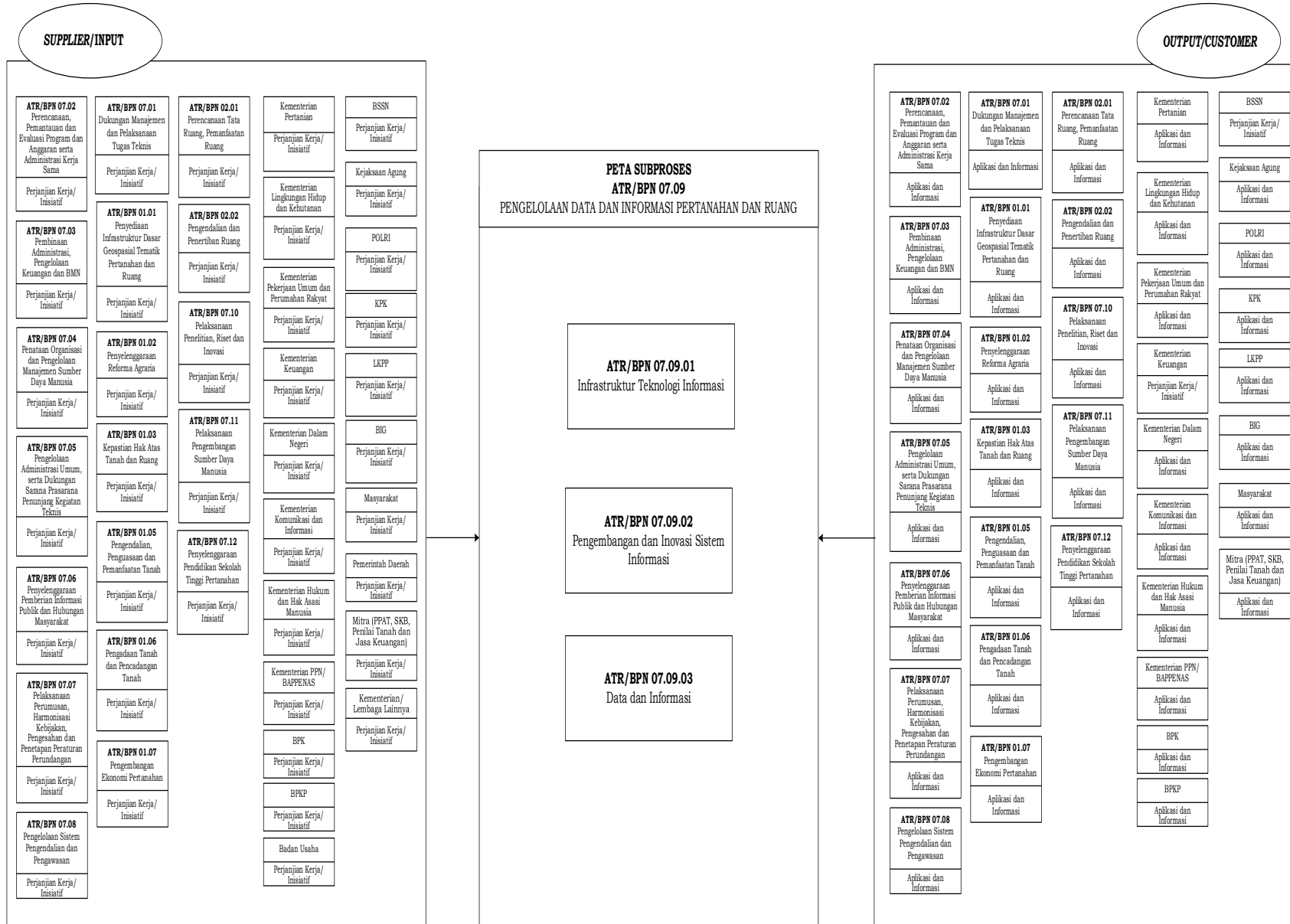




3.1.8. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Data dan Informasi Pertanian, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Catatan Input:

- PERJANJIAN KERJA/INISIATIF Yang Berdasar Pada:
- Renstra, Renja, RKAKL, DIPA, POK
 - NSPK
 - Grand Desain TIK
 - SDM
 - Data Tematik Agraria
 - Data Tematik Kawasan
 - Data Peta
 - Dokumen Riset Produk Teknologi
 - Regulasi
 - Dokumen Kerjasama
 - API Services
 - Study Literature
 - Best Practice
 - Peta Dasar
 - Kuisioner

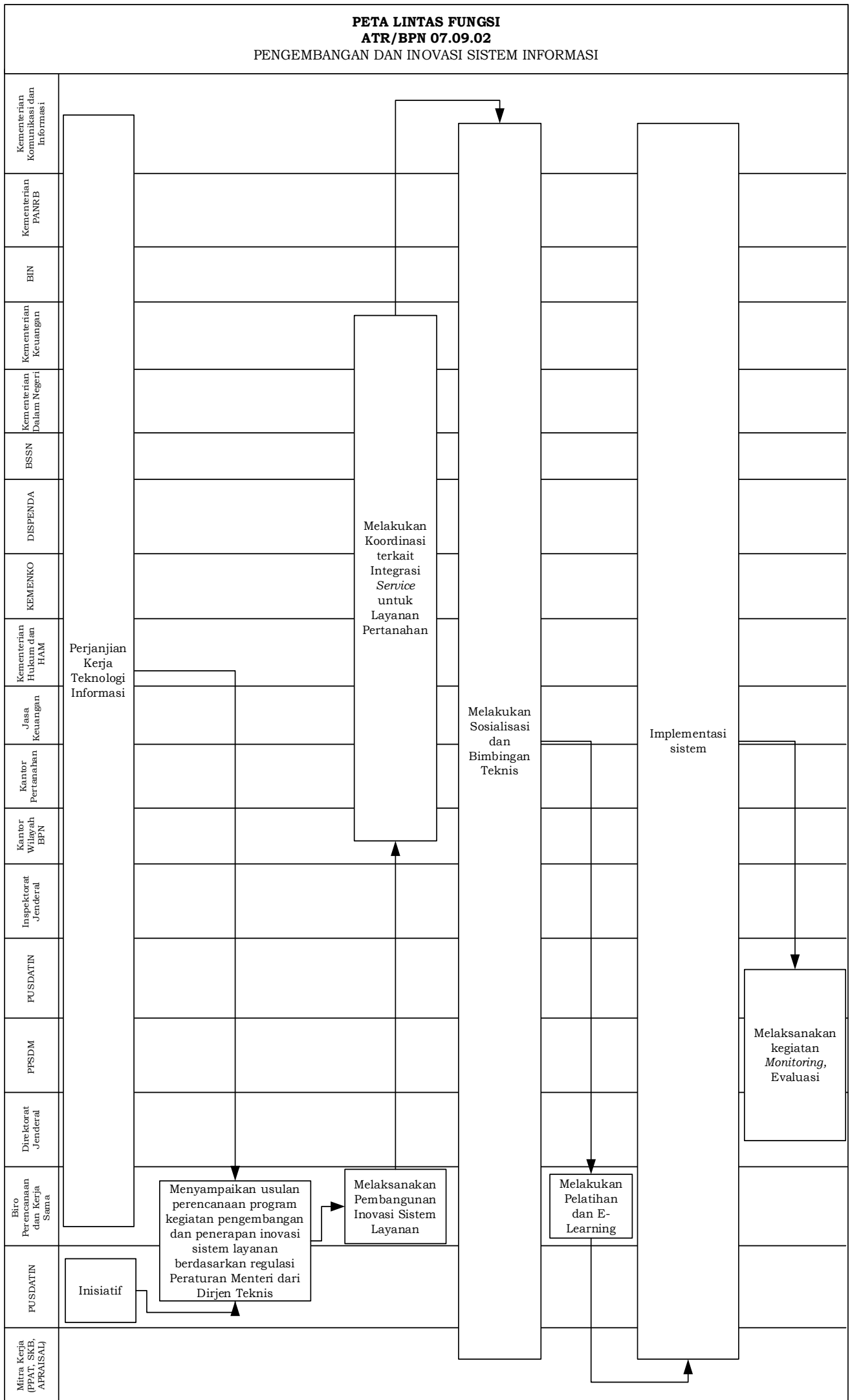


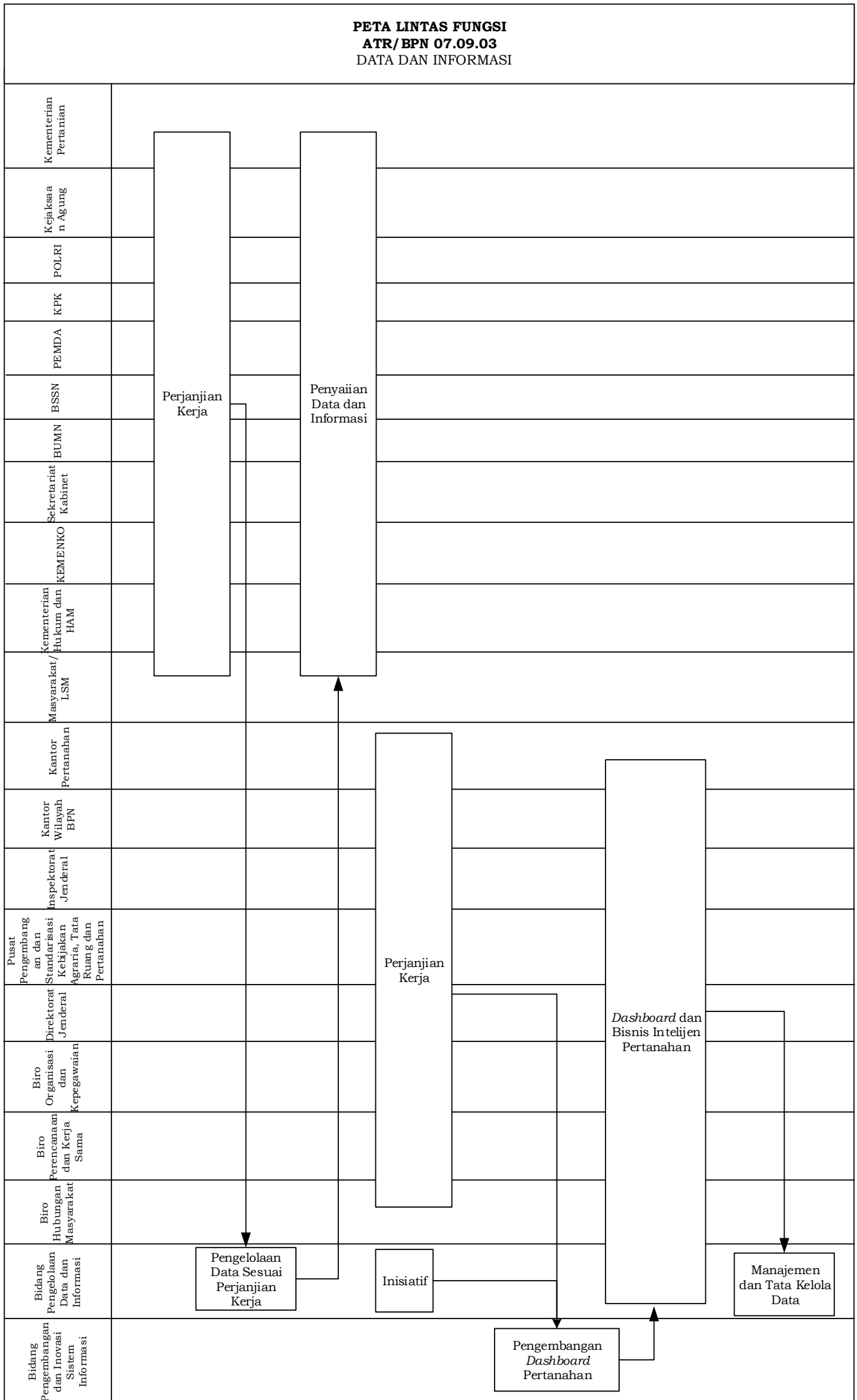
Catatan Output:

- Aplikasi dan Informasi yang berdasar pada:
- Sistem informasi Utama, Pendukung dan manajemen berbasis spasial yang menjadi kebutuhan bisnis Kementerian ATR/BPN.
 - Aplikasi Berbasis Layanan (misal Redistribusi Tanah, PTSL, Pengadaan Tanah, dst)
 - Sistem Pembayaran Elektronik
 - Sistem informasi Pelaporan dan Analisa Kebijakan
 - E-Office.
 - API Services Pelayanan Pertanahan
 - IT Support
 - Dashboard Pertanahan
 - Database dan aplikasinya
 - Website
 - Self service system
 - Performance monitoring system
 - Tracking & complain system
 - Dokumen Kebijakan Pengelolaan Teknologi TIK di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
 - Grand Desain Pengembangan TIK
 - Sistem Komunikasi data dan jaringan
 - DC/DRC
 - Aplikasi Mobile
 - Penerapan Bigdata untuk digital document
 - Single account
 - Public Key Infrastruktur (Subscriber, TTE.)
 - Infrastruktur dan Storage

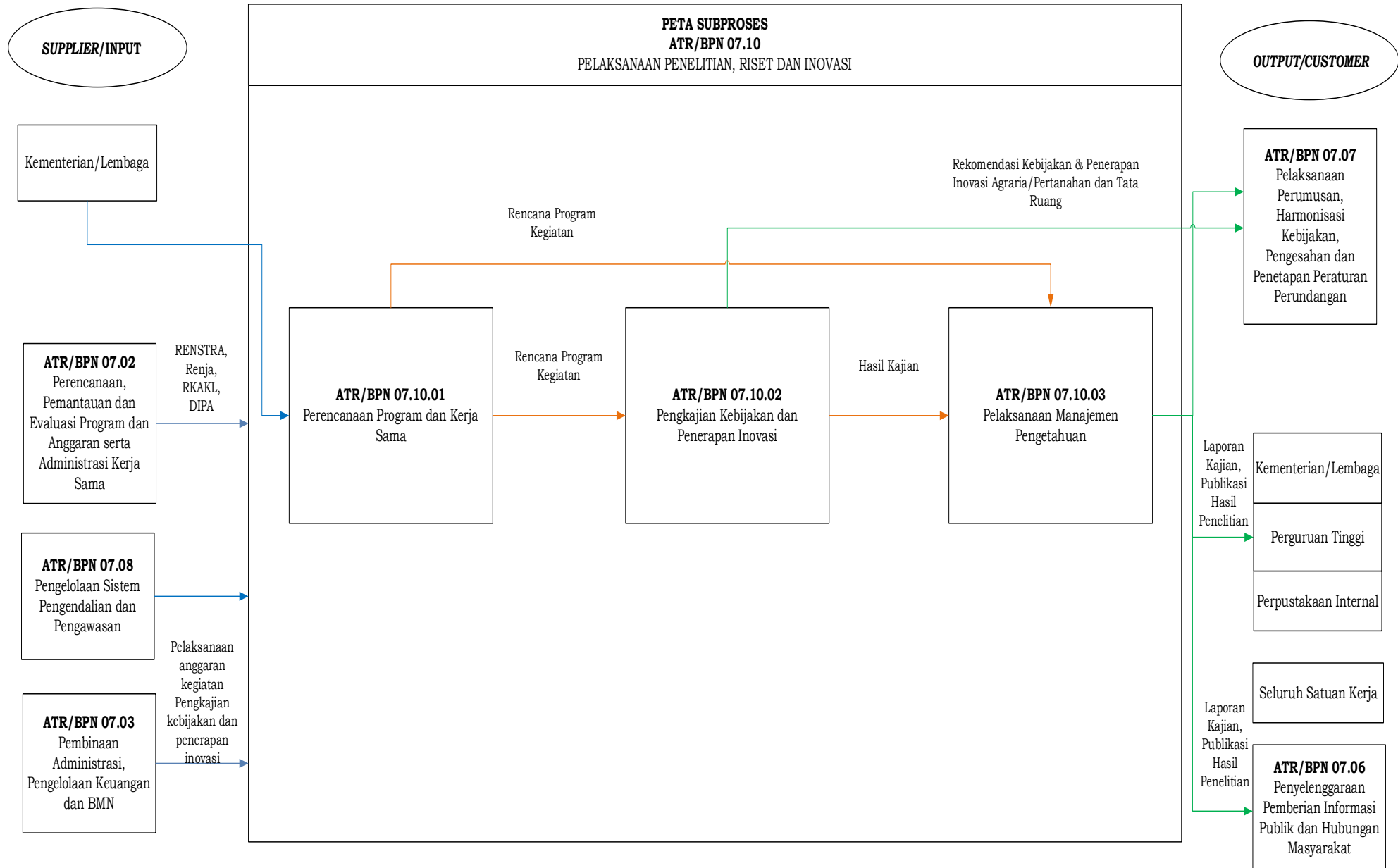
PETA RELASI
ATR/BPN 07.09
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN DAN RUANG

ATR/BPN 07.09.01 Infrastruktur Teknologi Informasi	ATR/BPN 07.09.02 Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi	ATR/BPN 07.09.03 Data dan Informasi																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Seluruh Satuan Kerja Pusat</td> <td style="width: 33%;">Kementerian PPN/BAPPENAS</td> <td style="width: 33%;">LKPP</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pertanian</td> <td>BPK</td> <td>BIG</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td>BPKP</td> <td>Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</td> <td>Badan Usaha</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Keuangan</td> <td>BSSN</td> <td>Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Dalam Negeri</td> <td>Kejaksaan Agung</td> <td>Kementerian/ Lembaga Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Komunikasi dan Informasi</td> <td>POLRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</td> <td>KPK</td> <td></td> </tr> </table>	Seluruh Satuan Kerja Pusat	Kementerian PPN/BAPPENAS	LKPP	Kementerian Pertanian	BPK	BIG	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BPKP	Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Kementerian Keuangan	BSSN	Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)	Kementerian Dalam Negeri	Kejaksaan Agung	Kementerian/ Lembaga Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Informasi	POLRI		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KPK		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Seluruh Satuan Kerja Pusat</td> <td style="width: 33%;">Kementerian PPN/BAPPENAS</td> <td style="width: 33%;">LKPP</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pertanian</td> <td>BPK</td> <td>BIG</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td>BPKP</td> <td>Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</td> <td>Badan Usaha</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Keuangan</td> <td>BSSN</td> <td>Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Dalam Negeri</td> <td>Kejaksaan Agung</td> <td>Kementerian/ Lembaga Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Komunikasi dan Informasi</td> <td>POLRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</td> <td>KPK</td> <td></td> </tr> </table>	Seluruh Satuan Kerja Pusat	Kementerian PPN/BAPPENAS	LKPP	Kementerian Pertanian	BPK	BIG	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BPKP	Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Kementerian Keuangan	BSSN	Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)	Kementerian Dalam Negeri	Kejaksaan Agung	Kementerian/ Lembaga Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Informasi	POLRI		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KPK		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Seluruh Satuan Kerja Pusat</td> <td style="width: 33%;">Kementerian PPN/BAPPENAS</td> <td style="width: 33%;">LKPP</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pertanian</td> <td>BPK</td> <td>BIG</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td>BPKP</td> <td>Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</td> <td>Badan Usaha</td> <td>Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Keuangan</td> <td>BSSN</td> <td>Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Dalam Negeri</td> <td>Kejaksaan Agung</td> <td>Kementerian/ Lembaga Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Komunikasi dan Informasi</td> <td>POLRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</td> <td>KPK</td> <td></td> </tr> </table>	Seluruh Satuan Kerja Pusat	Kementerian PPN/BAPPENAS	LKPP	Kementerian Pertanian	BPK	BIG	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BPKP	Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Usaha	Pemerintah Daerah	Kementerian Keuangan	BSSN	Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)	Kementerian Dalam Negeri	Kejaksaan Agung	Kementerian/ Lembaga Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Informasi	POLRI		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KPK	
Seluruh Satuan Kerja Pusat	Kementerian PPN/BAPPENAS	LKPP																																																																								
Kementerian Pertanian	BPK	BIG																																																																								
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BPKP	Masyarakat																																																																								
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Usaha	Pemerintah Daerah																																																																								
Kementerian Keuangan	BSSN	Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)																																																																								
Kementerian Dalam Negeri	Kejaksaan Agung	Kementerian/ Lembaga Lainnya																																																																								
Kementerian Komunikasi dan Informasi	POLRI																																																																									
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KPK																																																																									
Seluruh Satuan Kerja Pusat	Kementerian PPN/BAPPENAS	LKPP																																																																								
Kementerian Pertanian	BPK	BIG																																																																								
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BPKP	Masyarakat																																																																								
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Usaha	Pemerintah Daerah																																																																								
Kementerian Keuangan	BSSN	Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)																																																																								
Kementerian Dalam Negeri	Kejaksaan Agung	Kementerian/ Lembaga Lainnya																																																																								
Kementerian Komunikasi dan Informasi	POLRI																																																																									
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KPK																																																																									
Seluruh Satuan Kerja Pusat	Kementerian PPN/BAPPENAS	LKPP																																																																								
Kementerian Pertanian	BPK	BIG																																																																								
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BPKP	Masyarakat																																																																								
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Usaha	Pemerintah Daerah																																																																								
Kementerian Keuangan	BSSN	Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan)																																																																								
Kementerian Dalam Negeri	Kejaksaan Agung	Kementerian/ Lembaga Lainnya																																																																								
Kementerian Komunikasi dan Informasi	POLRI																																																																									
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KPK																																																																									

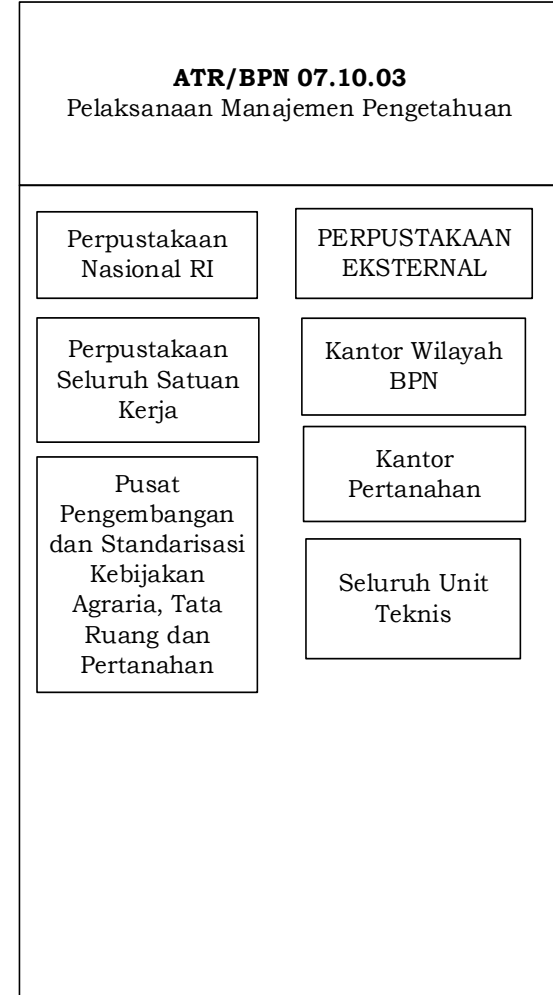


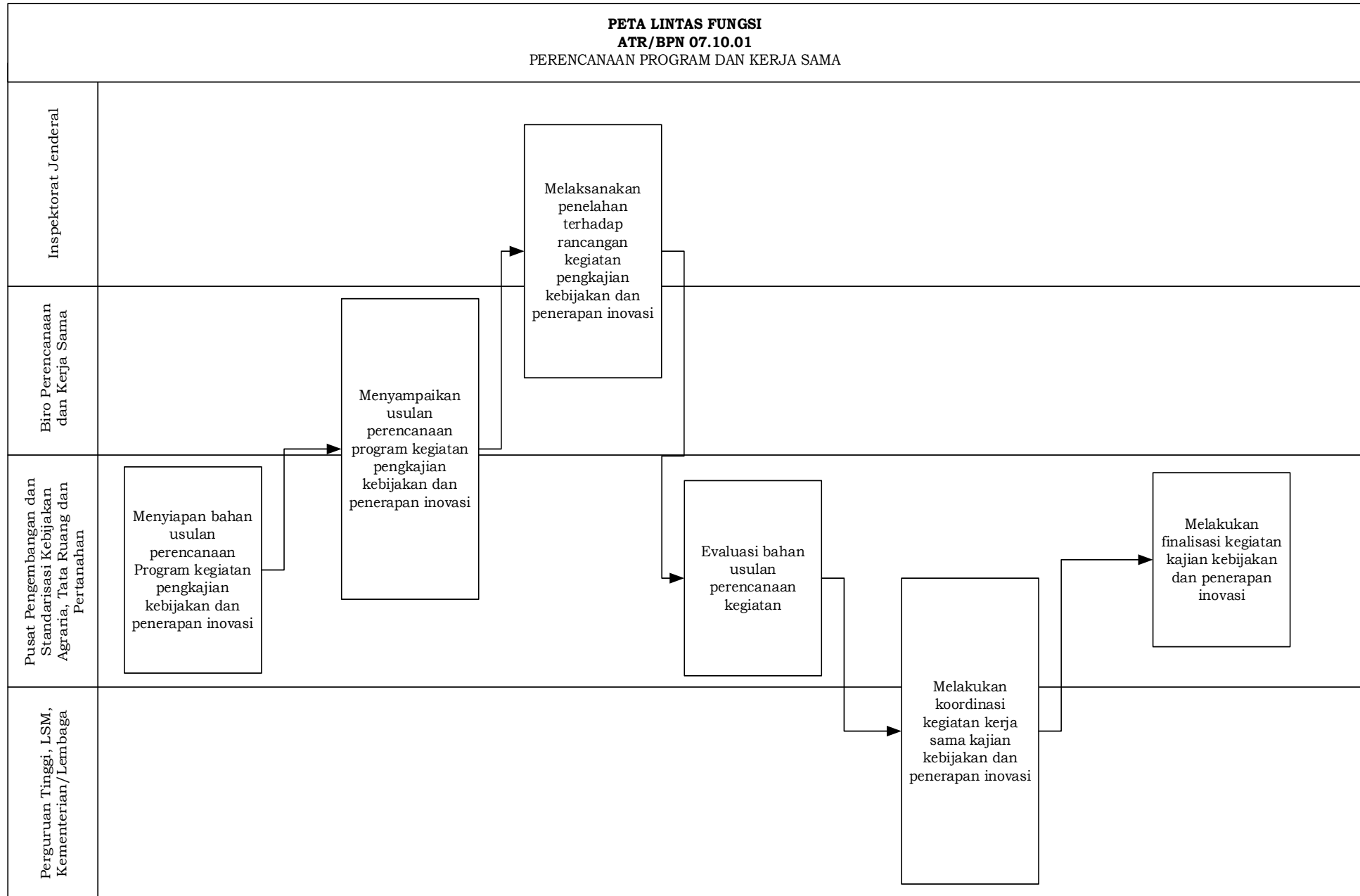


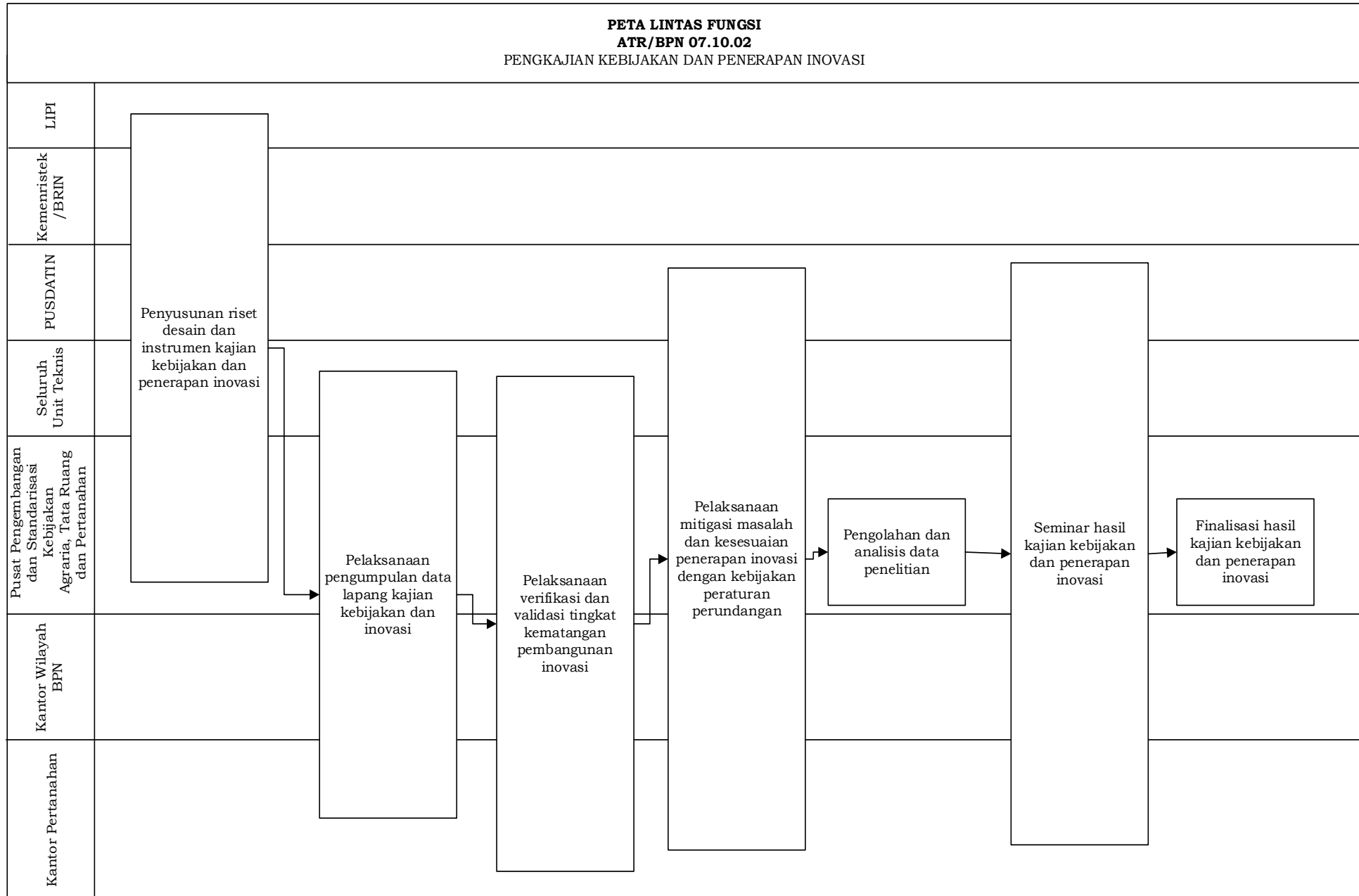
3.1.9. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

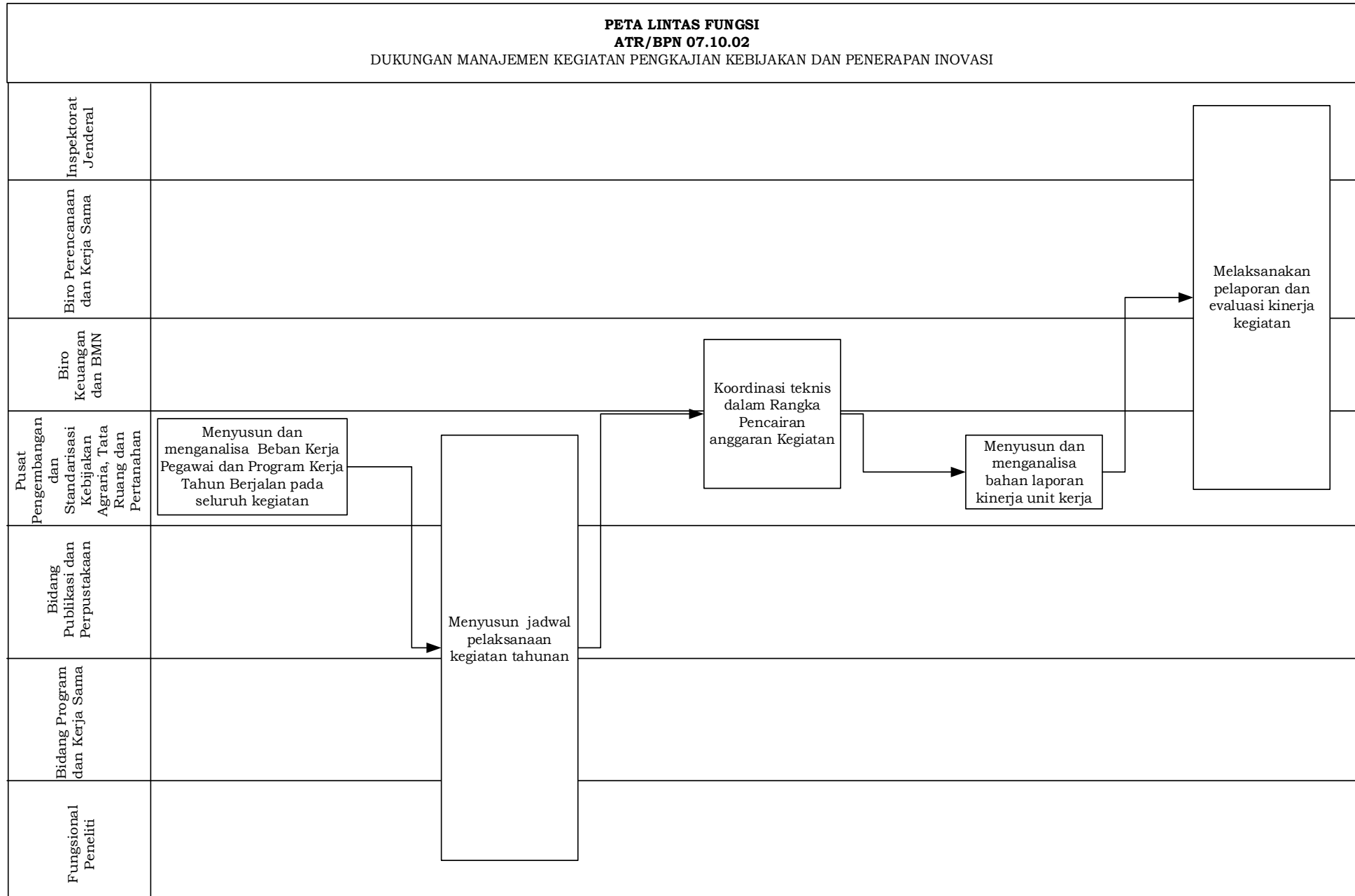


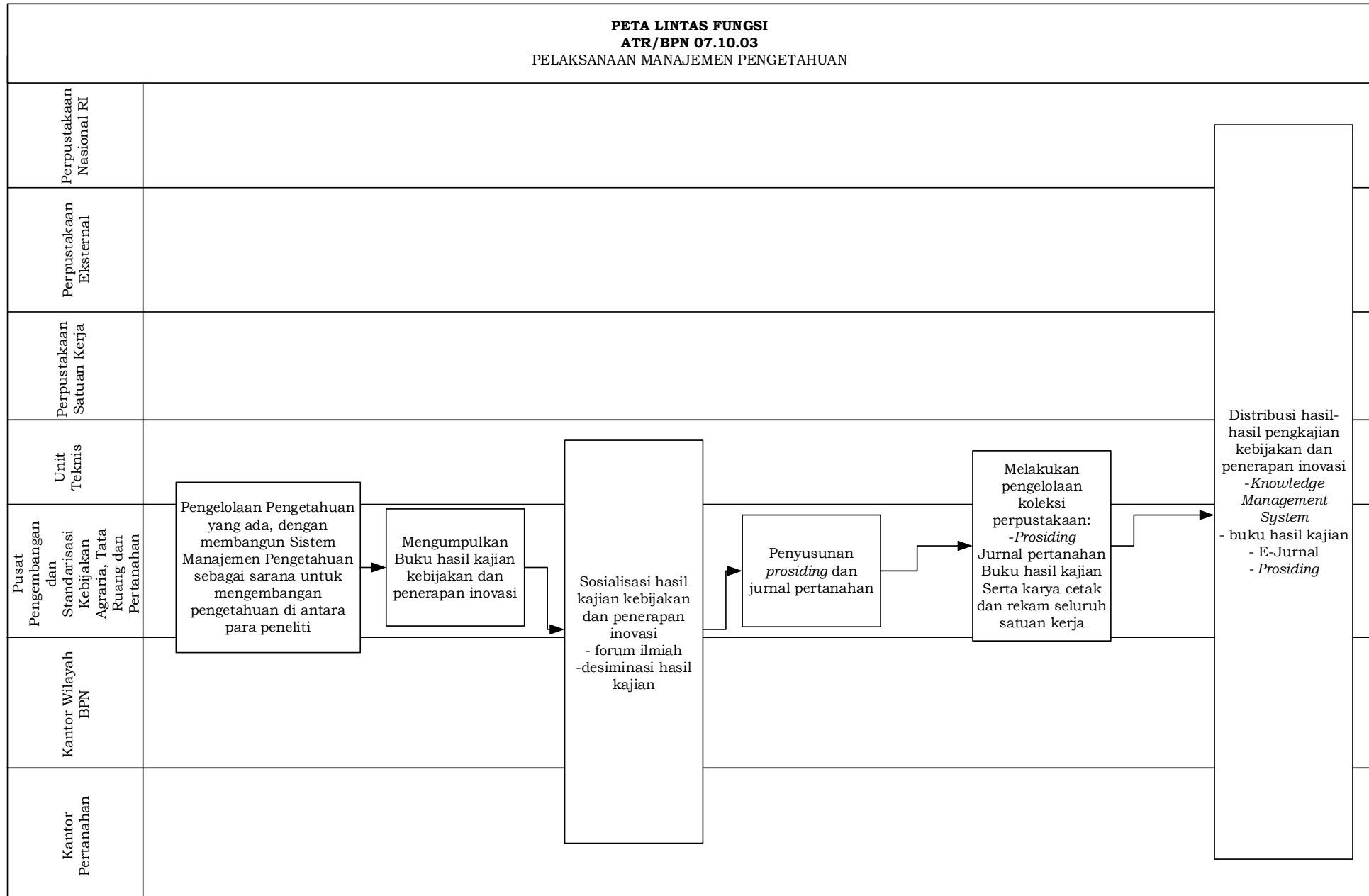
PETA RELASI
ATR/BPN 07.10
PELAKSANAAN PENELITIAN, RISET DAN INOVASI



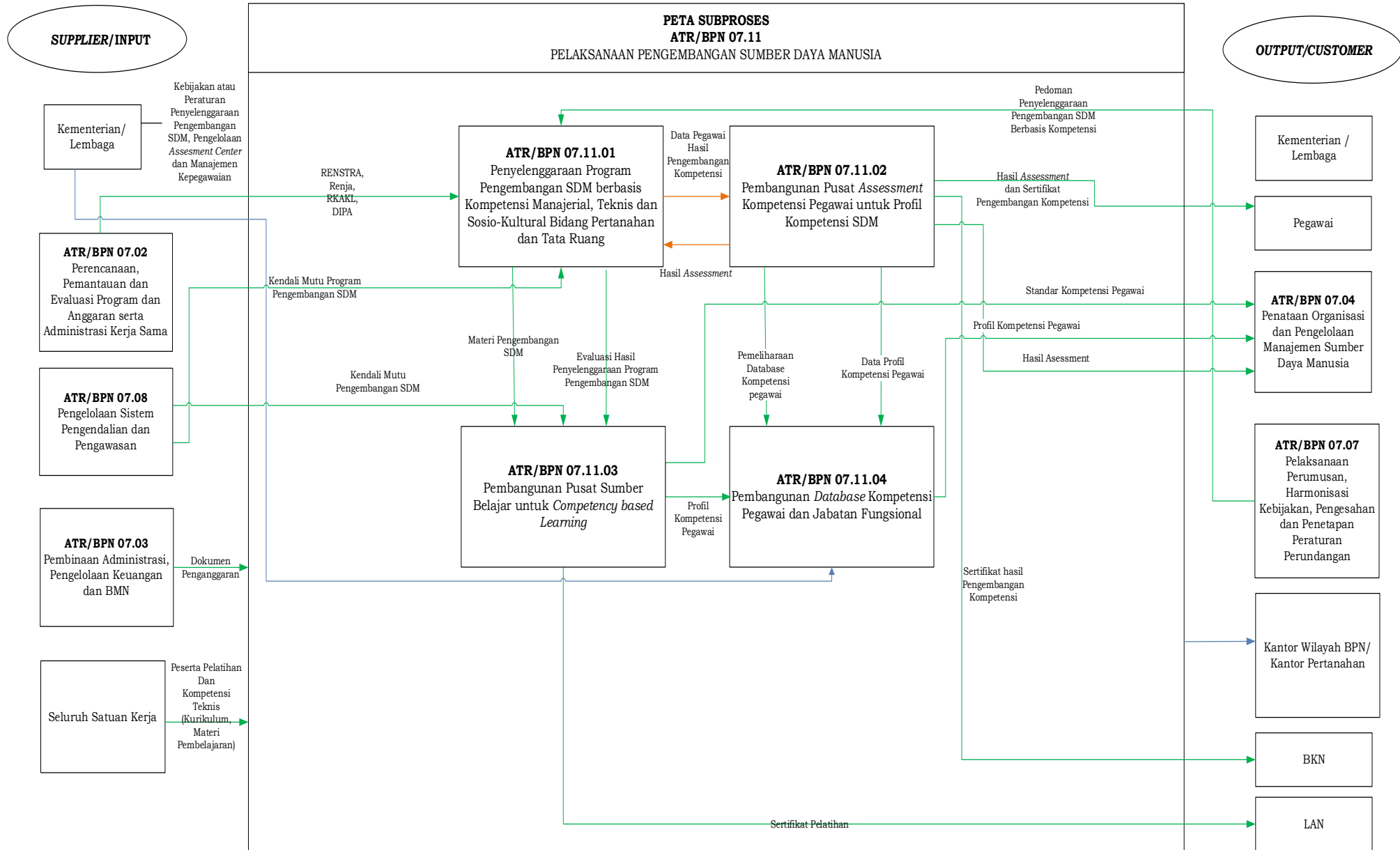




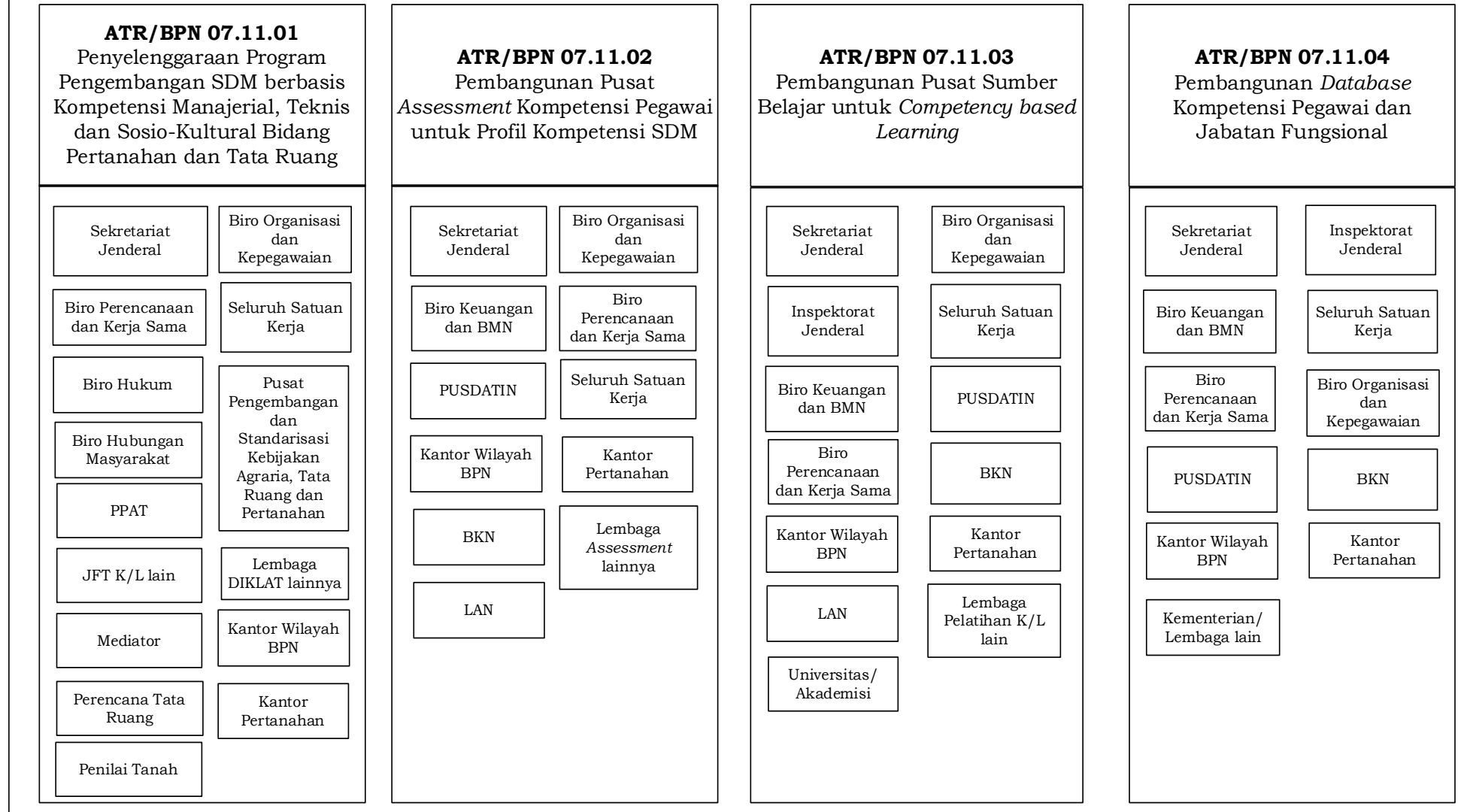


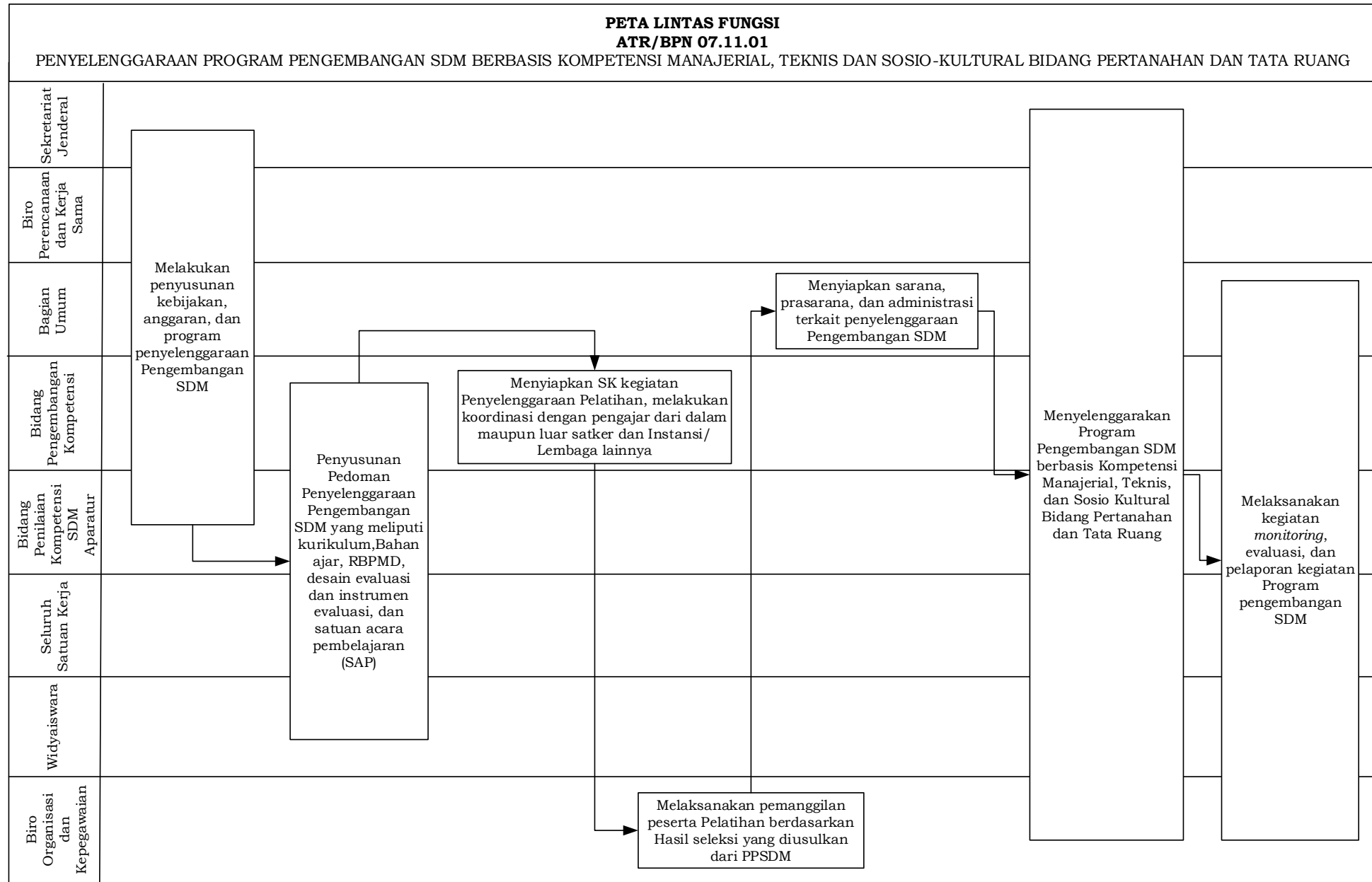


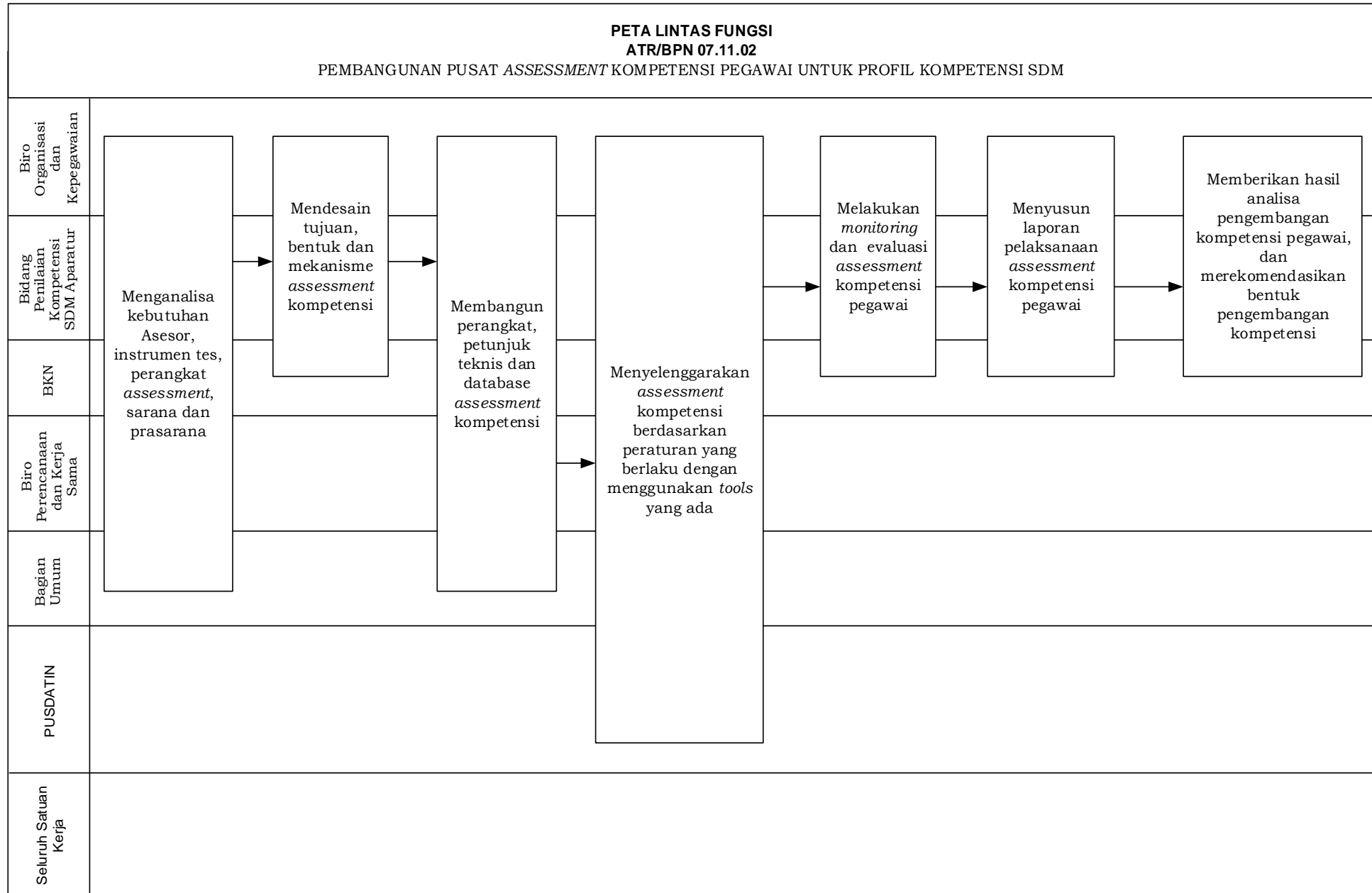
3.1.10. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

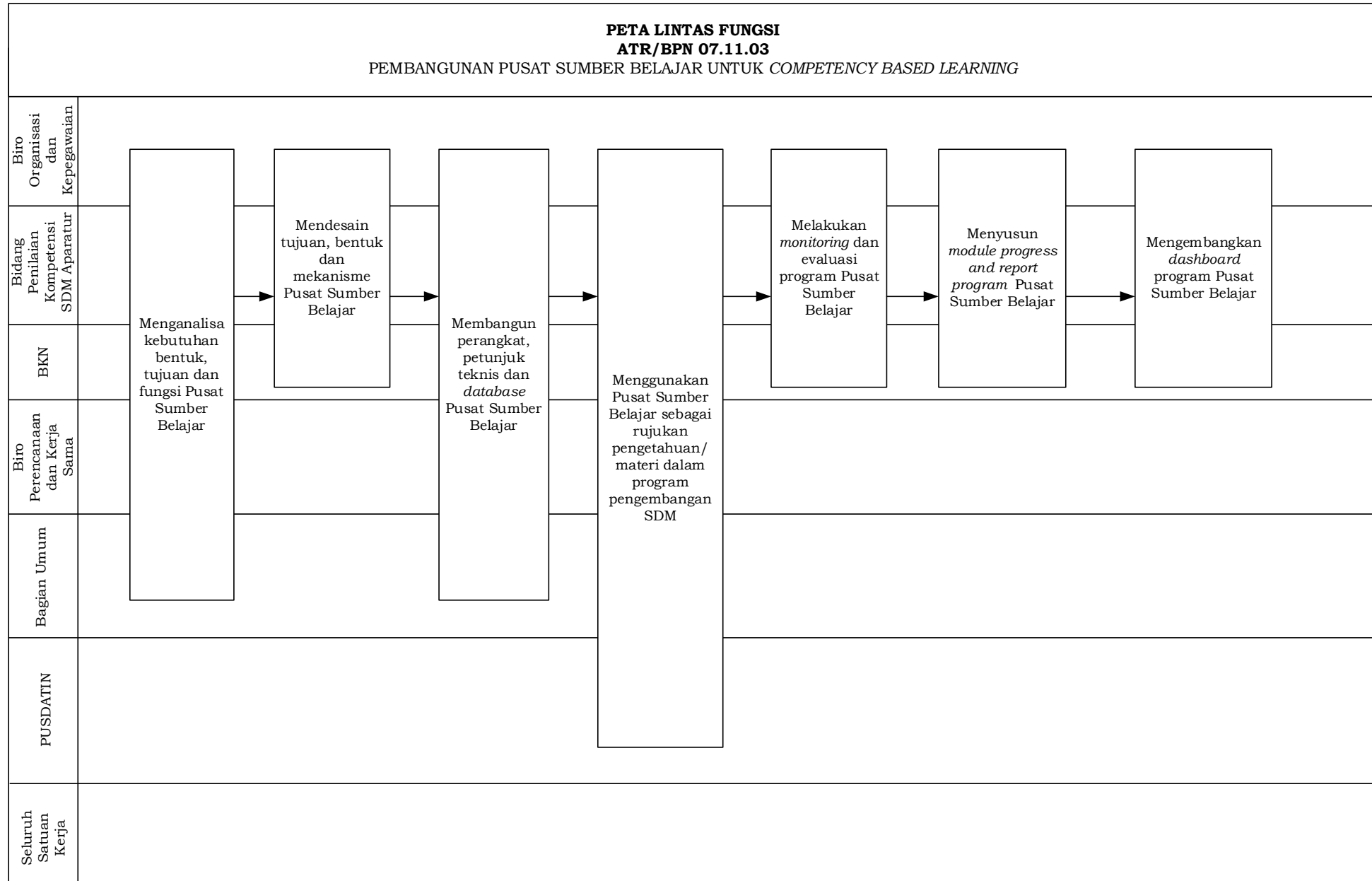


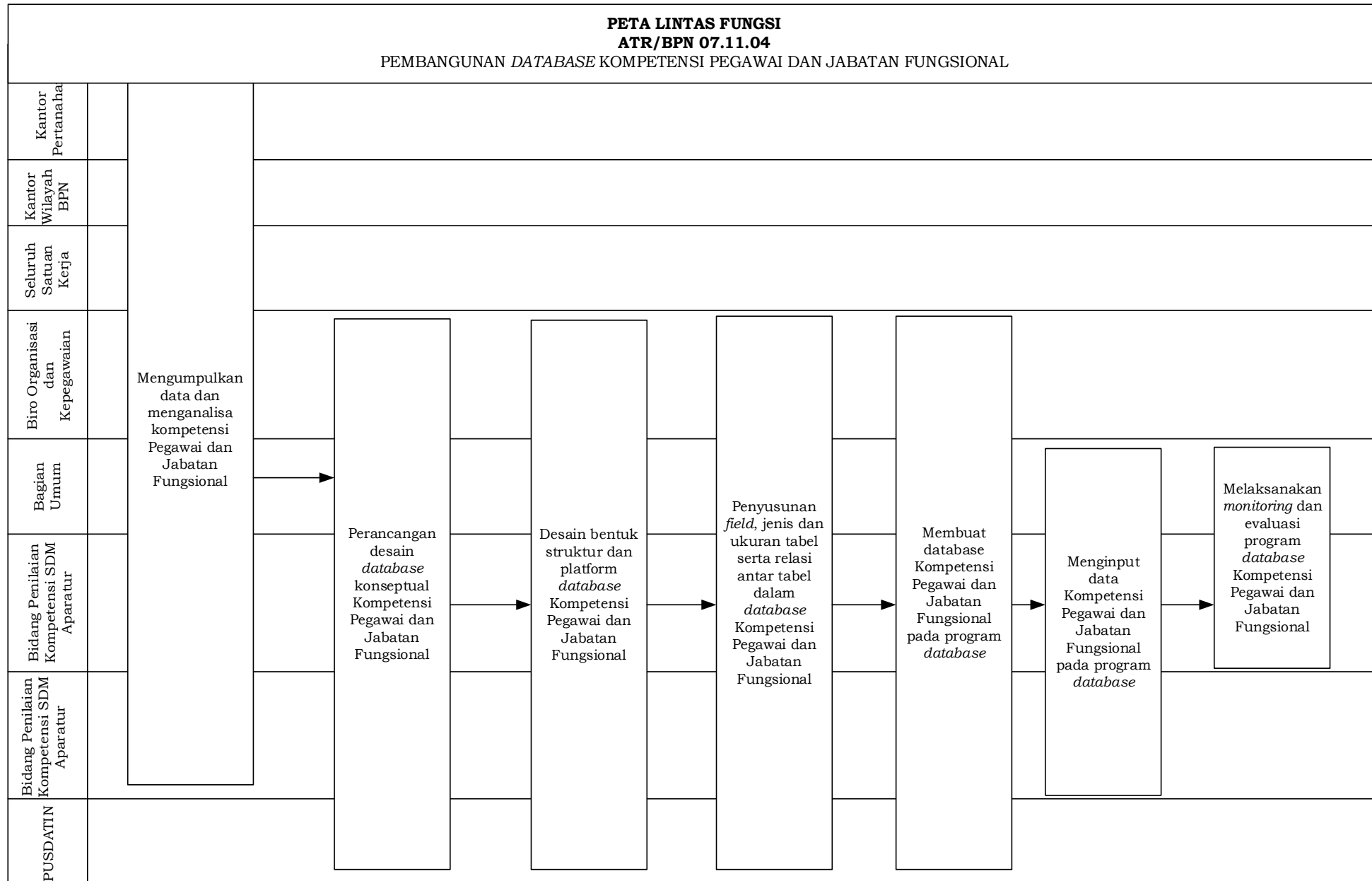
PETA RELASI
ATR/BPN 07.11
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



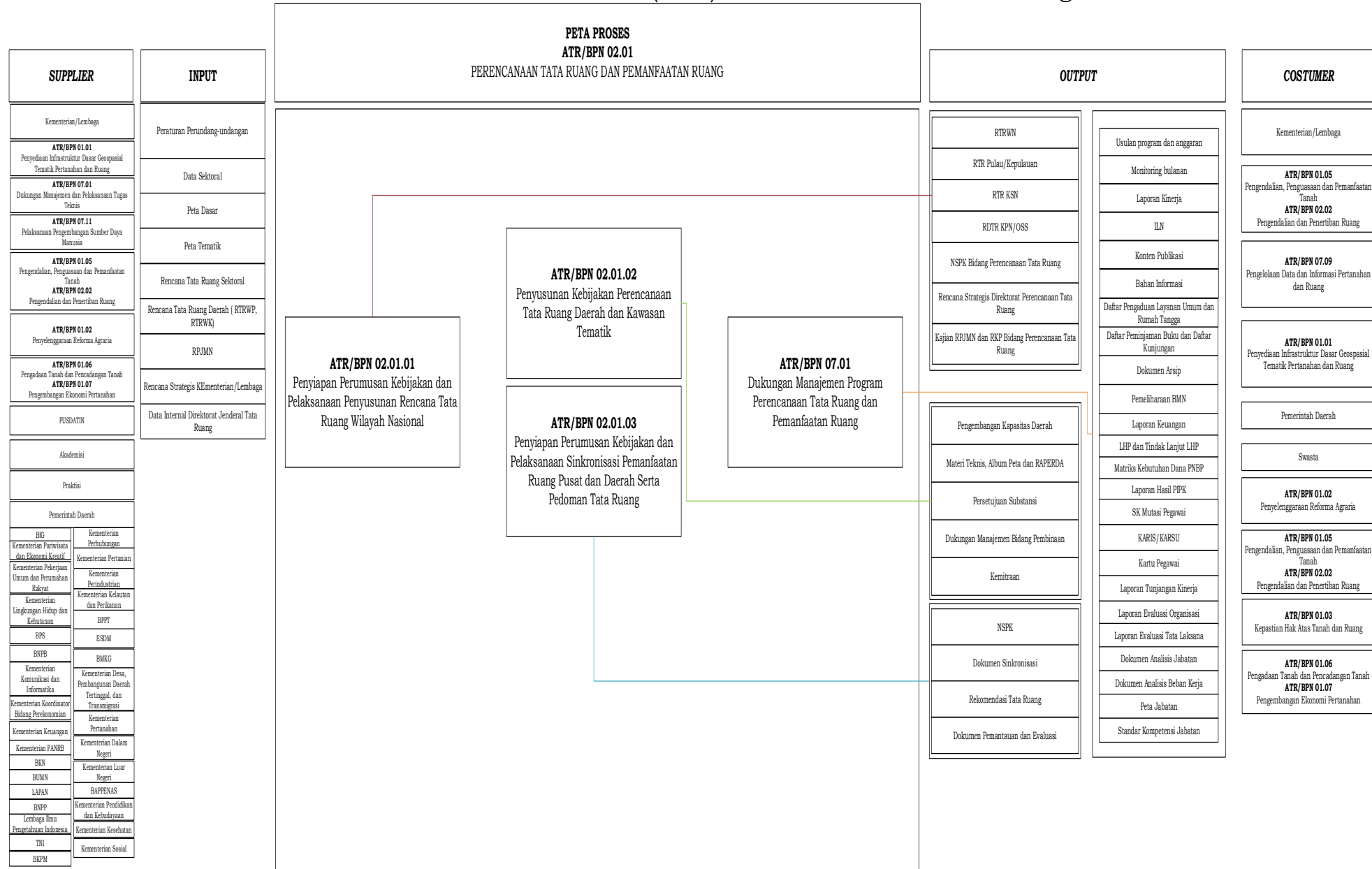




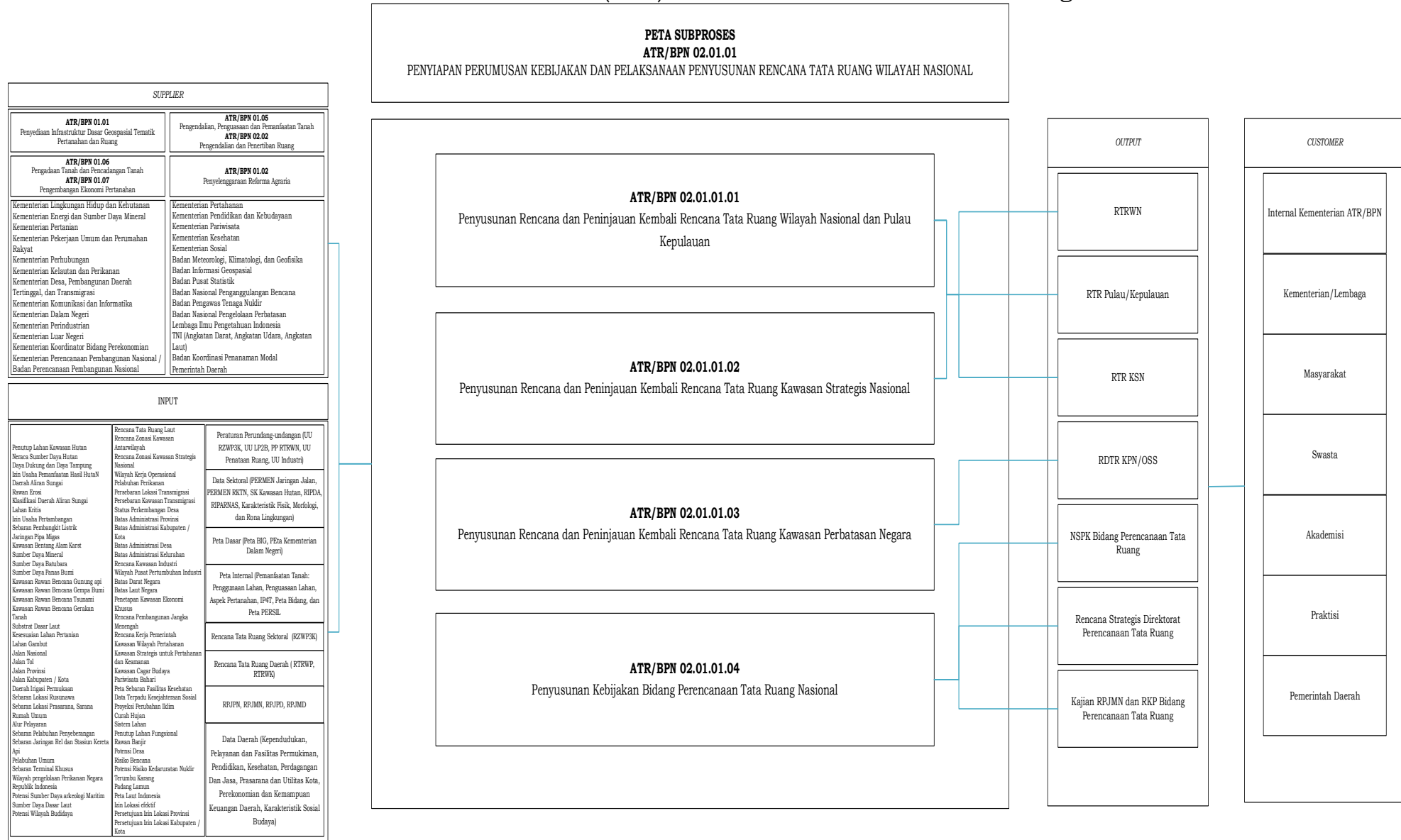




3.2. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Tata Ruang

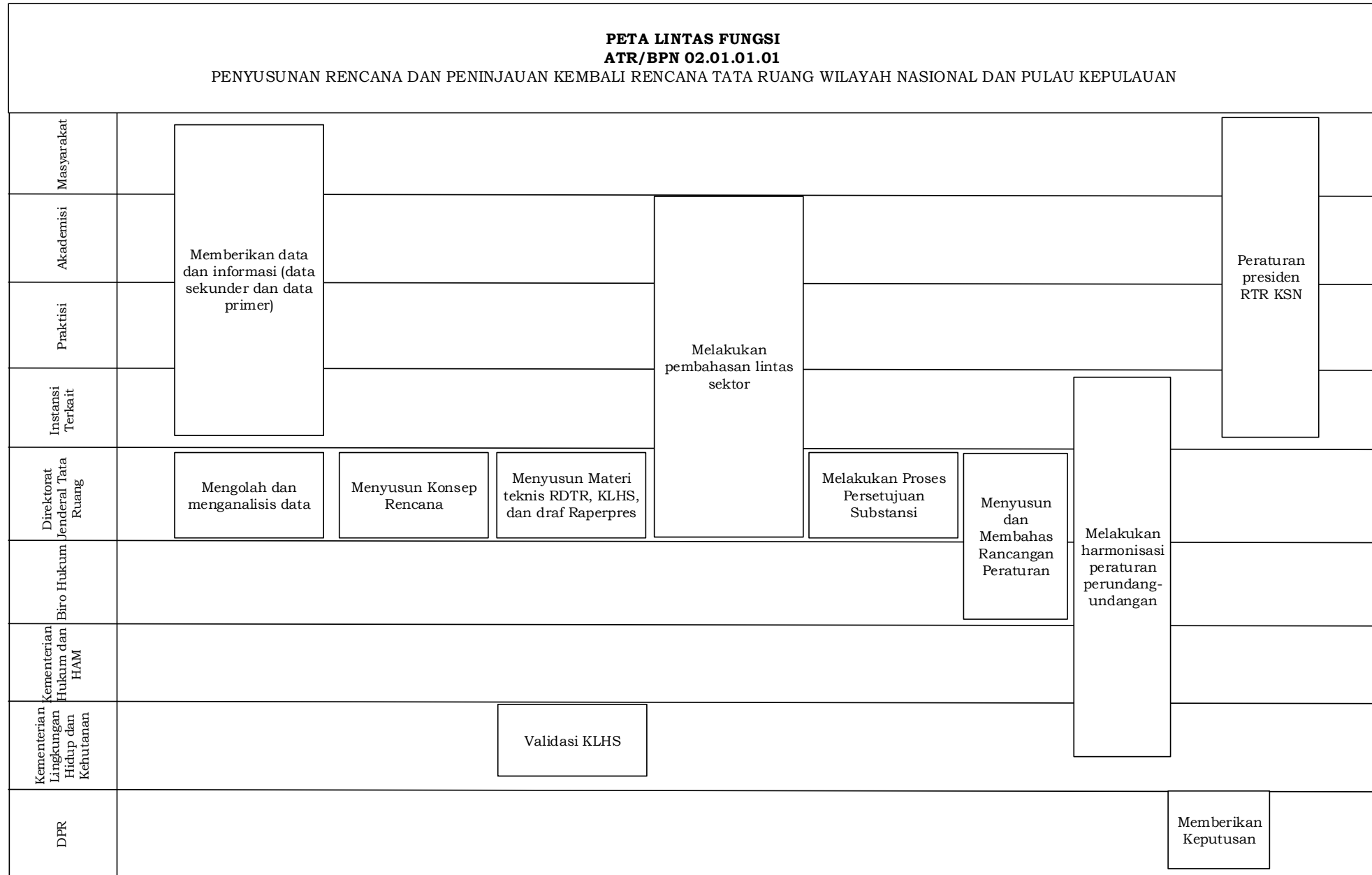


3.2.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional

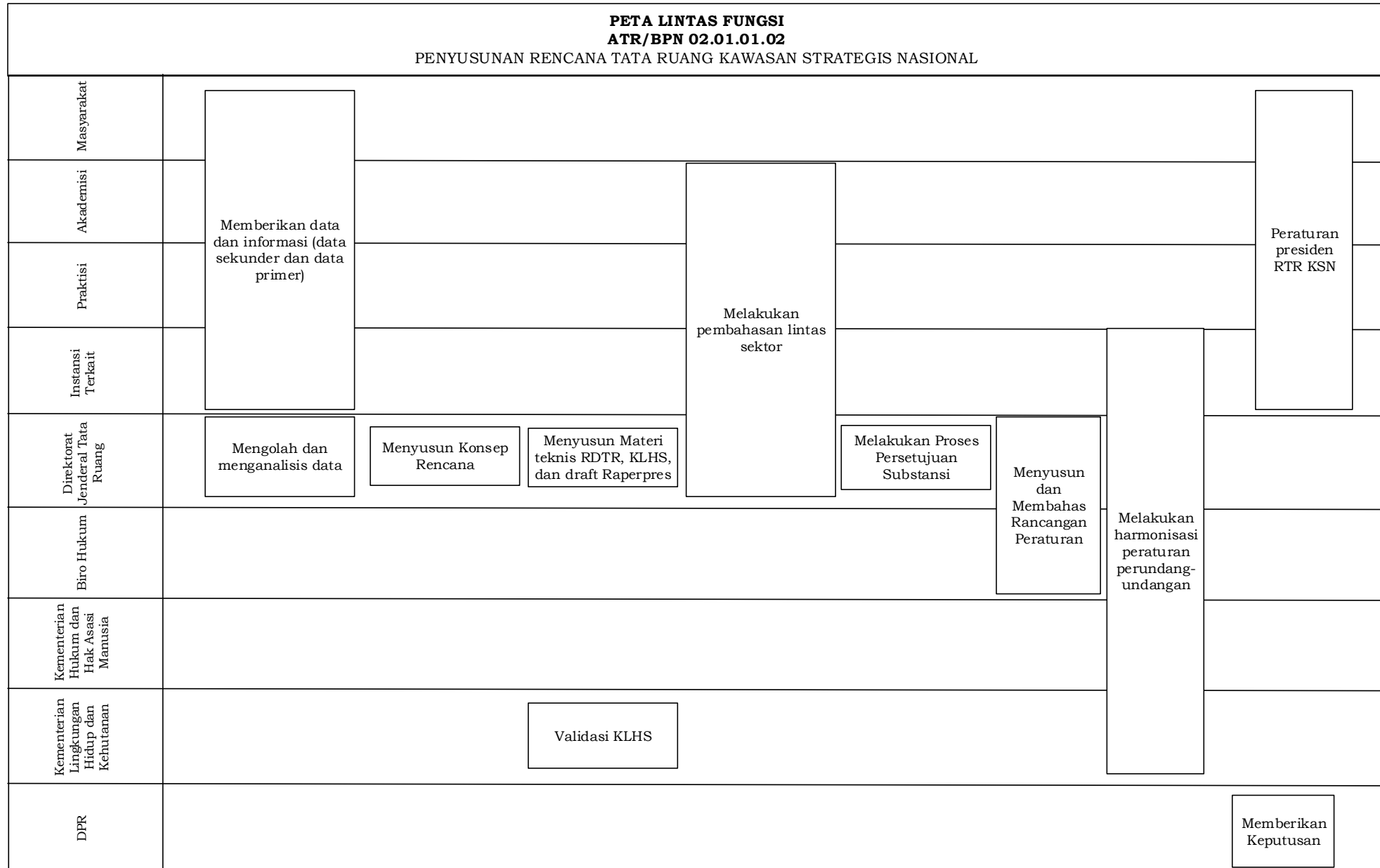


PETA RELASI
ATR/BPN 02.01.01
 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

ATR/BPN 02.01.01.01 Penyusunan Rencana dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Pulau Kepulauan	ATR/BPN 02.01.01.02 Penyusunan Rencana dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	ATR/BPN 02.01.01.03 Penyusunan Rencana dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	ATR/BPN 02.01.01.04 Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan Tata Ruang Nasional																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Biro Hukum</td> <td style="padding: 5px;">Masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td style="padding: 5px;">Akademisi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPR</td> <td style="padding: 5px;">Praktisi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</td> <td style="padding: 5px;">Instansi Terkait</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang	Biro Hukum	Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Akademisi	DPR	Praktisi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Instansi Terkait		Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Biro Hukum</td> <td style="padding: 5px;">Masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td style="padding: 5px;">Akademisi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPR</td> <td style="padding: 5px;">Praktisi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</td> <td style="padding: 5px;">Instansi Terkait</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang	Biro Hukum	Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Akademisi	DPR	Praktisi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Instansi Terkait		Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Biro Hukum</td> <td style="padding: 5px;">Masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> <td style="padding: 5px;">Akademisi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPR</td> <td style="padding: 5px;">Praktisi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</td> <td style="padding: 5px;">Instansi Terkait</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)</td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang	Biro Hukum	Masyarakat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Akademisi	DPR	Praktisi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Instansi Terkait		Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Masyarakat</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Instansi Terkait</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Akademisi</td> <td style="padding: 5px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Praktisi</td> <td style="padding: 5px;">Biro Hukum</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Pemerintah Daerah</td> <td style="padding: 5px;">Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</td> </tr> </table>	Masyarakat	Instansi Terkait	Akademisi	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Praktisi	Biro Hukum	Pemerintah Daerah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang																																														
Biro Hukum	Masyarakat																																														
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Akademisi																																														
DPR	Praktisi																																														
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Instansi Terkait																																														
	Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)																																														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang																																														
Biro Hukum	Masyarakat																																														
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Akademisi																																														
DPR	Praktisi																																														
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Instansi Terkait																																														
	Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)																																														
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang																																														
Biro Hukum	Masyarakat																																														
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Akademisi																																														
DPR	Praktisi																																														
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Instansi Terkait																																														
	Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)																																														
Masyarakat	Instansi Terkait																																														
Akademisi	Direktorat Jenderal Tata Ruang																																														
Praktisi	Biro Hukum																																														
Pemerintah Daerah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia																																														



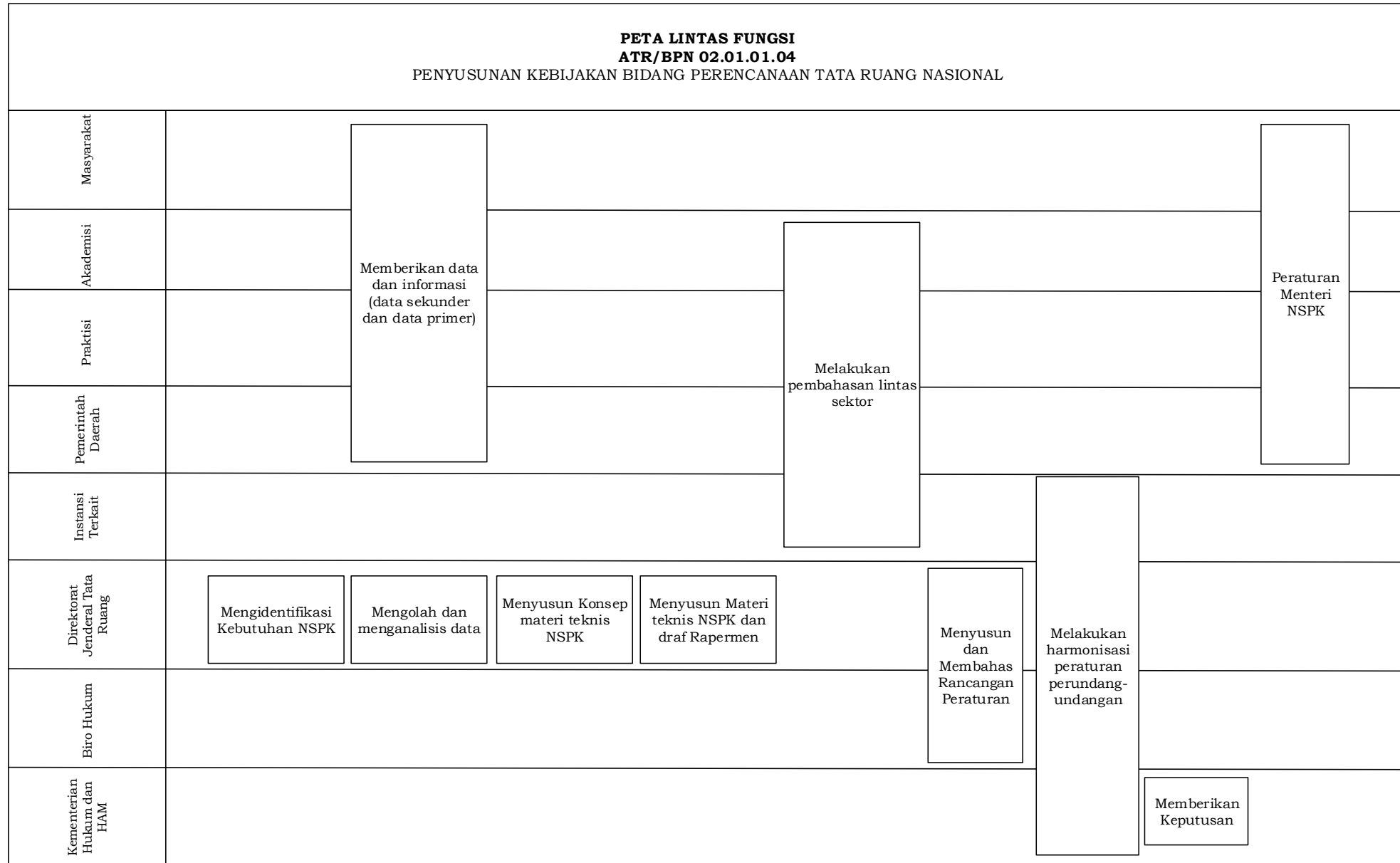
<p align="center">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.01 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN PULAU KEPULAUAN</p>						
Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang	Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang		Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang			
Masyarakat	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)					Rencana Tata Ruang
Akademisi						
Praktisi						
Instansi Terkait						
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Mengkaji Rencana Tata Ruang	Mengevaluasi Rencana Tata Ruang	Melakukan Penilaian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali	Merivisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk	Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang
Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)						



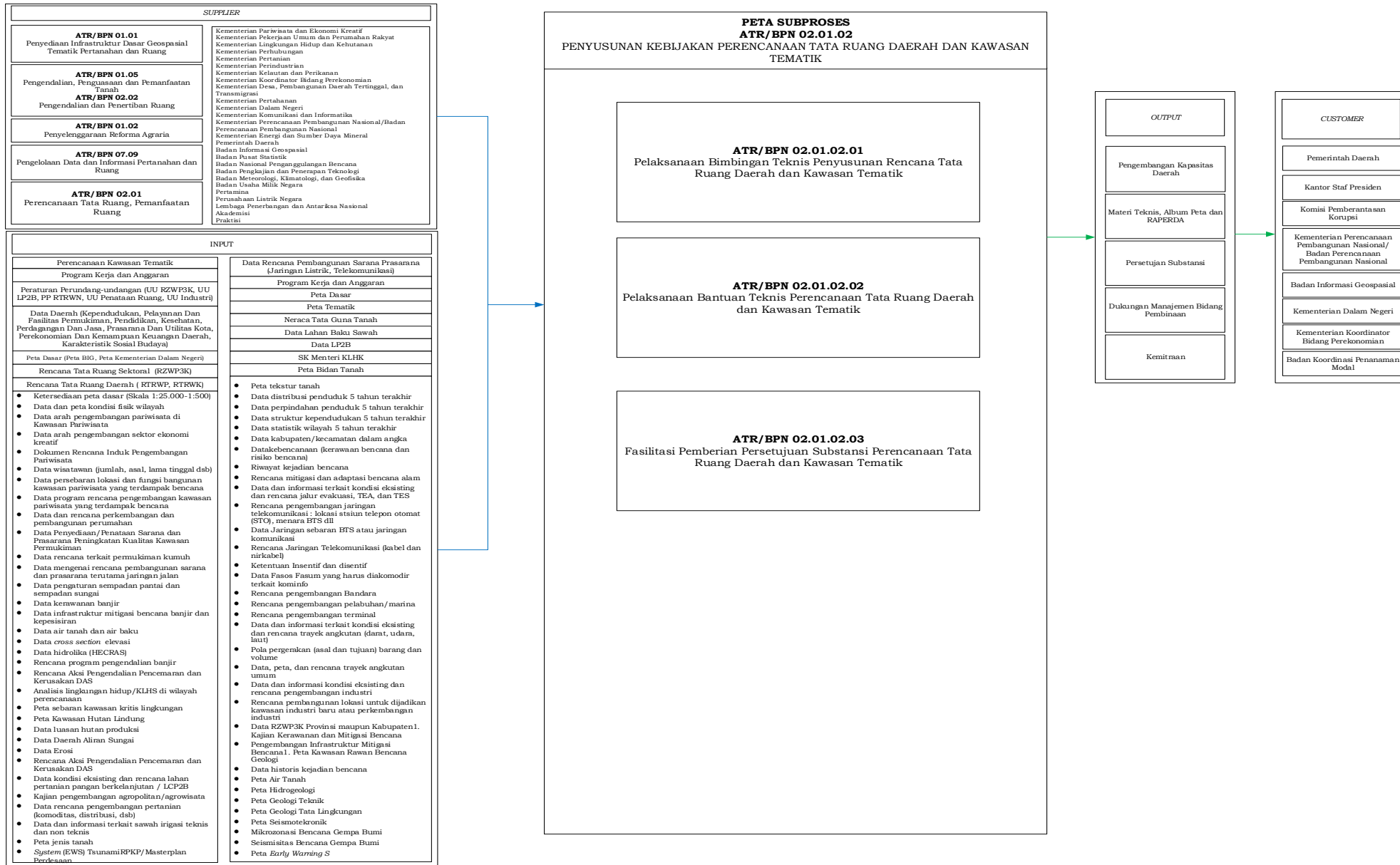
<p align="center">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.02 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL</p>						
Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang	Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang		Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang			
Masyarakat	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)					Rencana Tata Ruang
Akademisi						
Praktisi						
Instansi Terkait						
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Mengkaji Rencana Tata Ruang	Mengevaluasi Rencana Tata Ruang	Melakukan Penilaian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali	Merevisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk	Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang
Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)						

<p align="center">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.03 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</p>								
Masyarakat	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)				Melakukan pembahasan lintas sektor			Peraturan presiden RTR KSN
Akademisi								
Praktisi								
Instansi Terkait								
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Mengolah dan menganalisis data	Menyusun Konsep Rencana	Menyusun Materi teknis RDTR, KLHS, dan draft Raperpres	Melakukan Proses Persetujuan Substansi	Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan	Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan		
Biro Hukum								
Kementerian Hukum dan HAM								
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Validasi KLHS							
DPR								Memberikan Keputusan

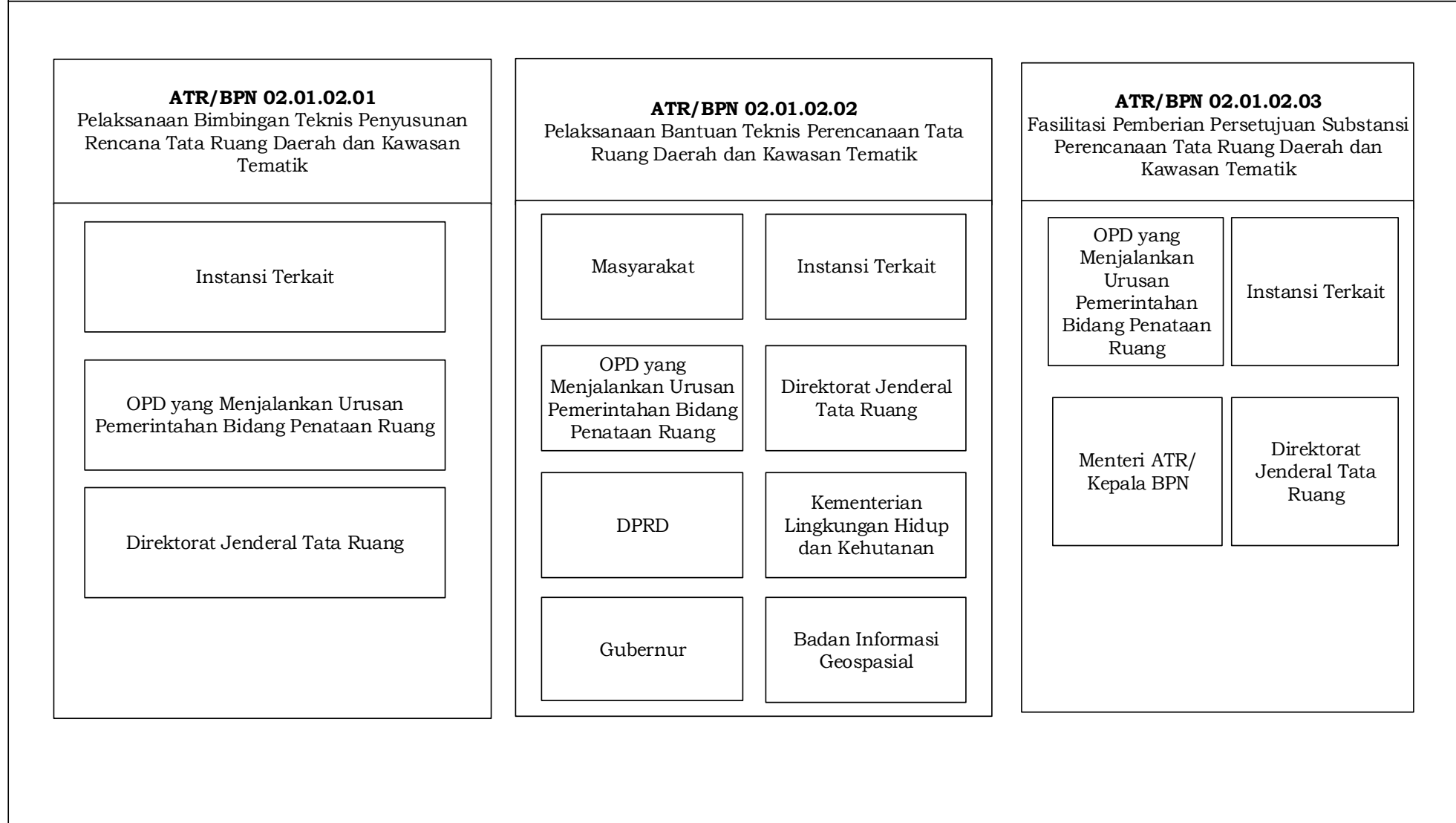
<p align="center">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.03 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA</p>						
Menteri yang Mengendalikan Urusan Bidang Penataan Ruang	Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang		Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang			
Masyarakat	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)	Rencana Tata Ruang				
Akademisi						
Praktisi						
Instansi Terkait						
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Mengkaji Rencana Tata Ruang	Mengevaluasi Rencana Tata Ruang	Melakukan Penilaian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang	Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali	Merevisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk	Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang
Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian)						



3.2.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II

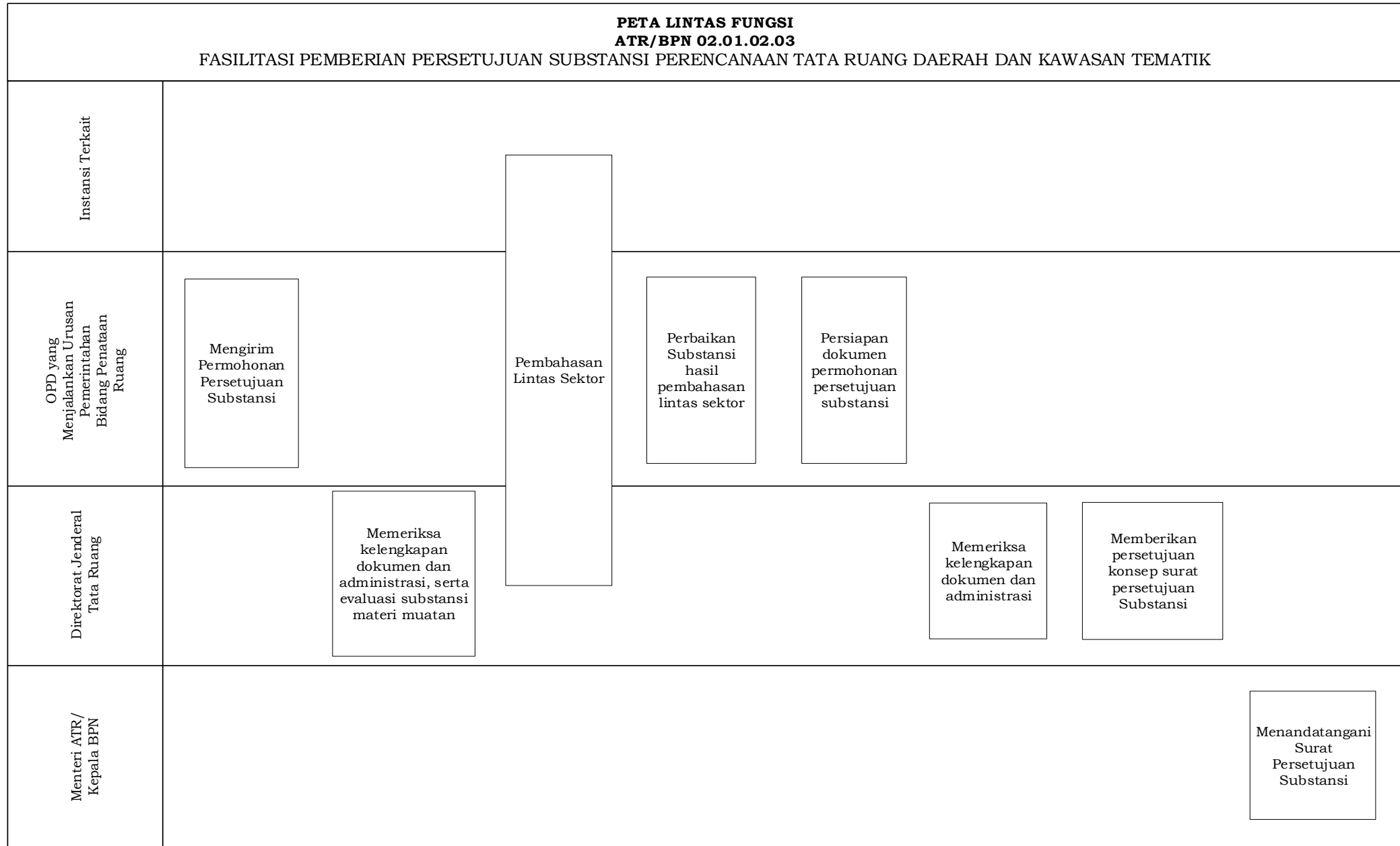


PETA RELASI
ATR/BPN 02.01.02
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK

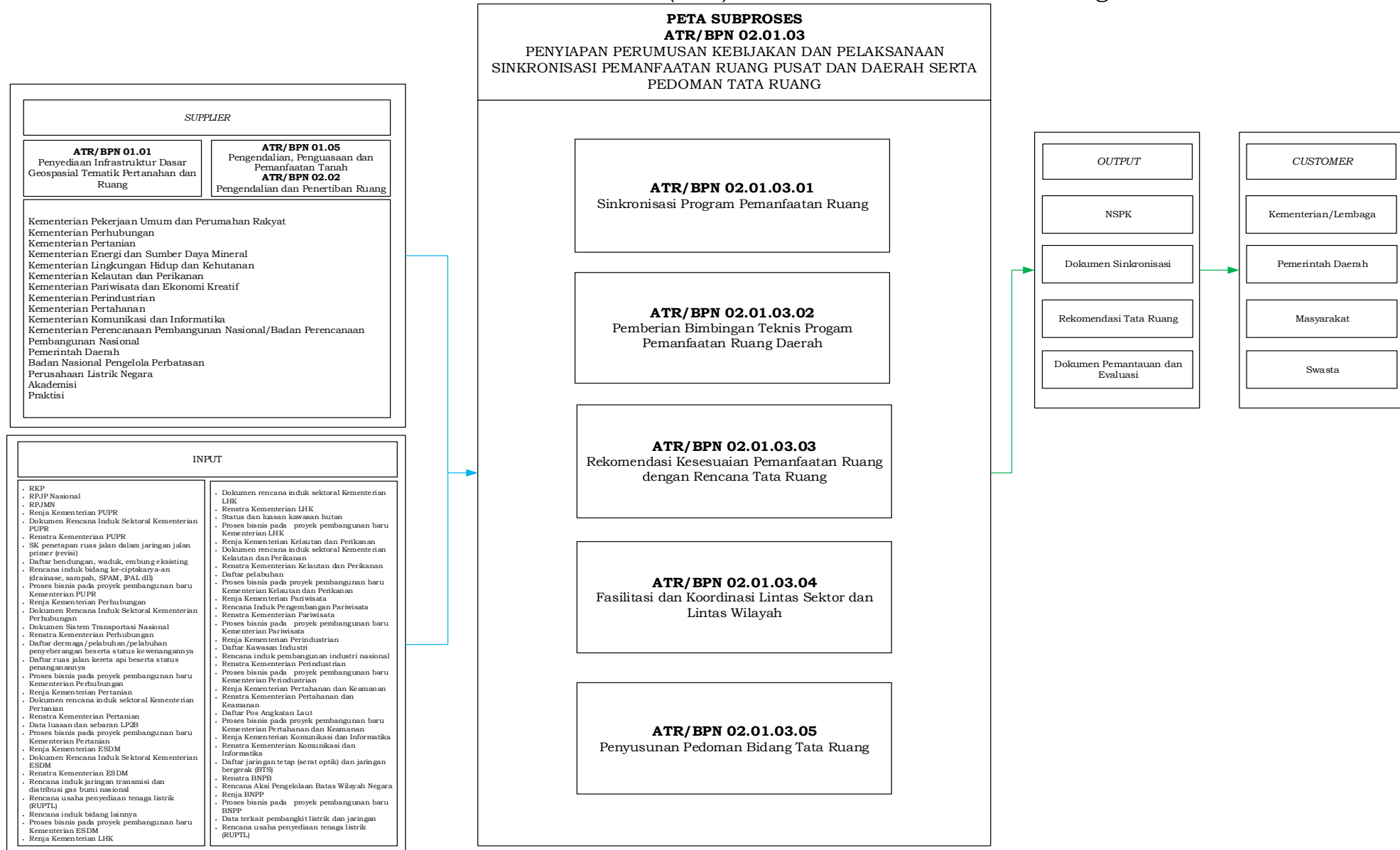


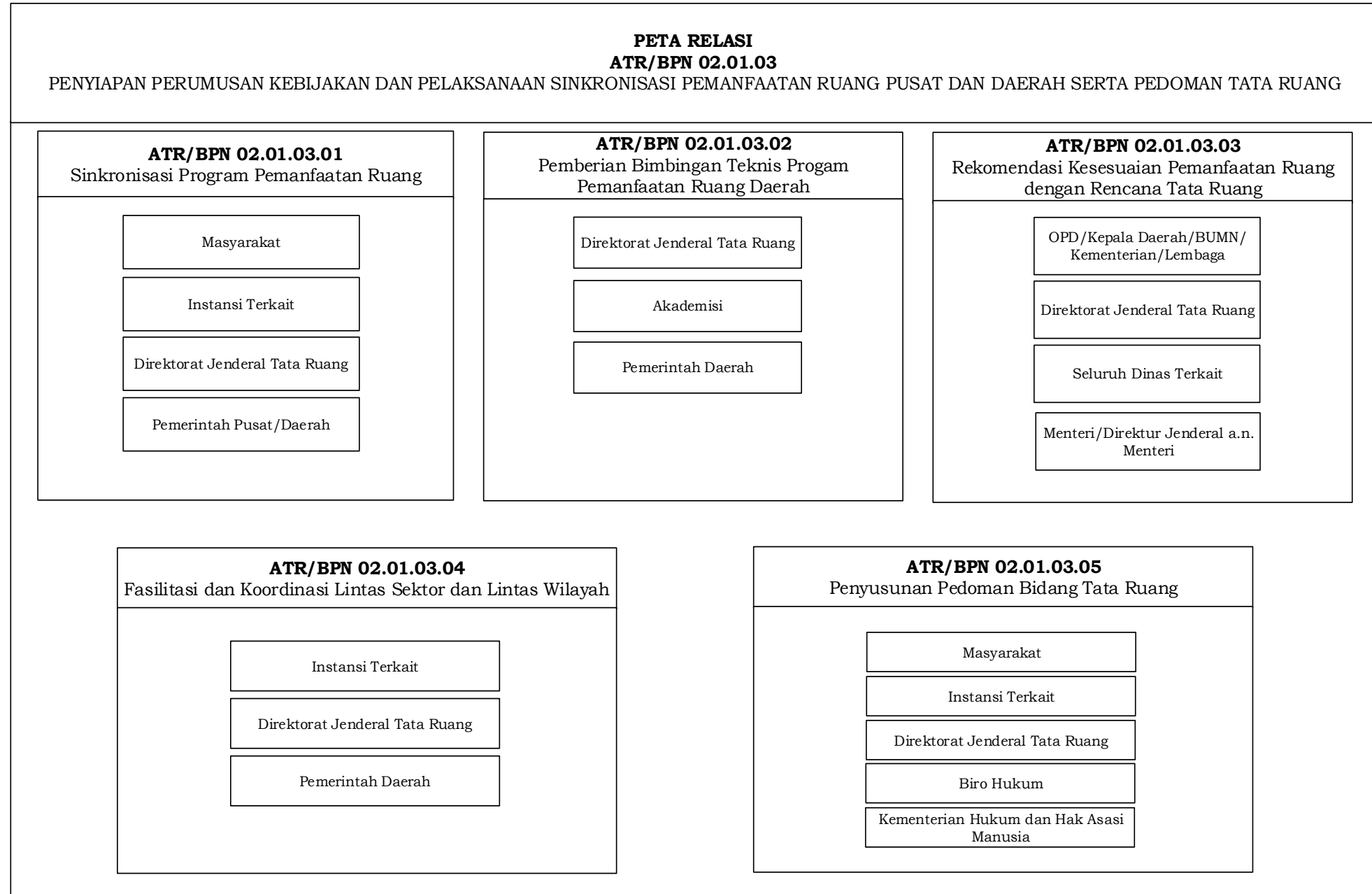
PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.02.01 PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK						
Instansi Terkait						
OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Mengikuti Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang		Melakukan Konsultasi Perencanaan Tata Ruang	Menyusun Materi Teknis Rencana Tata Ruang		
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Menyiapkan Konsep Materi Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang	Melaksanakan Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang	Mengasistensi Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang	Melakukan Evaluasi Awal Substansi Perencanaan Tata Ruang	Menyiapkan Materi Pendampingan Perencanaan Tata Ruang	Melakukan Pendampingan Perencanaan Tata Ruang

<p align="center">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.02.02 PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK</p>													
Masyarakat													Peraturan Daerah RTR
Instansi Terkait	Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer)												Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang	Memberikan masukan terhadap Konsep Rencana		Mendampingi Proses Konsultasi Peta		Mengajukan Permohonan Validasi Peta	Mengajukan Permohonan Rekomendasi Gubernur	Melakukan pembahasan TKPRD	Mendampingi Proses Pembahasan Lintas Sektor		Membahas Raperda			
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Mengolah dan menganalisis data	Menyusun Konsep Rencana	Menyusun Materi teknis RTR, Peta, KLHS, dan <i>draft</i> Raperda	Melakukan Konsultasi Peta	Mengevaluasi Hasil Penyusunan Materi Teknis RTR, Peta, KLHS, dan <i>Draf</i> Raperda	Mendampingi Proses Validasi Peta dan KLHS	Mendampingi Proses Pengajuan Rekomendasi Gubernur	Mendampingi Proses Pembahasan TKPRD	Melakukan pembahasan lintas sektor	Melakukan Proses Persetujuan Substansi	Memberikan Persetujuan Substansi	Menyusun Raperda	
DPRD													Memberikan Keputusan
Badan Informasi Geospasial				Mengasistansi Penyusunan Peta				Memvalidasi Peta					
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan									Memvalidasi KLHS				
Gubernur													Memberikan Rekomendasi



3.2.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

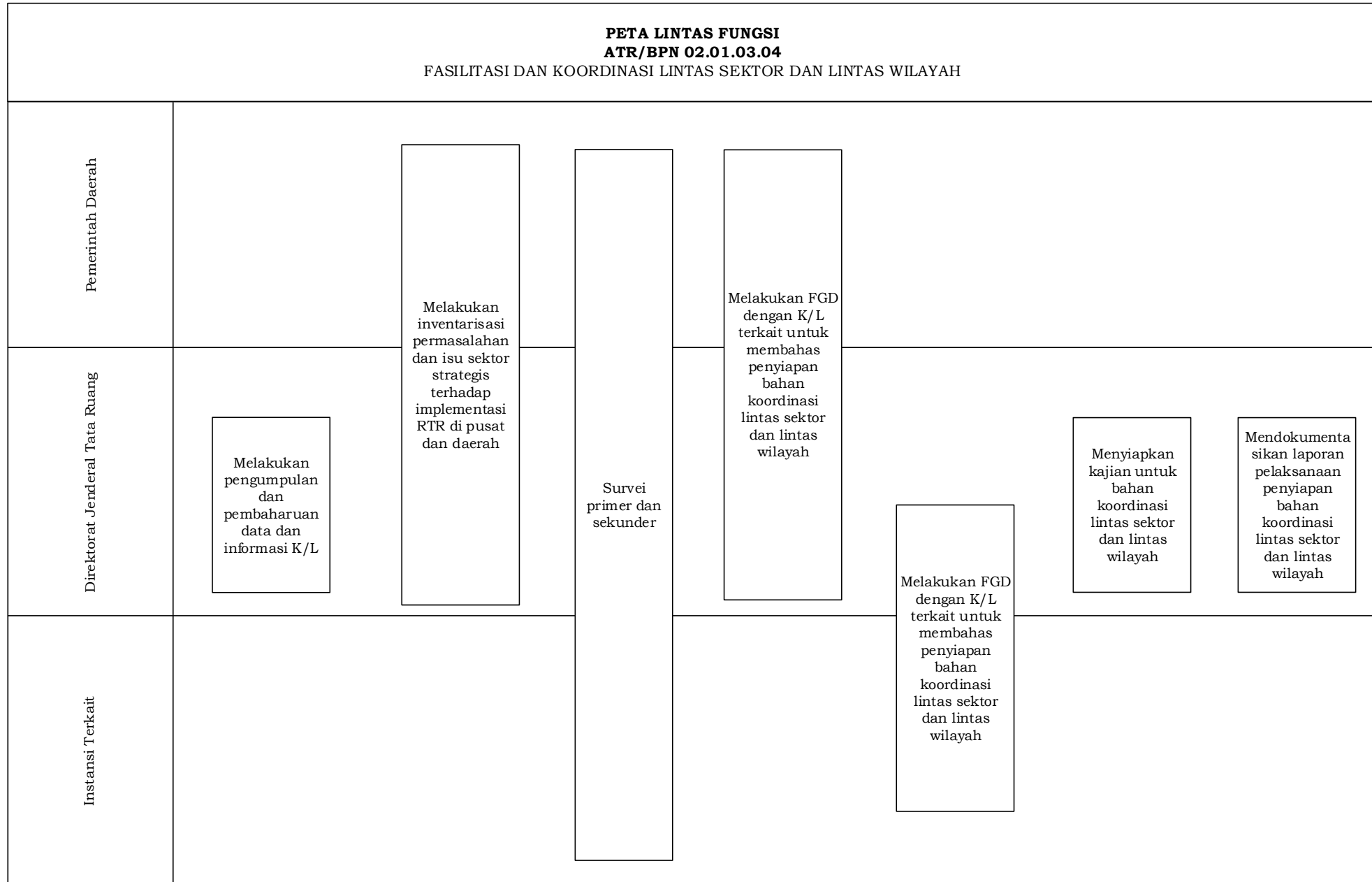




PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.01 SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	
Masyarakat	
Instansi Terkait	
Direktorat Jenderal Tata Ruang	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengidentifikasi arahan spasial</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Melakukan inventarisasi program investasi pemanfaatan ruang</div> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Merumuskan rencana terpadu</div> </div> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Melakukan sinkronisasi keterpaduan program</div> </div> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Menyiapkan rancangan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah (PRIMA BARATA)</div> </div> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Melakukan penyepakatan rancangan PRIMA BARATA</div> </div> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Melakukan penilaian keprioritasan program T+2 (aspek perencanaan, kesiapan program dan pelaksanaan program)</div> </div> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Melakukan penyepakatan rancangan program pemanfaatan ruang tahunan (PRITA BARATA)</div> </div> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Melakukan penajaman PRITA BARATA dengan K/L</div> </div> </div>
Pemerintah Pusat / Daerah	

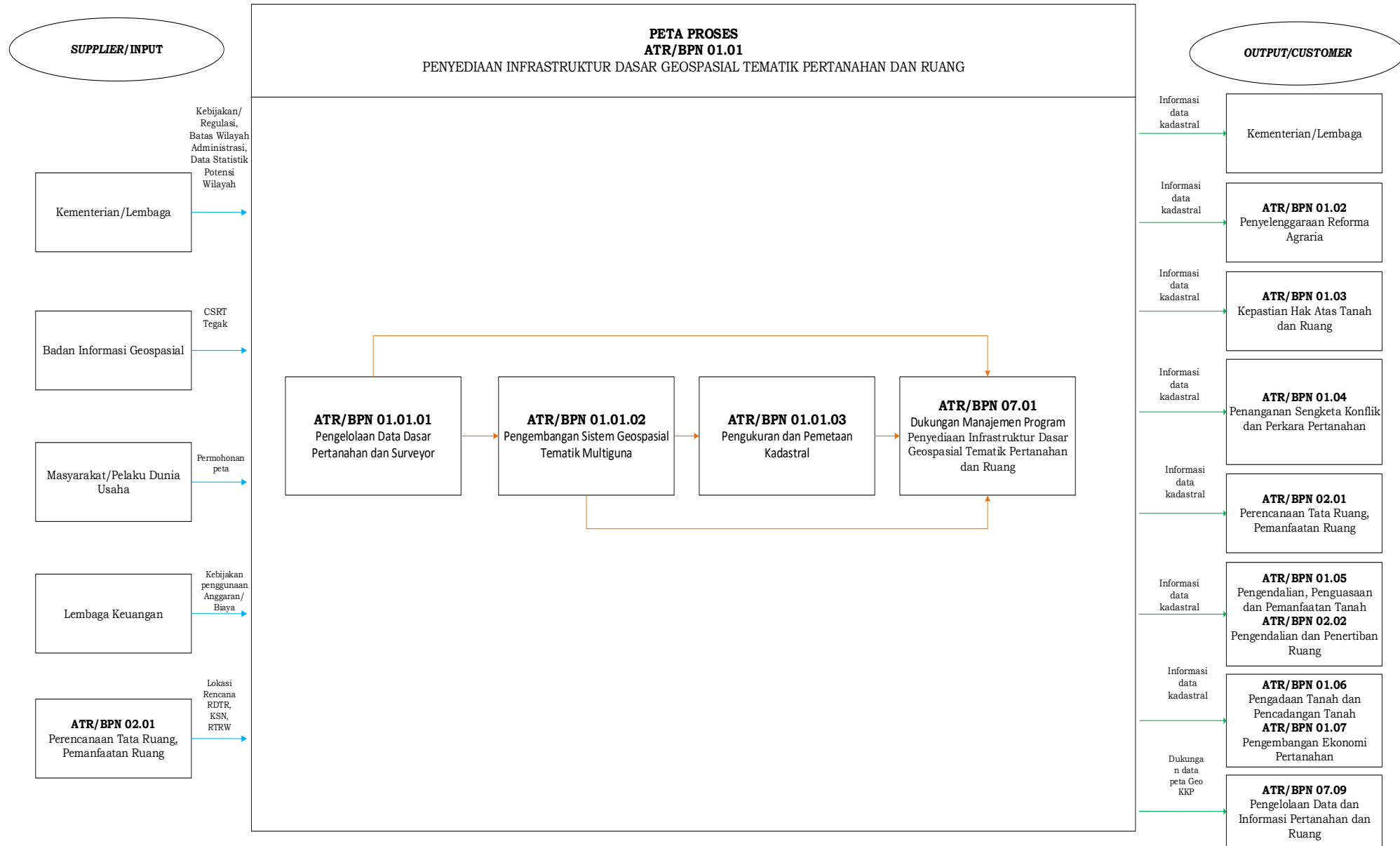
PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.02 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PROGAM PEMANFAATAN RUANG DAERAH							
Instansi Terkait							
Direktorat Jenderal Tata Ruang	<table border="1"><tr><td>Identifikasi NSPK <i>issue</i> permasalahan berdasarkan kebutuhan dan dinamika daerah</td><td>Menentukan <i>list</i> kebutuhan data primer dan sekunder</td><td>Menyusun materi teknis NSPK</td><td>Melakukan pembahasan penajaman muatan materi teknis Bimtek</td><td>Pelaksanaan Bimtek</td><td>Laporan Pelaksanaan Bimtek</td></tr></table>	Identifikasi NSPK <i>issue</i> permasalahan berdasarkan kebutuhan dan dinamika daerah	Menentukan <i>list</i> kebutuhan data primer dan sekunder	Menyusun materi teknis NSPK	Melakukan pembahasan penajaman muatan materi teknis Bimtek	Pelaksanaan Bimtek	Laporan Pelaksanaan Bimtek
Identifikasi NSPK <i>issue</i> permasalahan berdasarkan kebutuhan dan dinamika daerah	Menentukan <i>list</i> kebutuhan data primer dan sekunder	Menyusun materi teknis NSPK	Melakukan pembahasan penajaman muatan materi teknis Bimtek	Pelaksanaan Bimtek	Laporan Pelaksanaan Bimtek		
Akademisi							

<p align="center">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.03 REKOMENDASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA TATA RUANG</p>						
OPD/Kepala Daerah/BUMN/ Kementerian/Lembaga	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Mengirimkan Surat permohonan untuk Rekomendasi Tata Ruang </div>					
Direktorat Jenderal Tata Ruang	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Menerima dan menghubungi pemohon rekomendasi Tata Ruang </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Mengumpulkan kebutuhan data untuk kajian pada titik lokasi wilayah yang akan ditindaklanjuti </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Membuat Kajian terkait wilayah terkait </div>	Rapat Pembahasan dan/atau survei	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Berita Acara Kesepakatan/Notulensi Rapat </div>
Menteri/Direktur Jenderal a.n. Menteri	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Menetapkan rekomendasi/tanggapan </div>					

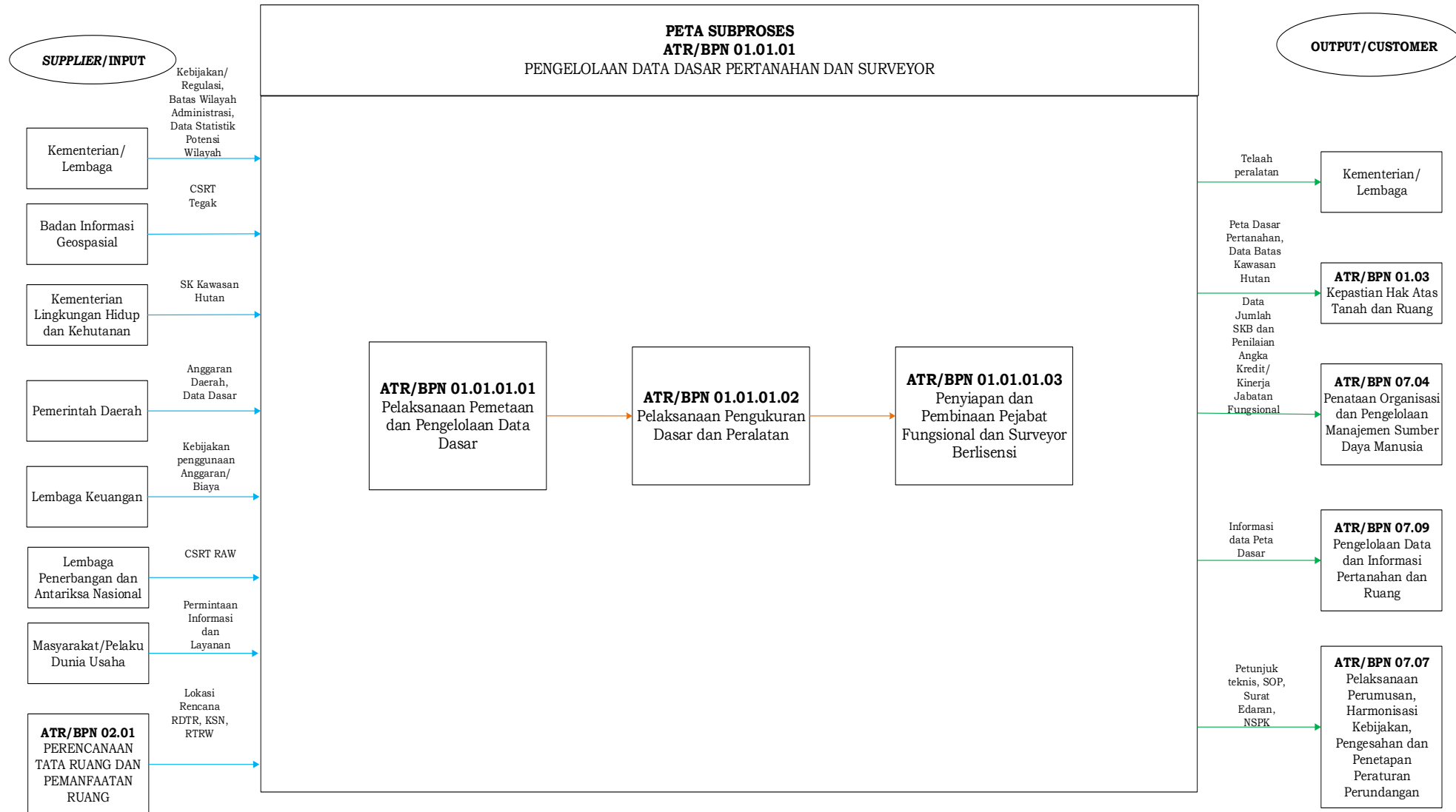


<p align="center">PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.05 PENYUSUNAN PEDOMAN BIDANG TATA RUANG</p>									
Pemerintah Daerah									
Instansi Terkait	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) </div>								
Direktorat Jenderal Tata Ruang	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Mengidentifikasi NSPK berdasarkan <i>family tree</i> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Mengidentifikasi NSPK berdasarkan kebutuhan dan dinamika di daerah </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Menentukan NSPK prioritas </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Menentukan <i>list</i> kebutuhan data primer dan sekunder </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Mengolah dan menganalisis data terkait penyusunan NSPK </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Menyusun materi teknis NSPK </div>	Melakukan pembahasan penajaman muatan materi teknis	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Menyusun Rapermen </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan </div>
AKADEMISI									

3.3. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang



3.3.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan

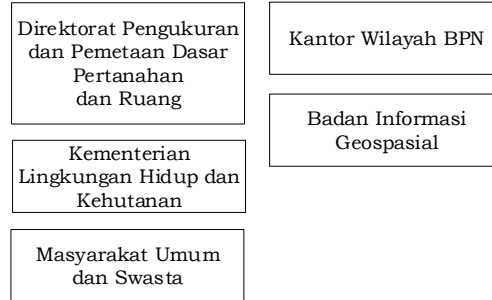


PETA RELASI
ATR/BPN 01.01.01
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA DASAR PERTANAHAN DAN SURVEYOR

ATR/BPN 01.01.01.01
Pelaksanaan Pemetaan dan Pengelolaan Data Dasar

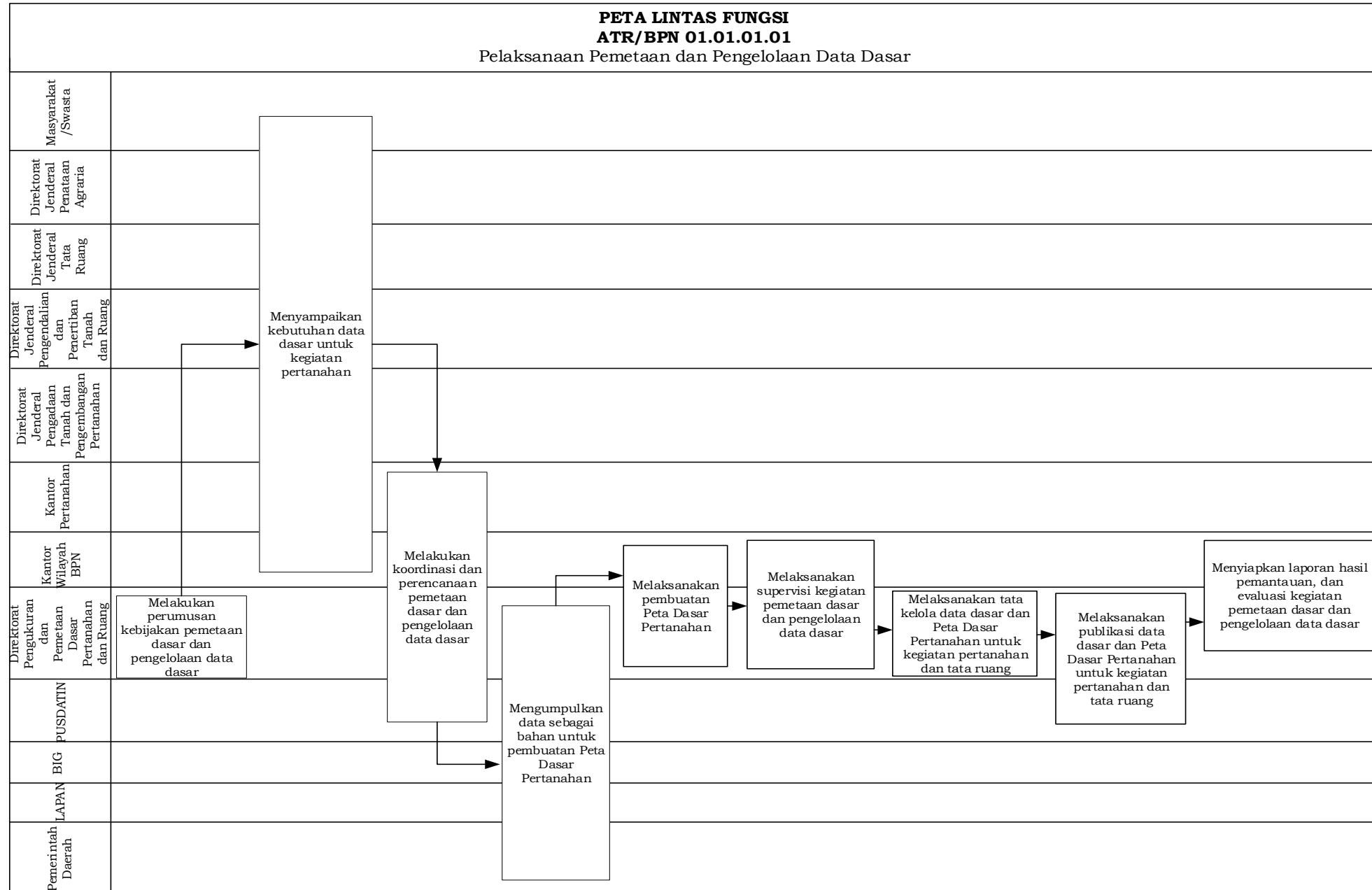


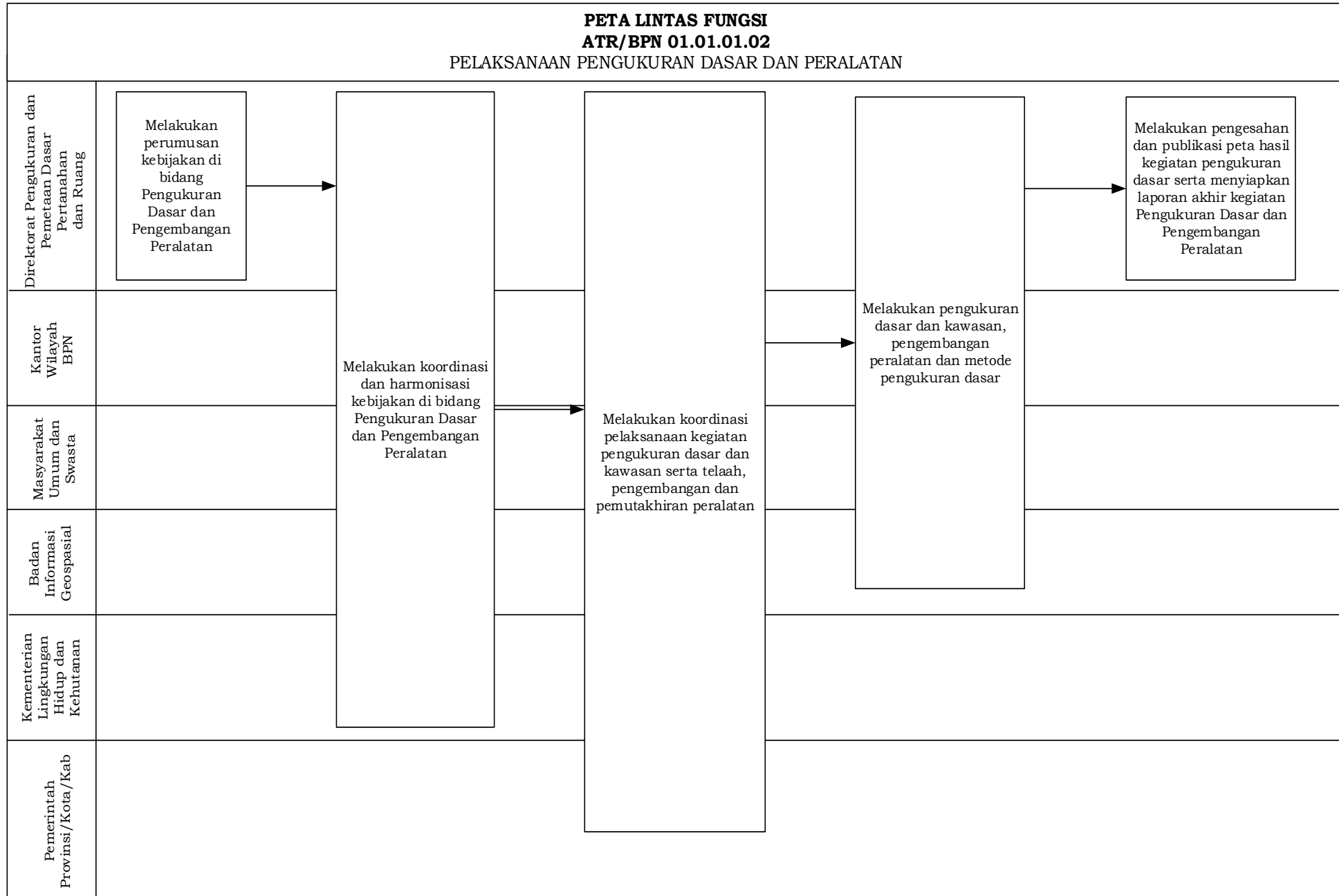
ATR/BPN 01.01.01.02
Pelaksanaan Pengukuran Dasar dan Peralatan

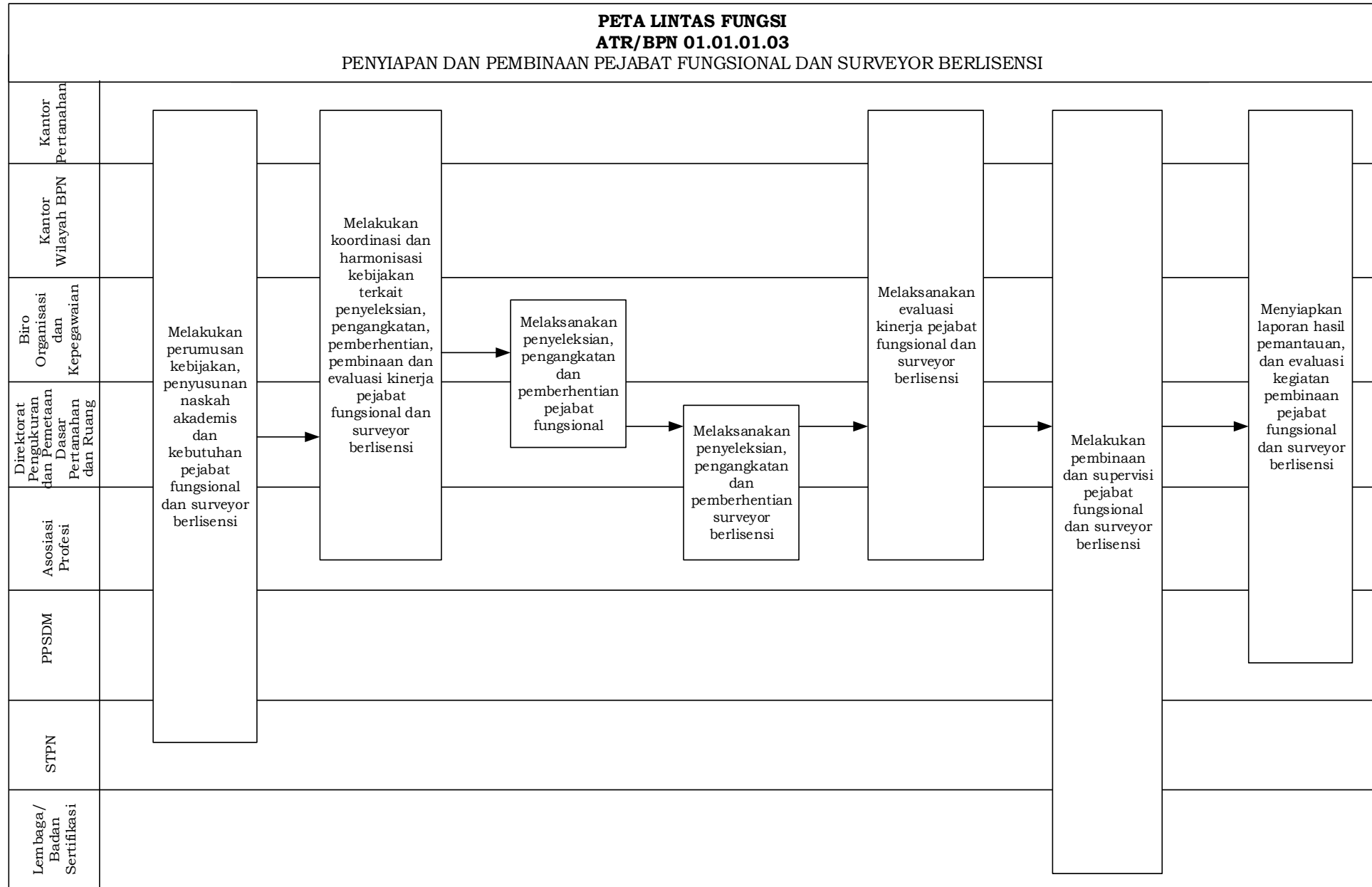


ATR/BPN 01.01.01.03
Penyiapan dan Pembinaan Pejabat Fungsional dan Surveyor Berlisensi

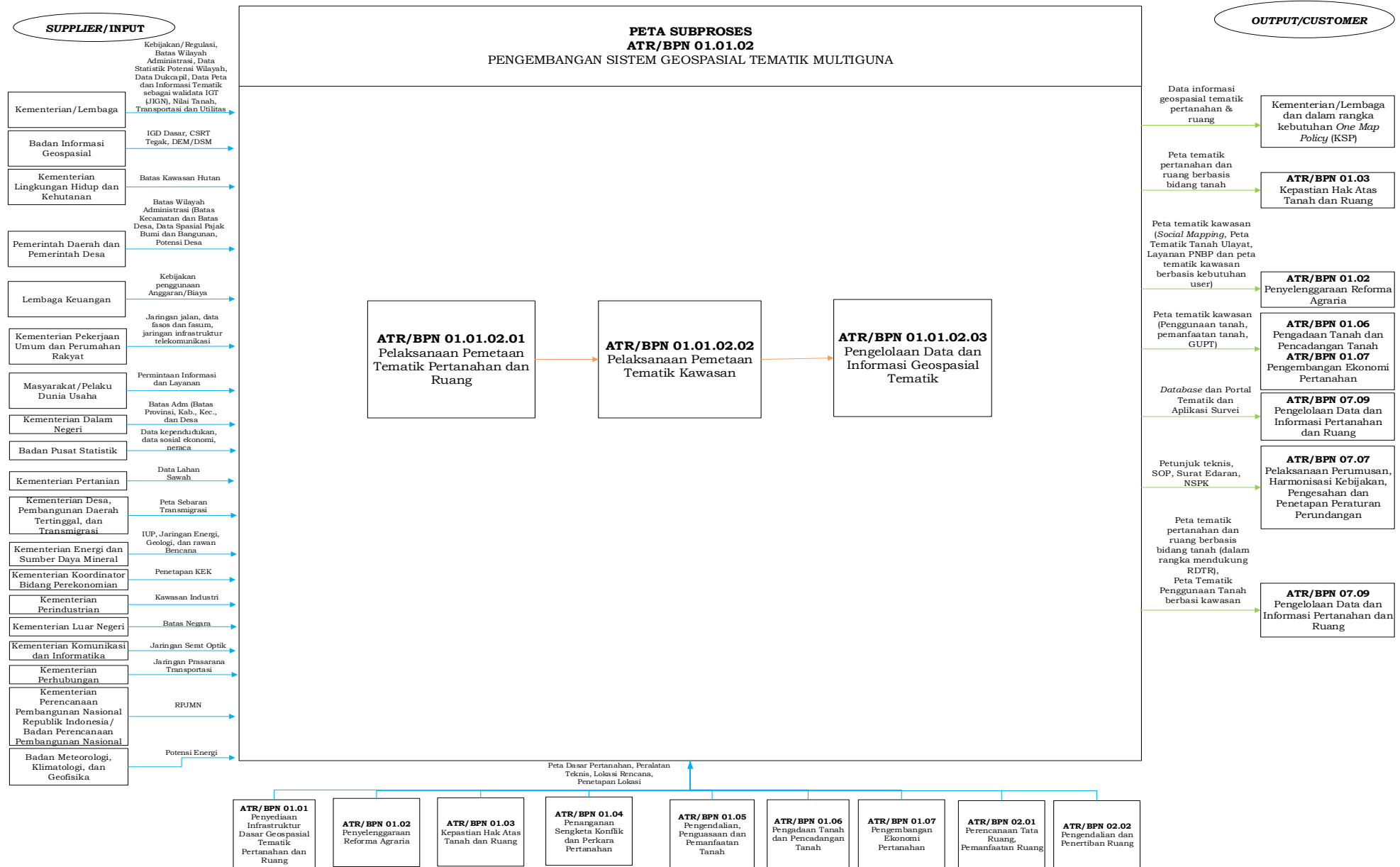








3.3.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik



PETA RELASI
ATR/BPN 01.01.02
 PENGEMBANGAN SISTEM GEOSPASIAL TEMATIK MULTIGUNA

ATR/BPN 01.01.02.01
 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang

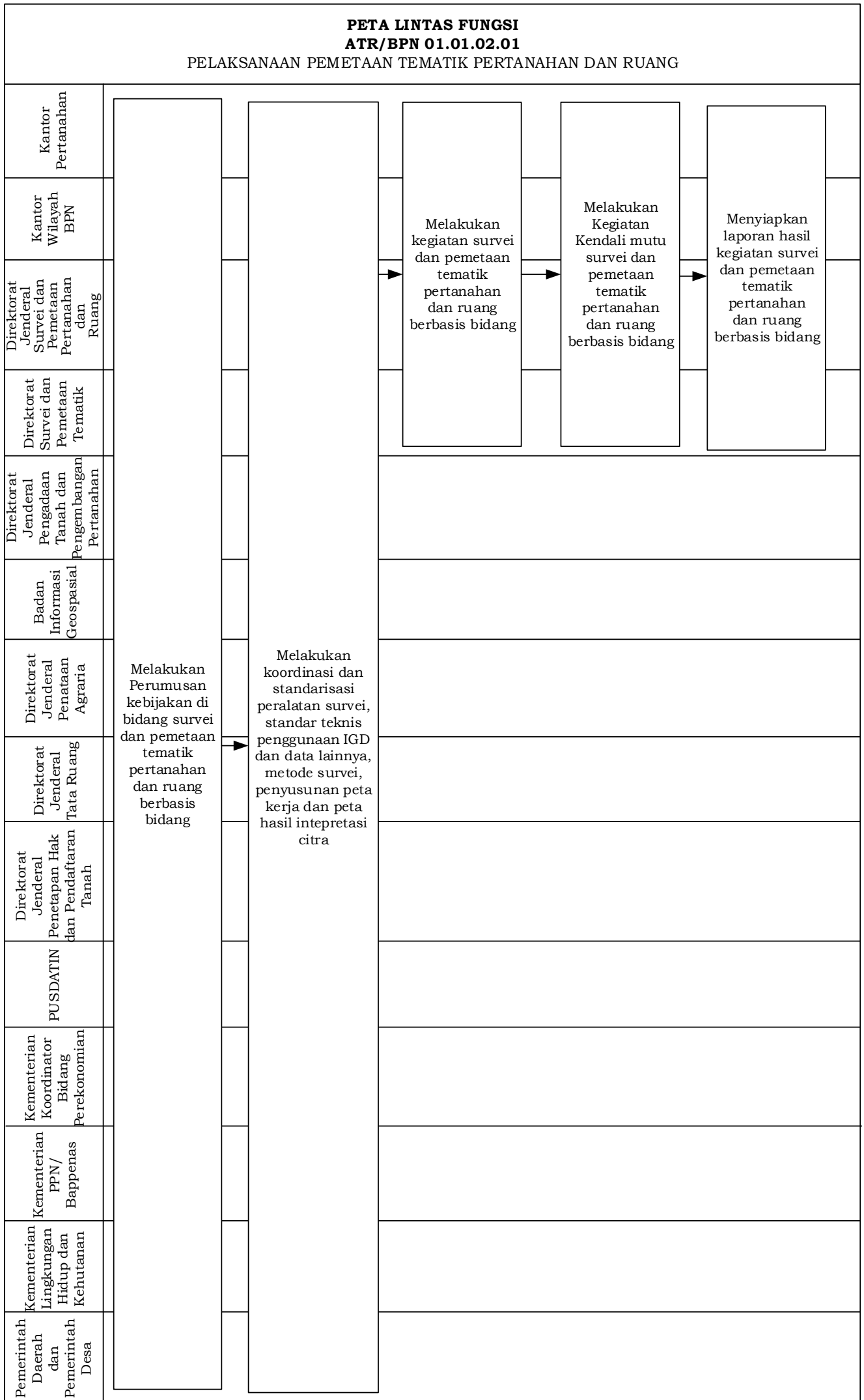
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Badan Informasi Geospasial
Kementerian PPN/ Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

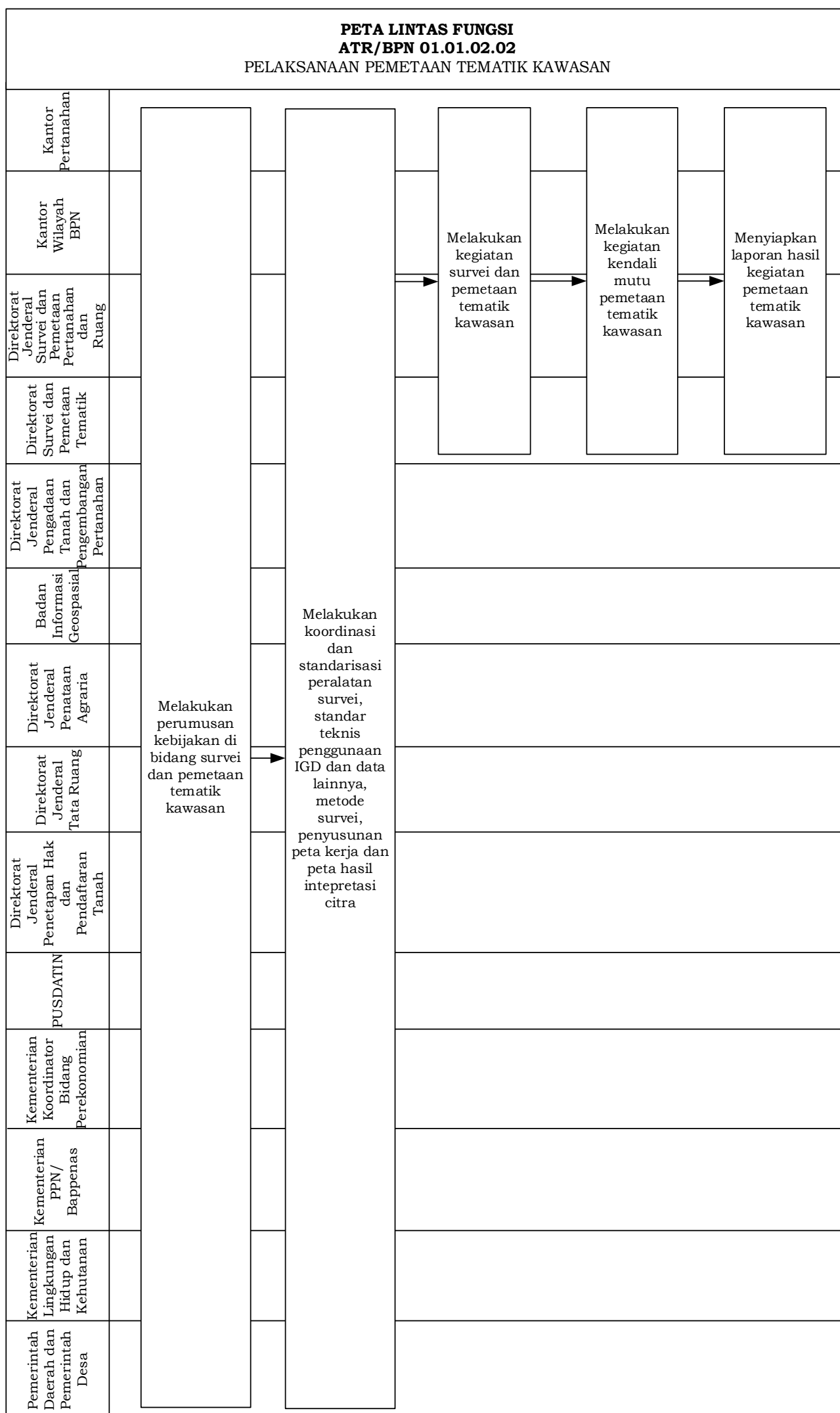
ATR/BPN 01.01.02.02
 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Kawasan

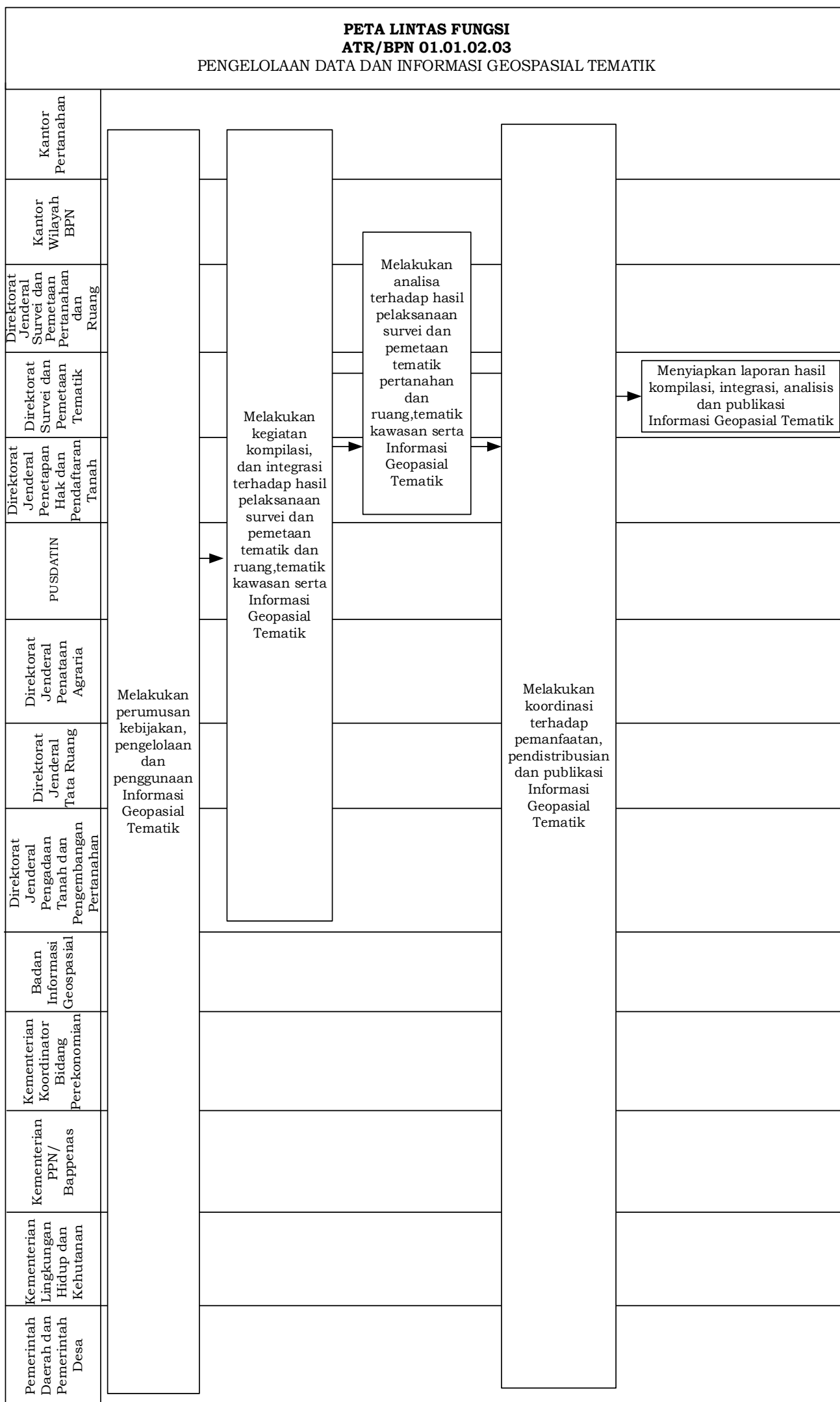
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Badan Informasi Geospasial
Kementerian PPN/ Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

ATR/BPN 01.01.02.03
 Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik

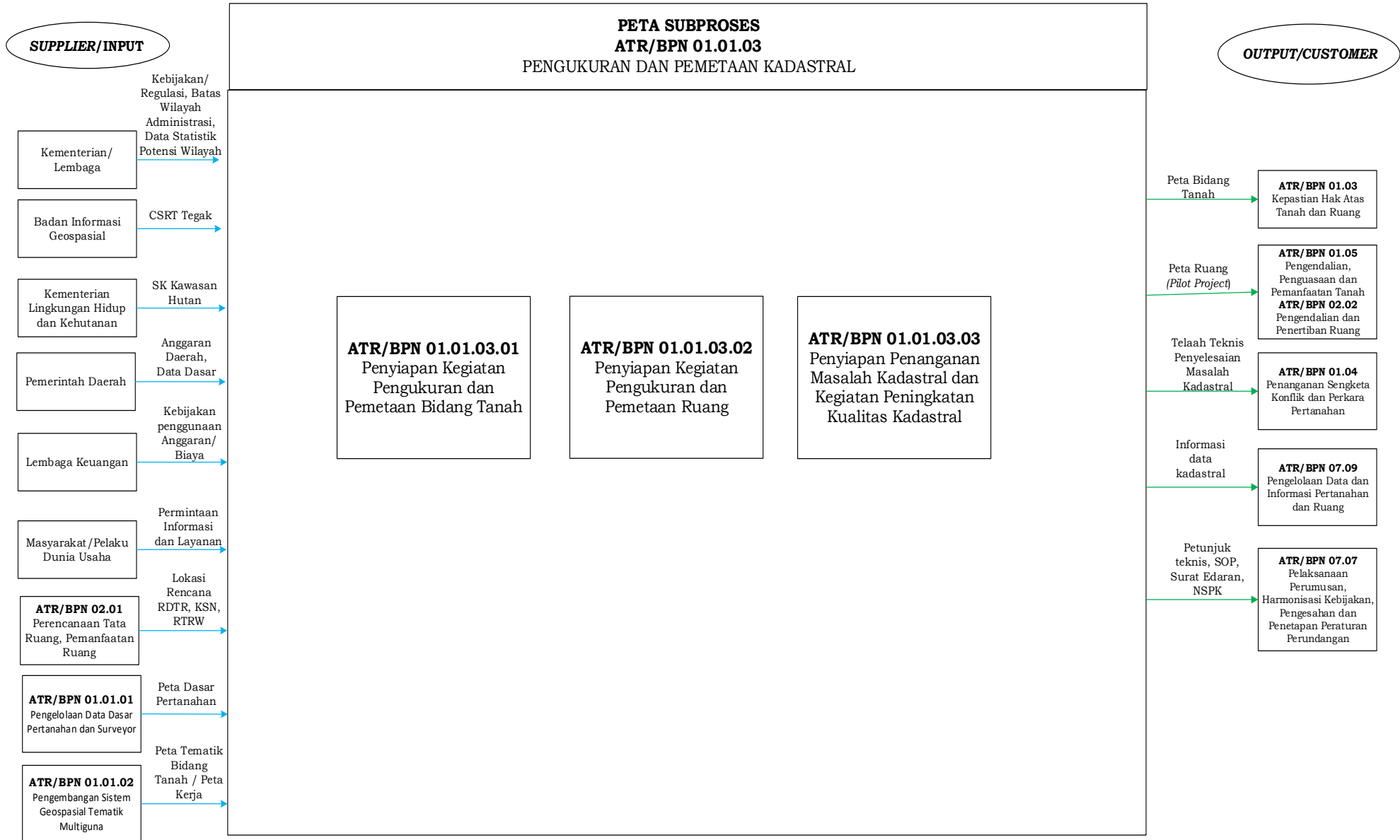
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Badan Informasi Geospasial
Kementerian PPN/ Bappenas	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa





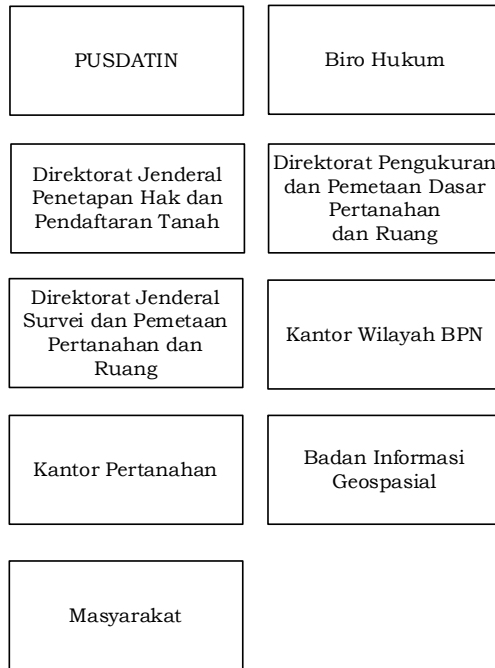


3.3.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

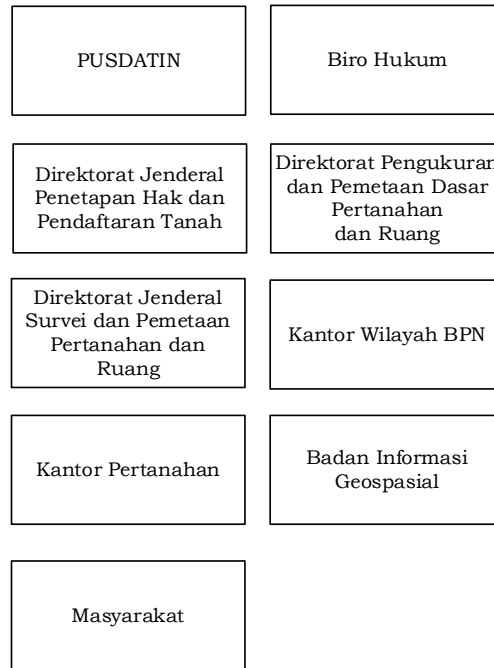


PETA RELASI
ATR/BPN 01.01.03
PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

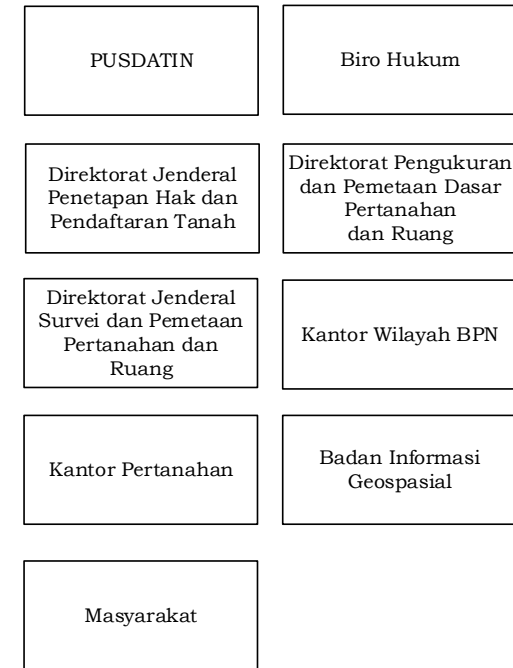
ATR/BPN 01.01.03.01
Penyiapan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan
Bidang Tanah

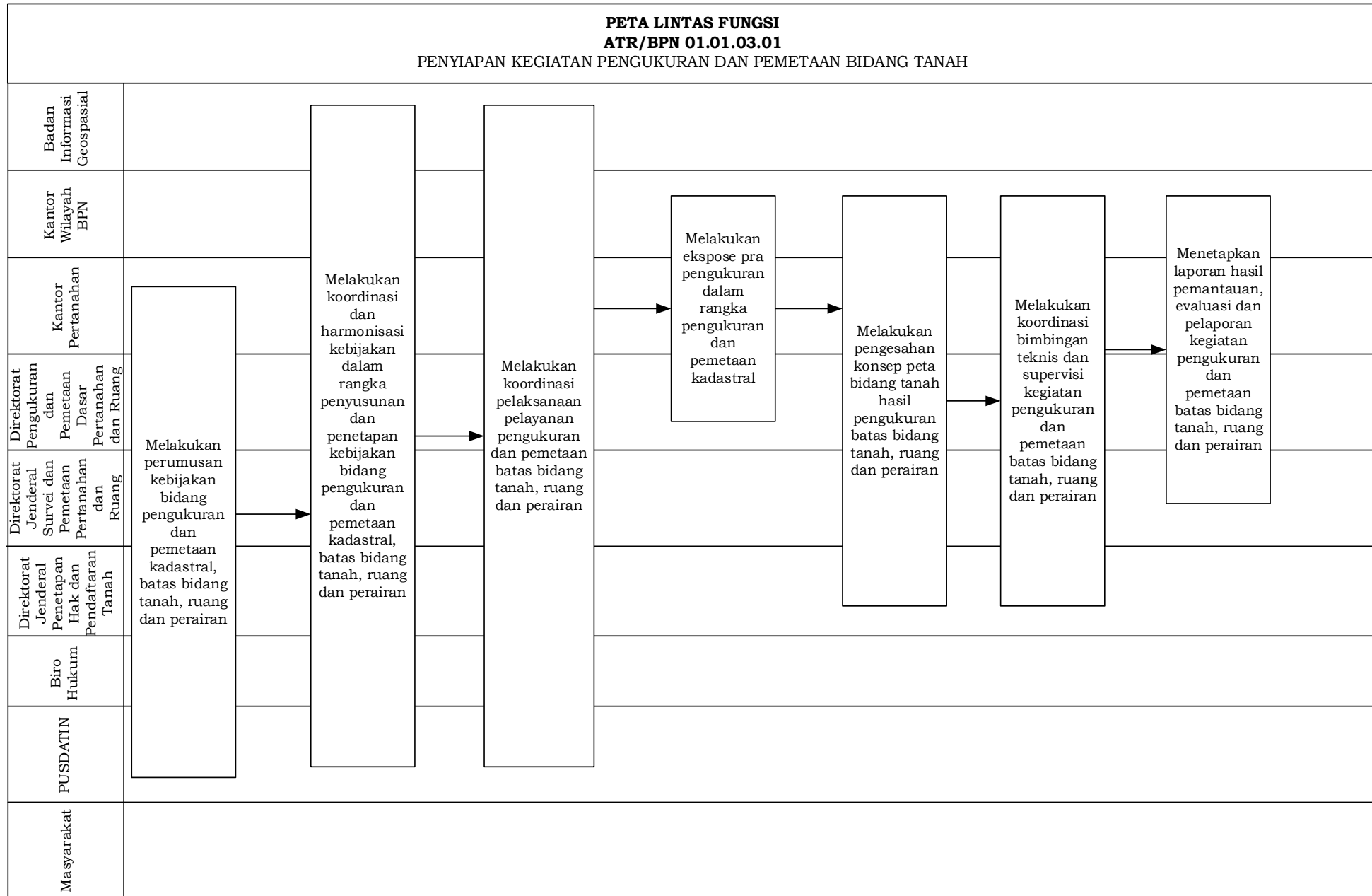


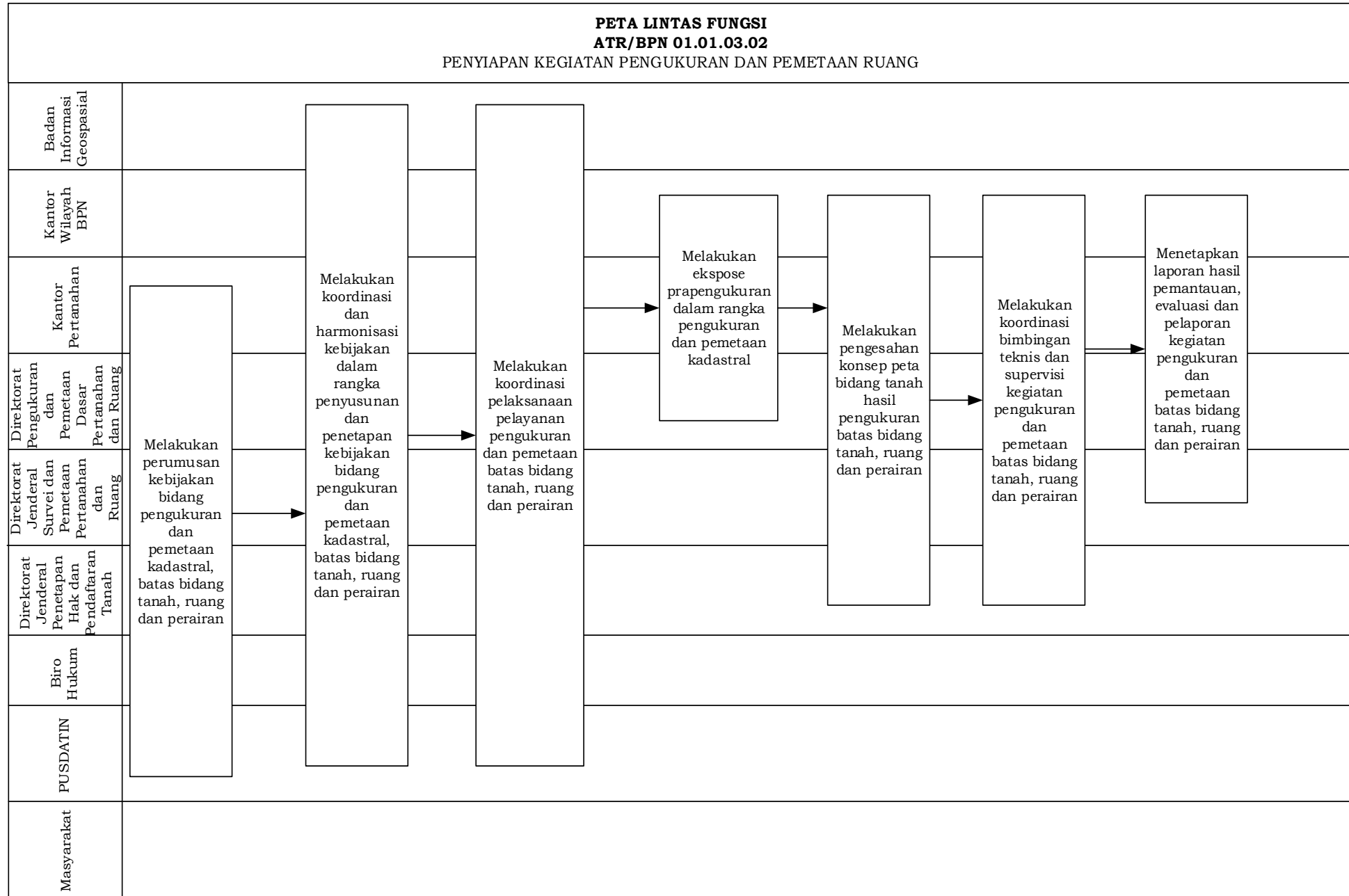
ATR/BPN 01.01.03.02
Penyiapan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan
Ruang

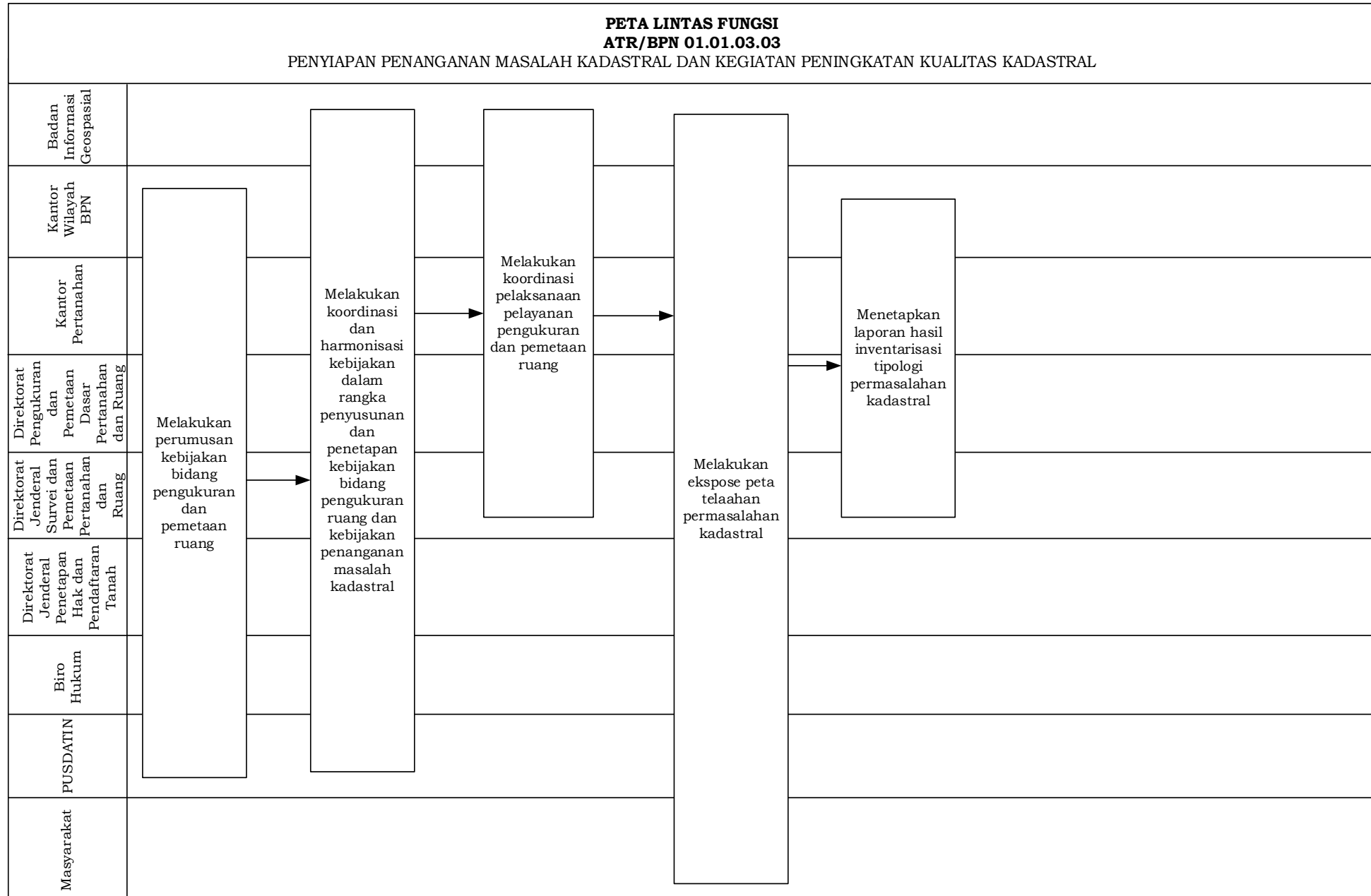


ATR/BPN 01.01.03.03
Penyiapan Penanganan Masalah Kadastral dan
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kadastral

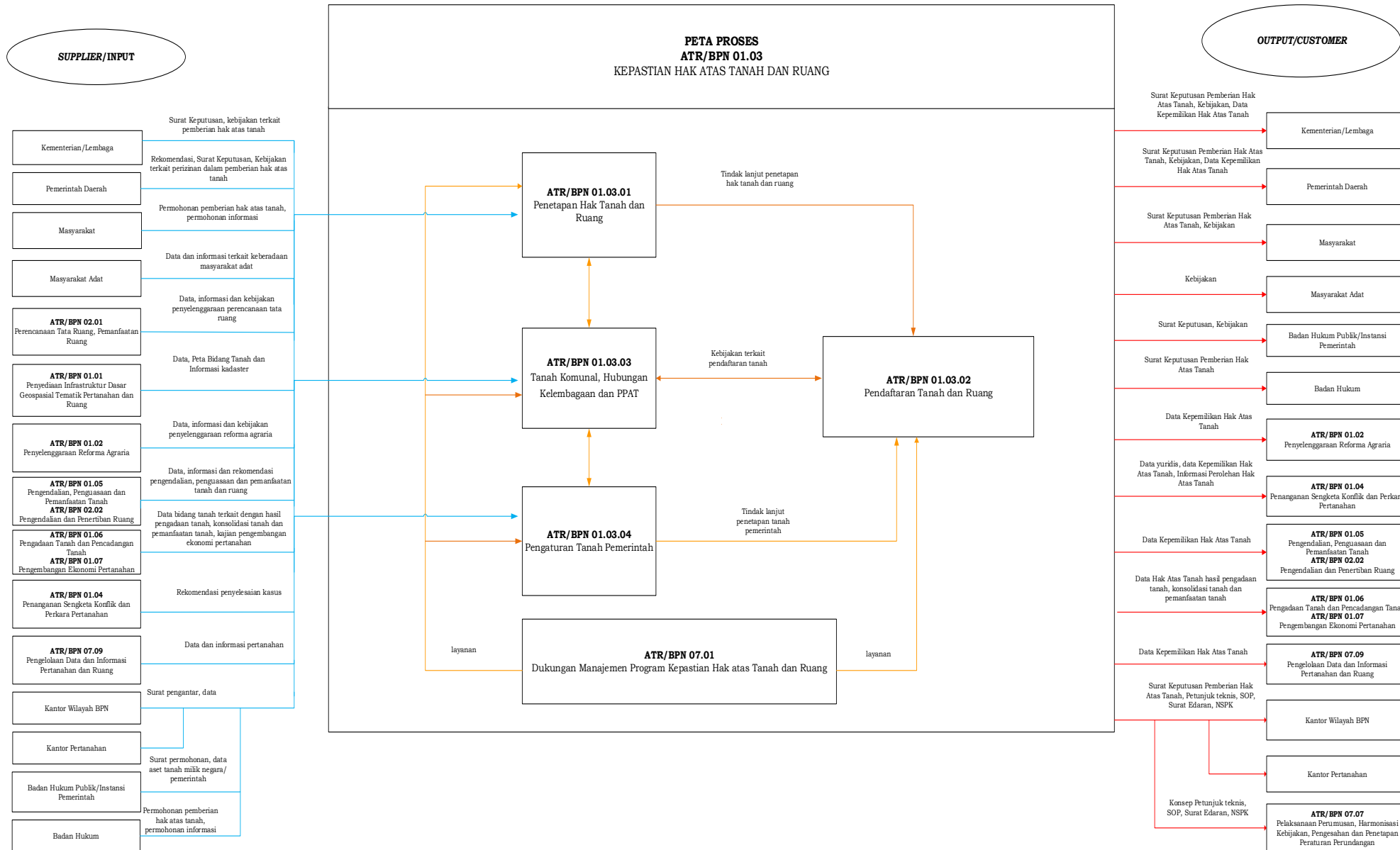




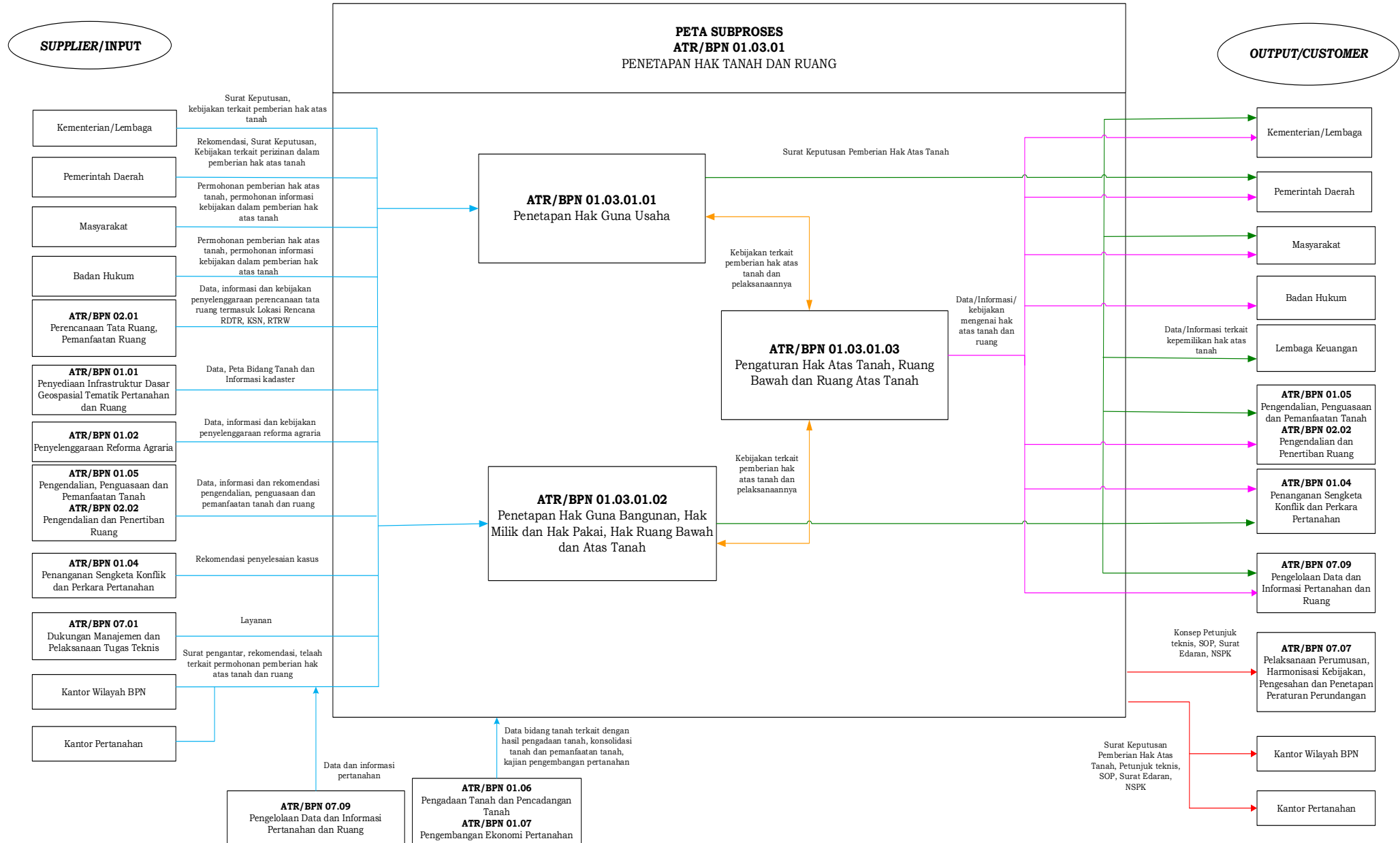




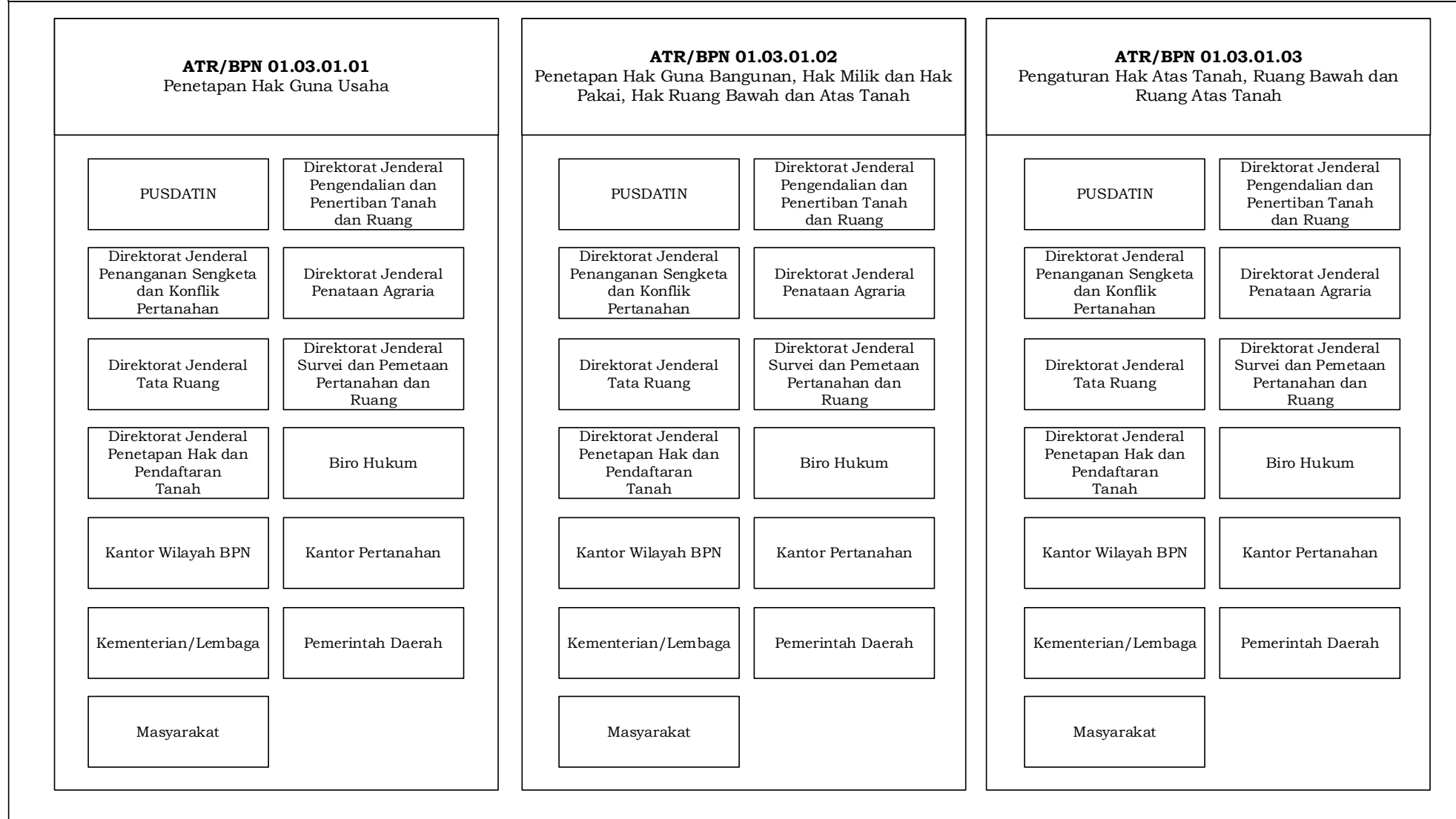
3.4. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

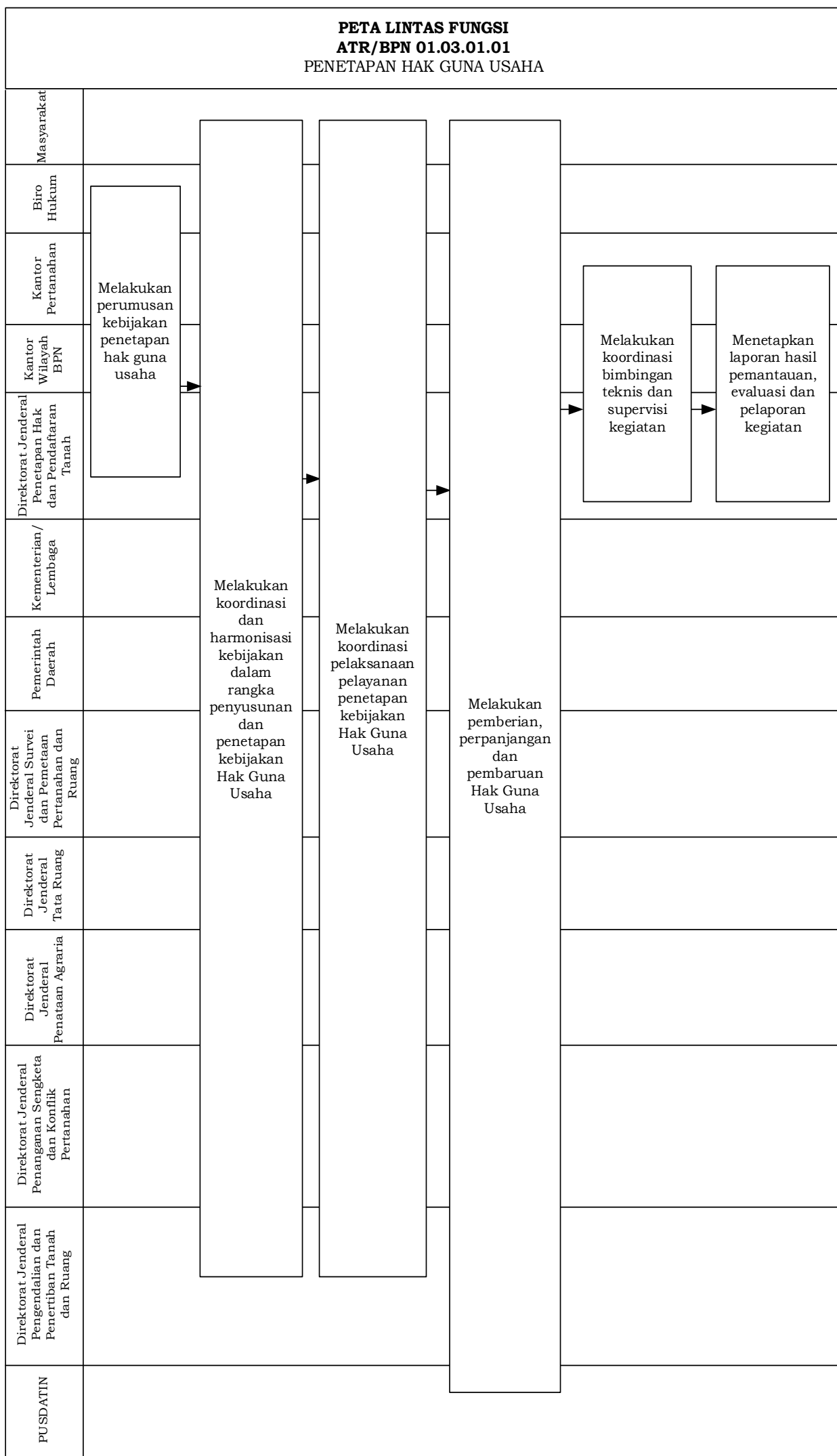


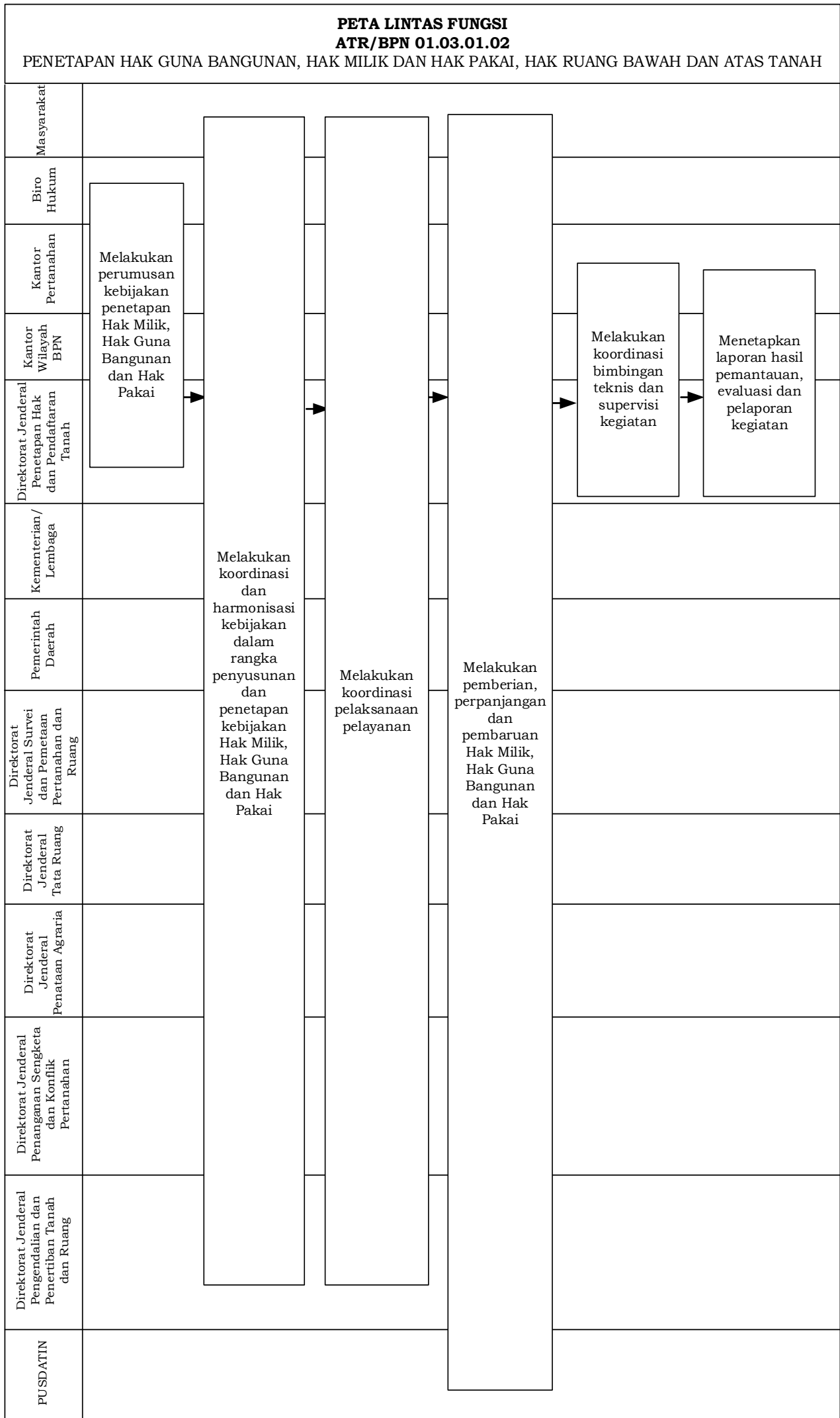
3.4.1. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang

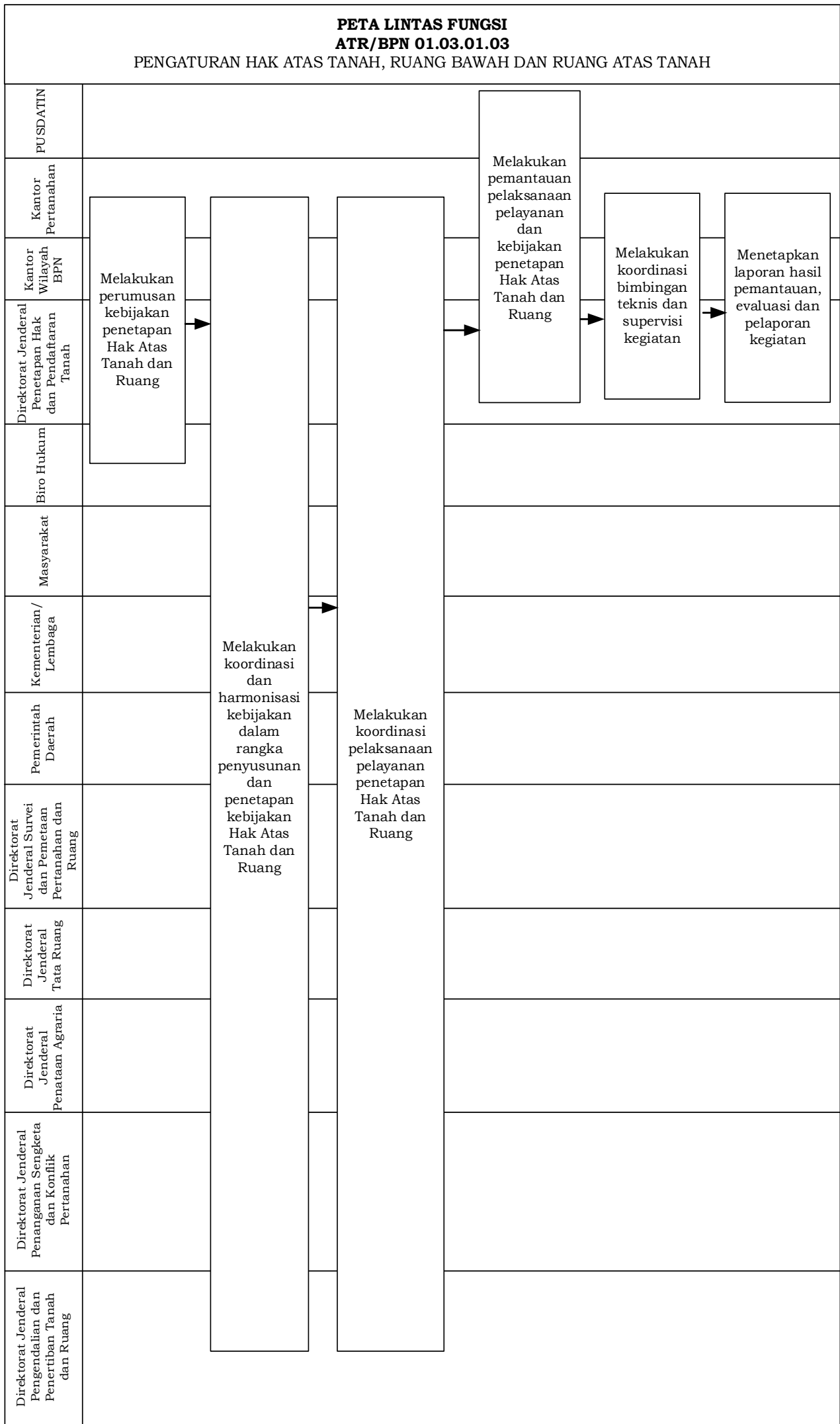


PETA RELASI
ATR/BPN 01.03.01
PENETAPAN HAK TANAH DAN RUANG

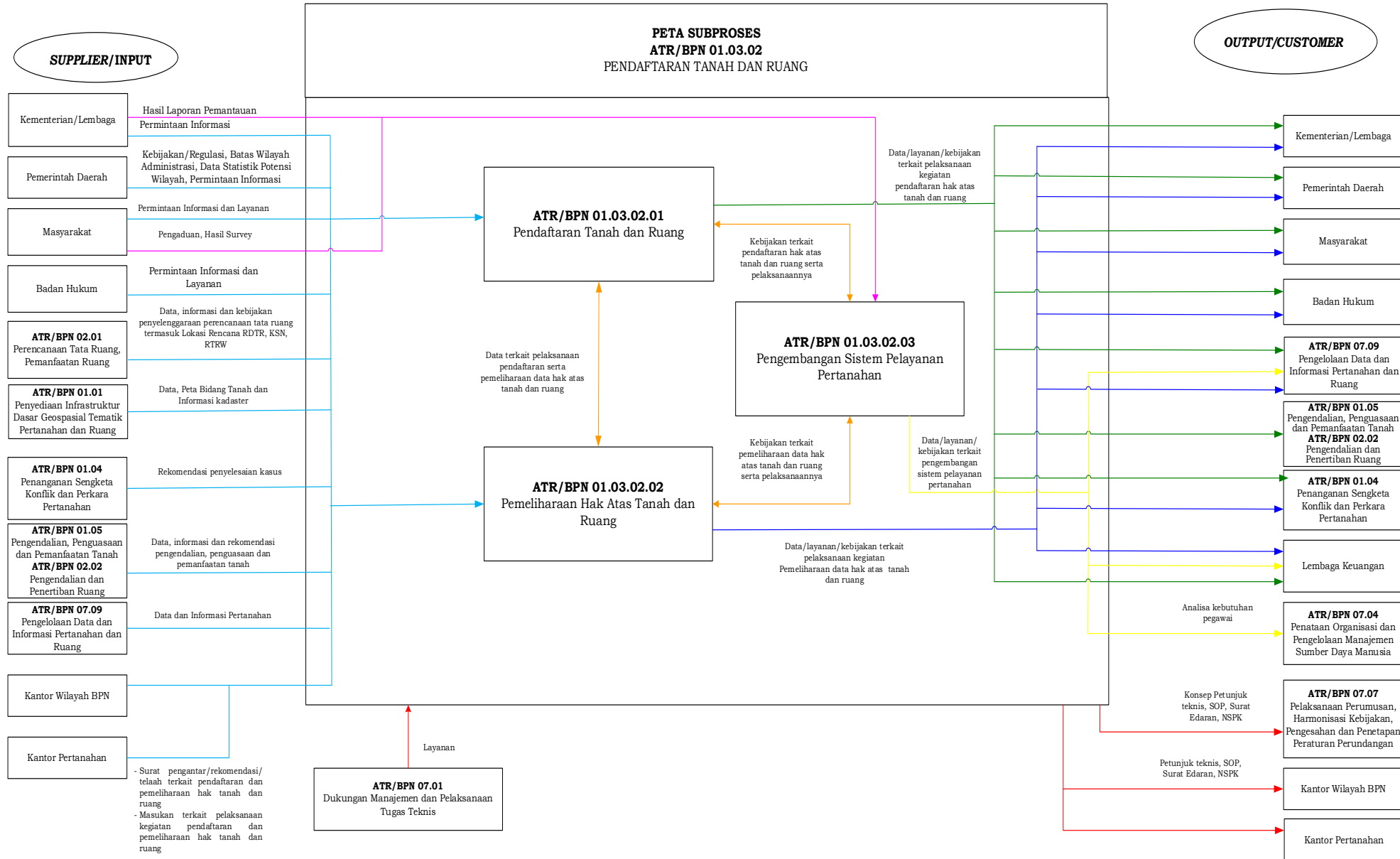




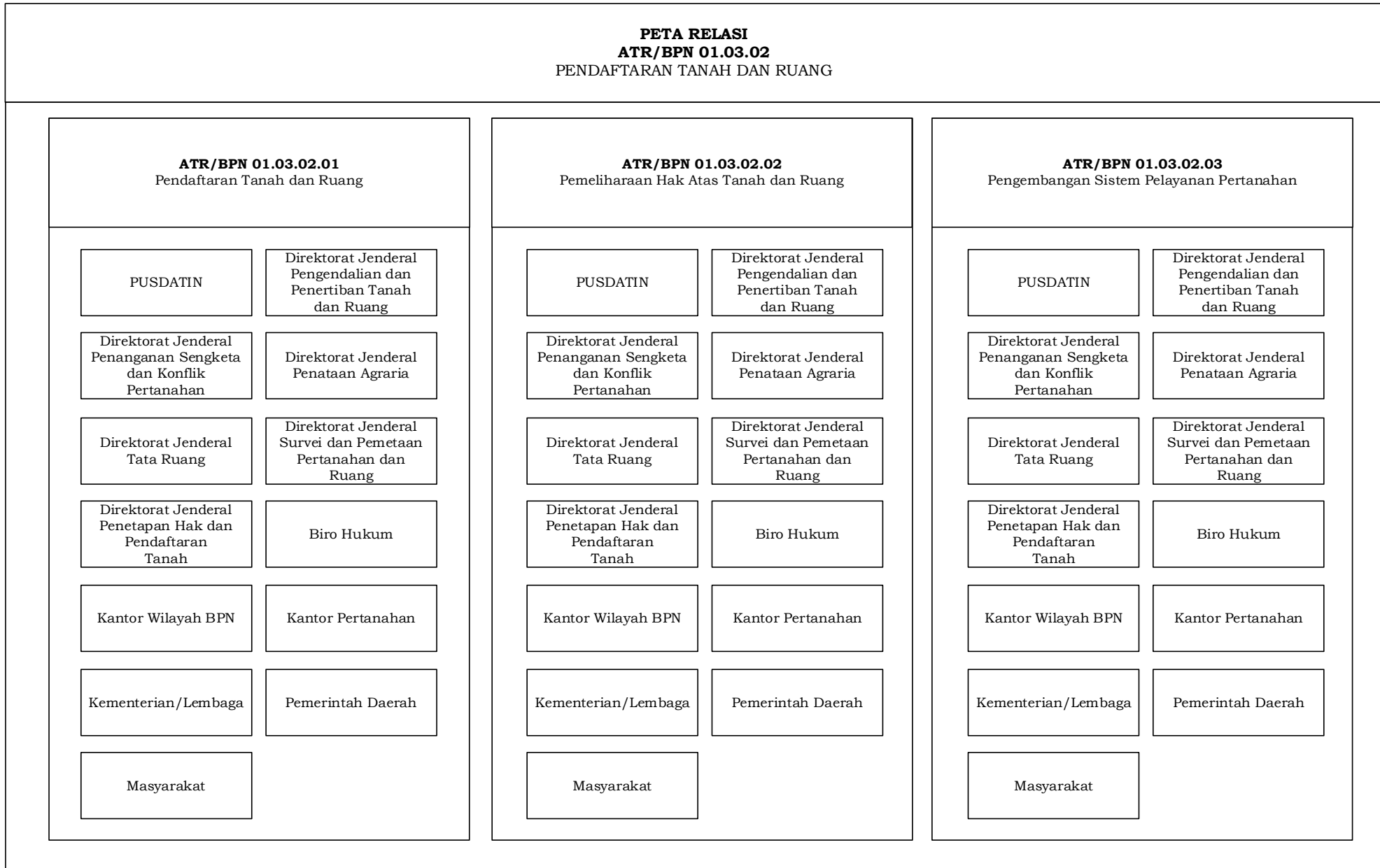


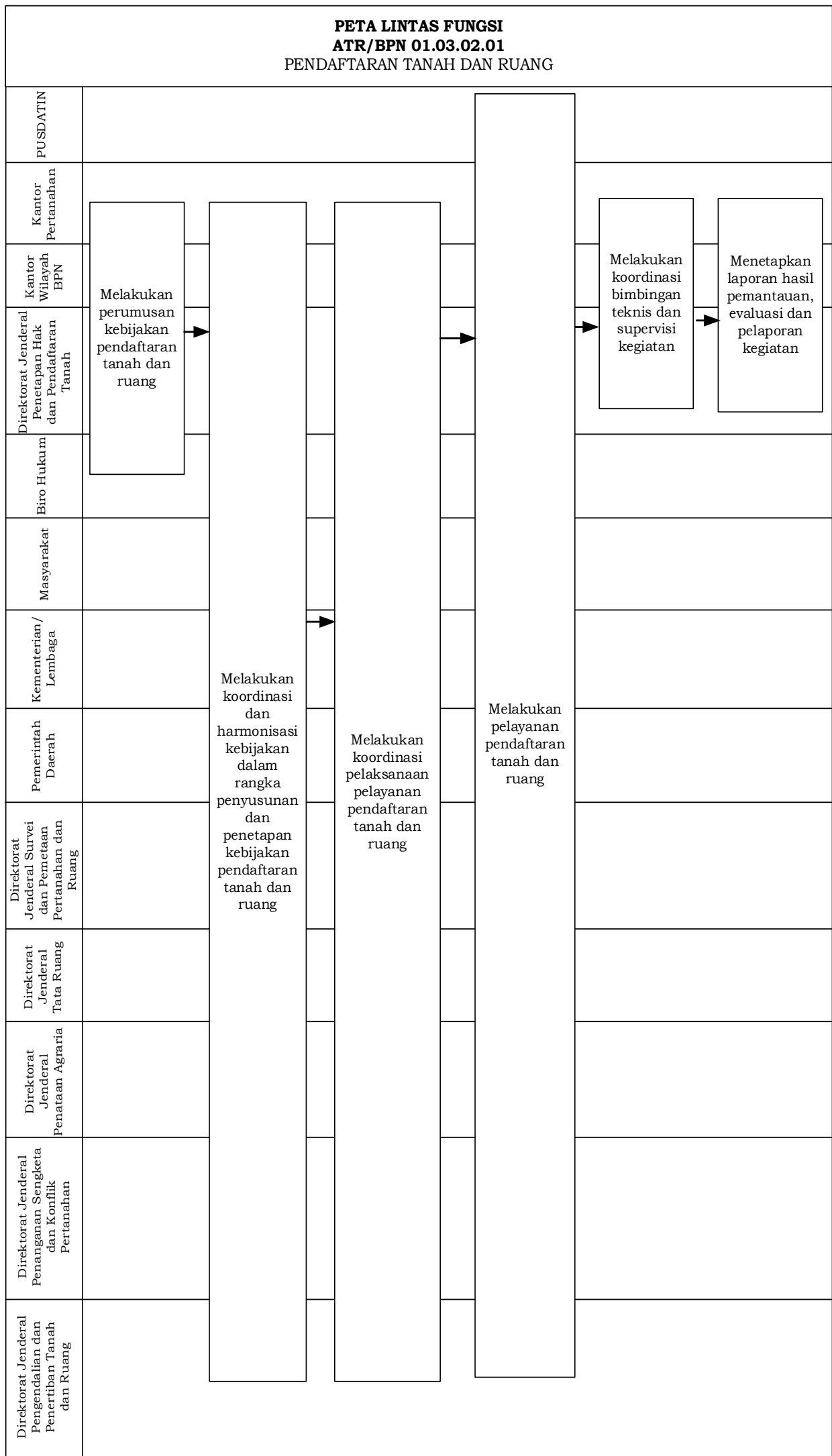


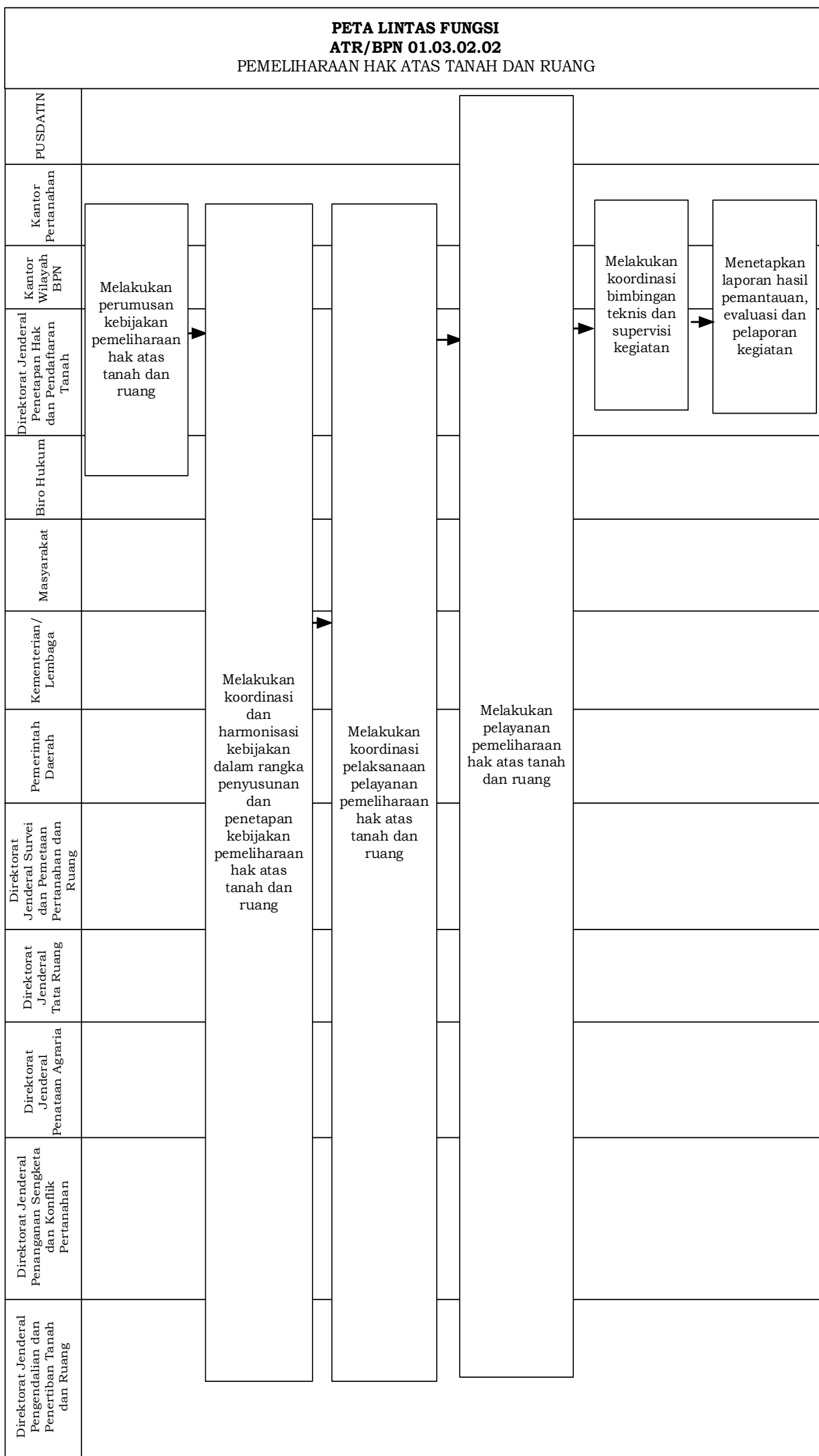
3.4.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang

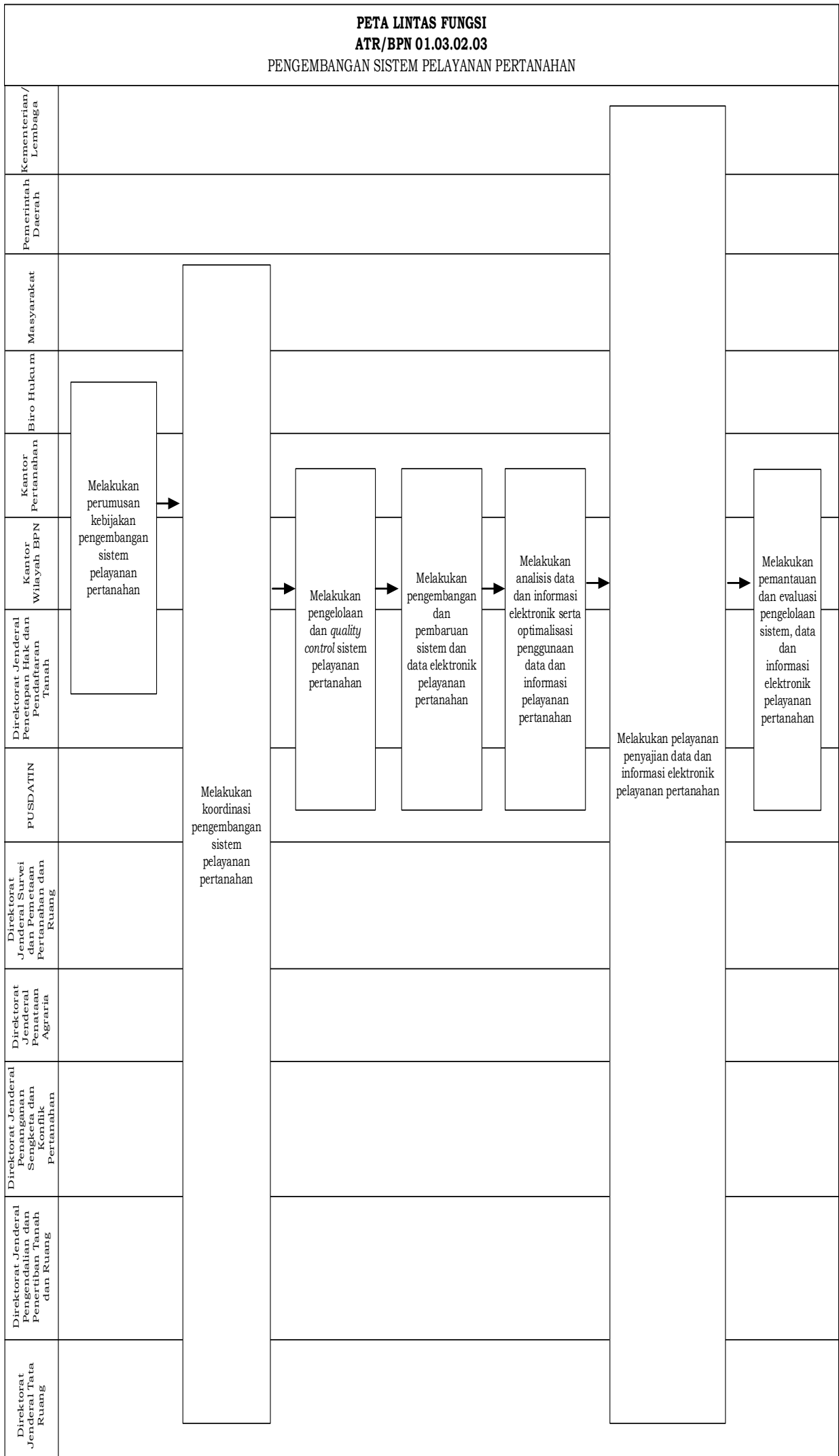


PETA RELASI
ATR/BPN 01.03.02
PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG

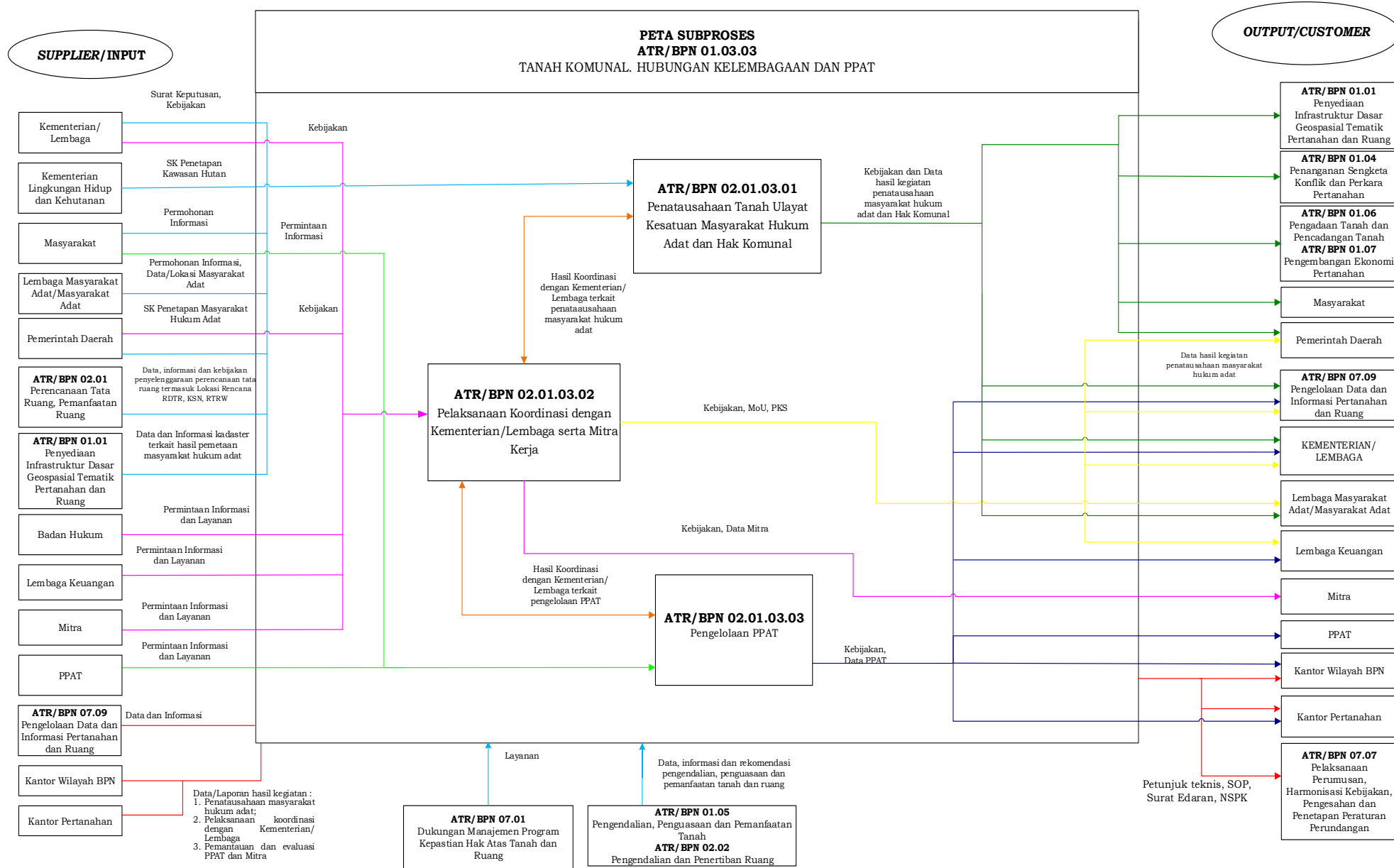








3.4.3. Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT



PETA RELASI
ATR/BPN 01.03.03
TANAH KOMUNAL. HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT

ATR/BPN 02.01.03.01
Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat dan Hak Komunal

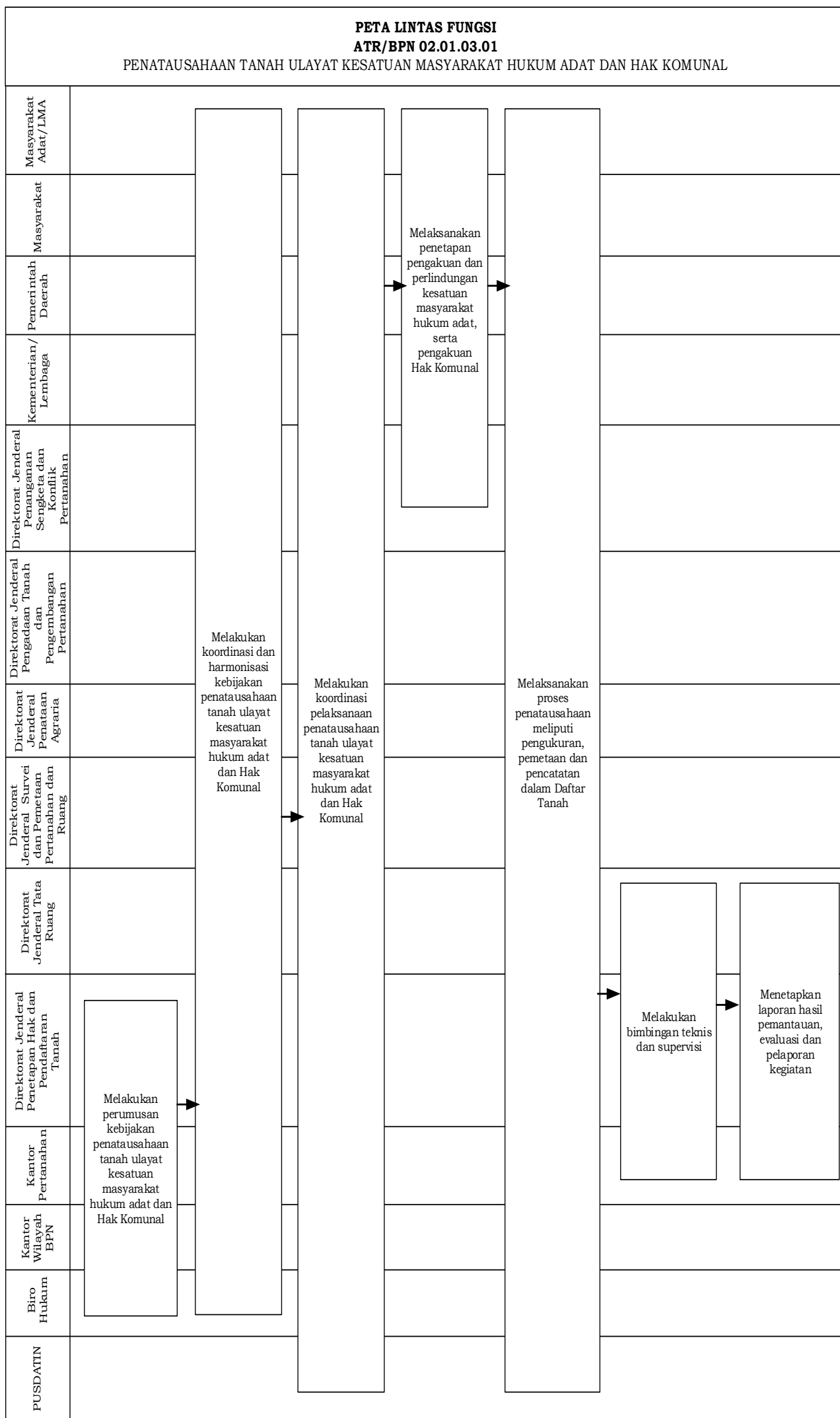
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Biro Hukum	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Kantor Pertanahan	Kantor Wilayah BPN
Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga
Masyarakat	Masyarakat Adat/LMA

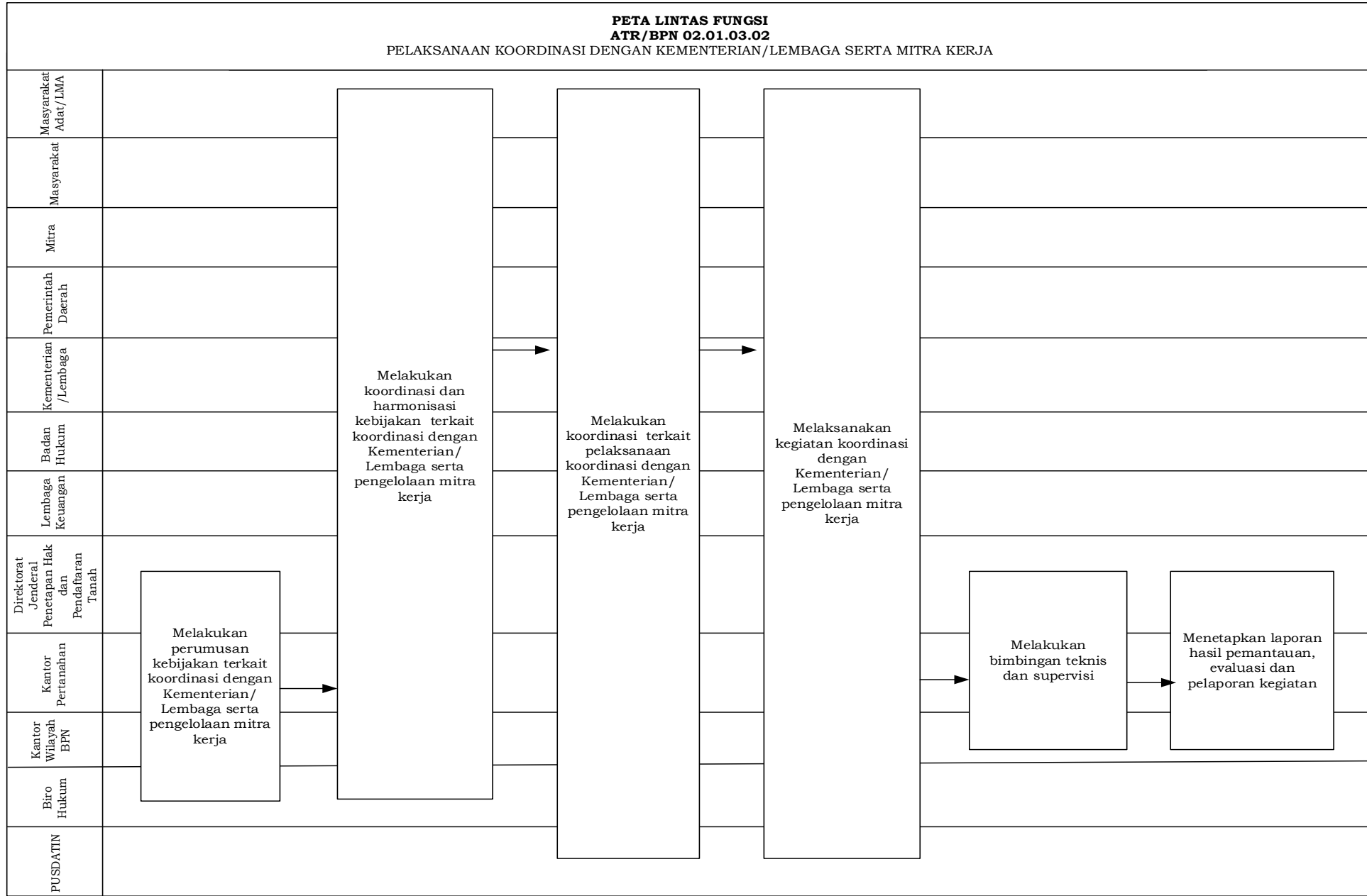
ATR/BPN 02.01.03.02
Pelaksanaan Koordinasi dengan Kementerian/
Lembaga serta Mitra Kerja

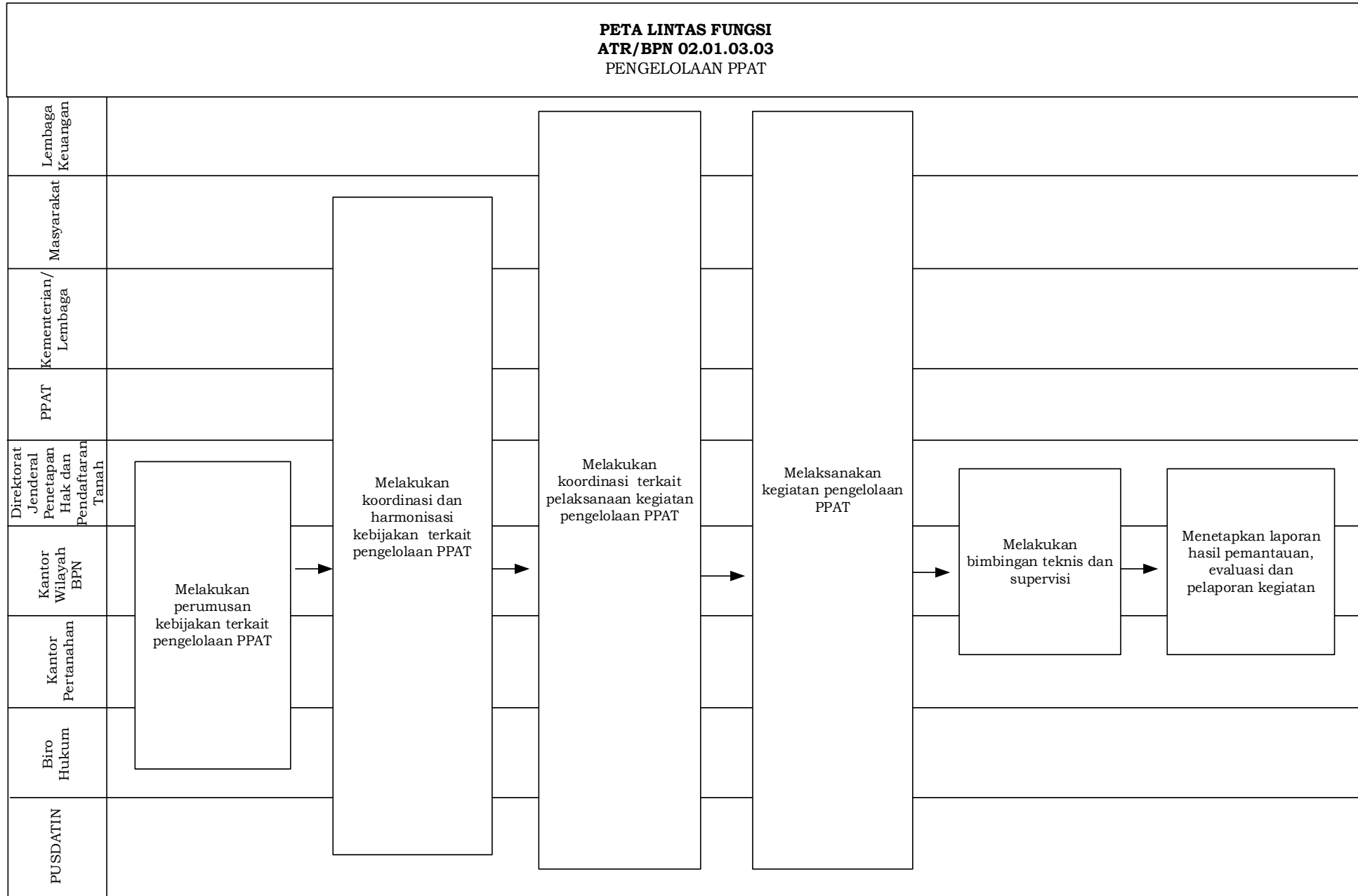
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah	Masyarakat Adat/LMA
Masyarakat	Badan Hukum
Lembaga Keuangan	Mitra

ATR/BPN 02.01.03.03
Pengelolaan PPAT

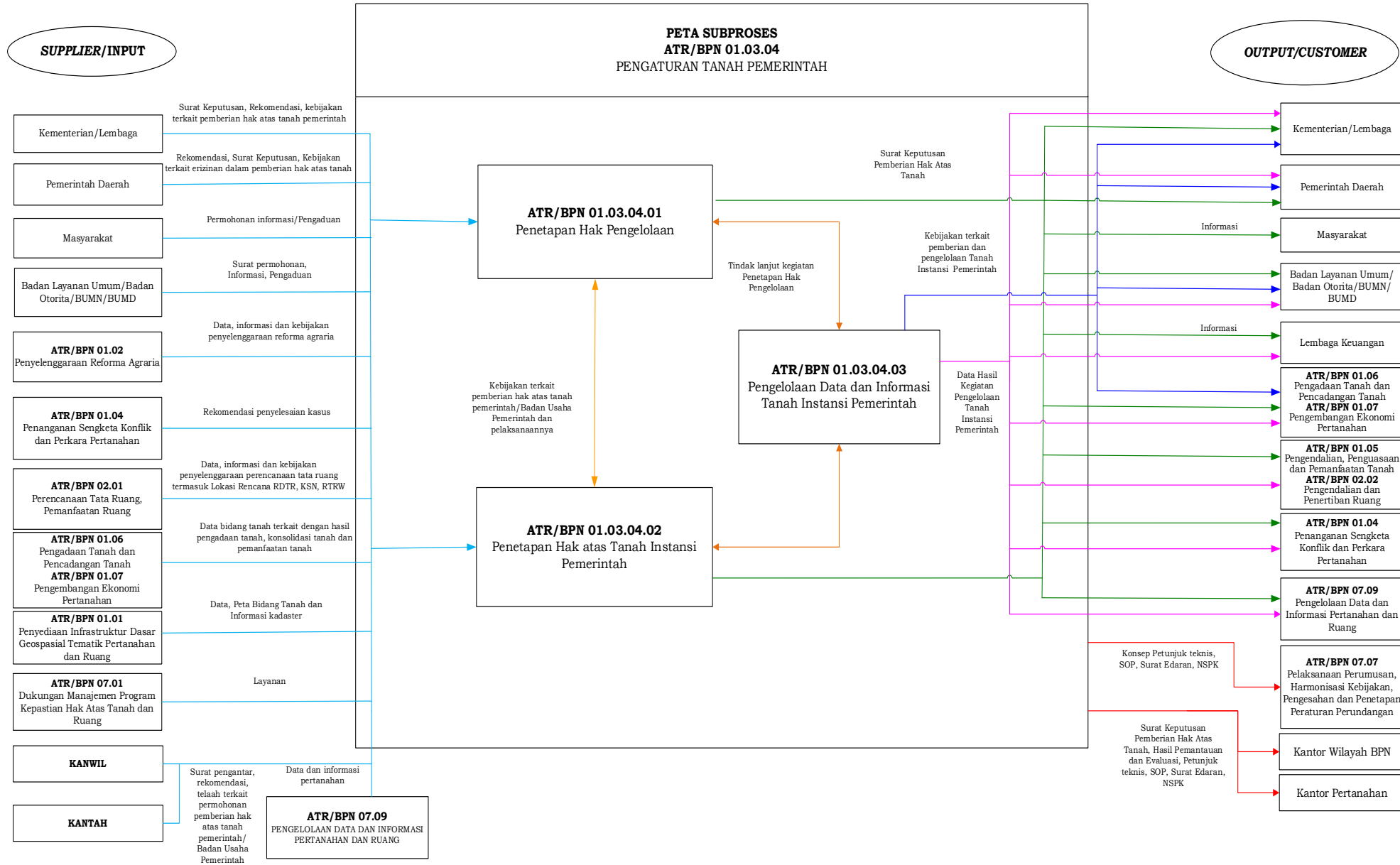
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Biro Hukum	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga
Lembaga Keuangan	Masyarakat
PPAT	







3.4.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah



PETA RELASI
ATR/BPN 01.03.04
PENGATURAN TANAH PEMERINTAH

ATR/BPN 01.03.04.01
Penetapan Hak Pengelolaan

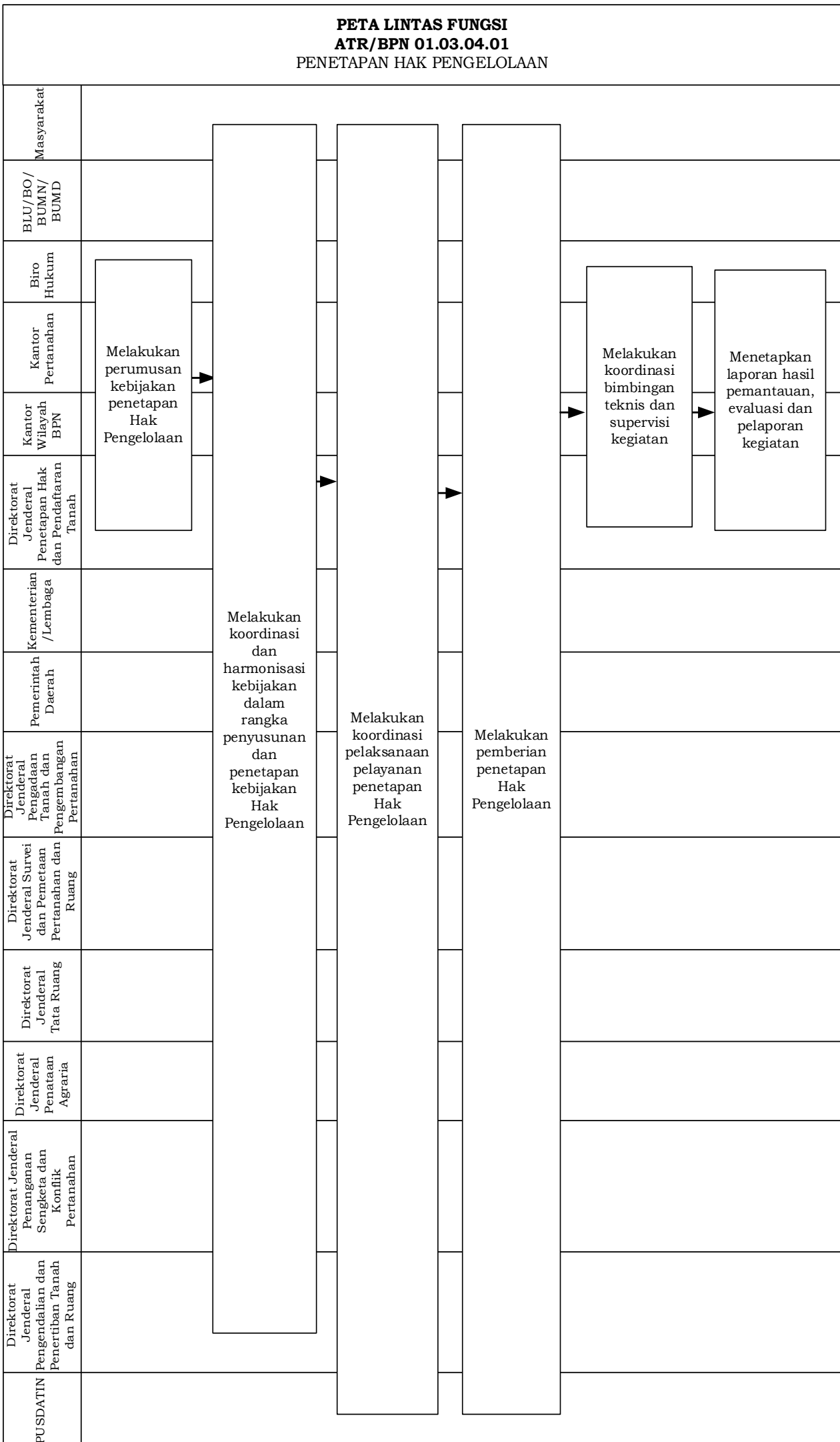
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Biro Hukum	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD
Masyarakat	

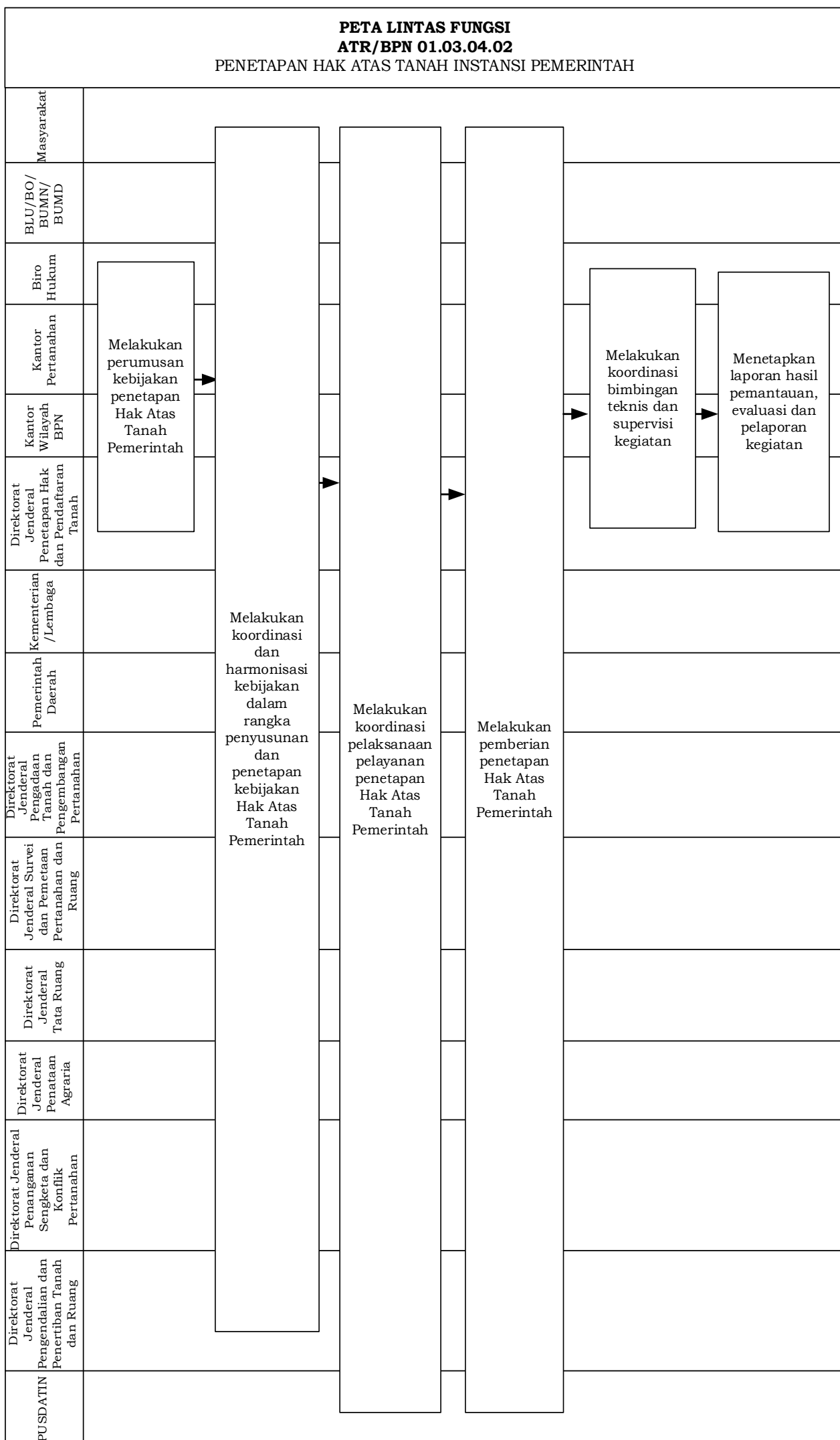
ATR/BPN 01.03.04.02
Penetapan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah

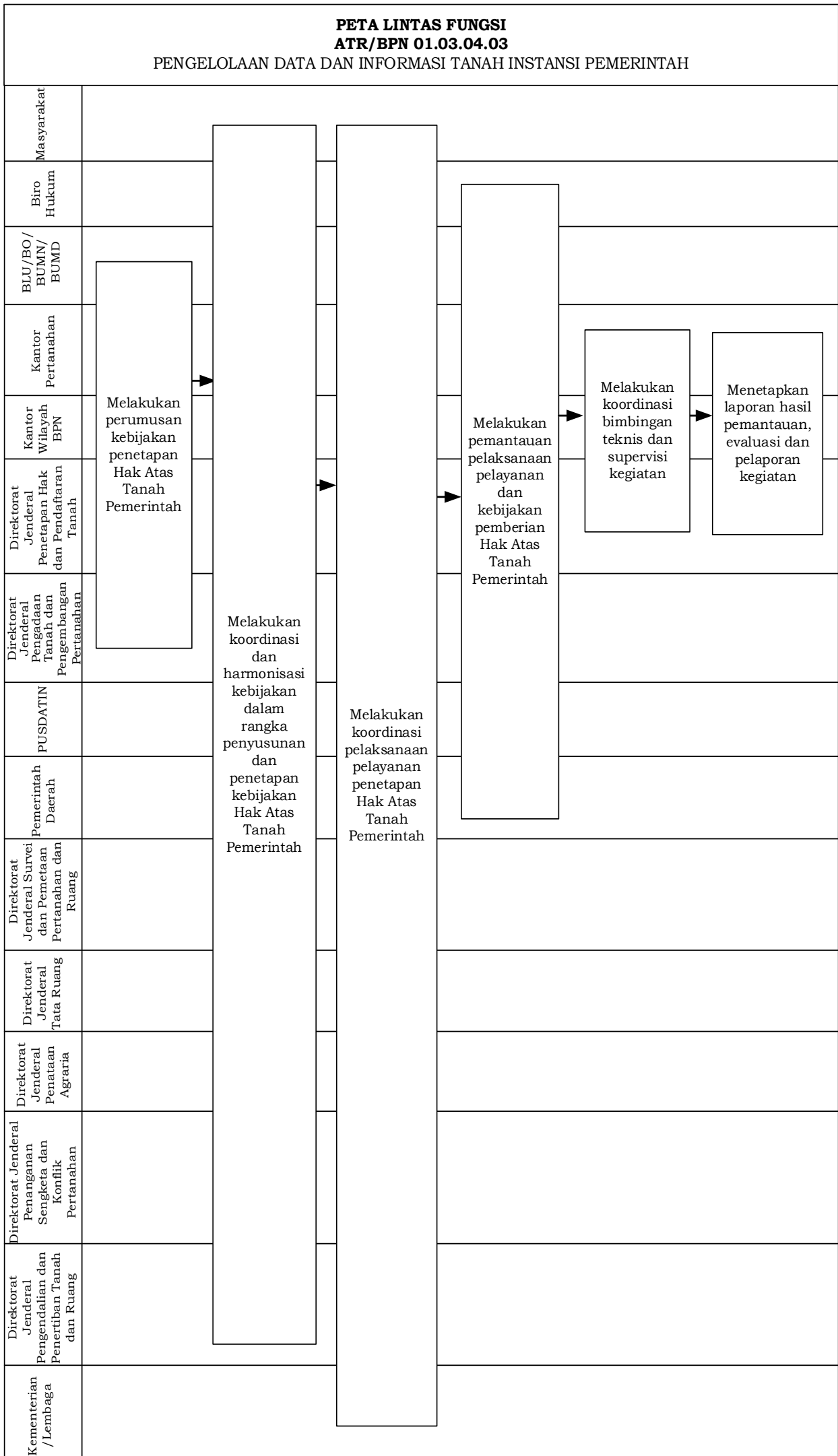
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Biro Hukum	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD
Masyarakat	

ATR/BPN 01.03.04.03
Pengelolaan Data dan Informasi Tanah Instansi Pemerintah

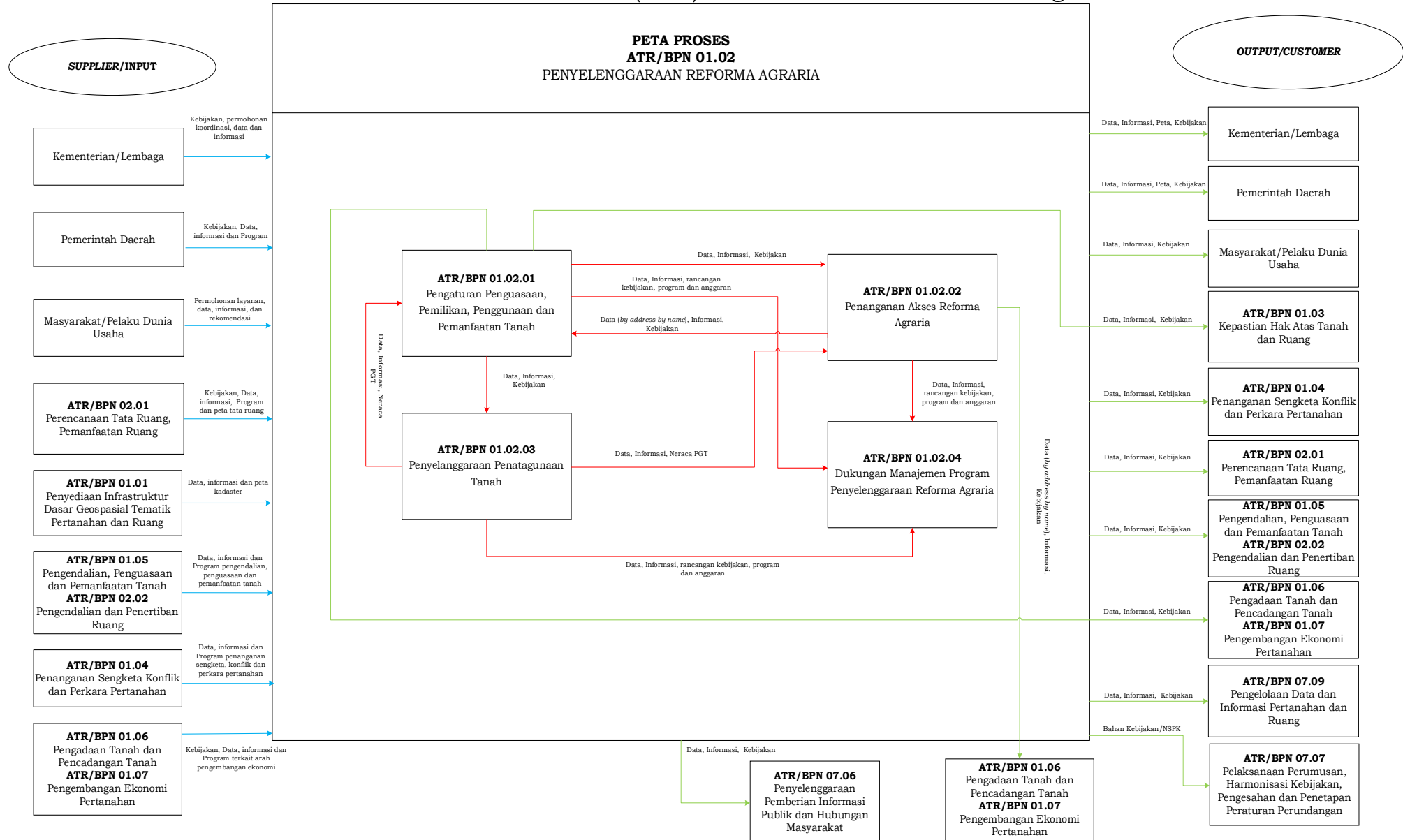
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Biro Hukum	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah	BLU/BO/BUMN/BUMD
Masyarakat	



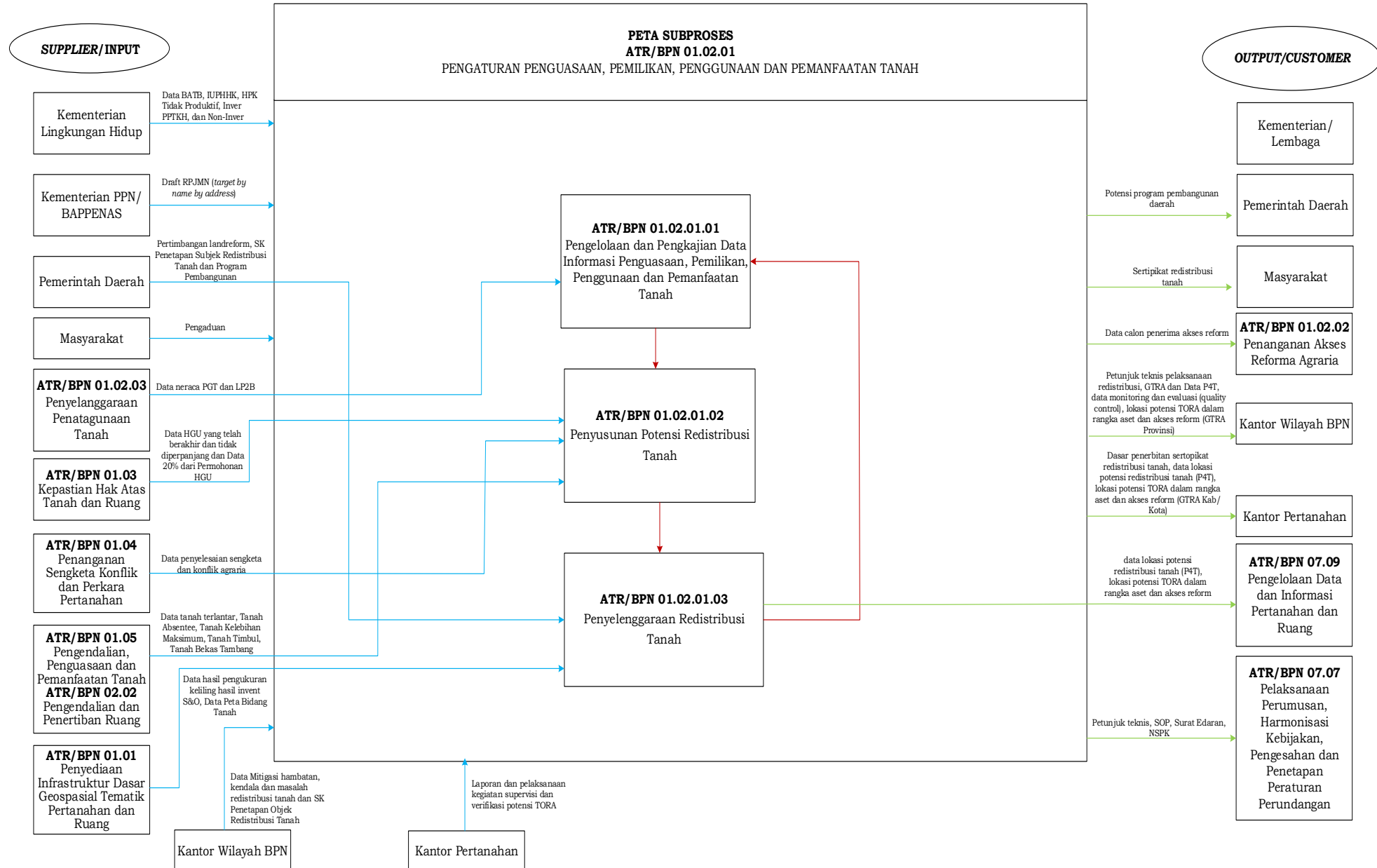




3.5. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penataan Agraria



3.5.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Redistribusi Tanah



PETA RELASI
ATR/BPN 01.03.02
PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG

ATR/BPN 01.02.01.01
Pengelolaan dan Pengkajian Data Informasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah

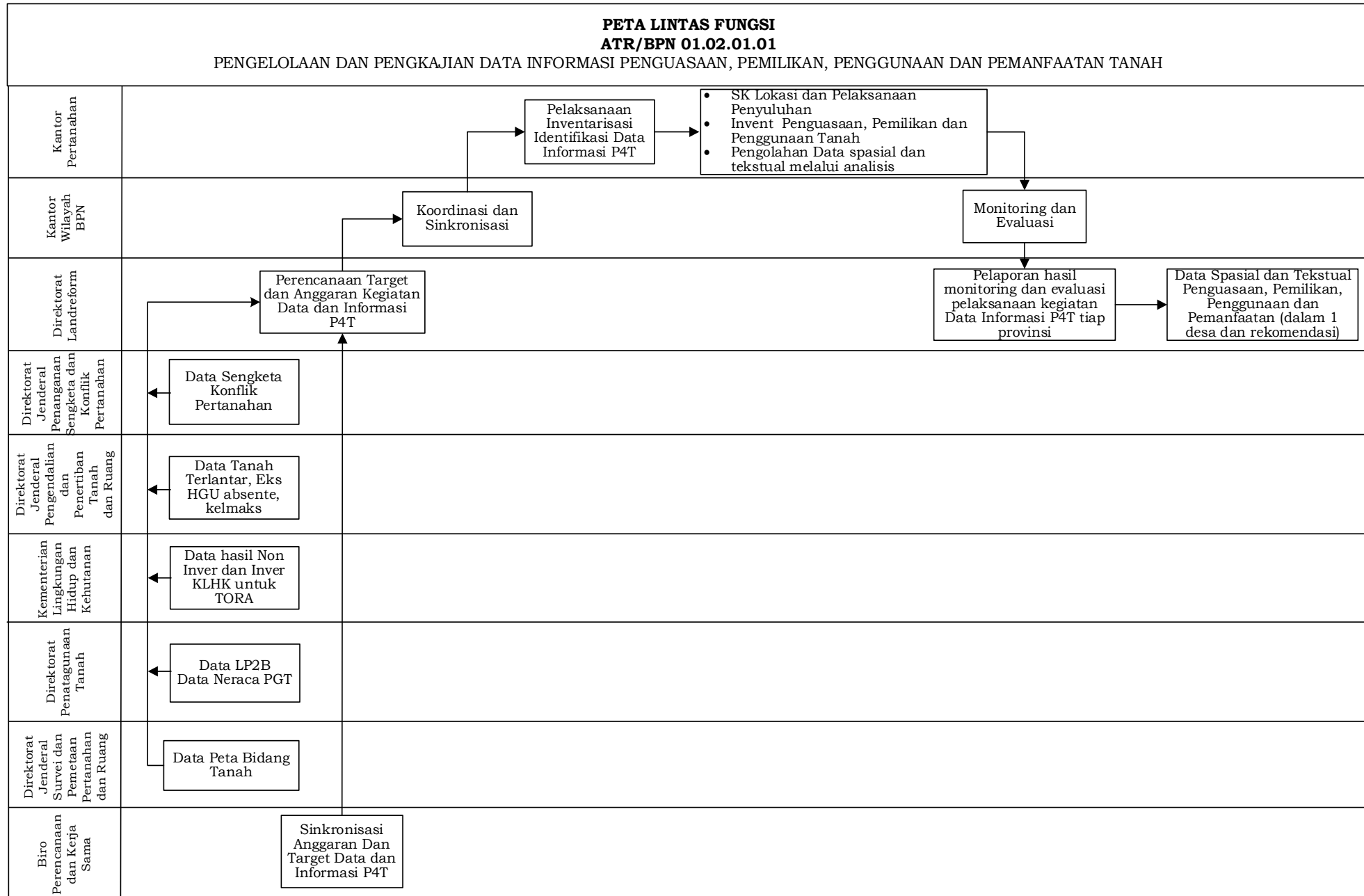
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Direktorat Penatagunaan Tanah	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Landreform	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

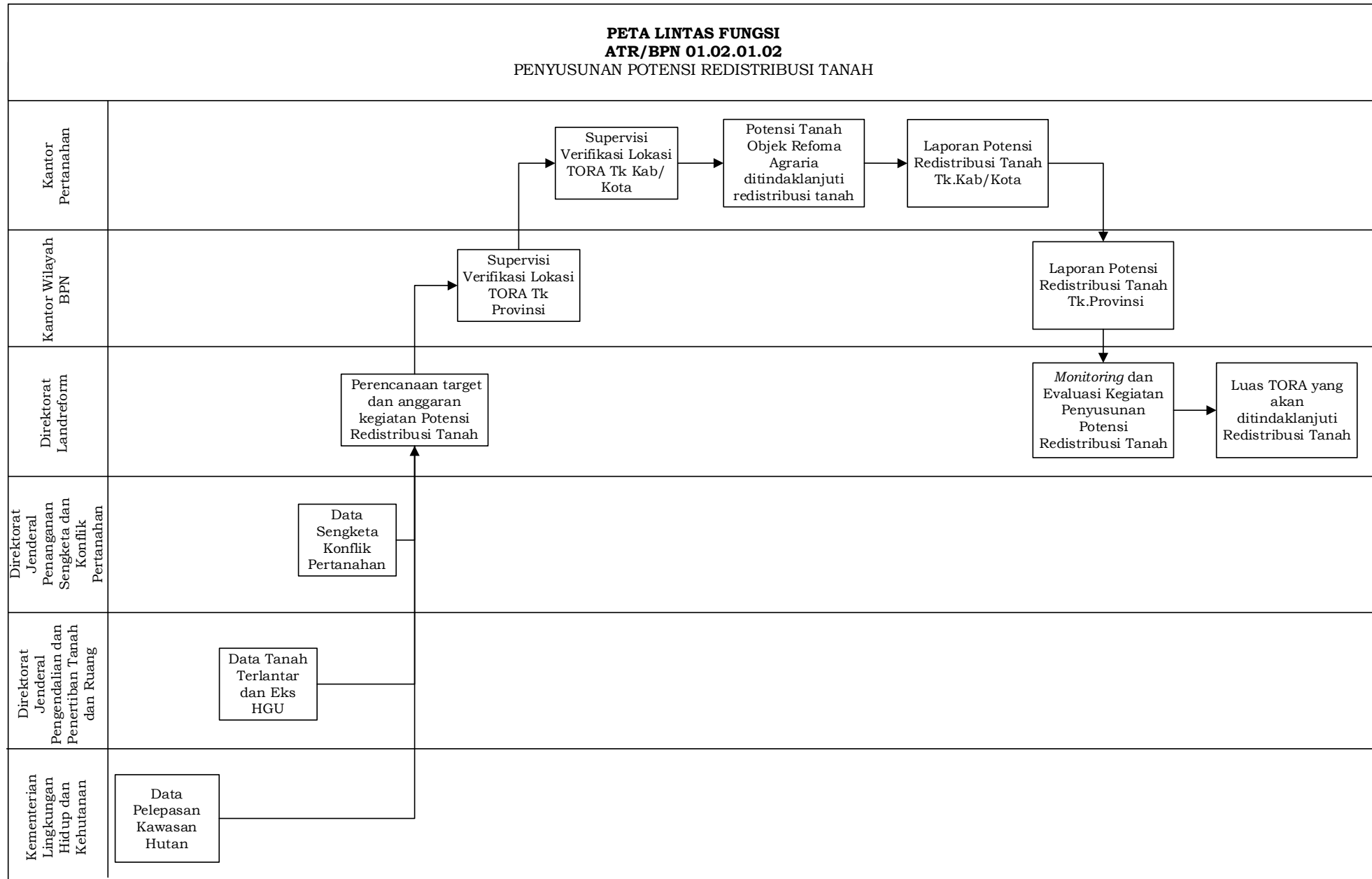
ATR/BPN 01.02.01.02
Penyusunan Potensi Redistribusi Tanah

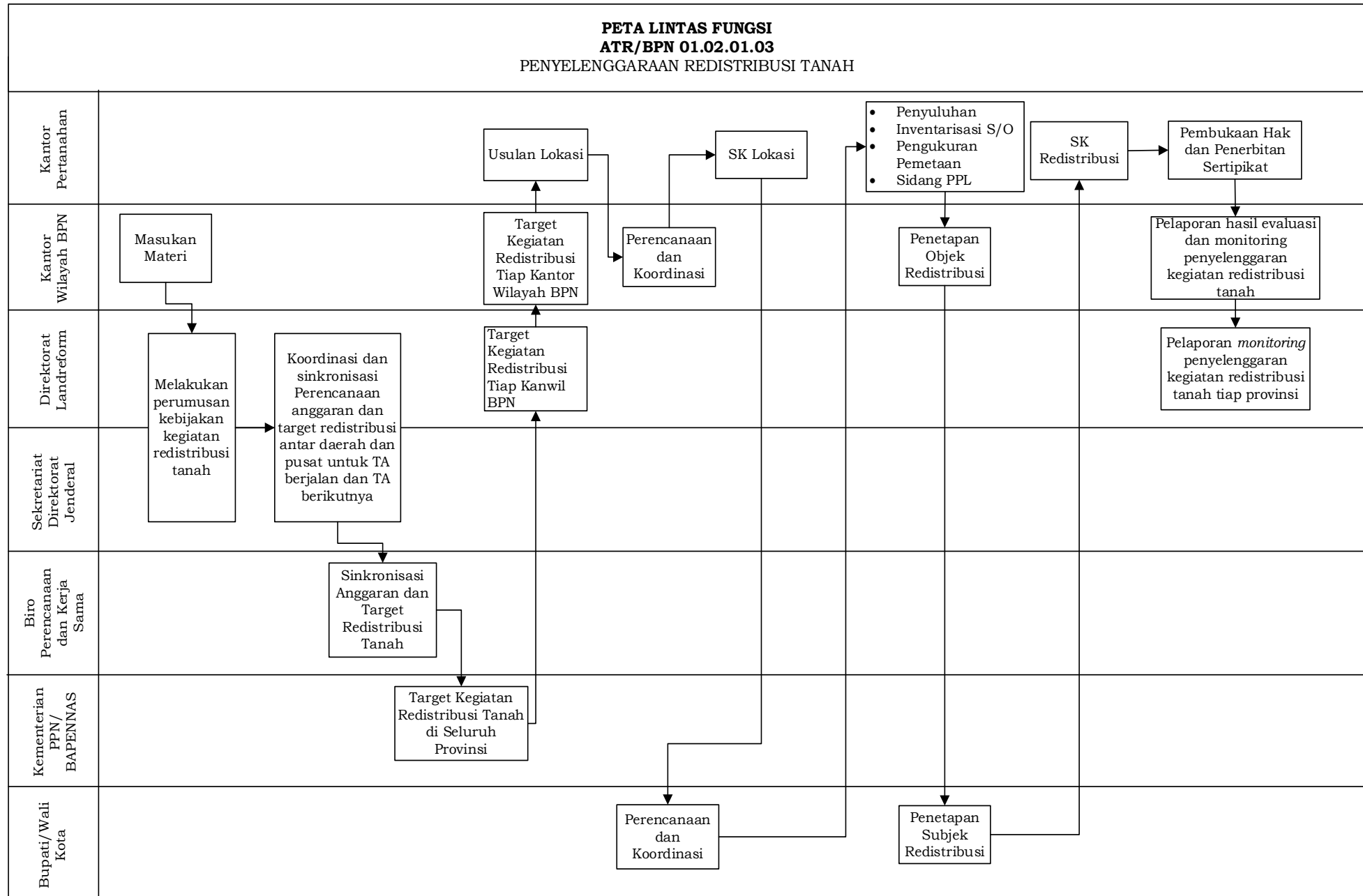
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian PPN/ BAPENNAS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Pertanian	Direktorat Landreform

ATR/BPN 01.02.01.03
Penyelenggaraan Redistribusi Tanah

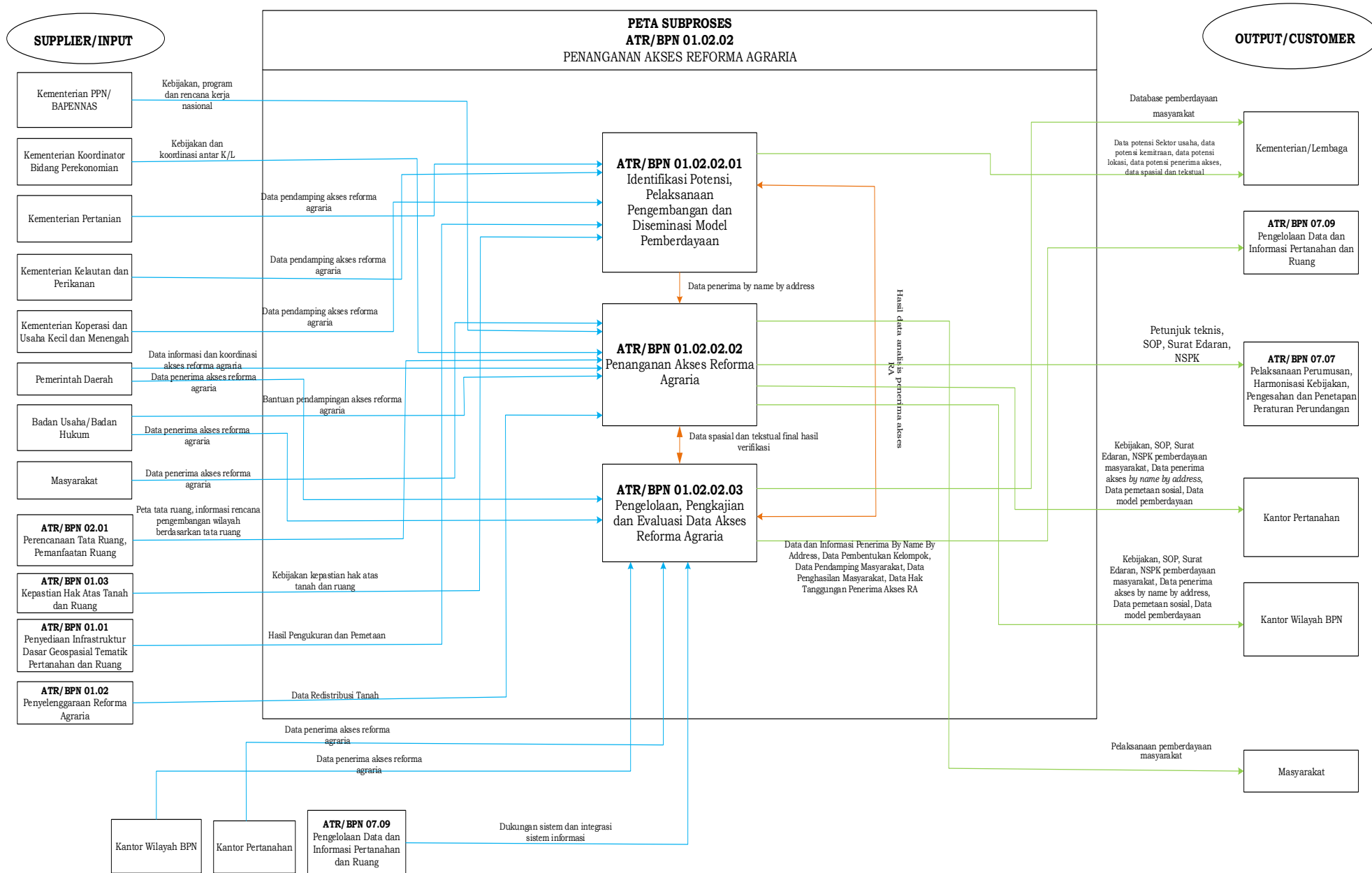
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bupati/Wali Kota
Kementerian PPN/ BAPENNAS	Direktorat Landreform







3.5.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat



PETA RELASI
ATR/BPN 01.02.02
PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA

ATR/BPN 01.02.02.01
Identifikasi Potensi, Pelaksanaan Pengembangan dan
Diseminasi Model Pemberdayaan

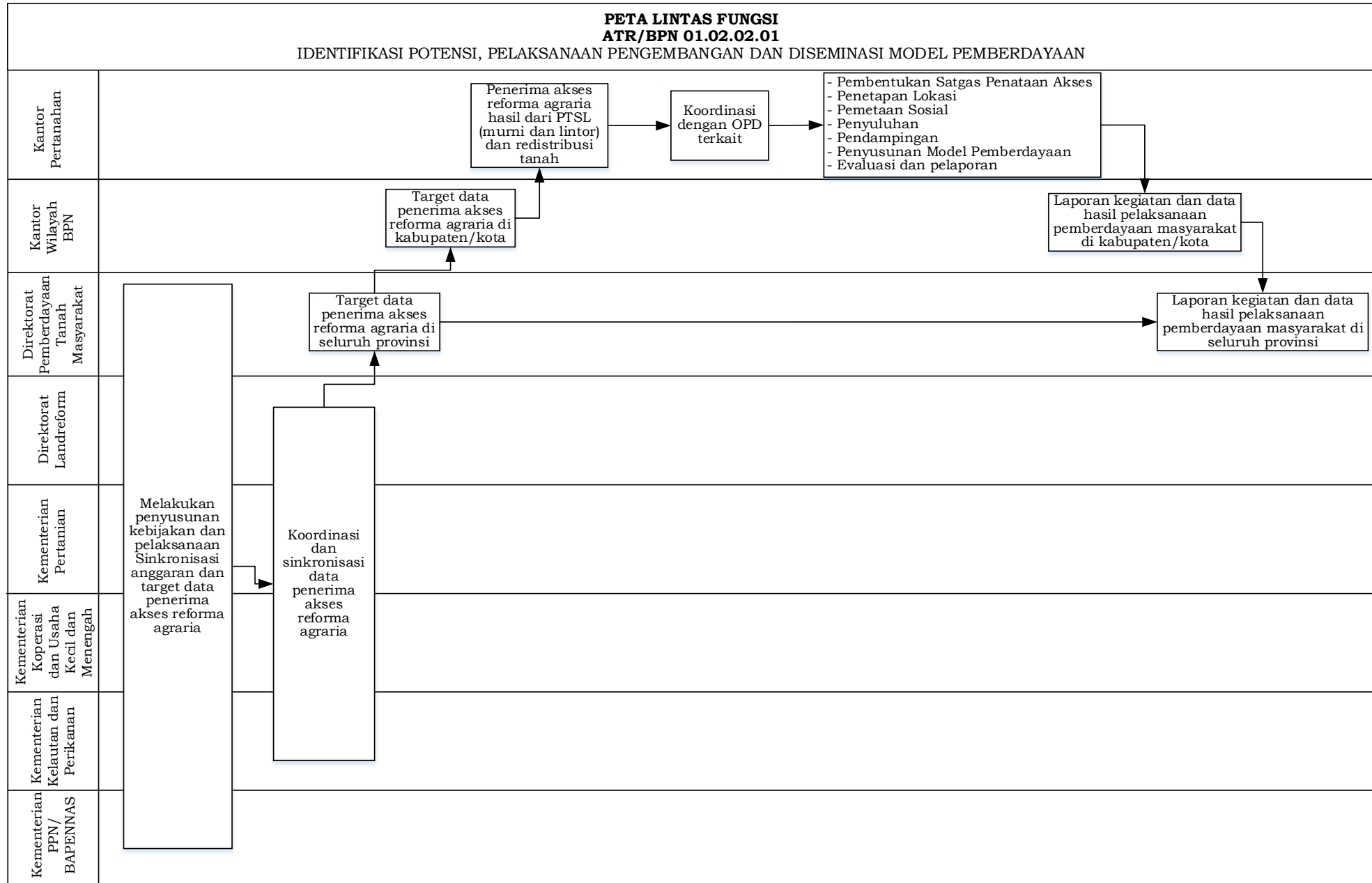
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Direktorat Landreform
Kementerian Pertanian	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian PPN/ BAPENNAS

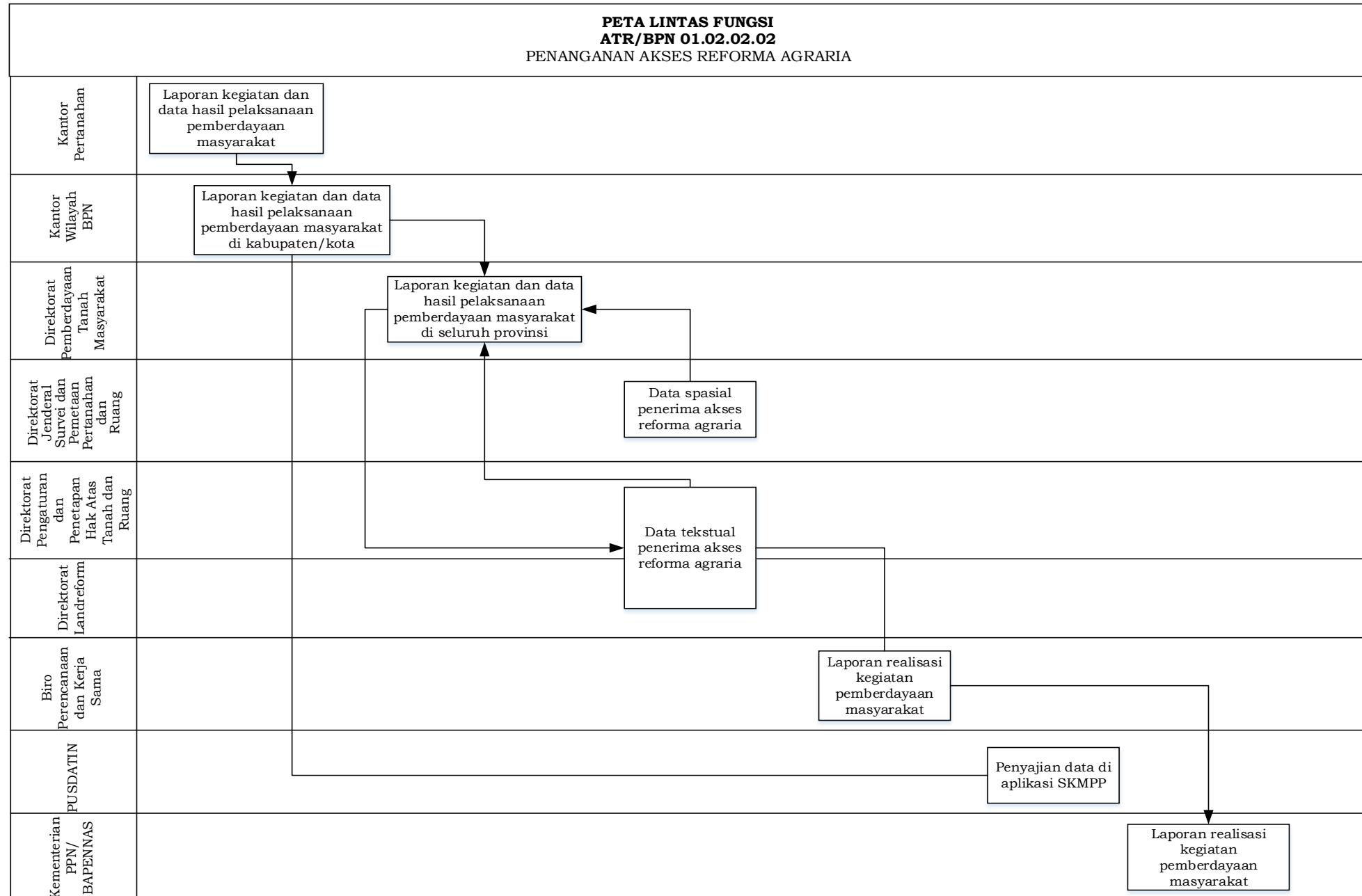
ATR/BPN 01.02.02.02
Penanganan Akses Reforma Agraria

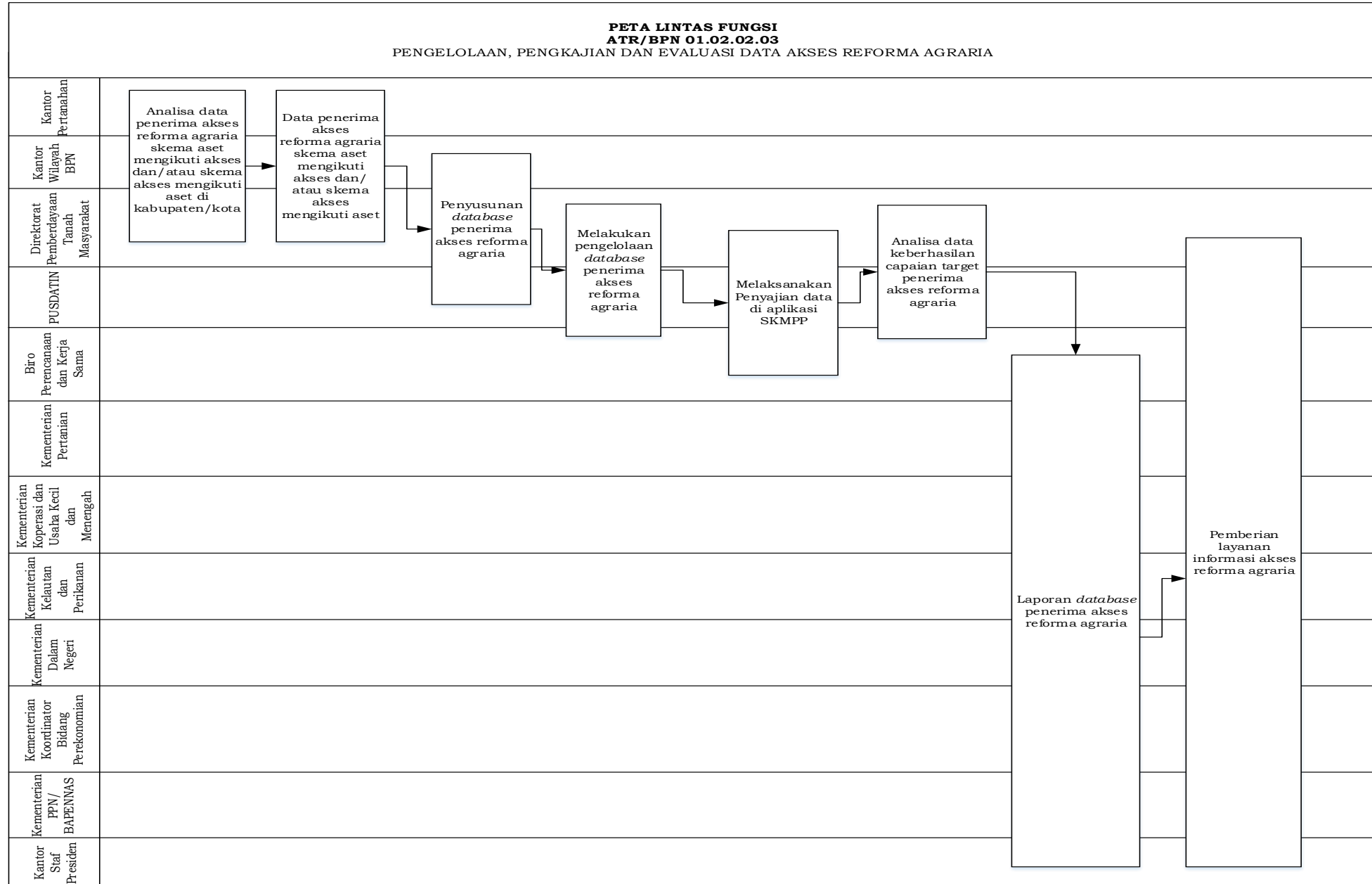
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Direktorat Landreform	Kementerian PPN/ BAPENNAS
PUSDATIN	

ATR/BPN 01.02.02.03
Pengelolaan, Pengkajian dan Evaluasi Data Akses
Reforma Agraria

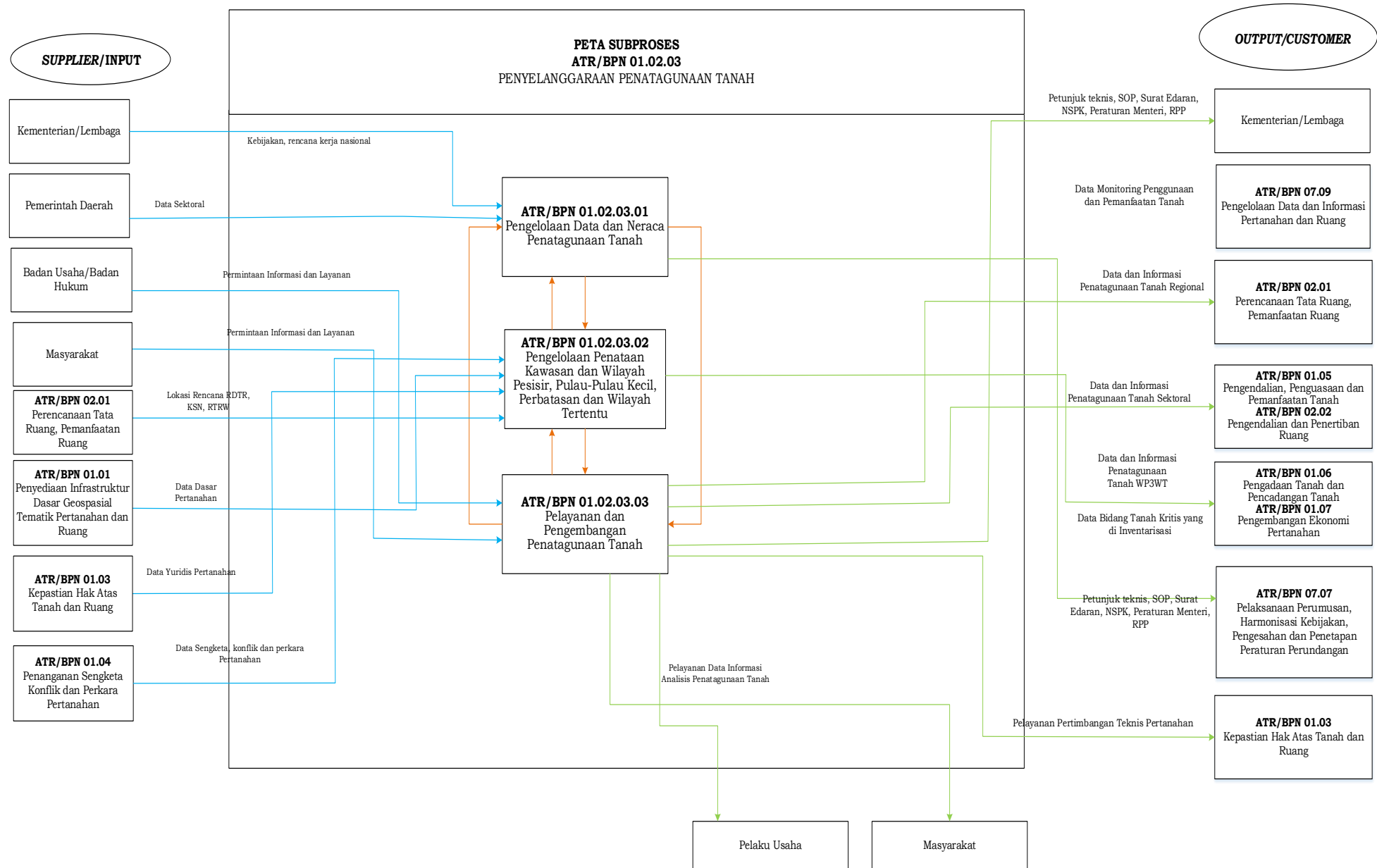
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat	PUSDATIN
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Kementerian Pertanian
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian







3.5.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penatagunaan Tanah



PETA RELASI
ATR/BPN 01.02.03
PENYELANGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH

ATR/BPN 01.02.03.01
Pengelolaan Data dan Neraca Penatagunaan Tanah

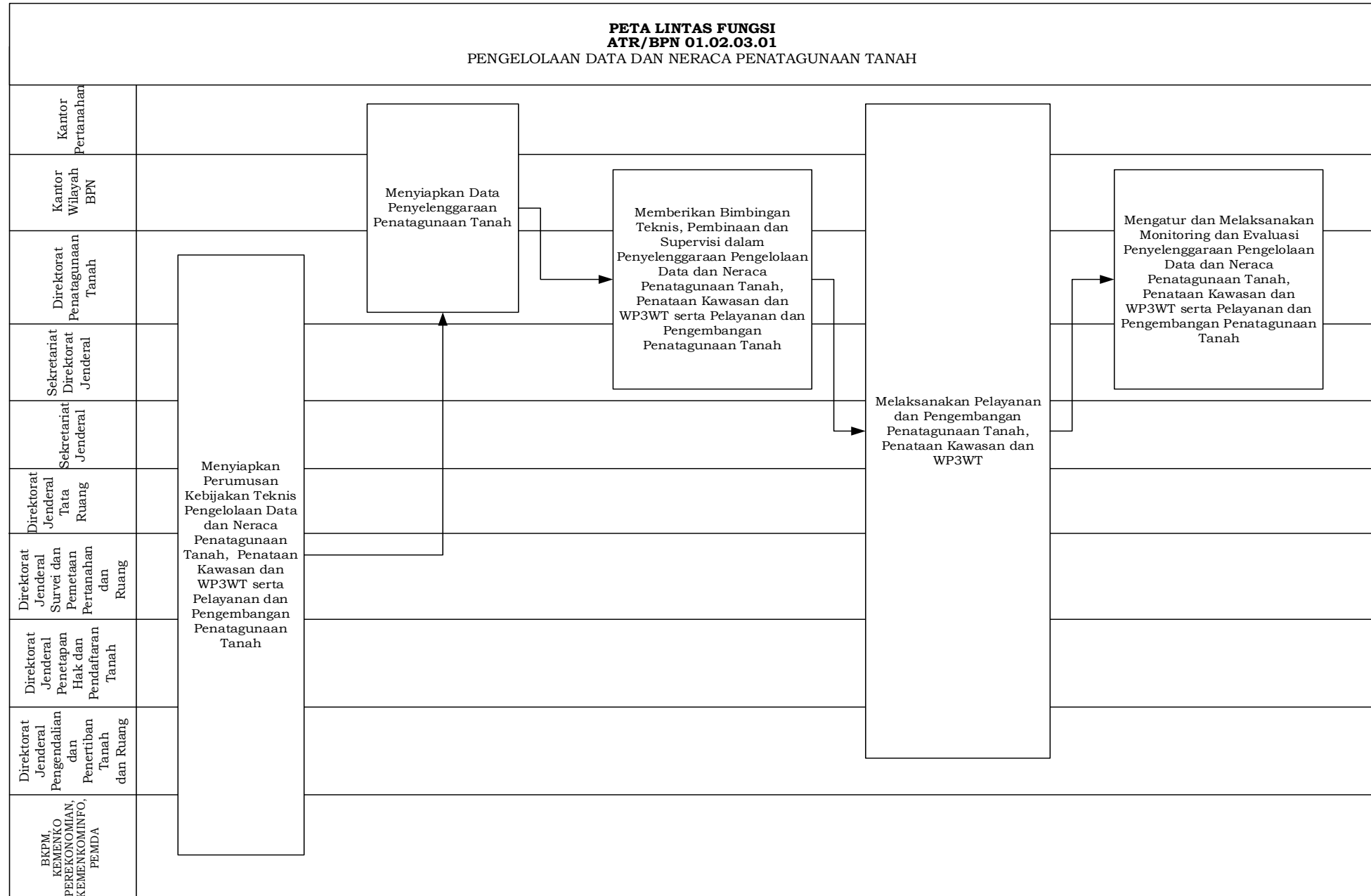
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENKOMINFO, PEMDA	KLHK, KEMENTAN, BIG, KKP
Kementerian/Lembaga Terkait	

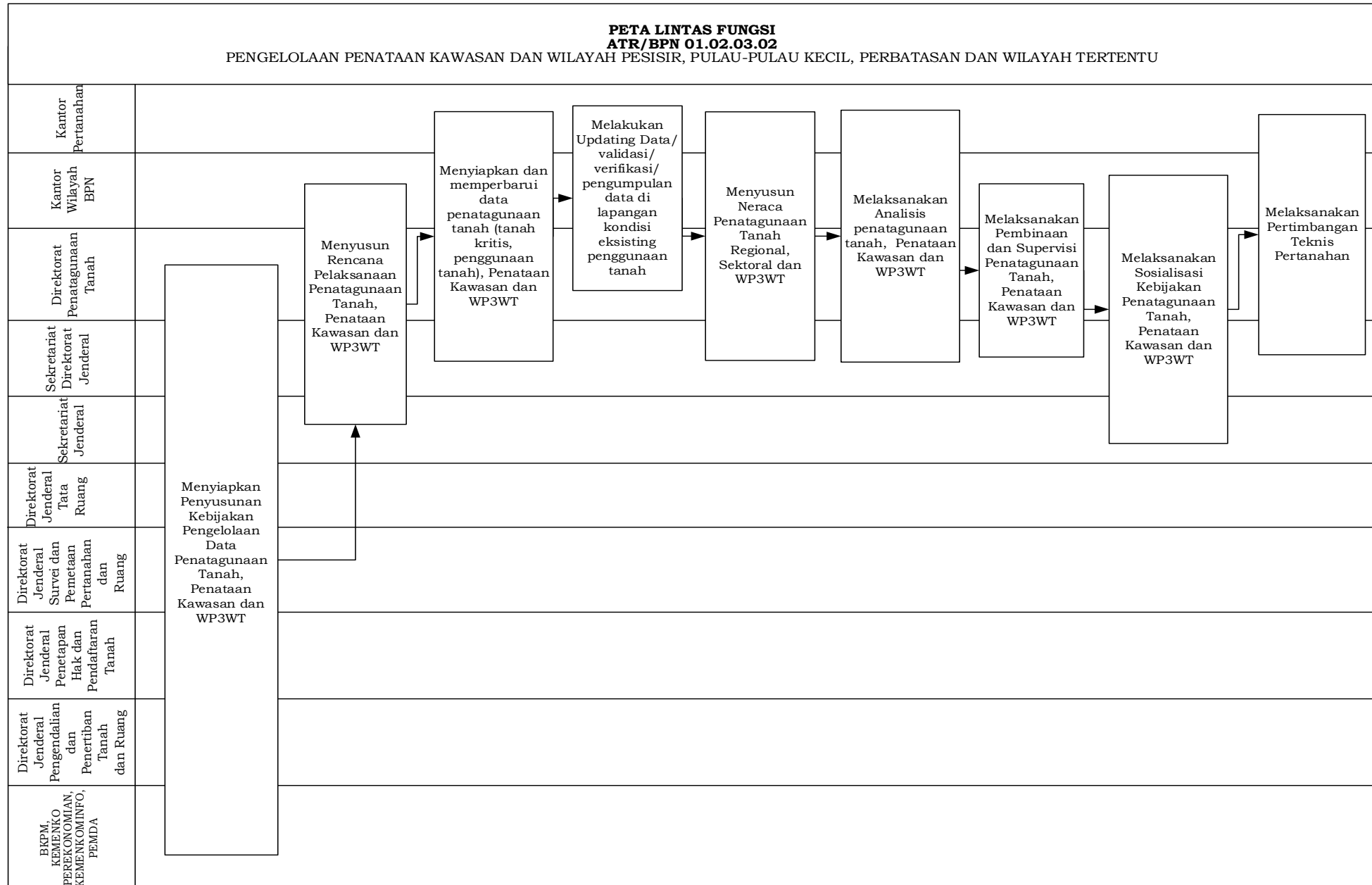
ATR/BPN 01.02.03.02
Pengelolaan Penataan Kawasan dan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

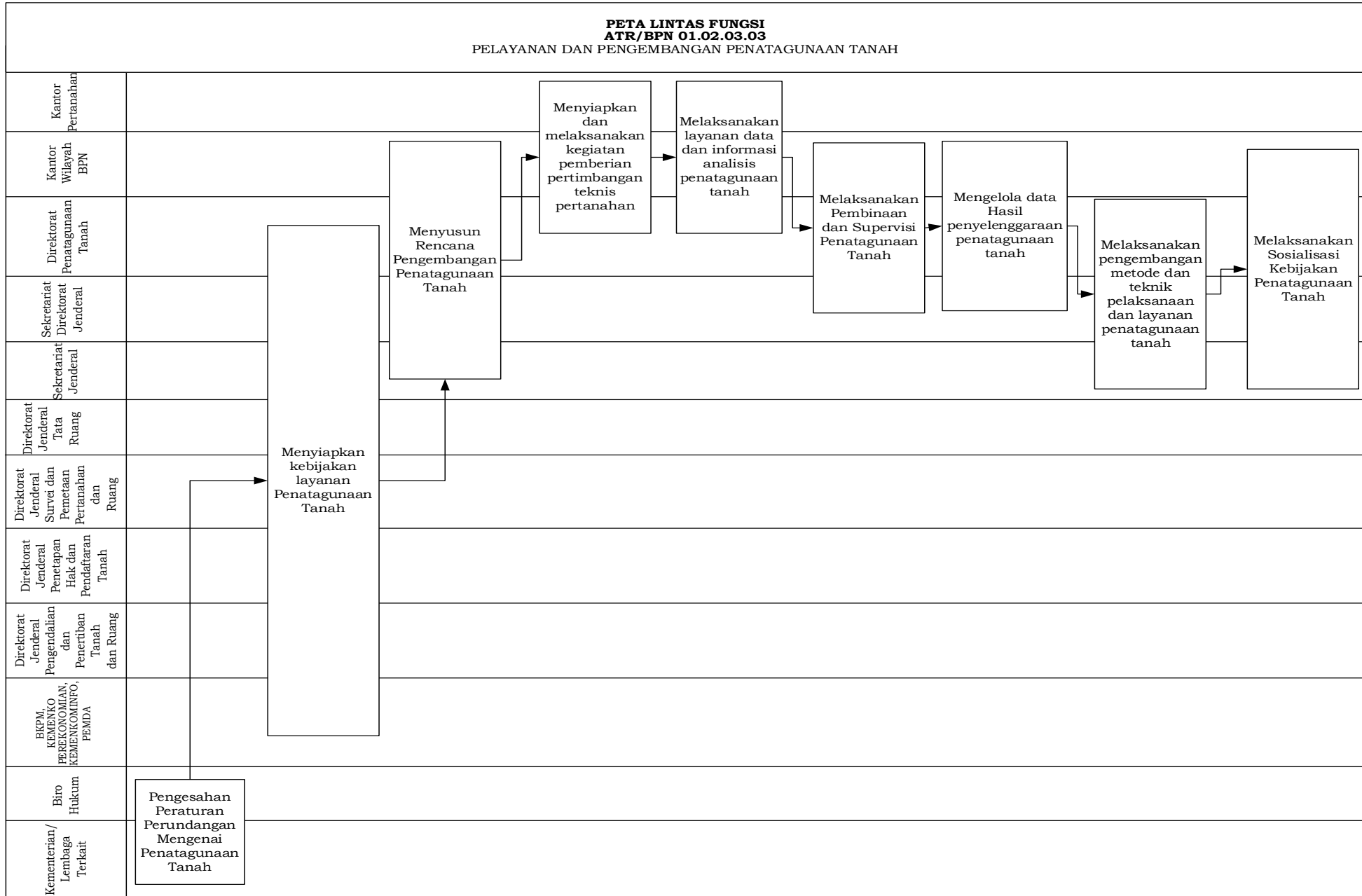
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENKOMINFO, PEMDA	KLHK, KEMENTAN, BIG, KKP
Kementerian/Lembaga Terkait	

ATR/BPN 01.02.03.03
Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah

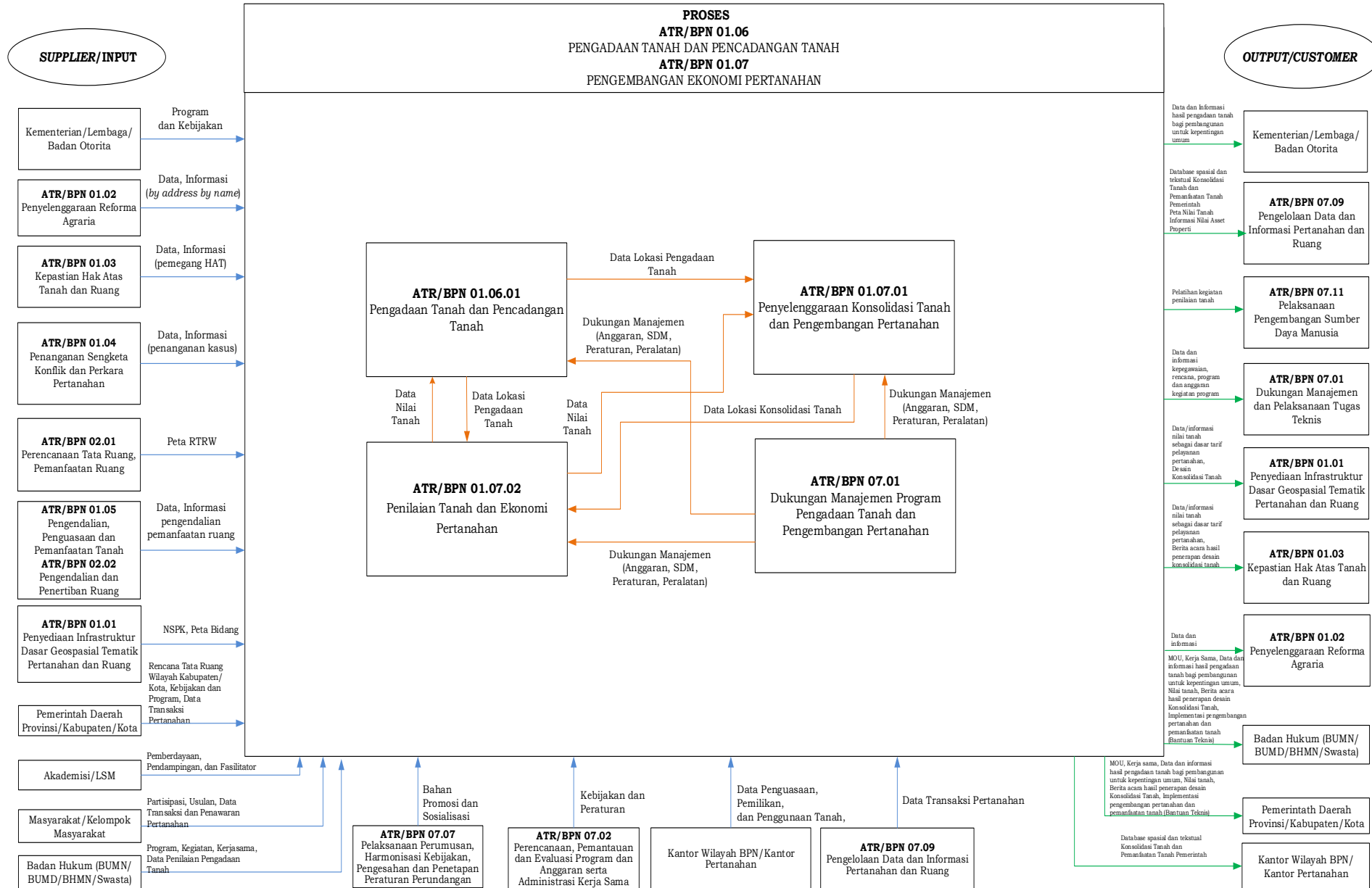
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Penatagunaan Tanah	Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Biro Hukum	BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENKOMINFO, PEMDA
KLHK, KEMENTAN, BIG, KKP	Kementerian/Lembaga Terkait



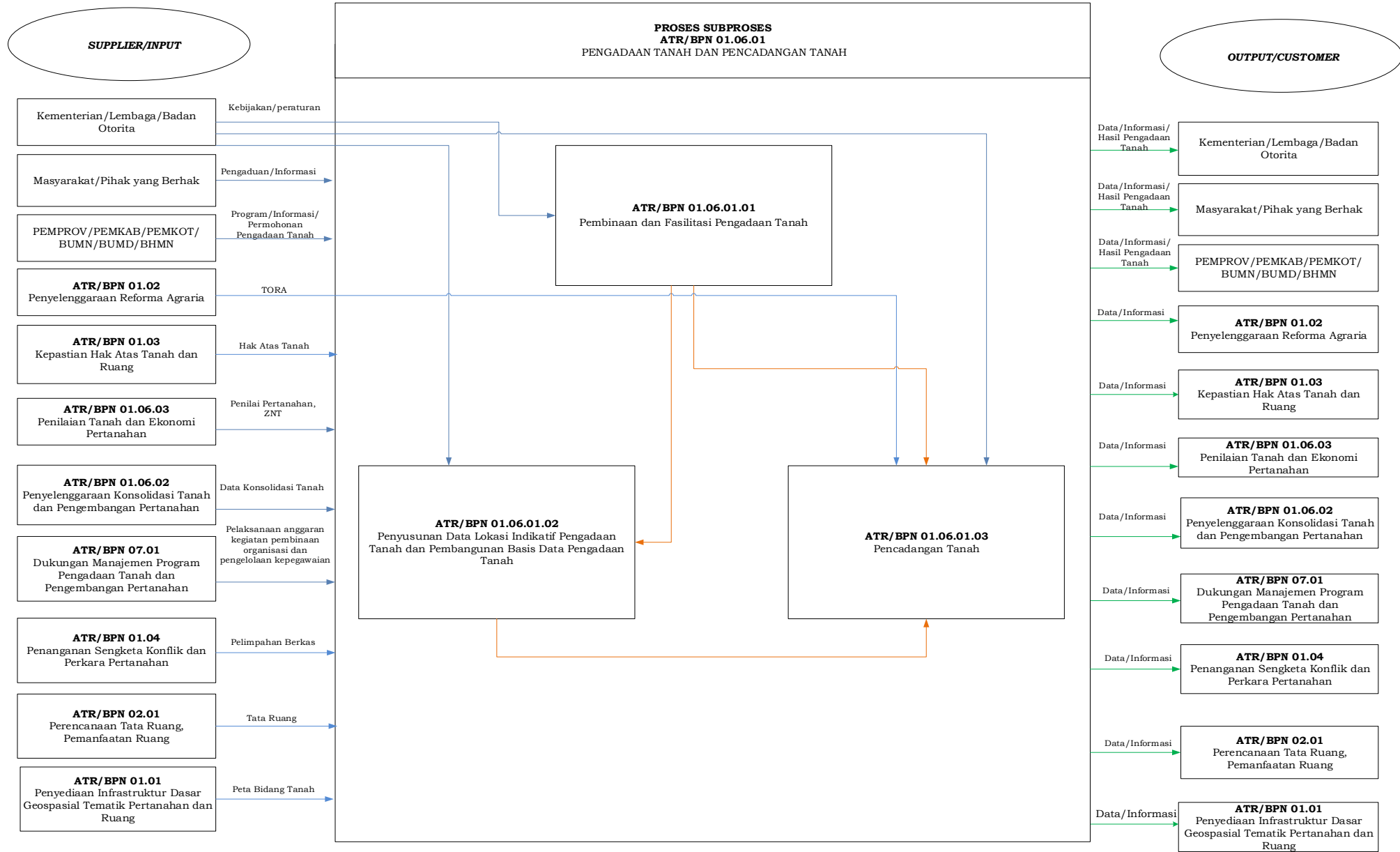




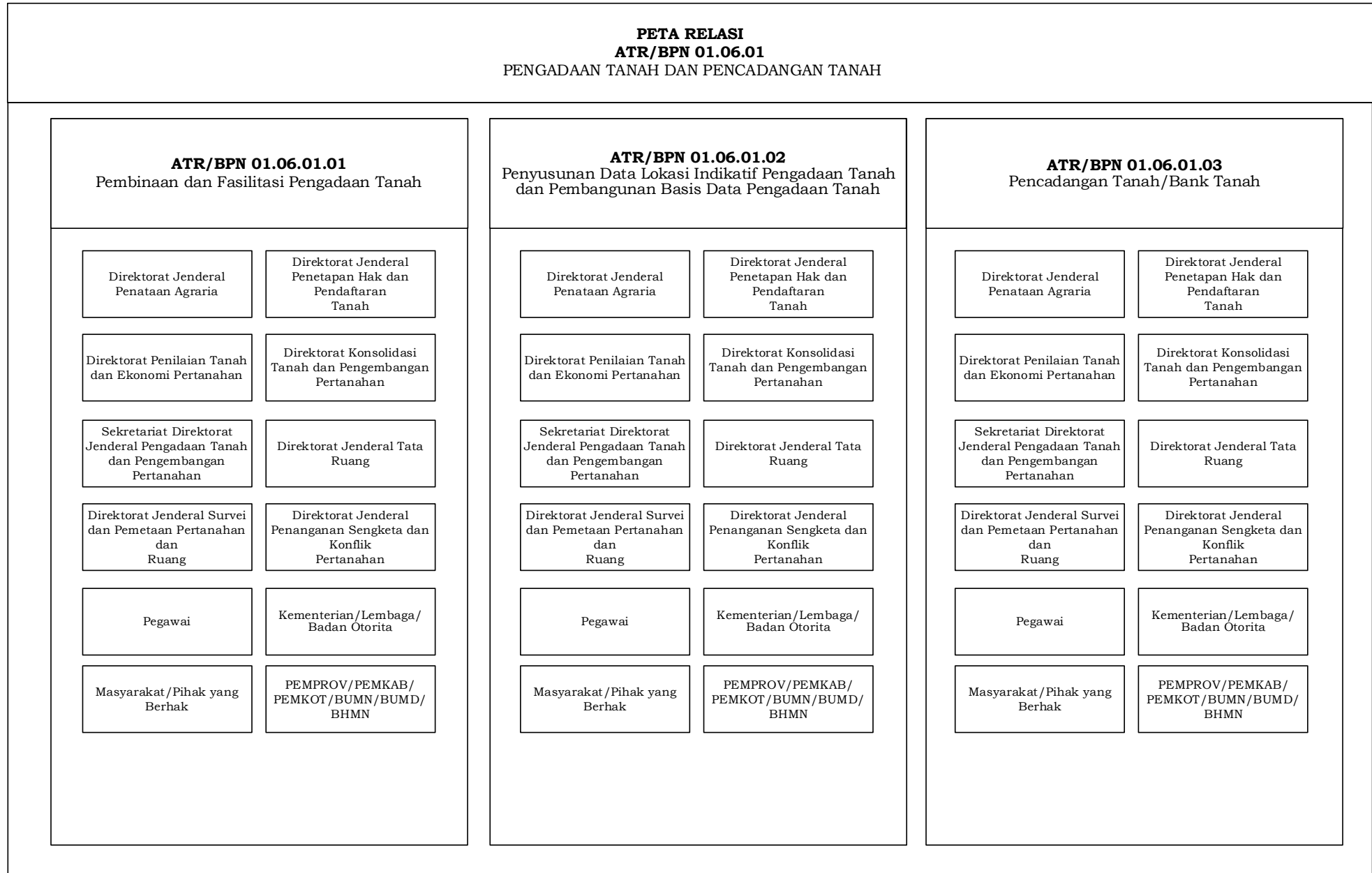
3.6. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanian



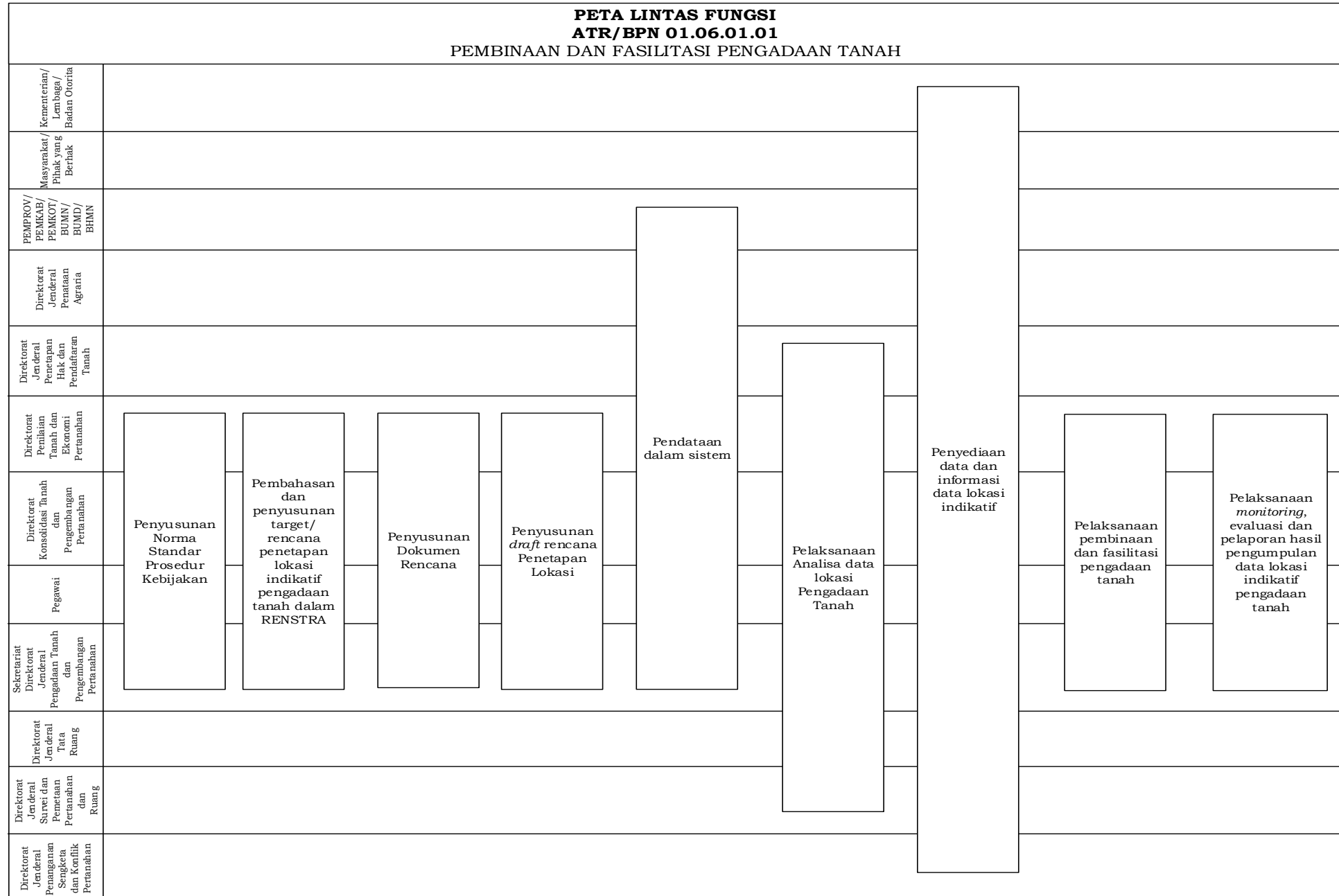
3.6.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pembinaan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah

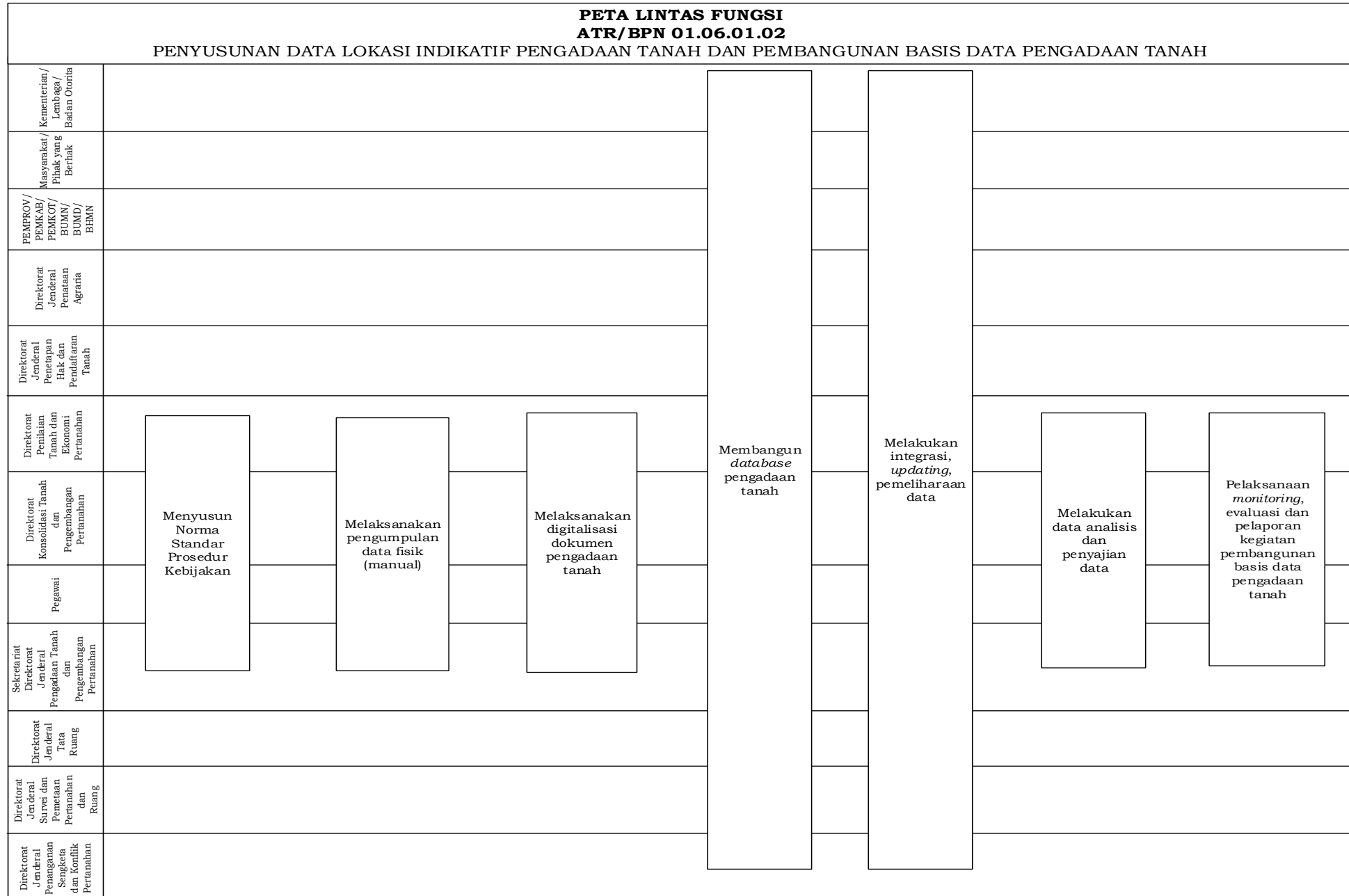


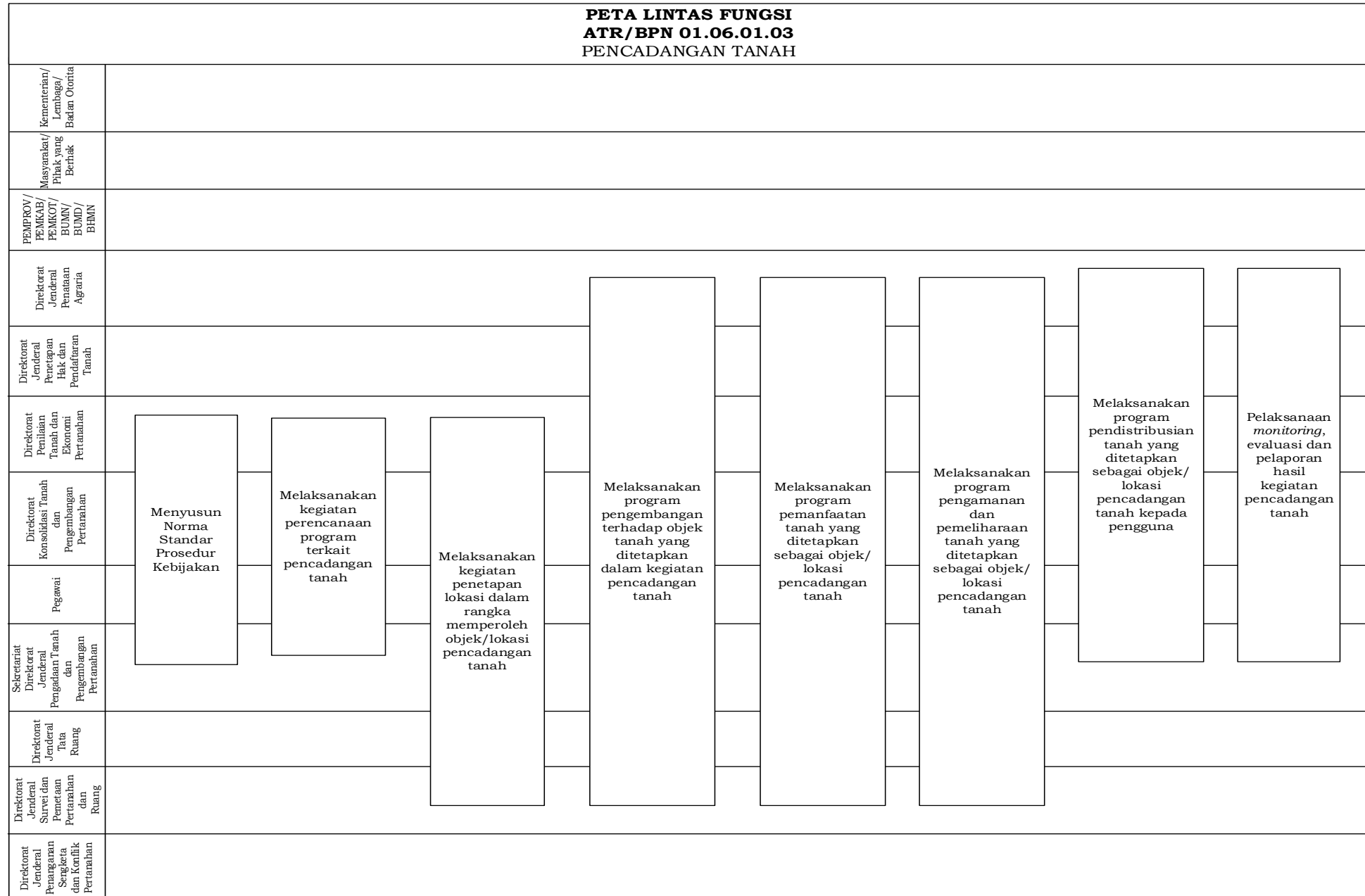
PETA RELASI
ATR/BPN 01.06.01
 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH



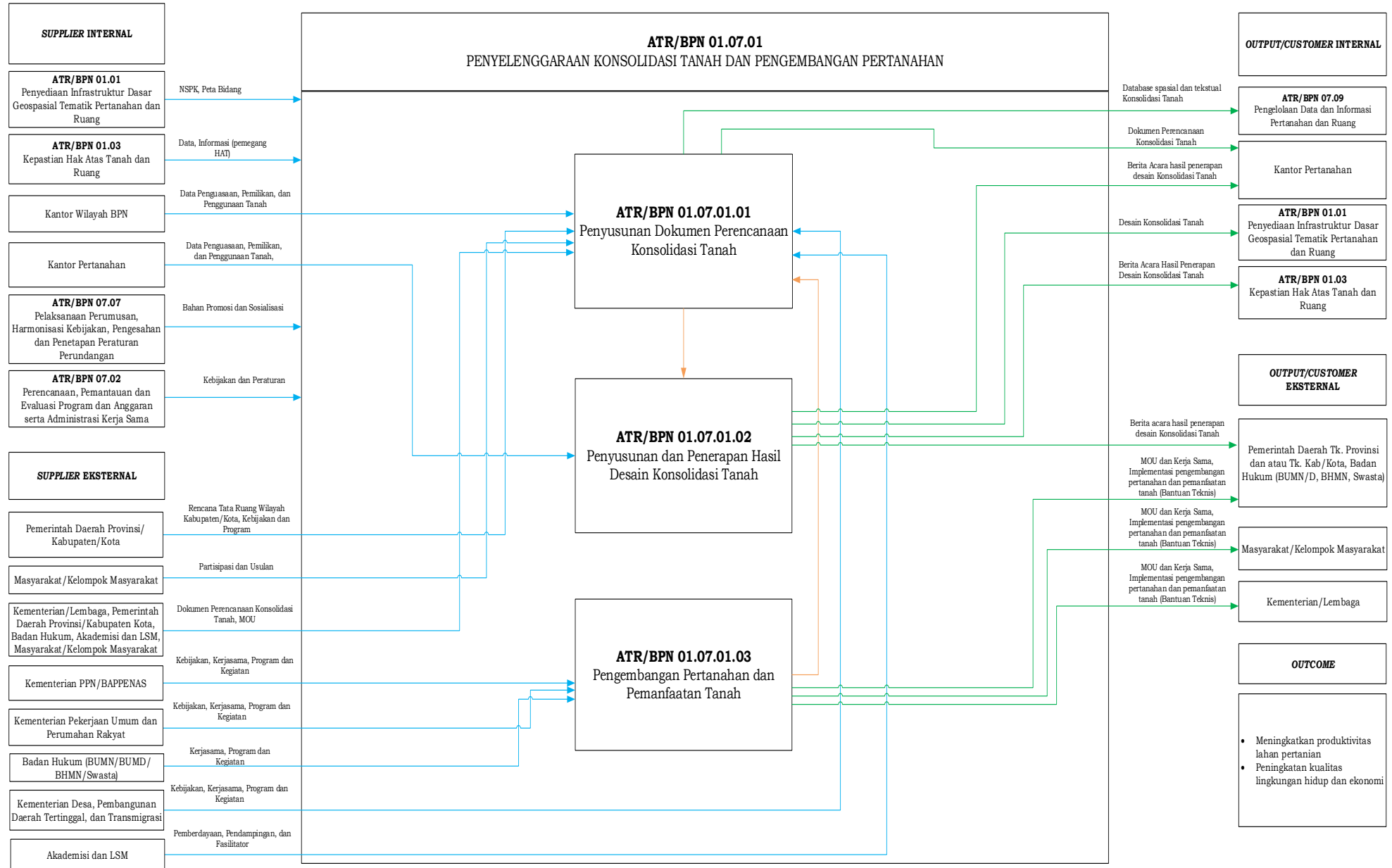
**PETA LINTAS FUNGSI
ATR/BPN 01.06.01.01
PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGADAAN TANAH**







3.6.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanian



PETA RELASI
ATR/BPN 01.07.01
PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

ATR/BPN 01.07.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah

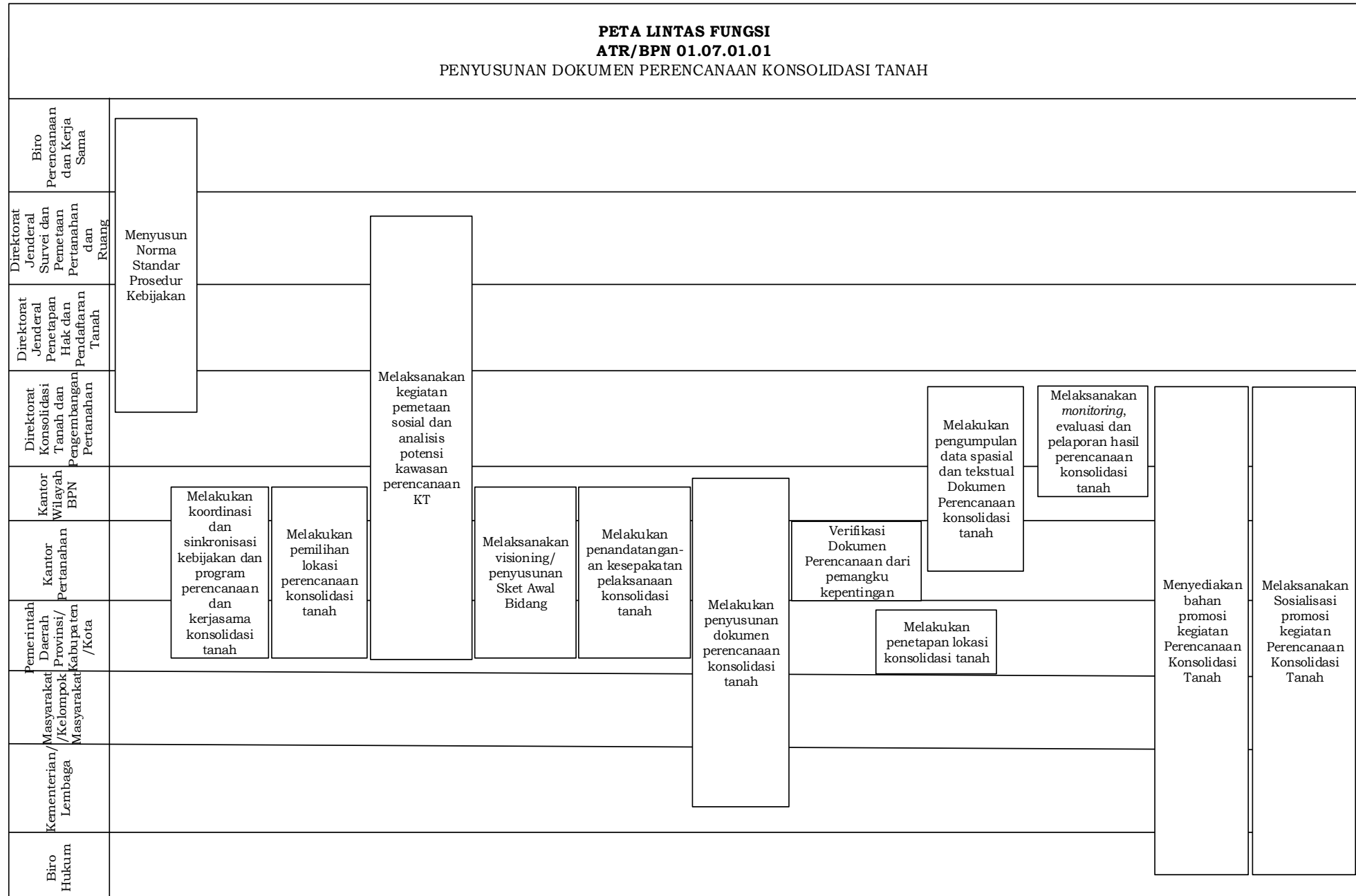
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat
Kementerian/Lembaga	Biro Hukum

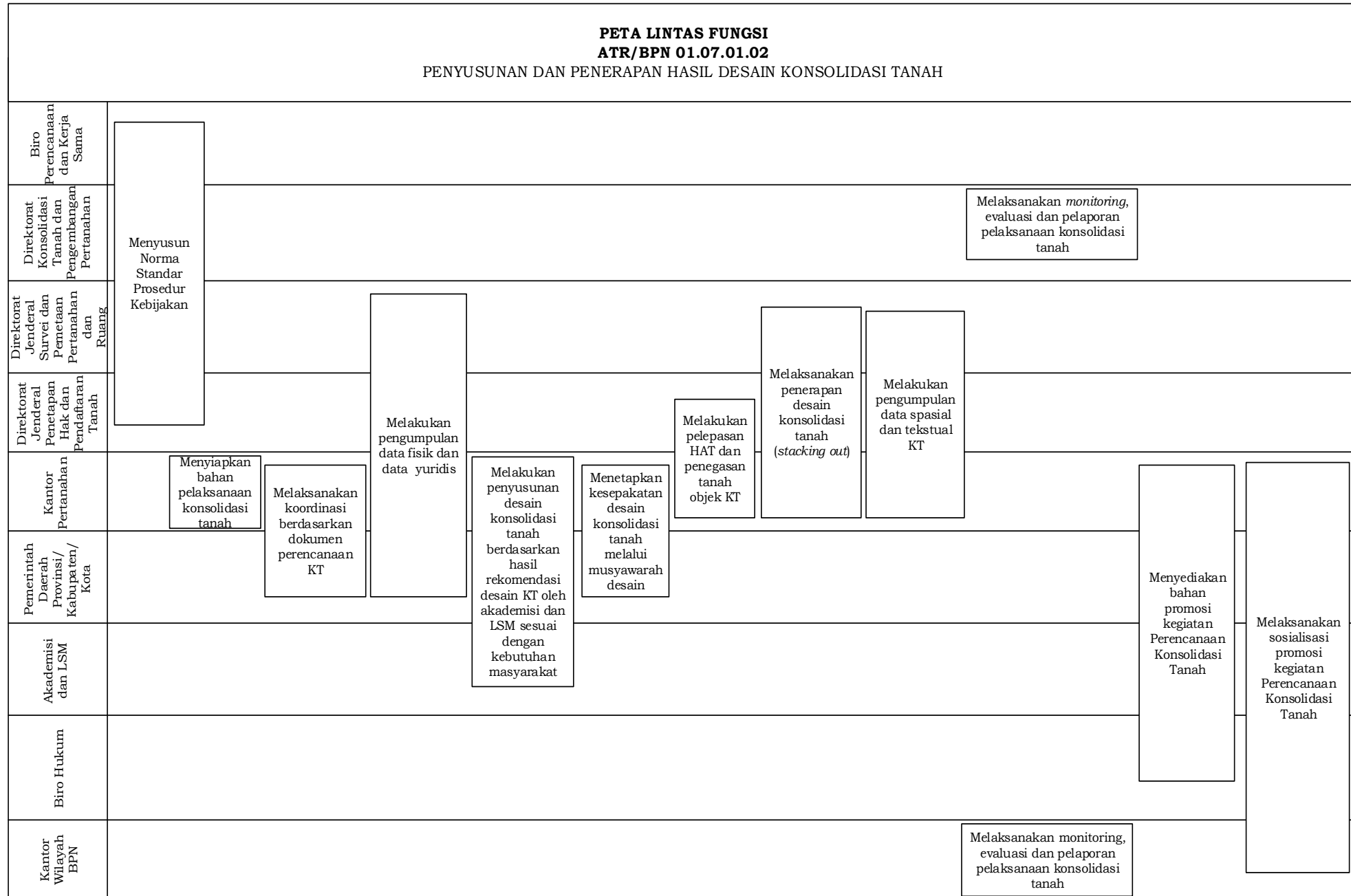
ATR/BPN 01.07.01.02
Penyusunan dan Penerapan Hasil Desain Konsolidasi Tanah

Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota
Akademisi dan LSM	Biro Hukum
Kantor Wilayah BPN	

ATR/BPN 01.07.01.03
Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah

Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Biro Hukum	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota
Badan Hukum (BUMN/ BUMD/ BHMN/ Swasta)	Kementerian/Lembaga

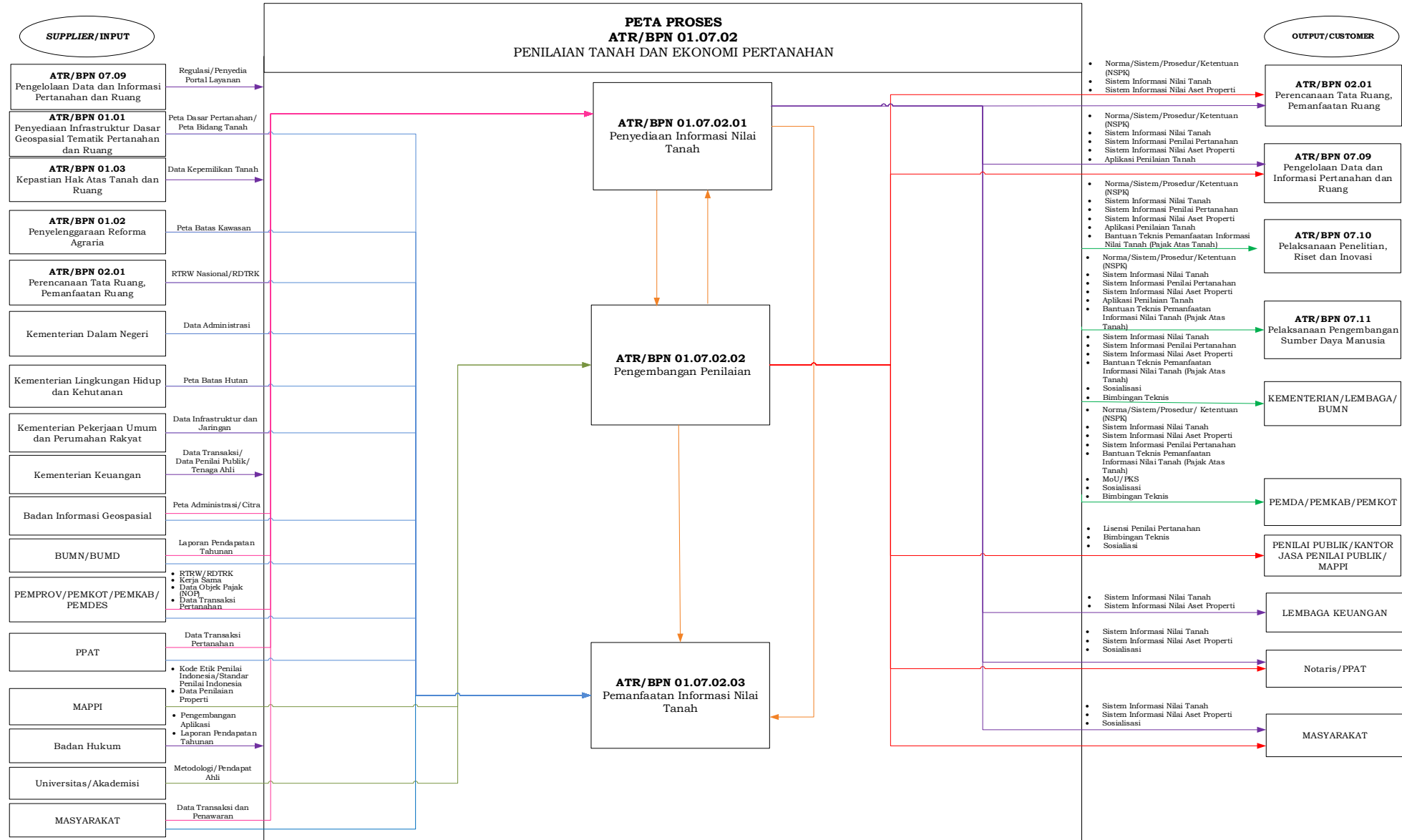




PETA LINTAS FUNGSI
ATR/BPN 01.07.01.03
 PENGEMBANGAN PERTANAHAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan	Melakukan identifikasi kebutuhan basis data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Melakukan pengumpulan data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Menyiapkan materi bahan sosialisasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Melaksanakan sosialisasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Melakukan penandatanganan MOU dan PKS pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah	Pelaksanaan kerja sama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Teknis)	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang								
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah								
Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan								
Biro Hukum		Melakukan identifikasi kebutuhan sosialisasi dan promosi						
Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota								
Badan Hukum (BUMD/ BUMD/ BHMN/ Swasta)								
Kementerian/ Lembaga								

3.6.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan



PETA RELASI
ATR/BPN 01.07.02
 PENILAIAN TANAH DAN EKONOMI PERTANAHAN

ATR/BPN 01.07.02.01
 Penyediaan Informasi Nilai Tanah

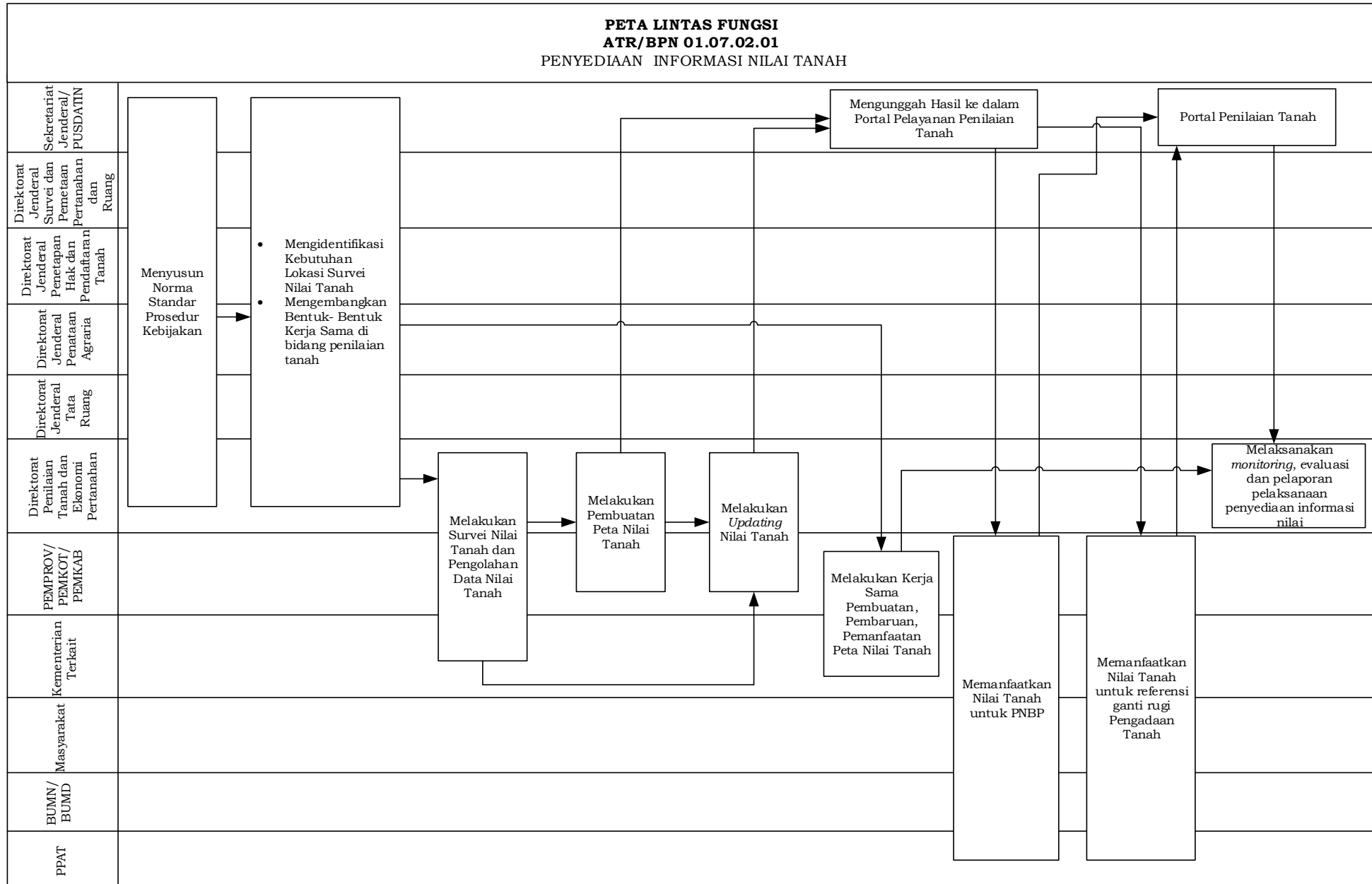
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
PEM PROV/ PEM KOT/ PEM KAB	Kementerian Terkait
BUMN/ BUMD	Masyarakat

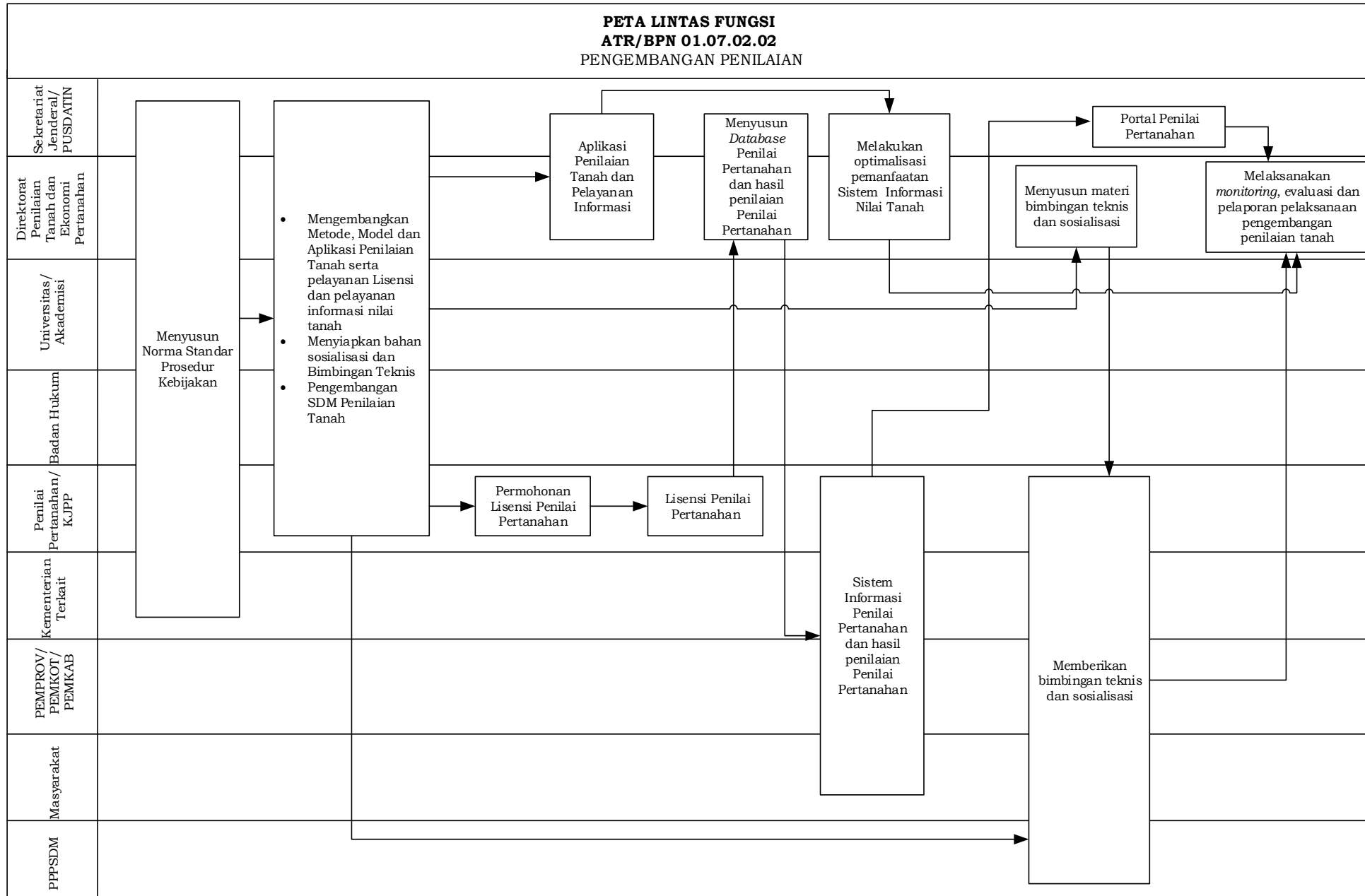
ATR/BPN 01.07.02.02
 Pengembangan Penilaian

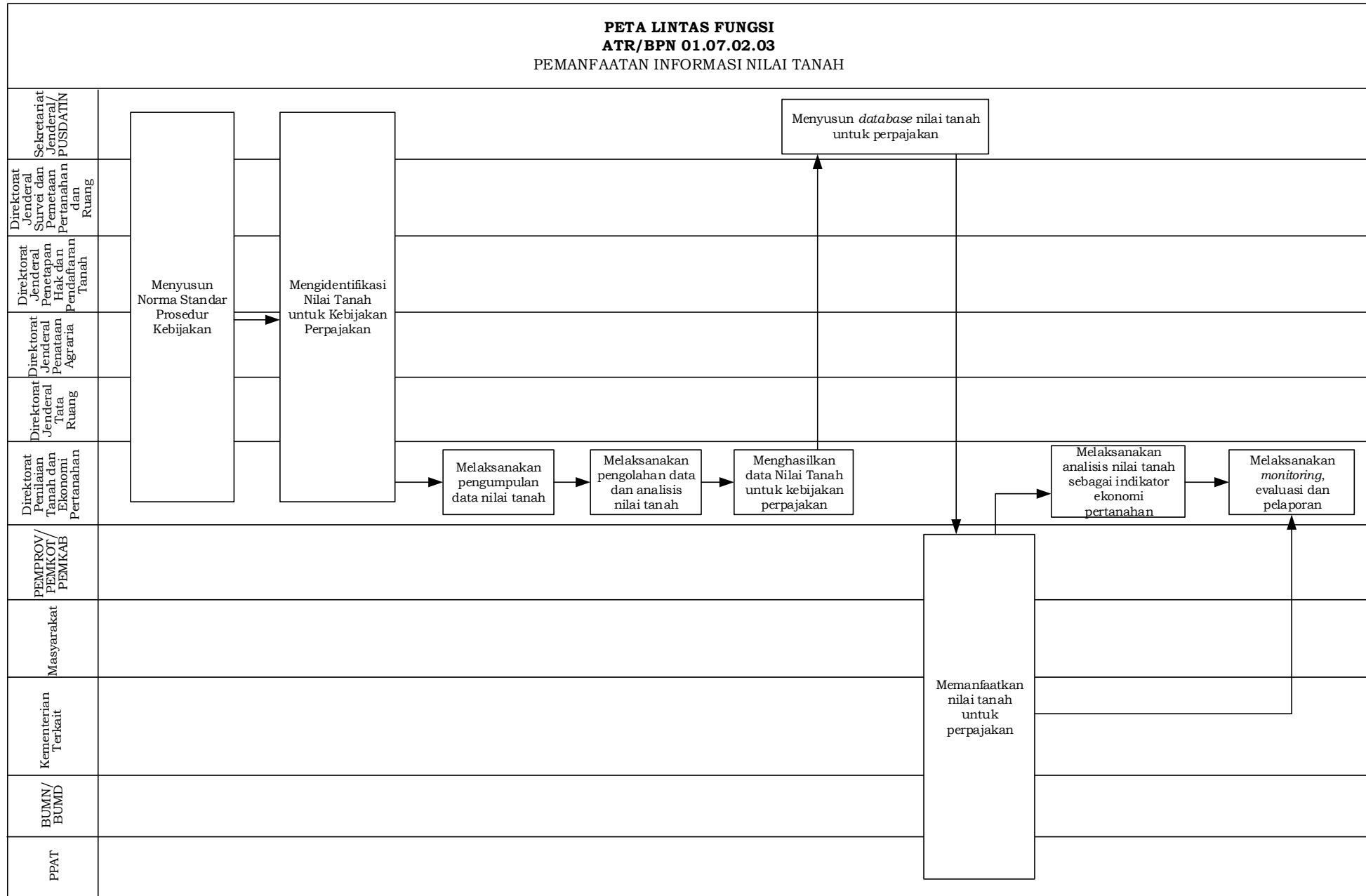
PUSDATIN	Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
Universitas/Akademisi	Badan Hukum
Penilai Pertanahan/KJPP	Kementerian Terkait
PEM PROV/ PEM KOT/ PEM KAB	Masyarakat
PPPSDM	

ATR/BPN 01.07.02.03
 Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah

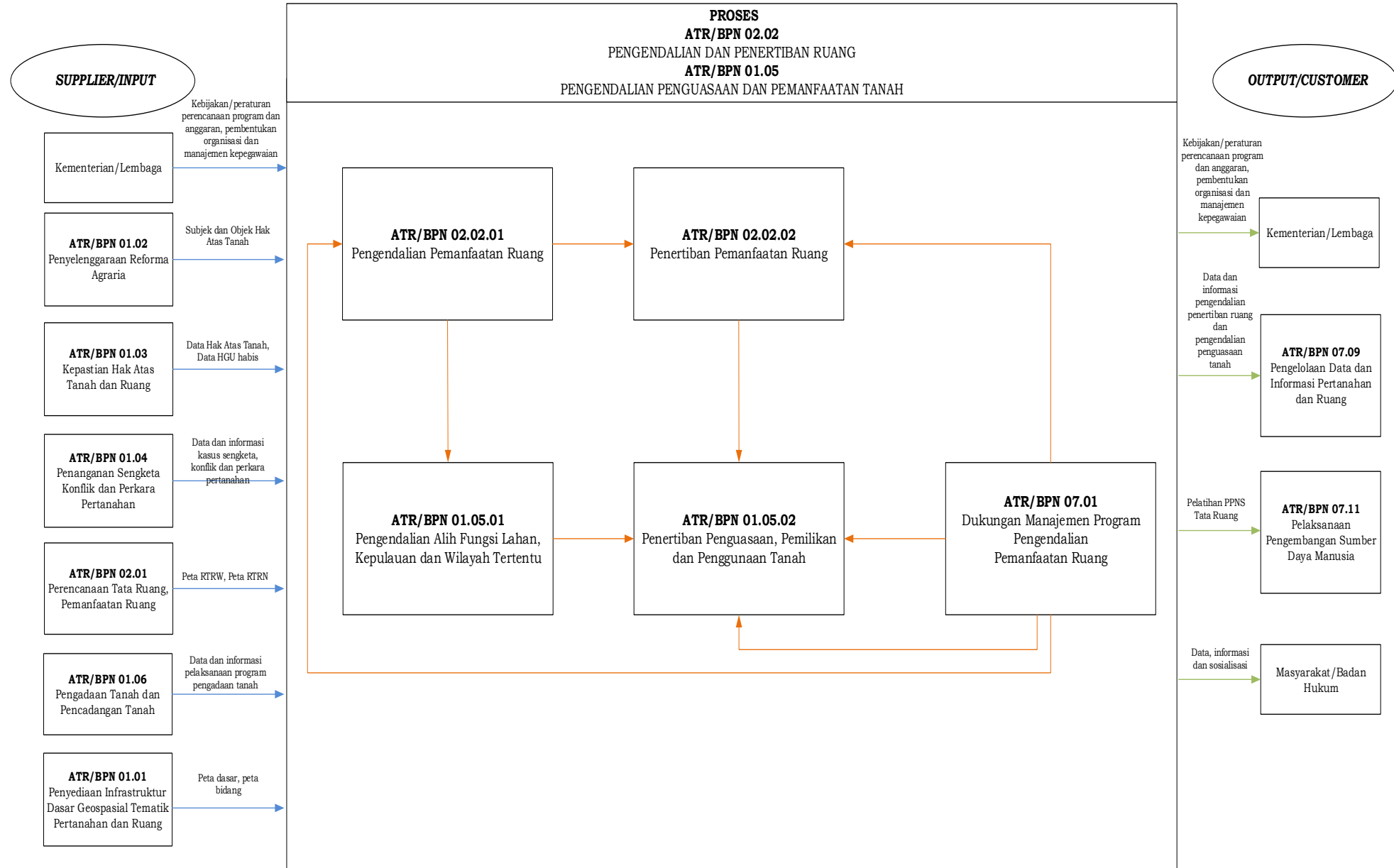
PUSDATIN	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
PEM PROV/ PEM KOT/ PEM KAB	Masyarakat
Kementerian Terkait	BUMN/ BUMD
PPAT	



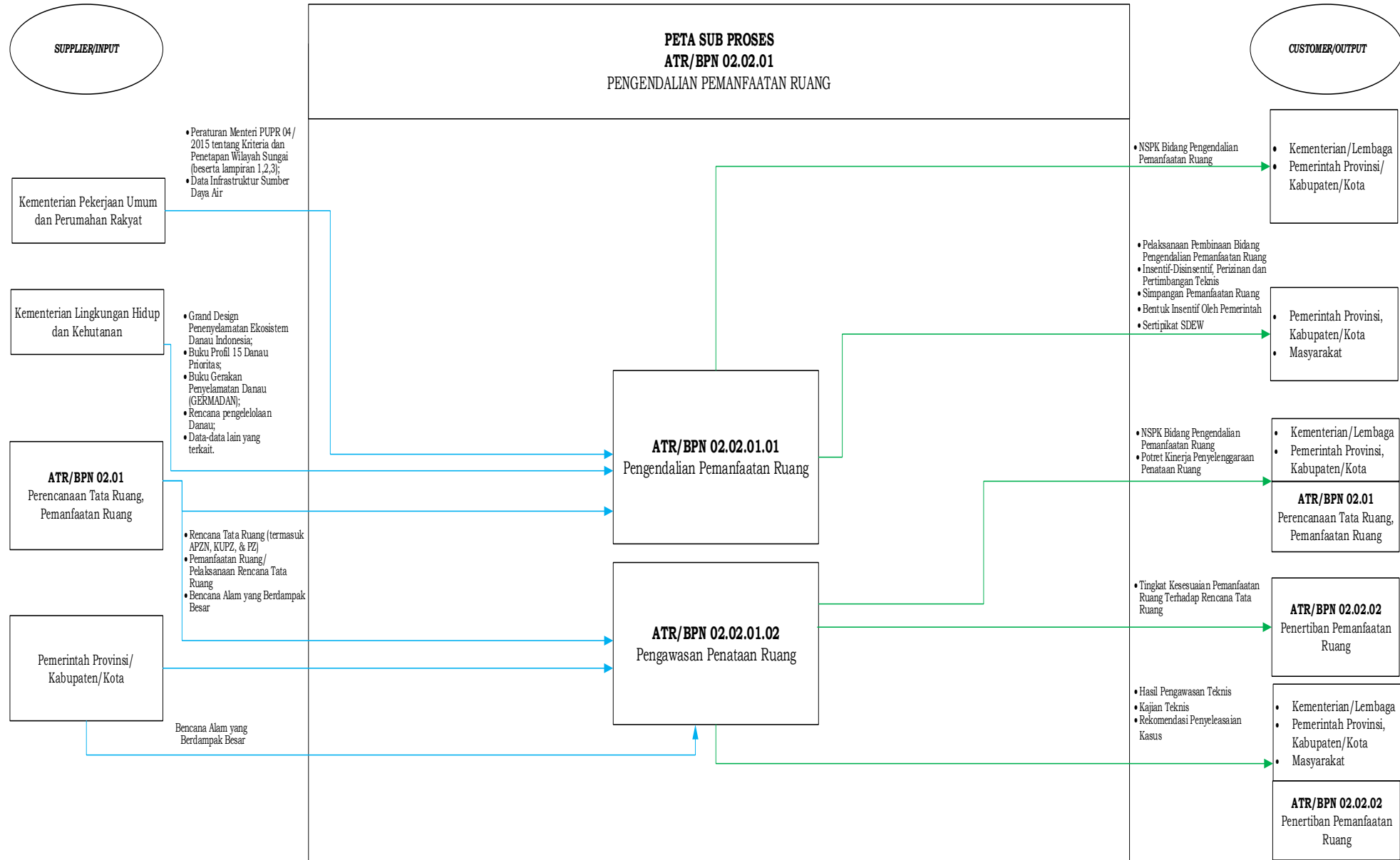




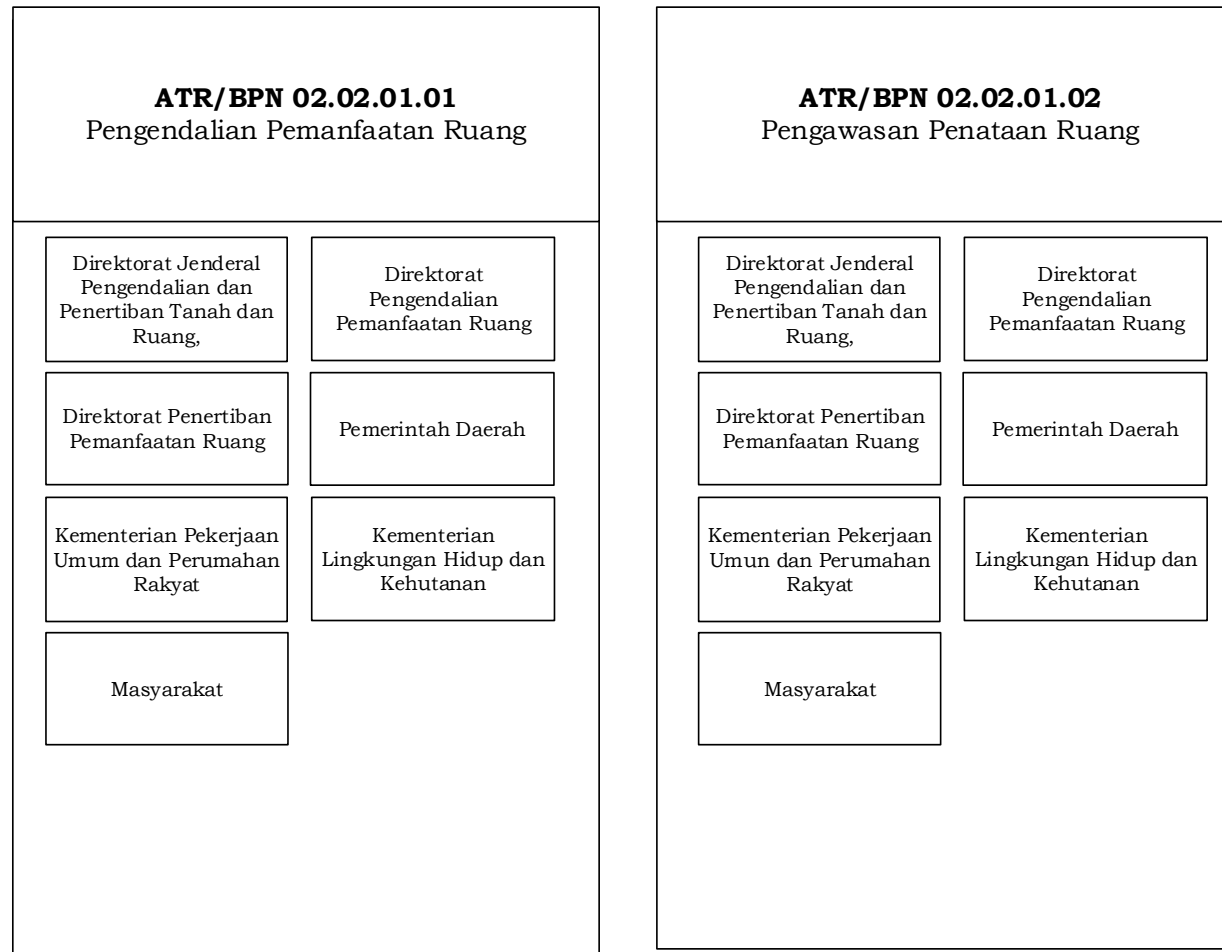
3.7. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

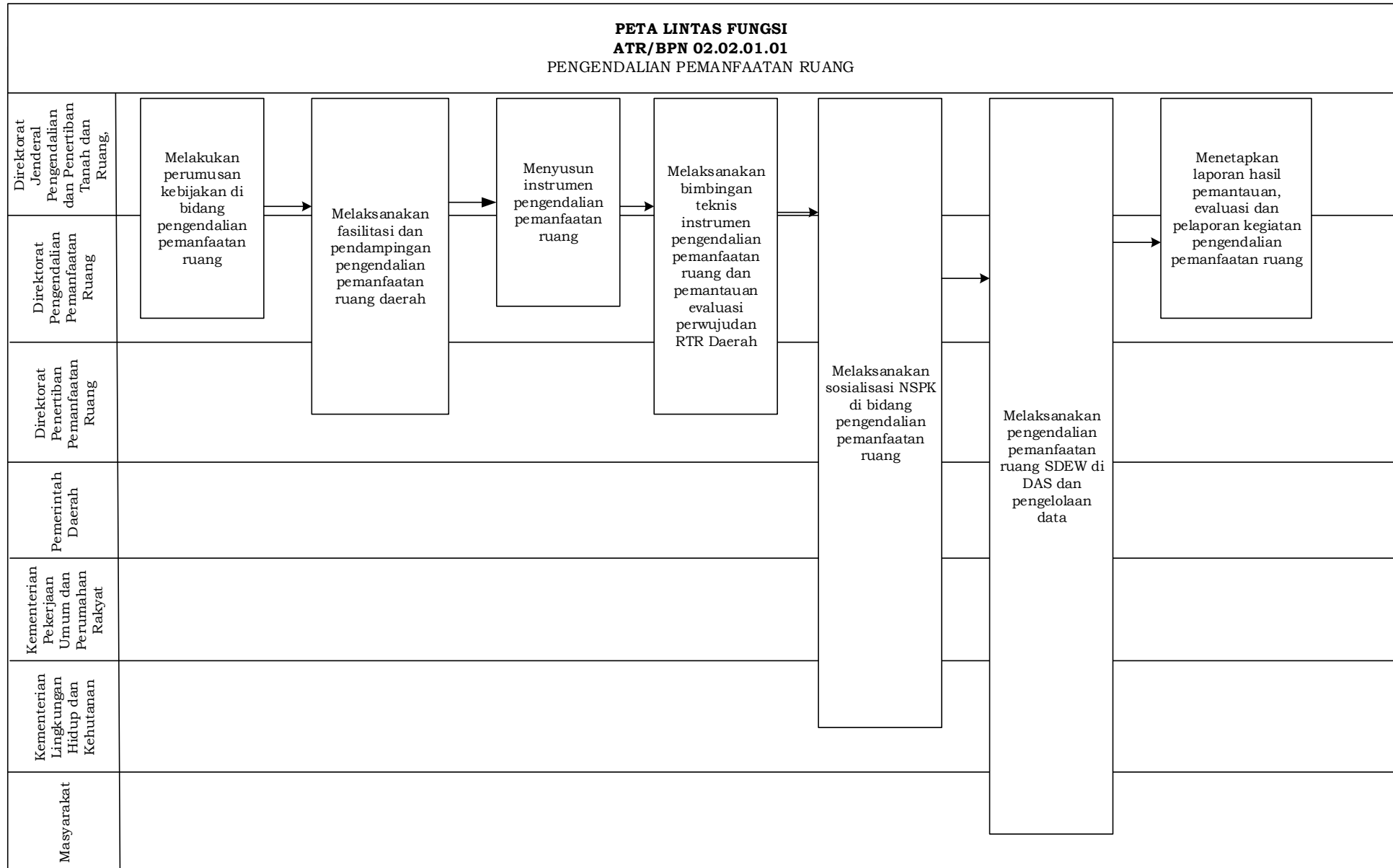


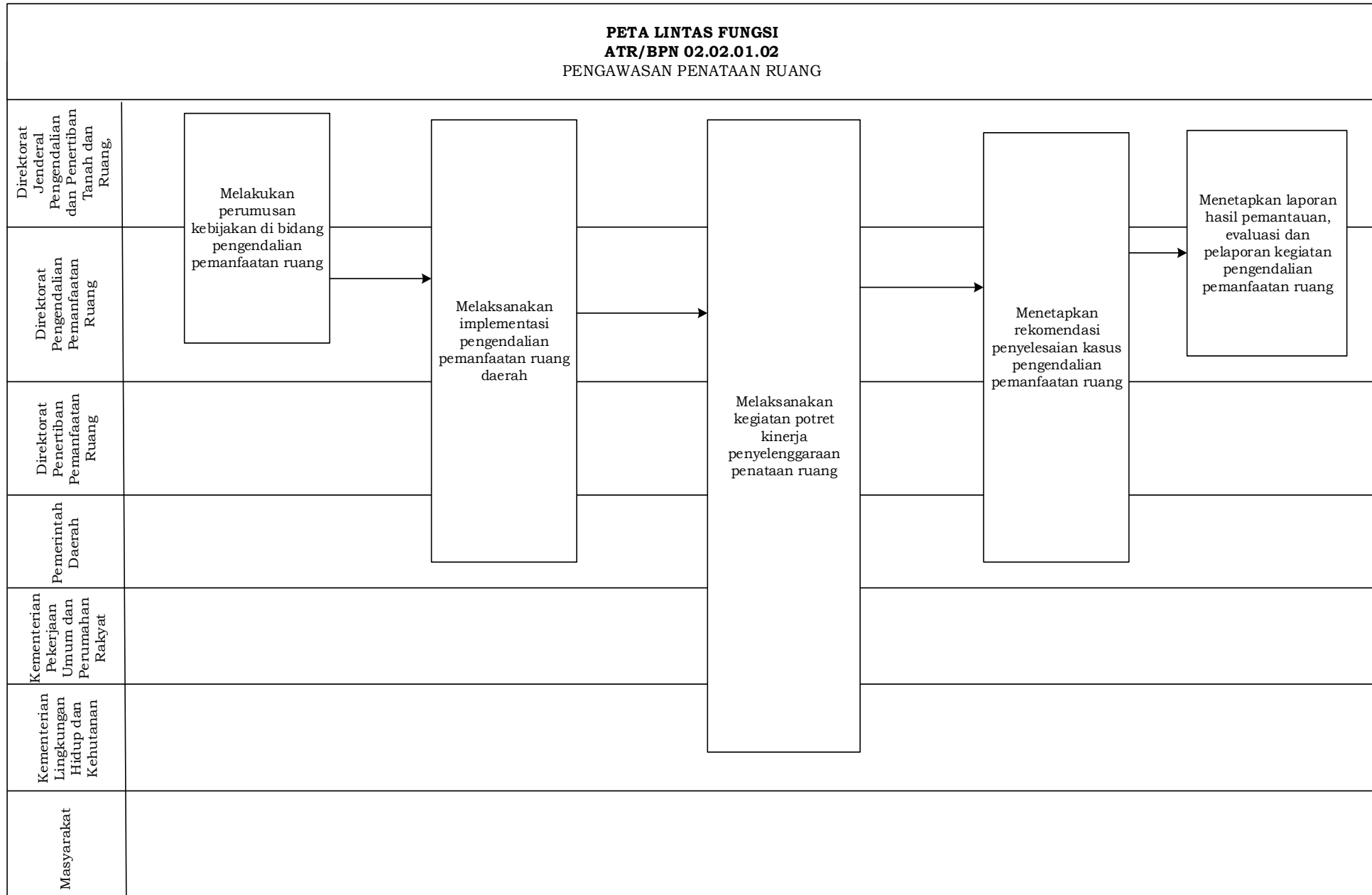
3.7.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang



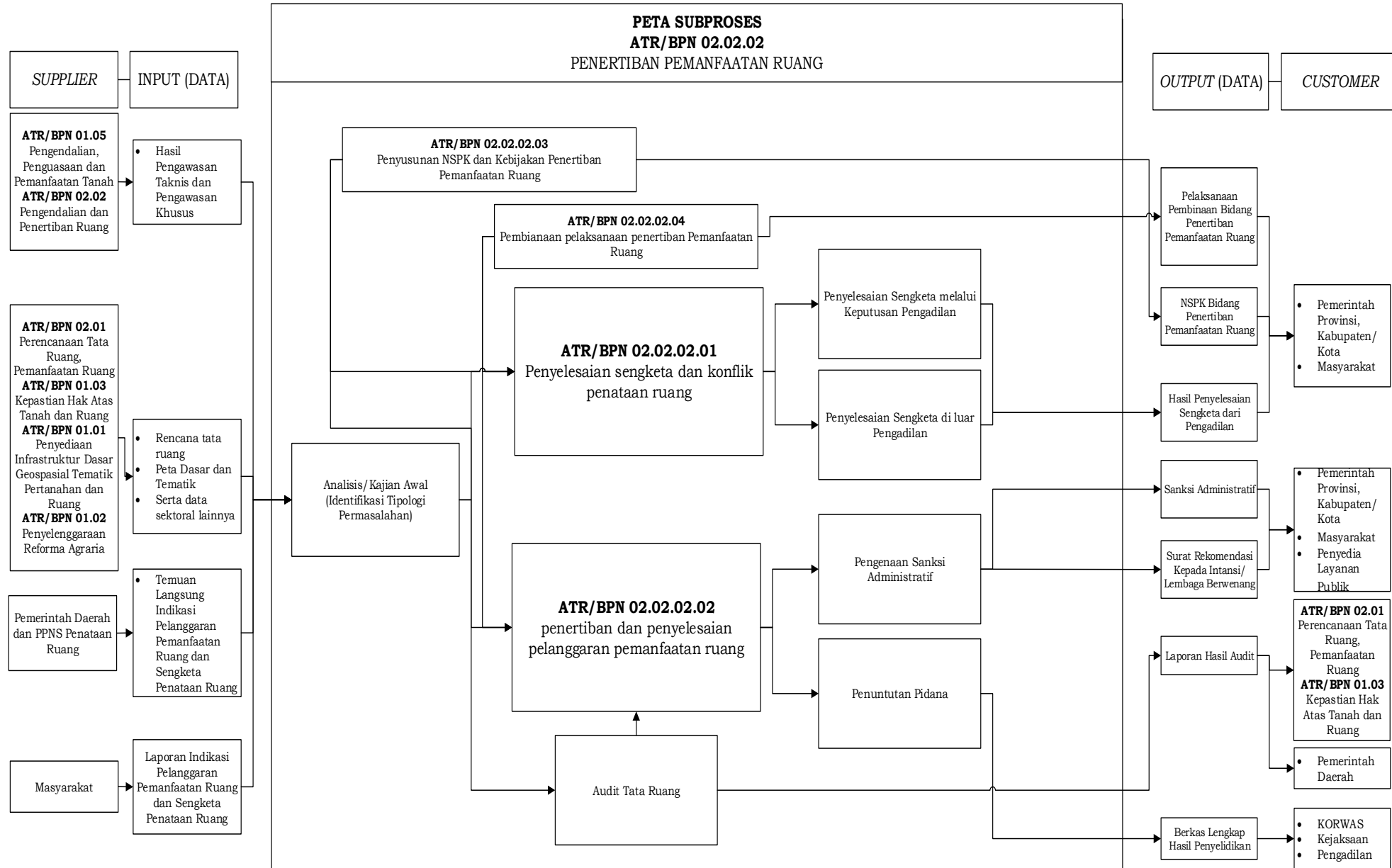
PETA RELASI
ATR/BPN 02.02.01
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG



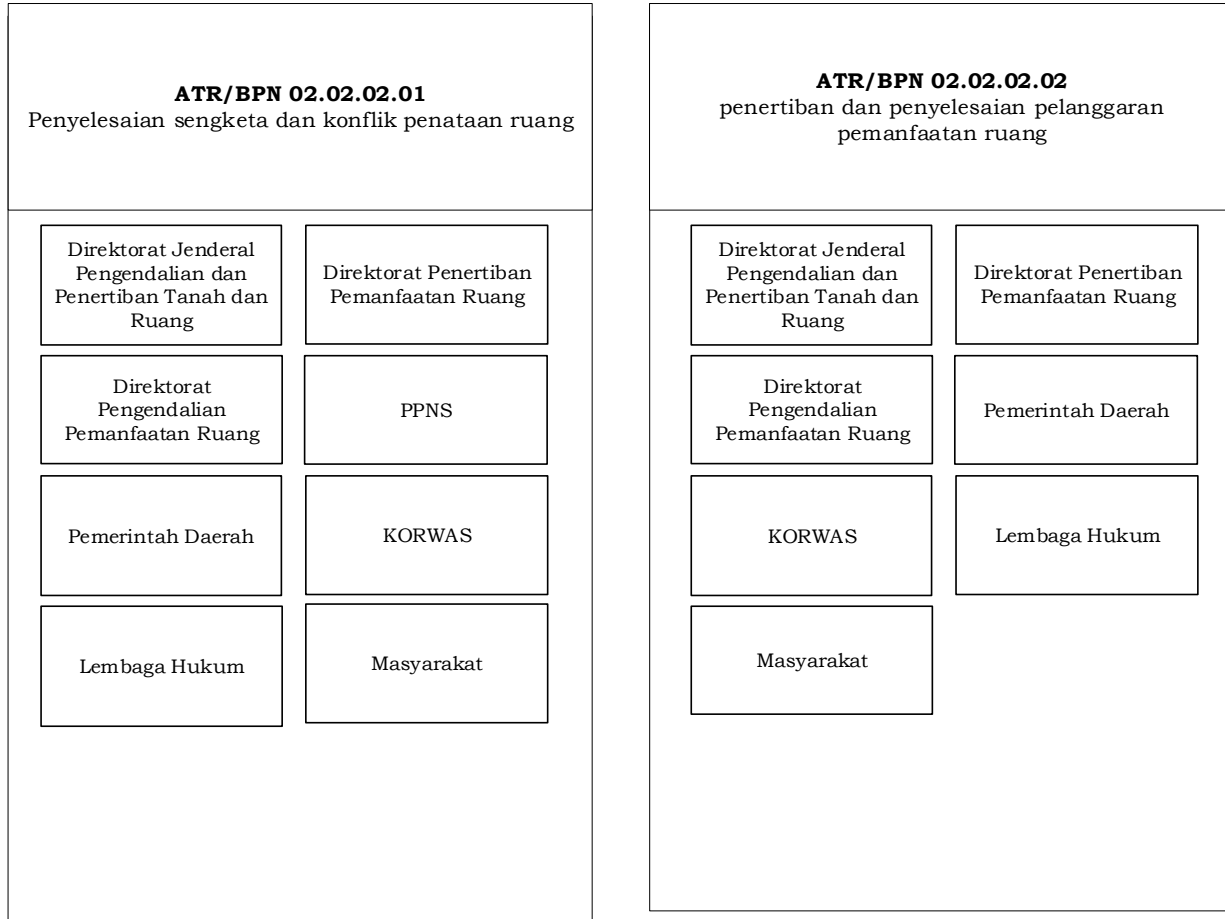


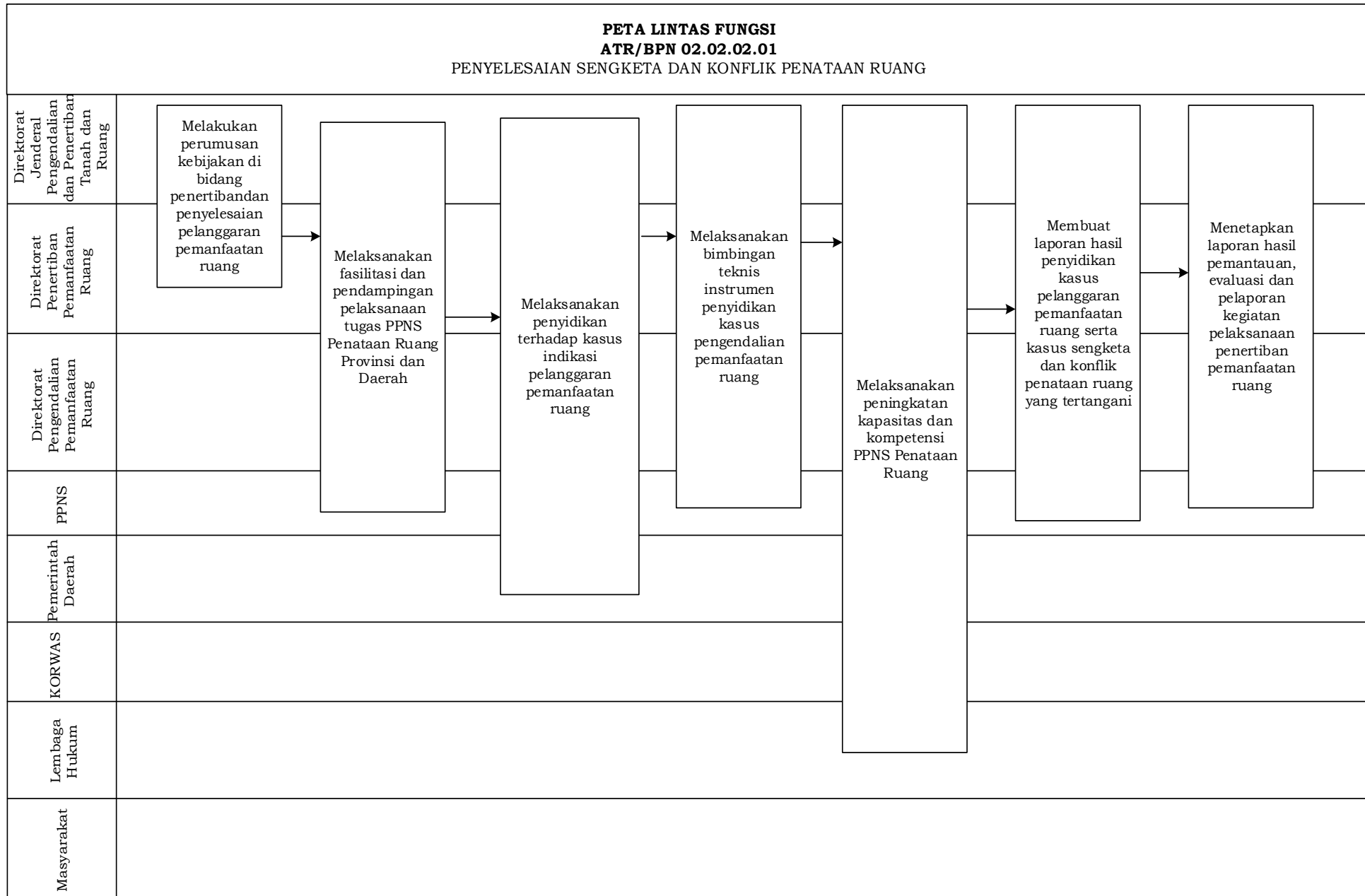


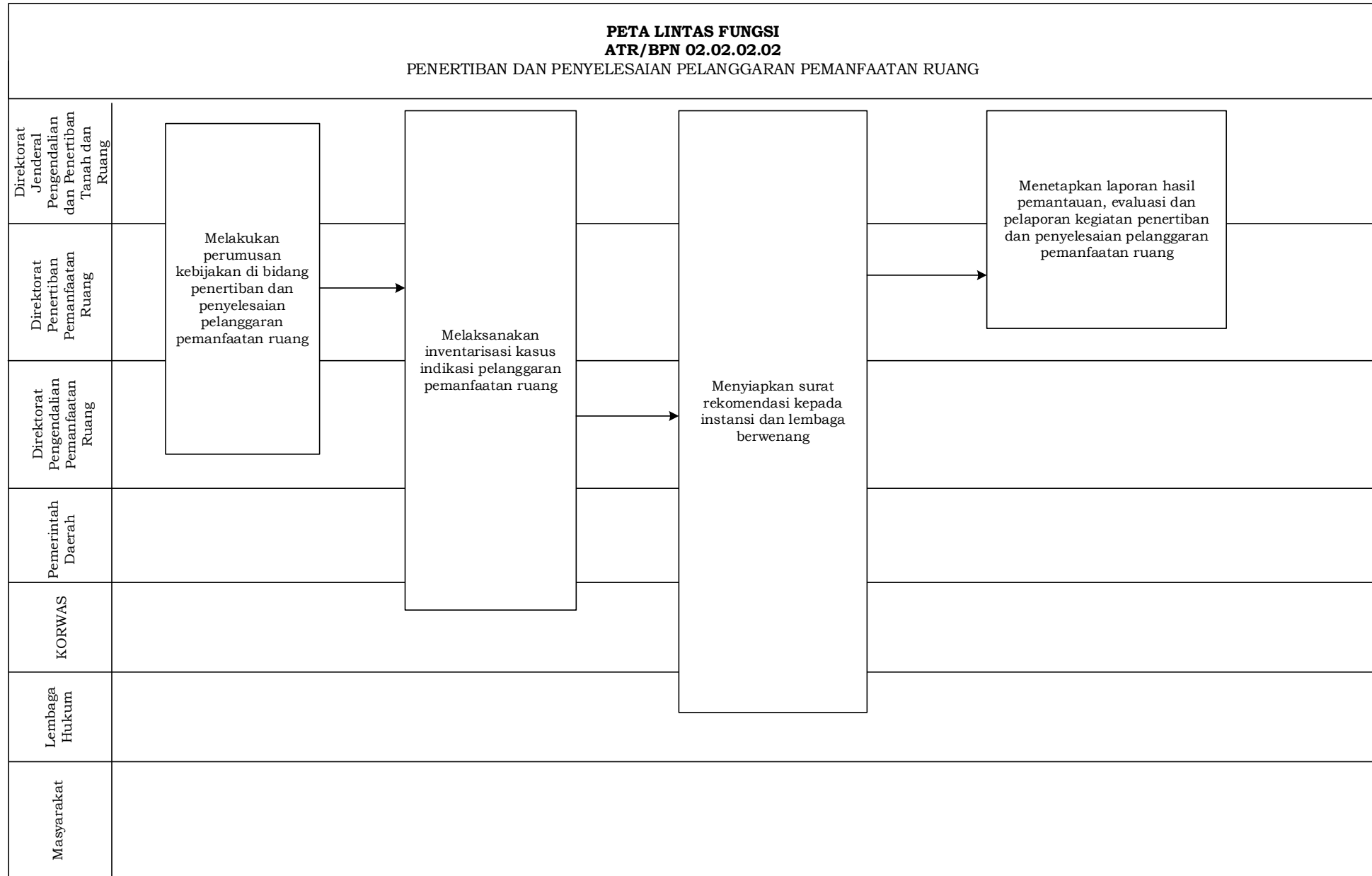
3.7.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang



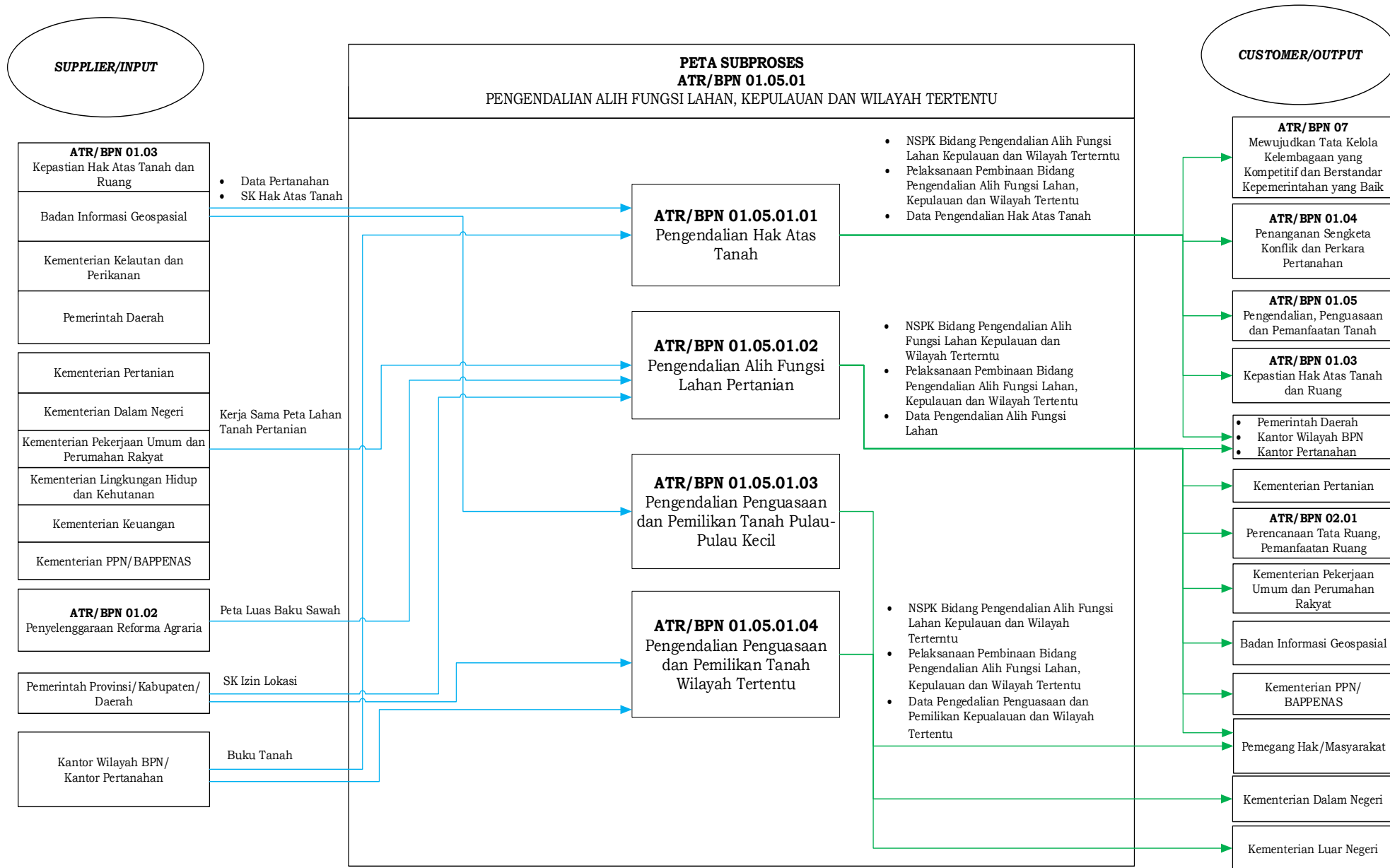
PETA RELASI
ATR/BPN 02.02.02
PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG





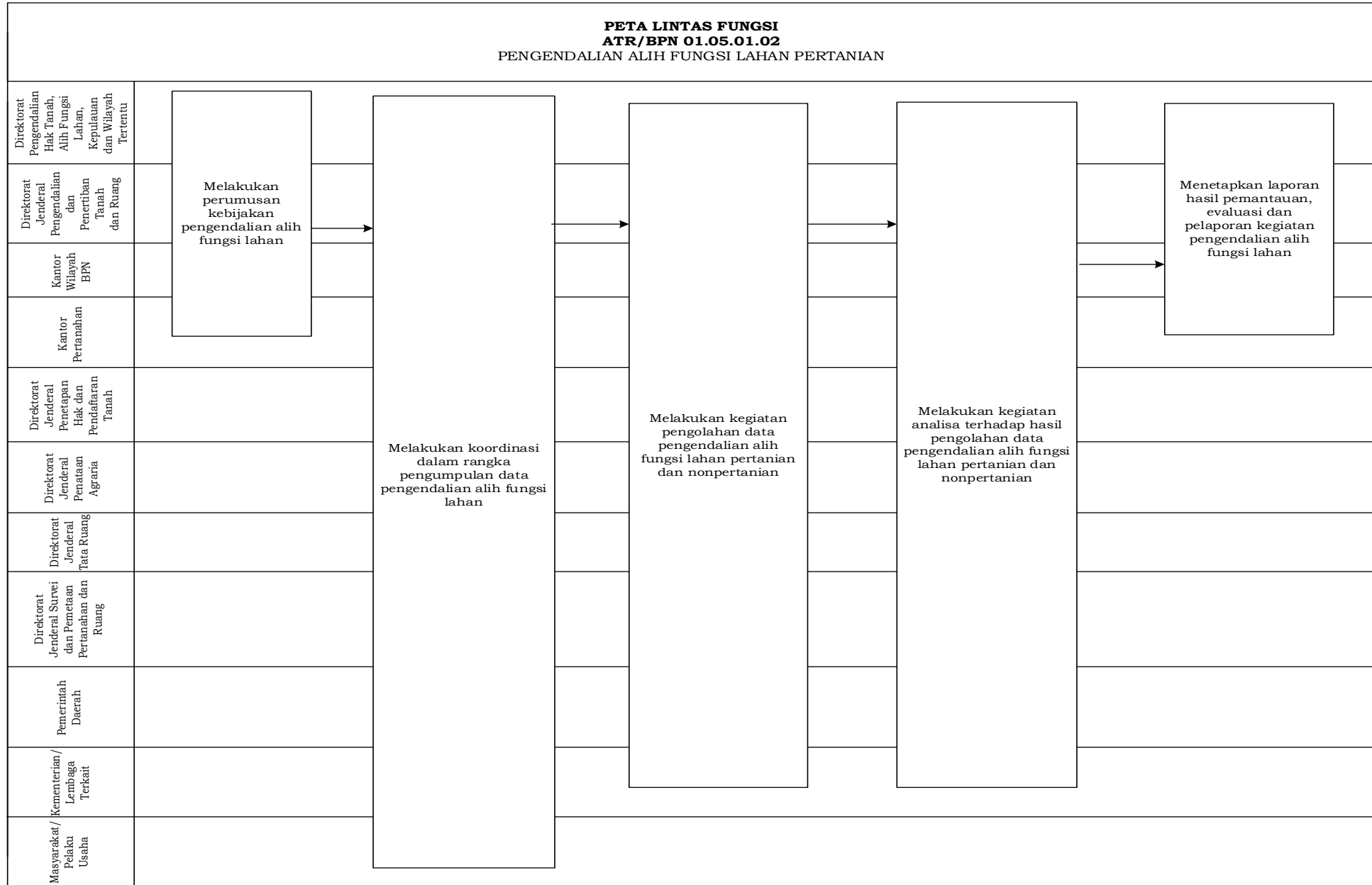


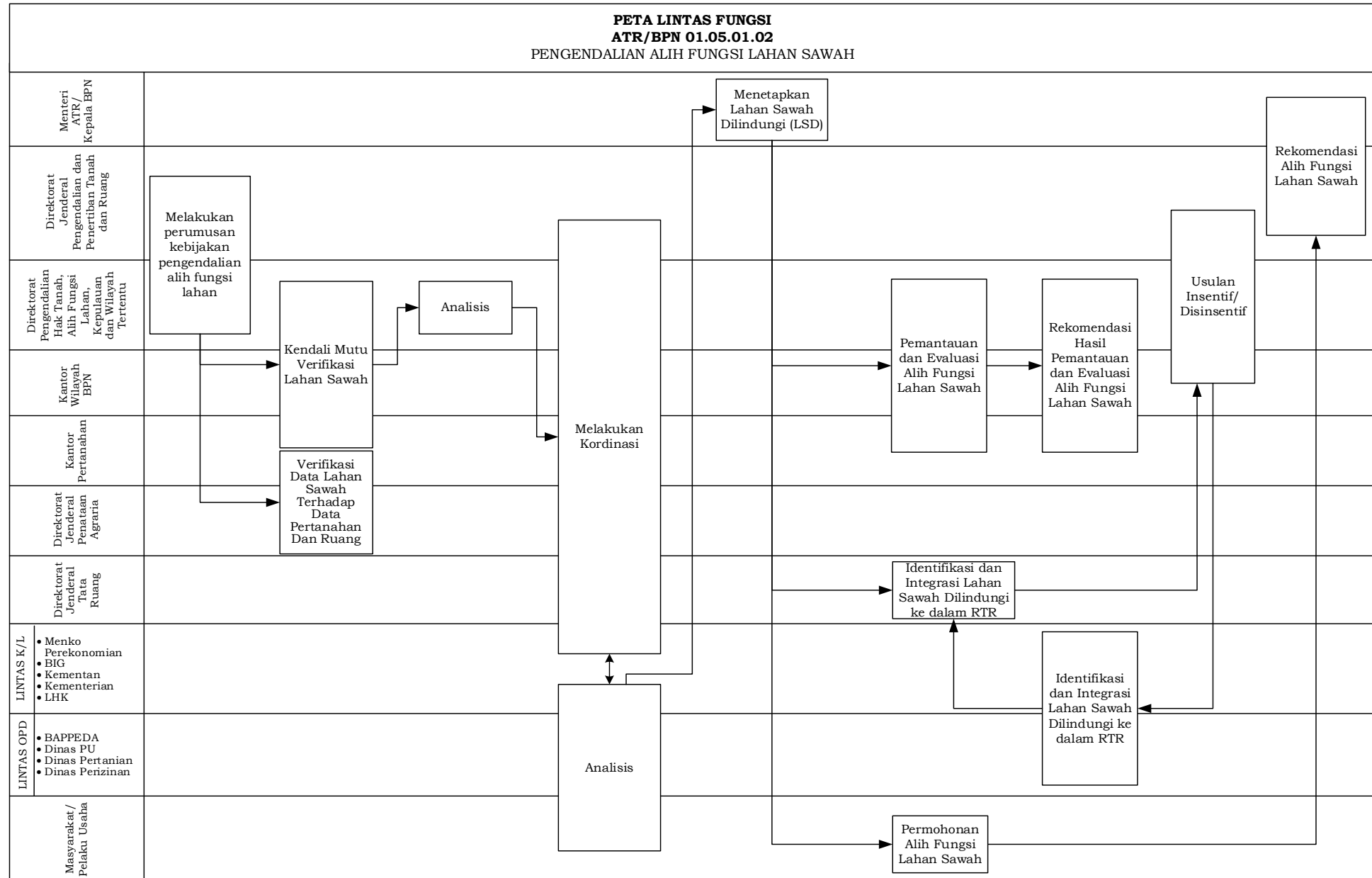
3.7.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu

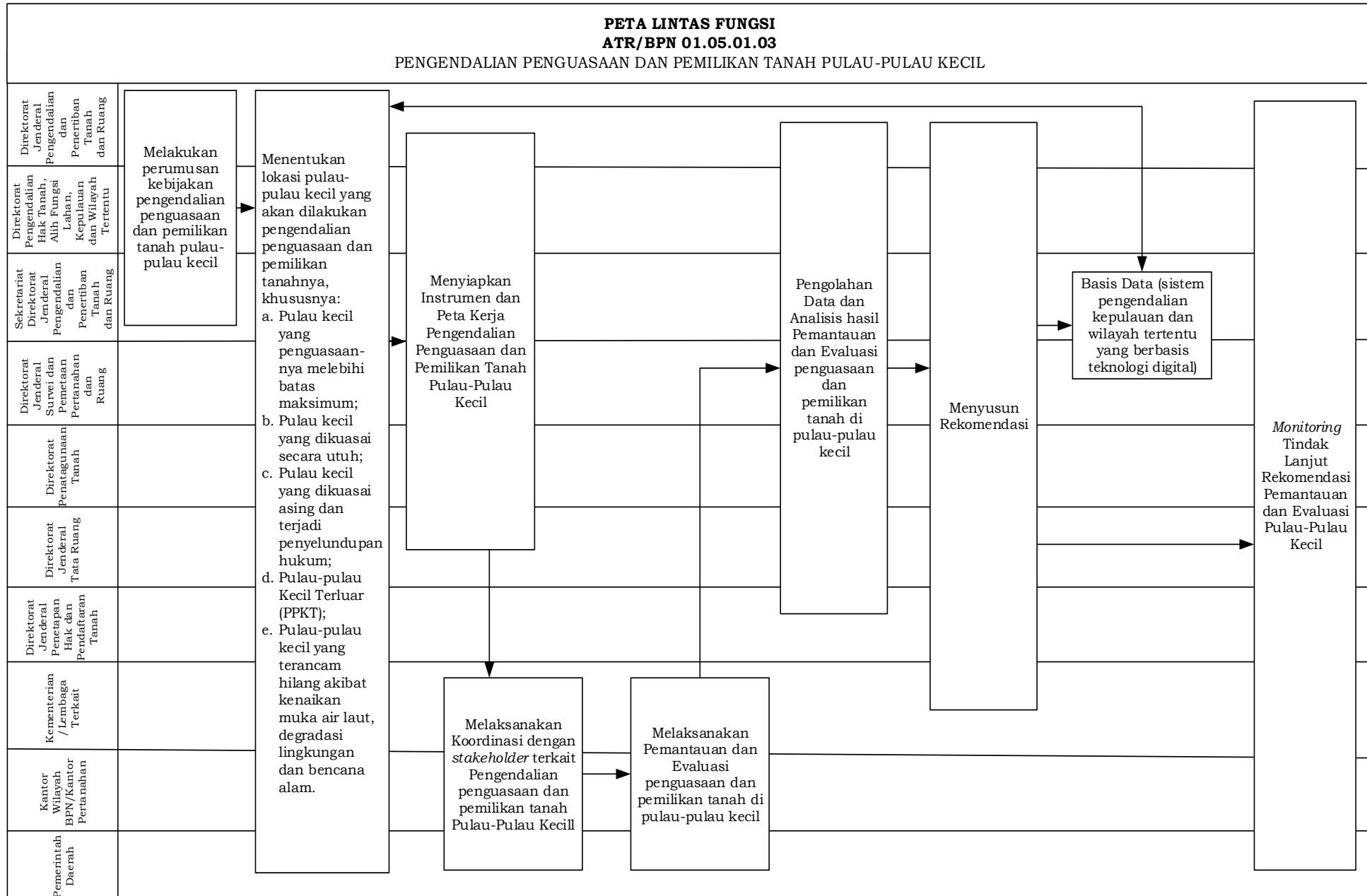


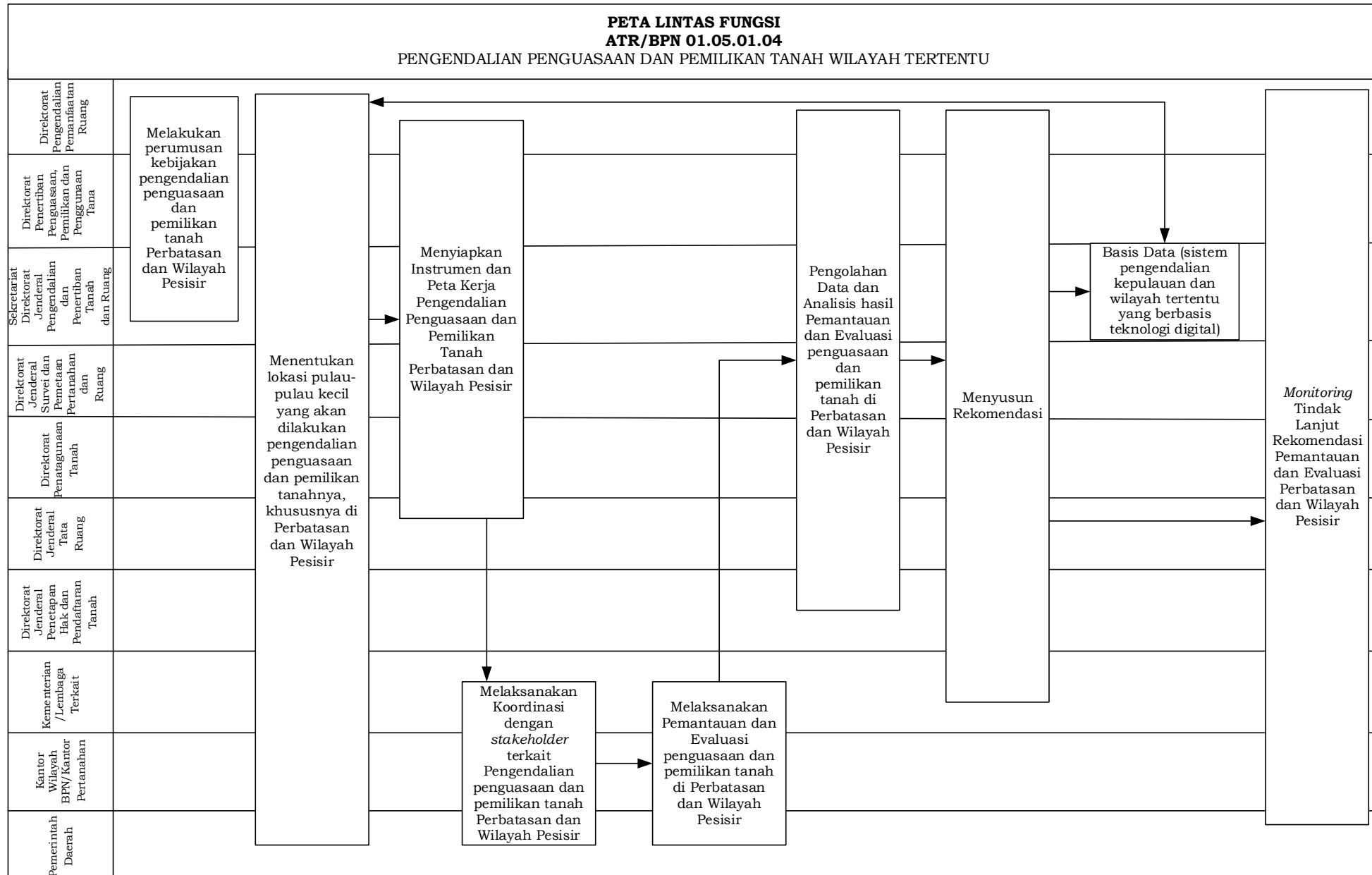
PETA RELASI
ATR/BPN 01.05.01
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU

ATR/BPN 01.05.01.01 Pengendalian Hak Atas Tanah	ATR/BPN 01.05.01.02 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	ATR/BPN 01.05.01.03 Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pulau-Pulau Kecil	ATR/BPN 01.05.01.04 Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Wilayah Tertentu																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="padding: 2px;">Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Pemerintah Daerah</td> <td style="padding: 2px;">Badan Informasi Geospasial</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kementerian/ Lembaga Terkait</td> <td style="padding: 2px;">Masyarakat</td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Pemerintah Daerah	Badan Informasi Geospasial	Kementerian/ Lembaga Terkait	Masyarakat	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kantor Wilayah BPN</td> <td style="padding: 2px;">Kantor Pertanahan</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Penataan Agraria</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Menteri ATR/Kepala BPN</td> <td style="padding: 2px;">Kementerian/ Lembaga Terkait</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Masyarakat/Pelaku Usaha</td> <td style="padding: 2px;">Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LINTAS K/L • Menko Perekonomian • BIG • Kementan • Kementerian LHK</td> <td style="padding: 2px;">LINTAS OPD • BAPPEDA • Dinas PU • Dinas Pertanian • Dinas Perizinan</td> </tr> </table>	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Menteri ATR/Kepala BPN	Kementerian/ Lembaga Terkait	Masyarakat/Pelaku Usaha	Pemerintah Daerah	LINTAS K/L • Menko Perekonomian • BIG • Kementan • Kementerian LHK	LINTAS OPD • BAPPEDA • Dinas PU • Dinas Pertanian • Dinas Perizinan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Penatagunaan Tanah</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="padding: 2px;">Kementerian/ Lembaga Terkait</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan</td> <td style="padding: 2px;">Pemerintah Daerah</td> </tr> </table>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Penatagunaan Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Kementerian/ Lembaga Terkait	Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tana</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Penatagunaan Tanah</td> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Tata Ruang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</td> <td style="padding: 2px;">Kementerian/ Lembaga Terkait</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan</td> <td style="padding: 2px;">Pemerintah Daerah</td> </tr> </table>	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tana	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Penatagunaan Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Kementerian/ Lembaga Terkait	Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu																																																
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan																																																
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria																																																
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan																																																
Pemerintah Daerah	Badan Informasi Geospasial																																																
Kementerian/ Lembaga Terkait	Masyarakat																																																
Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang																																																
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan																																																
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria																																																
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang																																																
Menteri ATR/Kepala BPN	Kementerian/ Lembaga Terkait																																																
Masyarakat/Pelaku Usaha	Pemerintah Daerah																																																
LINTAS K/L • Menko Perekonomian • BIG • Kementan • Kementerian LHK	LINTAS OPD • BAPPEDA • Dinas PU • Dinas Pertanian • Dinas Perizinan																																																
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu																																																
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang																																																
Direktorat Penatagunaan Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang																																																
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Kementerian/ Lembaga Terkait																																																
Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah																																																
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tana																																																
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang																																																
Direktorat Penatagunaan Tanah	Direktorat Jenderal Tata Ruang																																																
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Kementerian/ Lembaga Terkait																																																
Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan	Pemerintah Daerah																																																

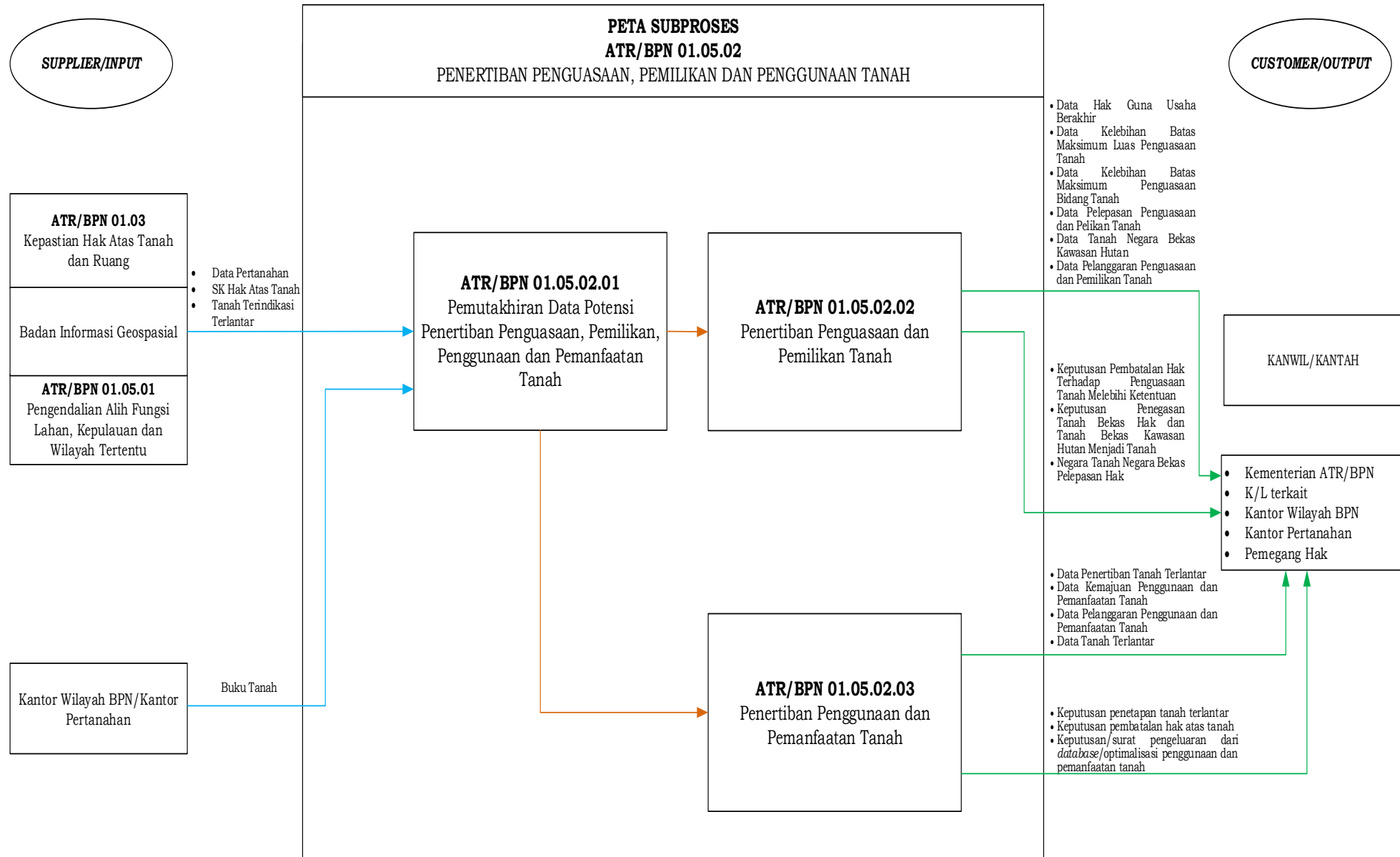








3.7.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah



PETA RELASI
ATR/BPN 01.05.02
PENERTIBAN PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

ATR/BPN 01.05.02.01
Pemutakhiran Data Potensi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

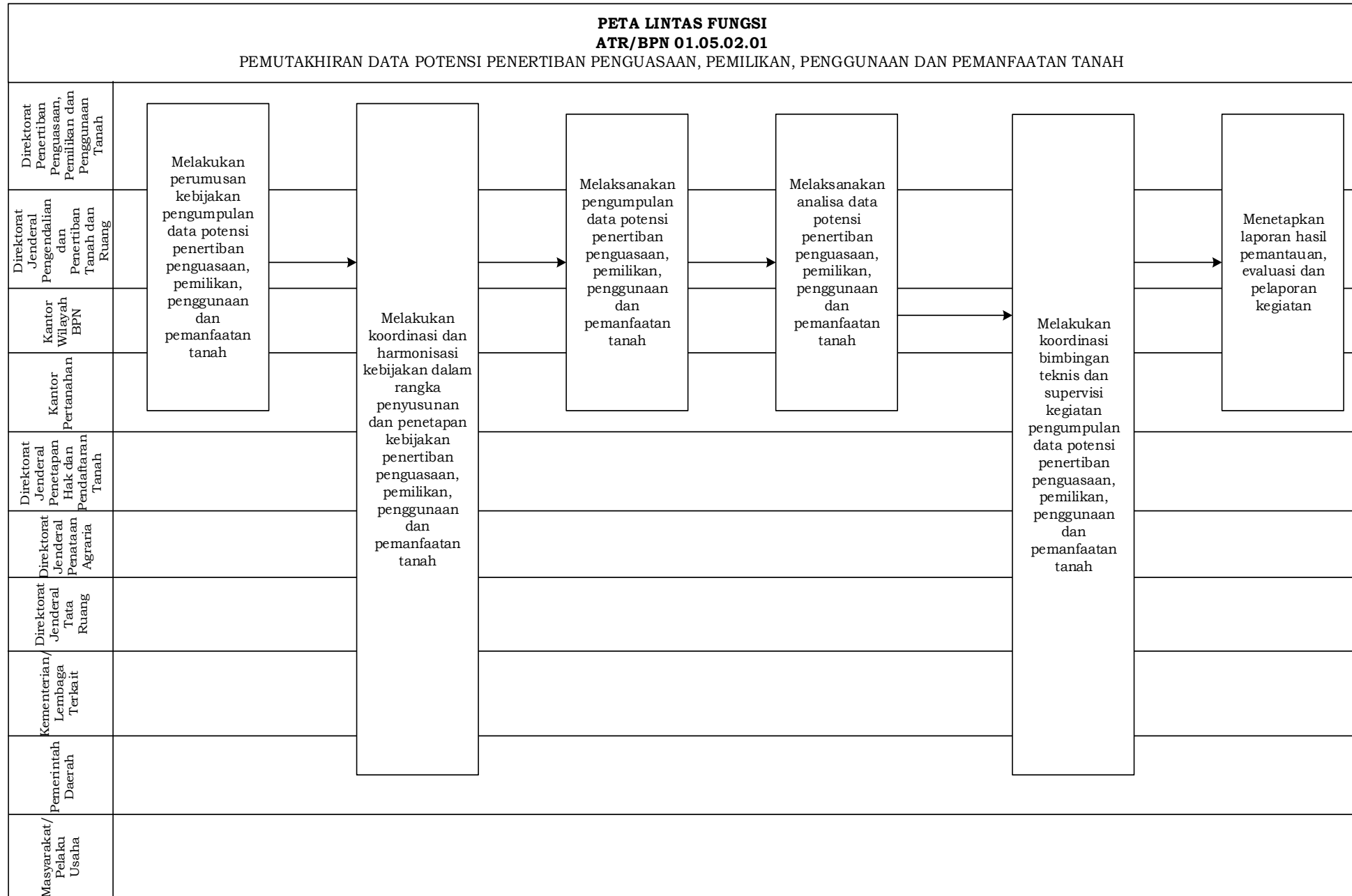
Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Kementerian/Lembaga Terkait
Pemerintah Daerah	Masyarakat/Pelaku Usaha

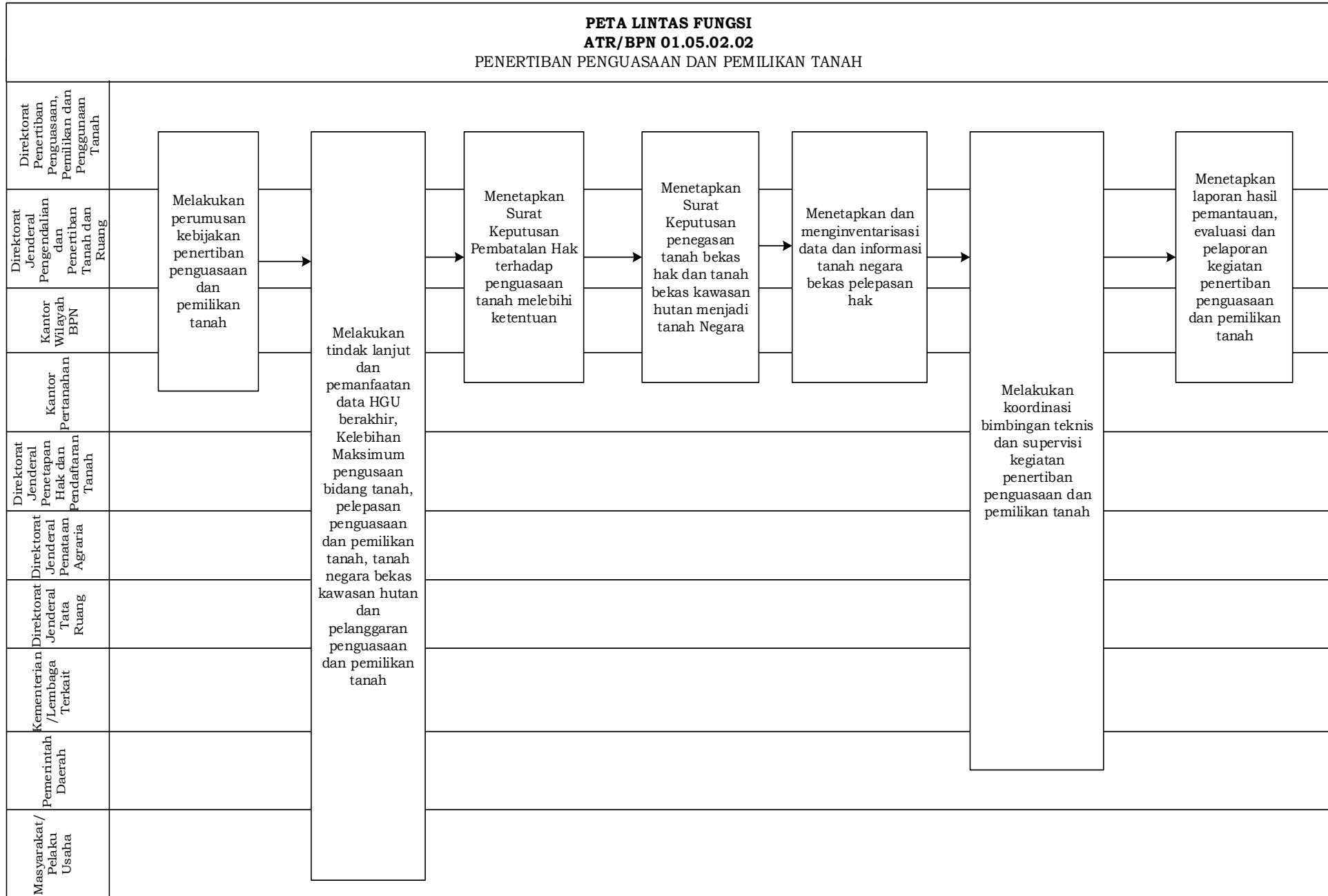
ATR/BPN 01.05.02.02
Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah

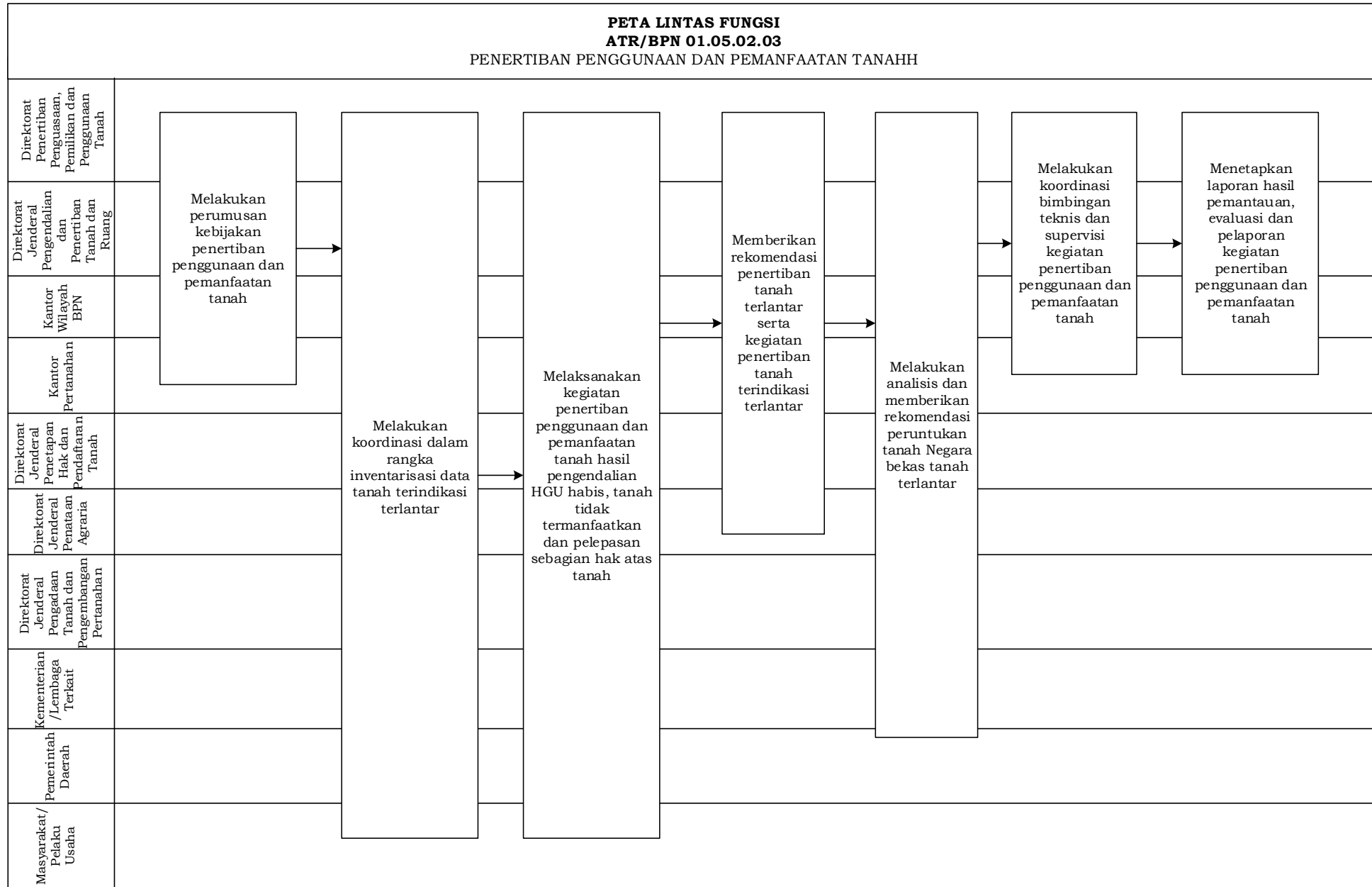
Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Tata Ruang	Kementerian/Lembaga Terkait
Pemerintah Daerah	Masyarakat/Pelaku Usaha

ATR/BPN 01.05.02.03
Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

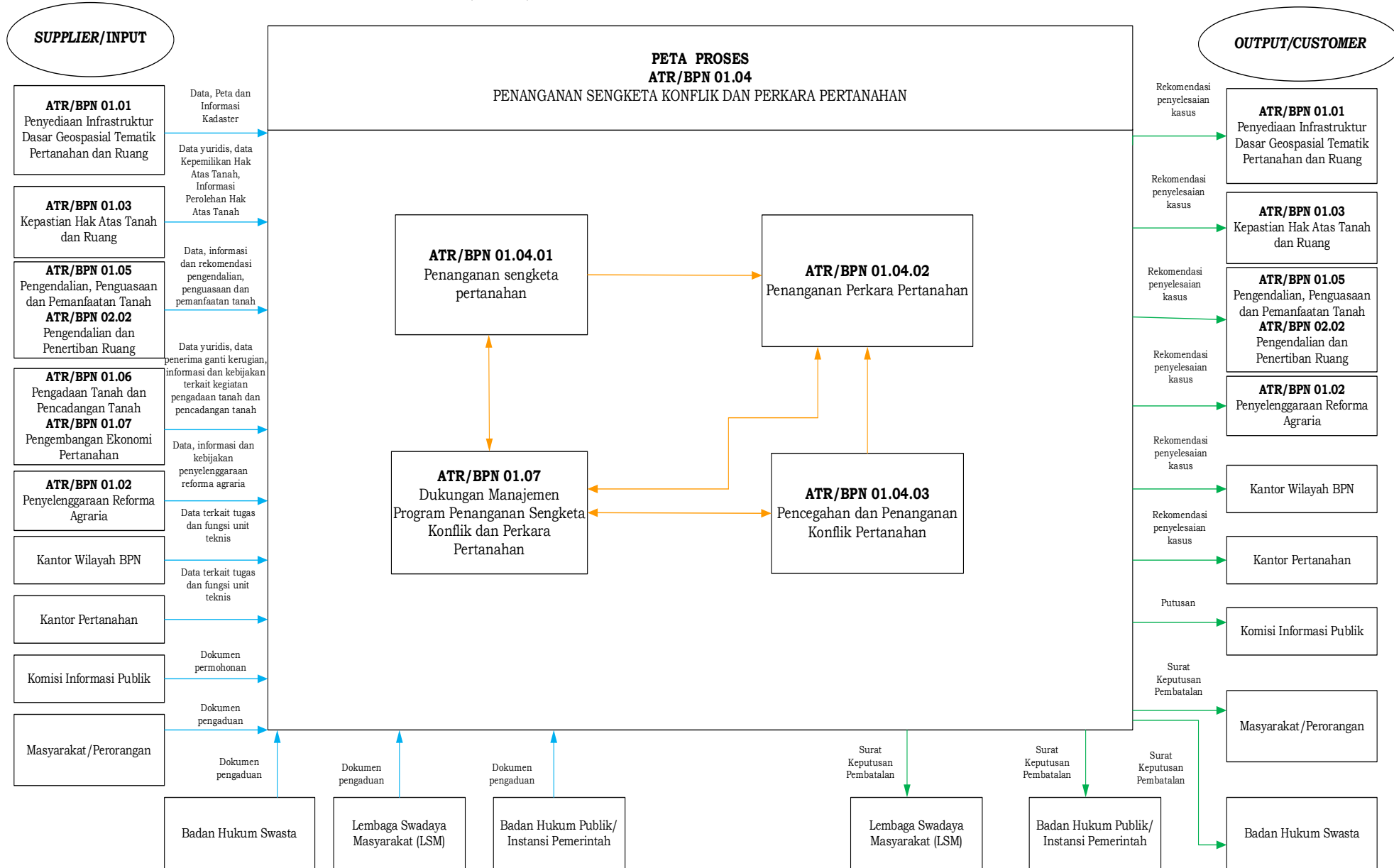
Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Kementerian/Lembaga Terkait
Pemerintah Daerah	Masyarakat/Pelaku Usaha



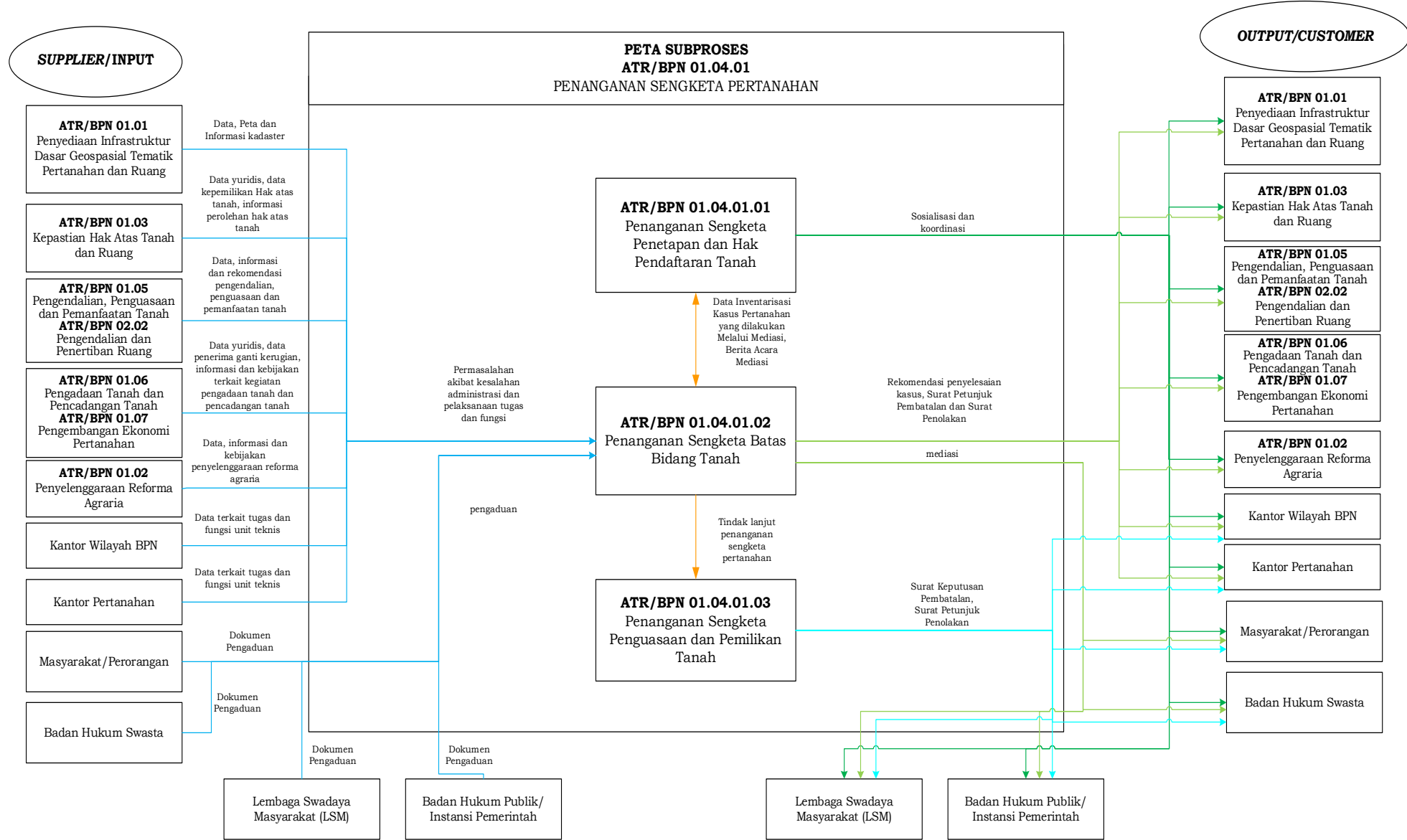




3.8. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan



3.8.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penanganan Sengketa Perkara



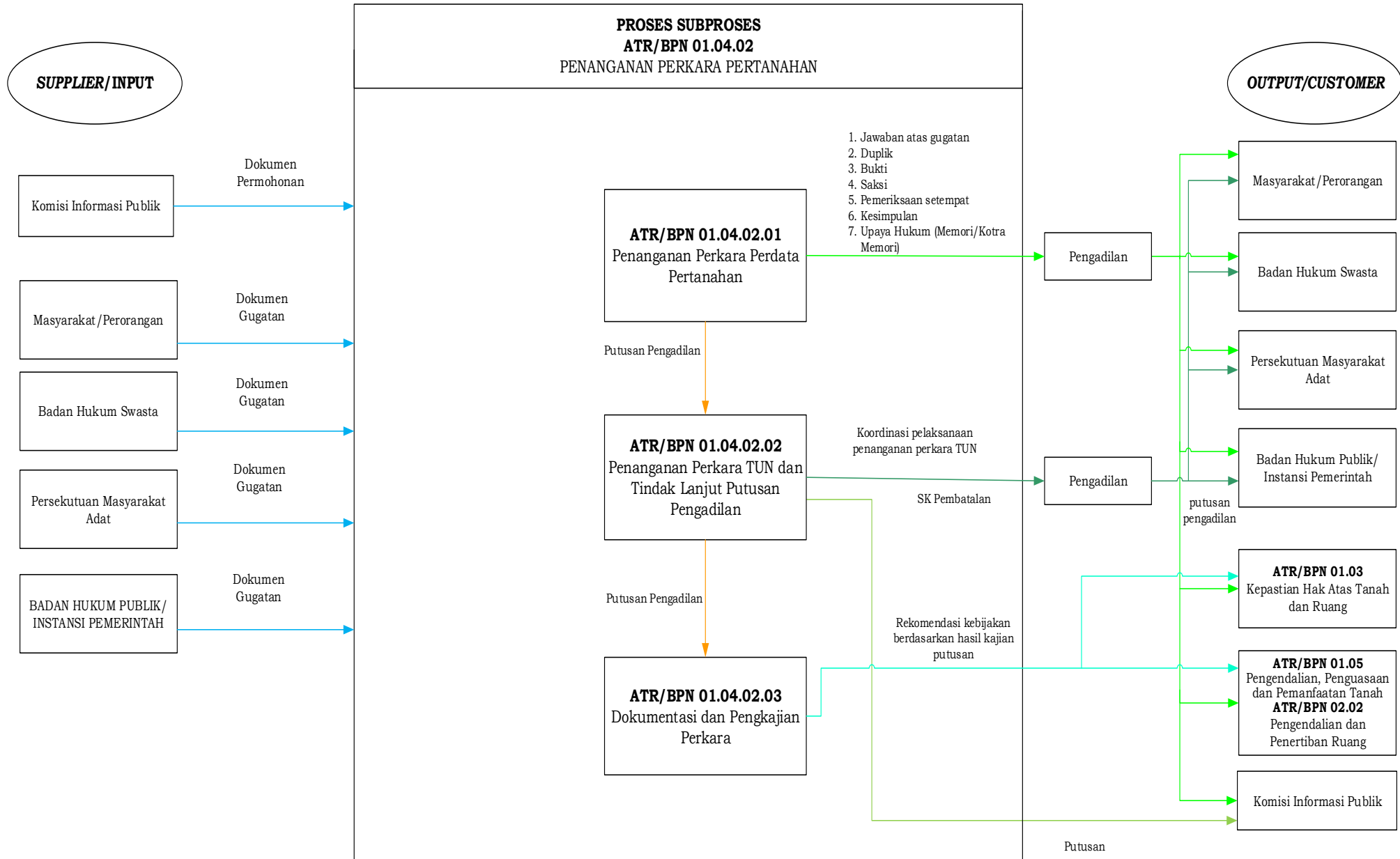
PETA RELASI
ATR/BPN 01.04.01
PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

ATR/BPN 01.04.01.01 Penanganan Sengketa Penetapan dan Hak Pendaftaran Tanah	
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan
Persekutuan Masyarakat Adat	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah

ATR/BPN 01.04.01.02 Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah	
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan
Persekutuan Masyarakat Adat	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah

ATR/BPN 01.04.01.03 Penanganan Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Tanah	
Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Badan Hukum Swasta
Masyarakat/ Perorangan	Persekutuan Masyarakat Adat
Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	

3.8.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan



PETA RELASI
ATR/BPN 01.04.02
PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN

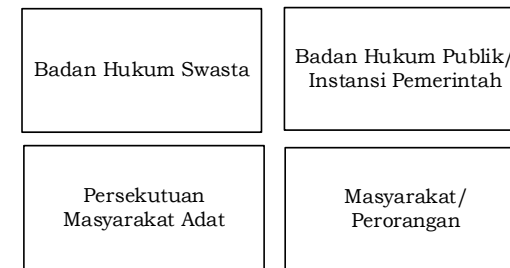
ATR/BPN 01.04.02.01
Penanganan Perkara Perdata Pertanahan

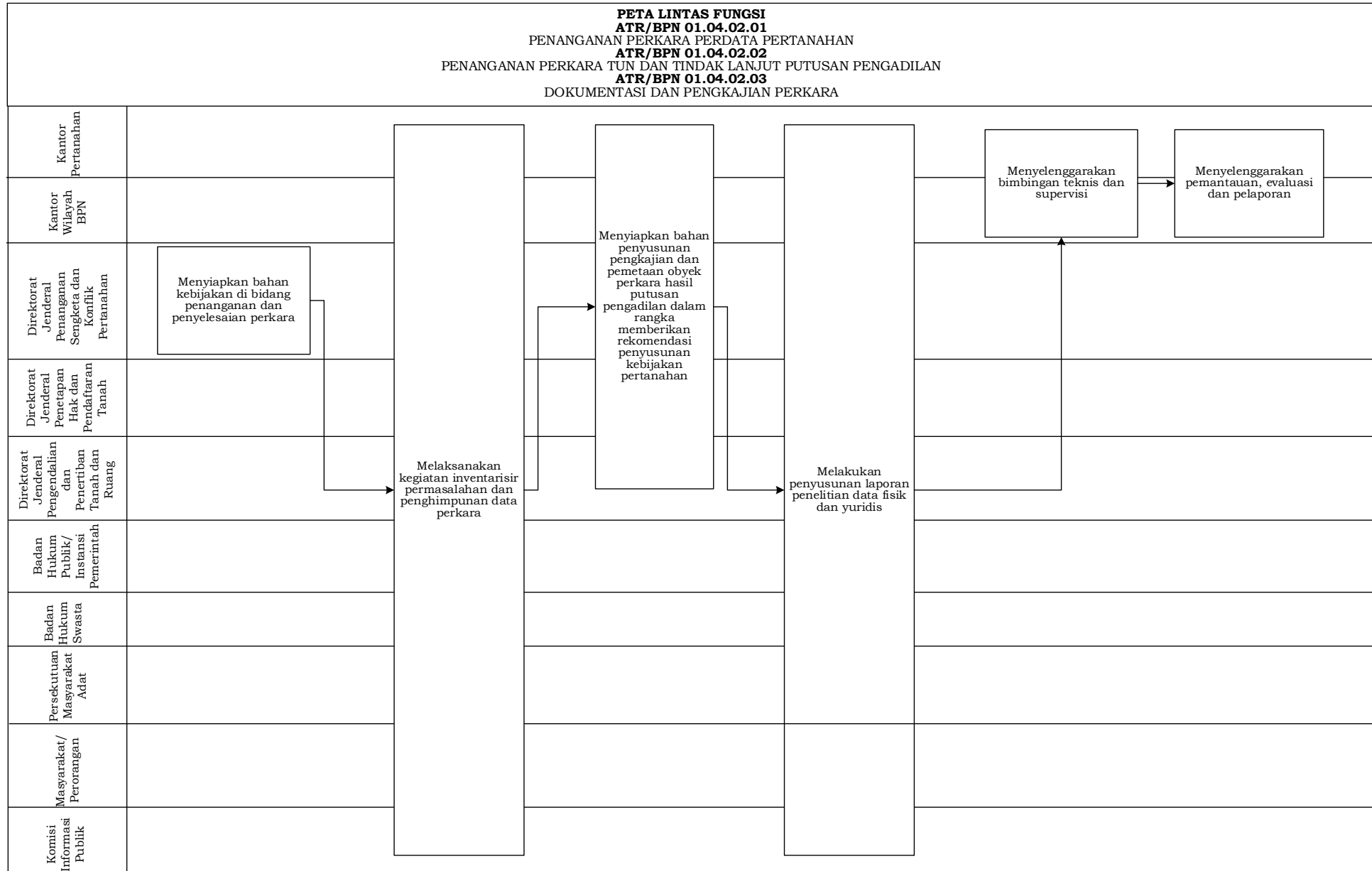


ATR/BPN 01.04.02.02
Penanganan Perkara TUN dan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan

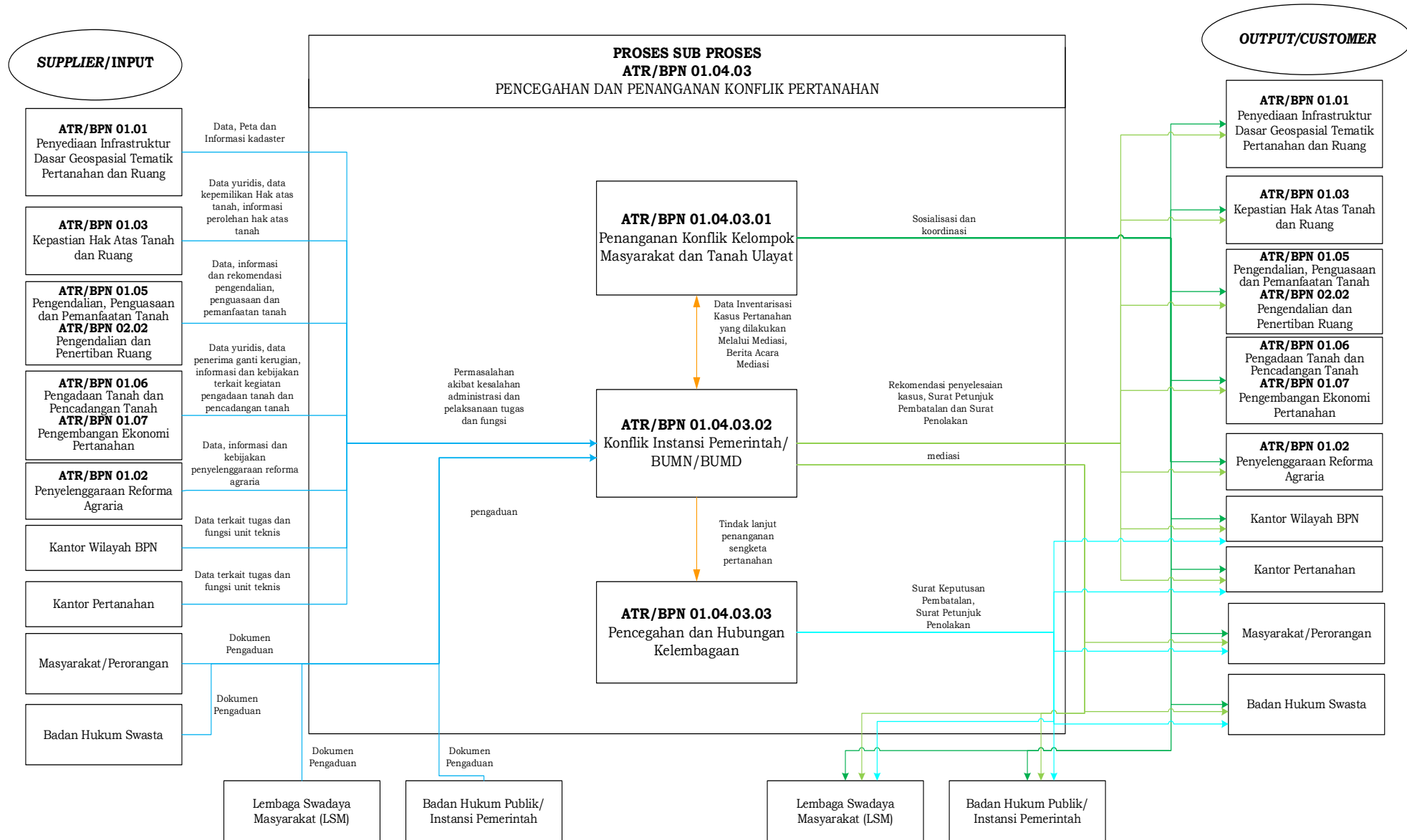


ATR/BPN 01.04.02.03
Dokumentasi dan Pengkajian Perkara





3.8.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik



PETA RELASI
ATR/BPN 01.04.03
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN

ATR/BPN 01.04.03.01
Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan
Persekutuan Masyarakat Adat	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah

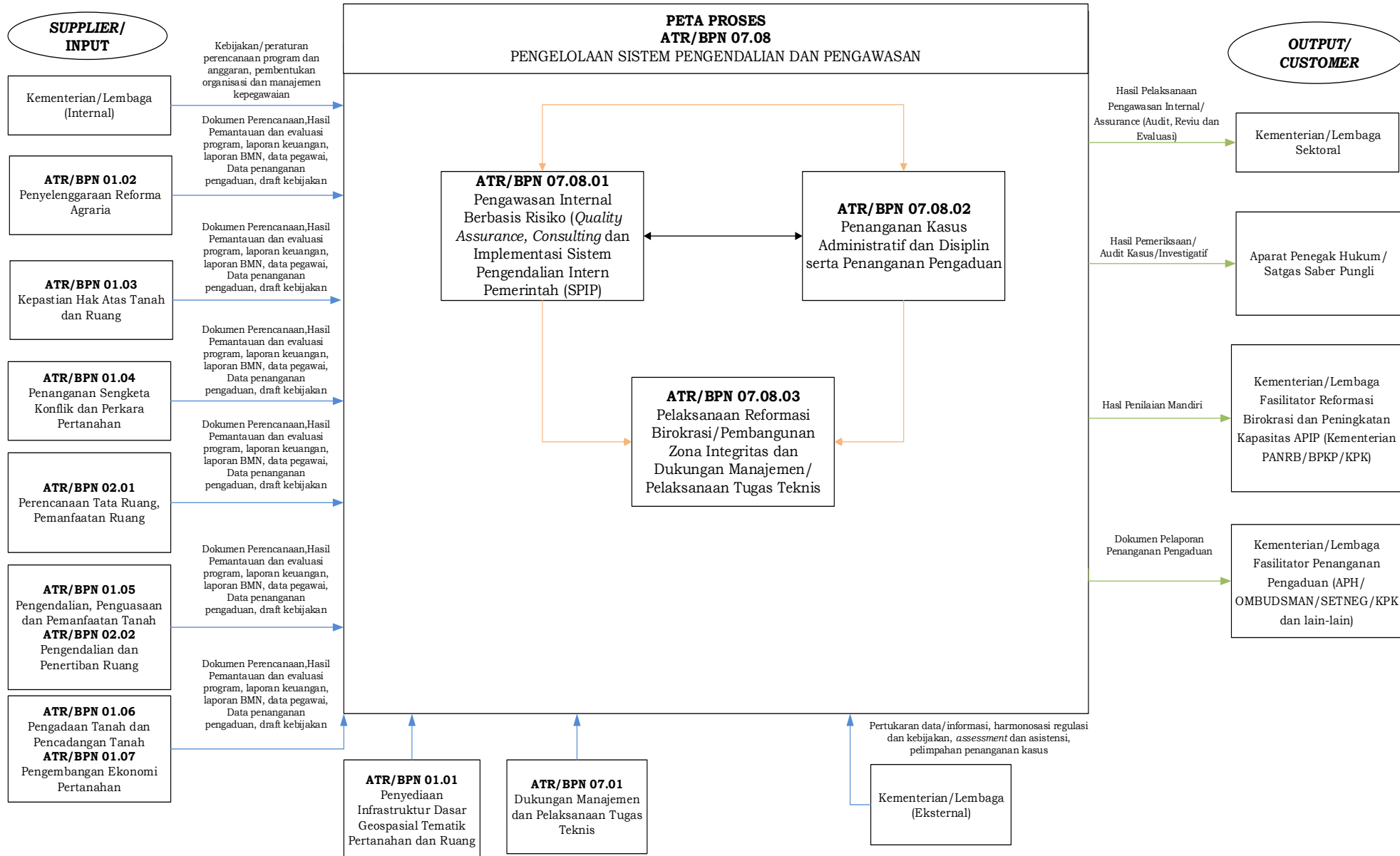
ATR/BPN 01.04.03.02
Konflik Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Kantor Wilayah BPN
Kantor Pertanahan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Badan Hukum Swasta	Masyarakat/ Perorangan
Persekutuan Masyarakat Adat	Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah

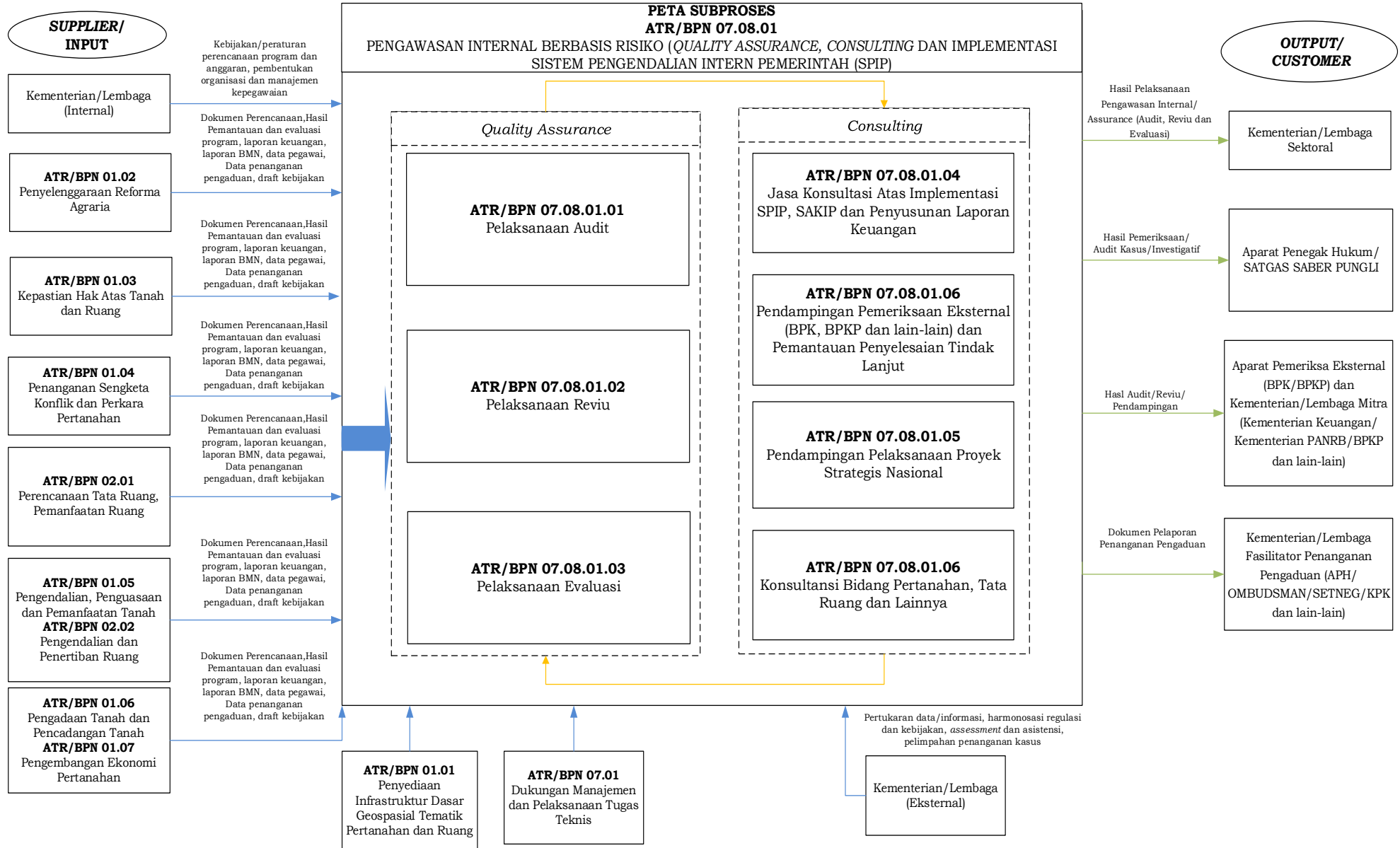
ATR/BPN 01.04.03.03
Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan

Kantor Wilayah BPN	Kantor Pertanahan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Badan Hukum Swasta
Masyarakat/ Perorangan	Persekutuan Masyarakat Adat
Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah	

3.9. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Inspektorat Jenderal

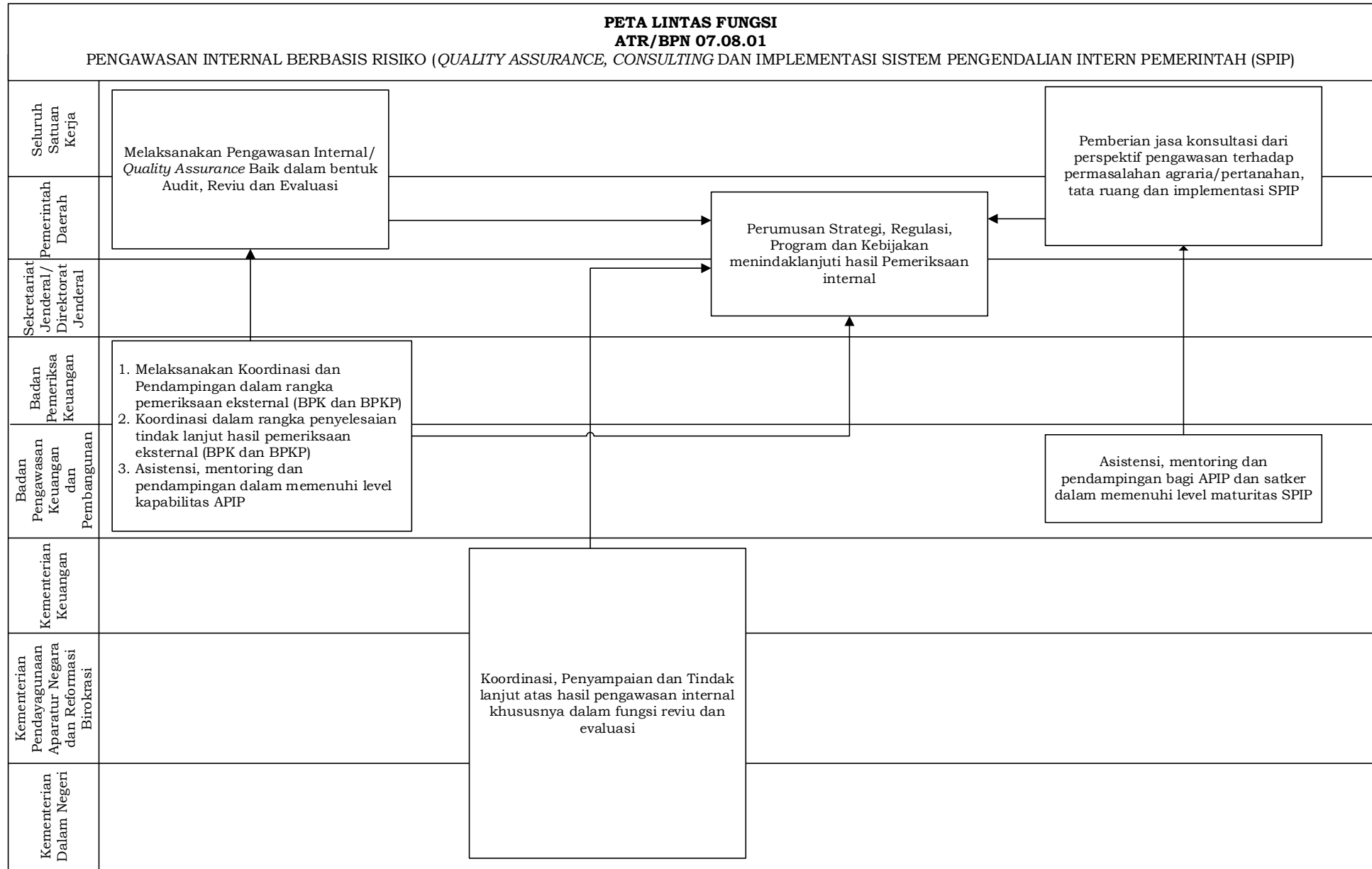


3.9.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Inspektorat Wilayah

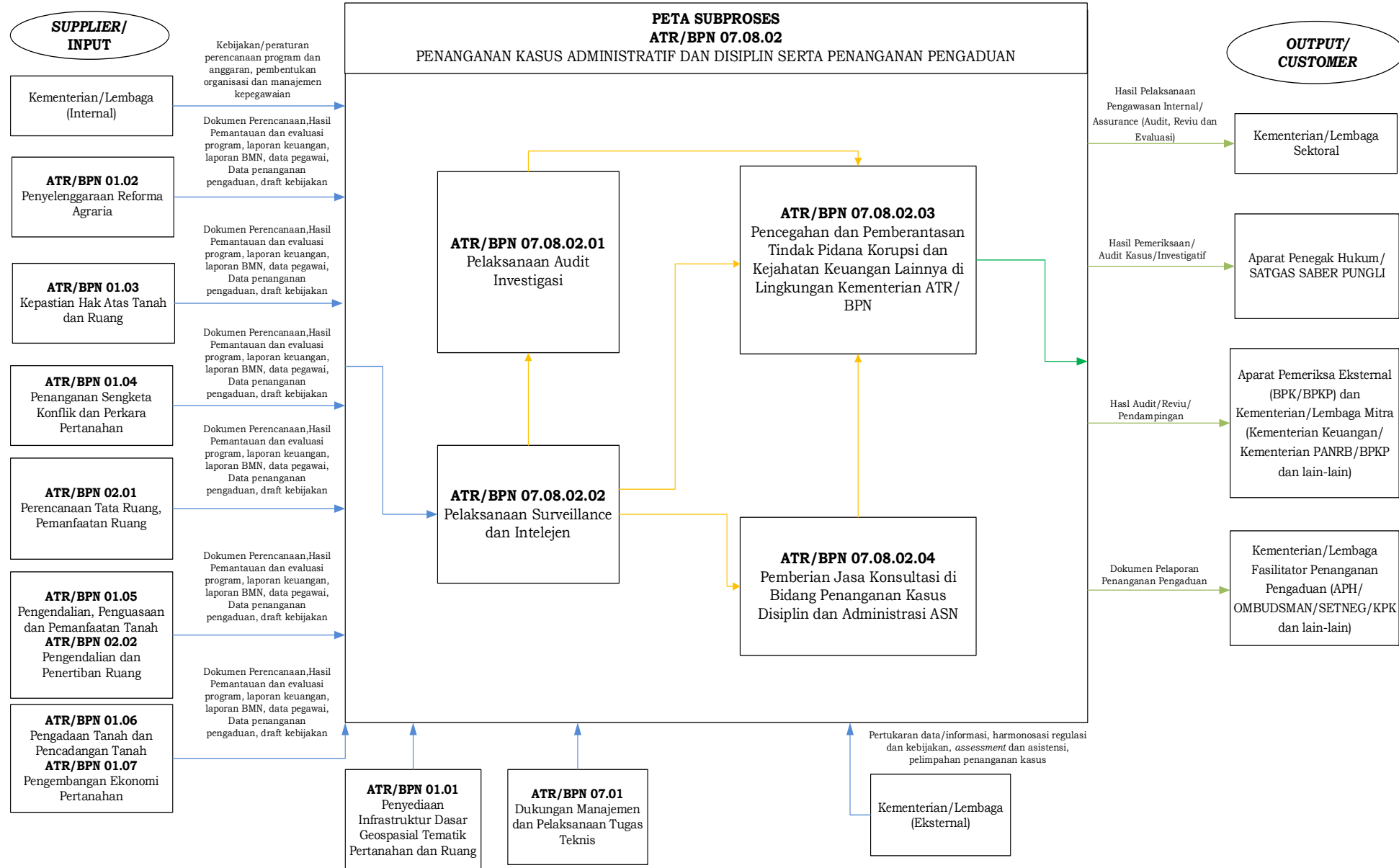


PETA RELASI
ATR/BPN 07.08.01
PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS RISIKO (*QUALITY ASSURANCE*, *CONSULTING* DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP))



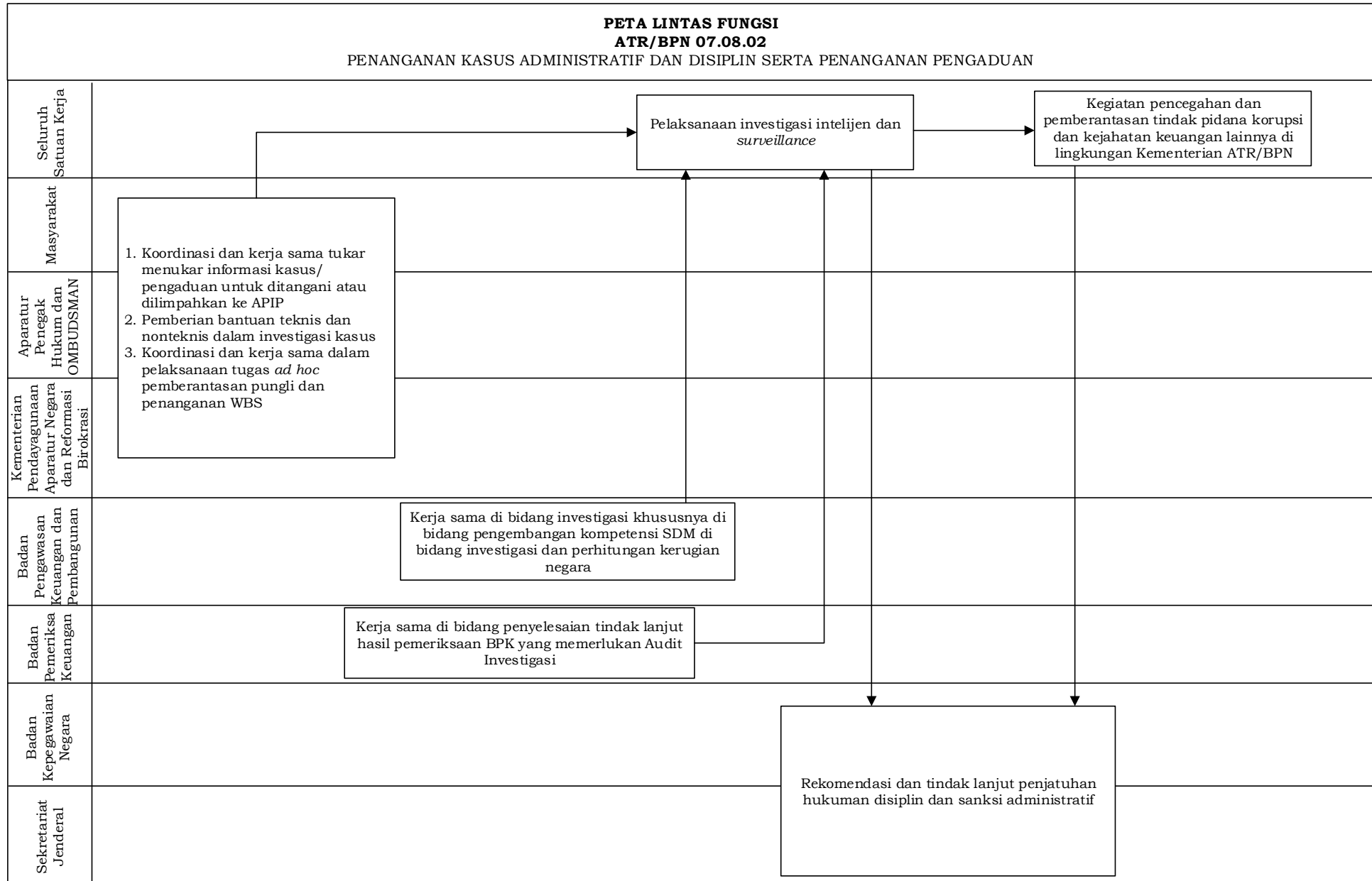


3.9.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Inspektorat Bidang Investigasi

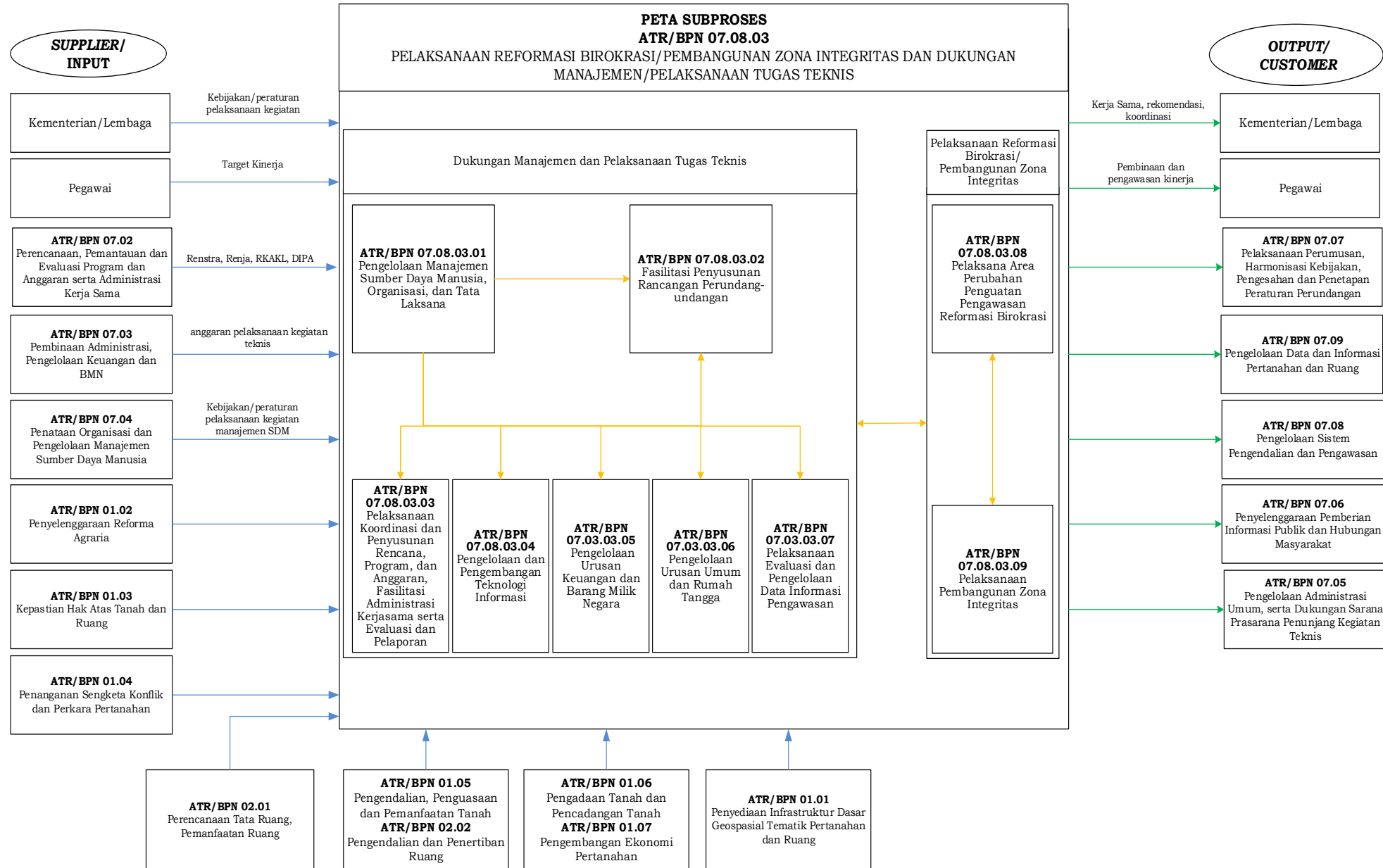


PETA RELASI
ATR/BPN 07.08.02
PENANGANAN KASUS ADMINISTRATIF DAN DISIPLIN SERTA PENANGANAN PENGADUAN





3.9.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sekretariat Inspektorat Jenderal



PETA RELASI
ATR/BPN 07.08.03
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI/PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN DUKUNGAN MANAJEMEN/PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

ATR/BPN 07.08.03
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Pembangunan
Zona Integritas dan Dukungan Manajemen/
Pelaksanaan Tugas Teknis

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

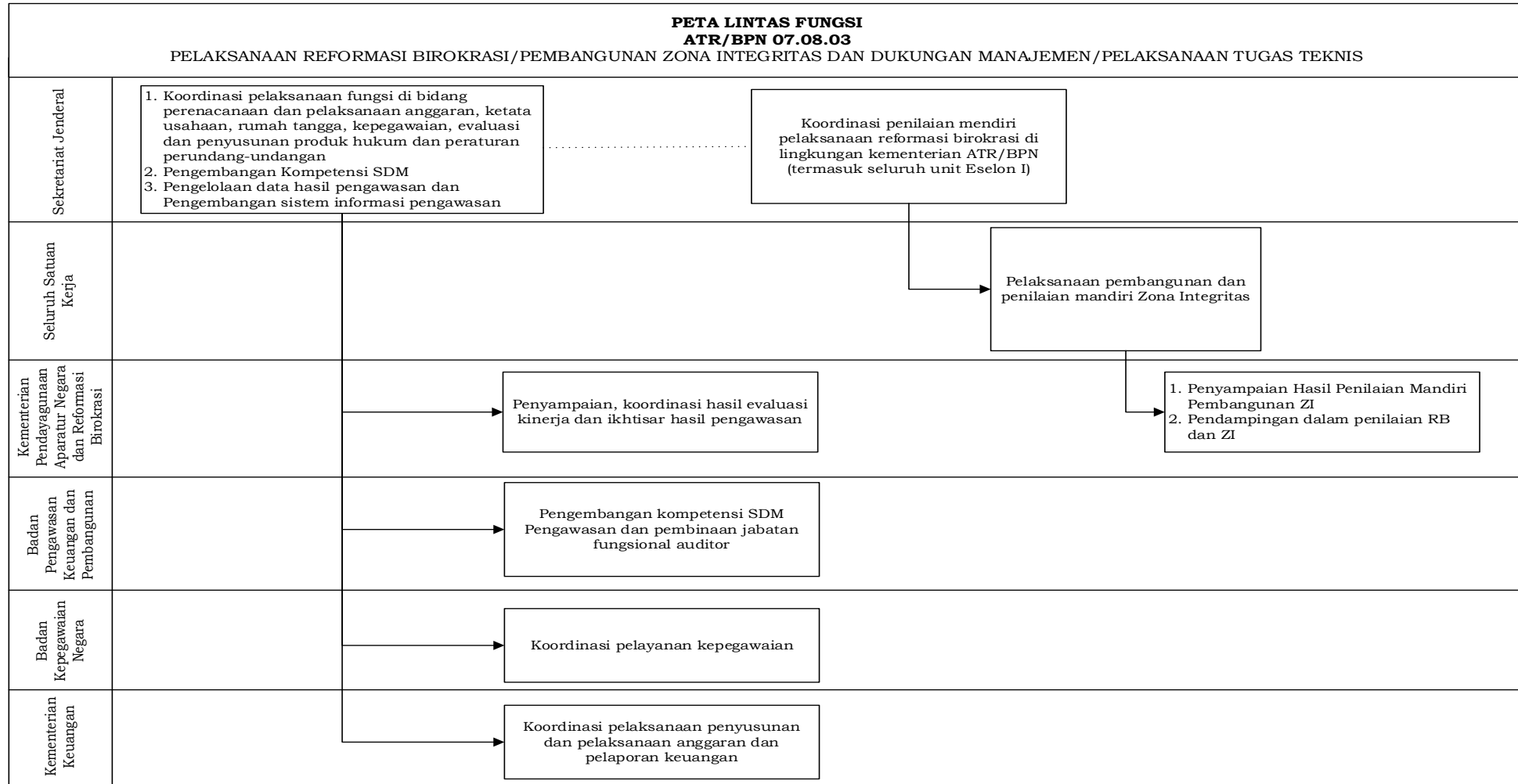
Badan Kepegawaian
Negara

Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan

Sekretariat Jenderal

Seluruh Satuan Kerja

Kementerian Keuangan



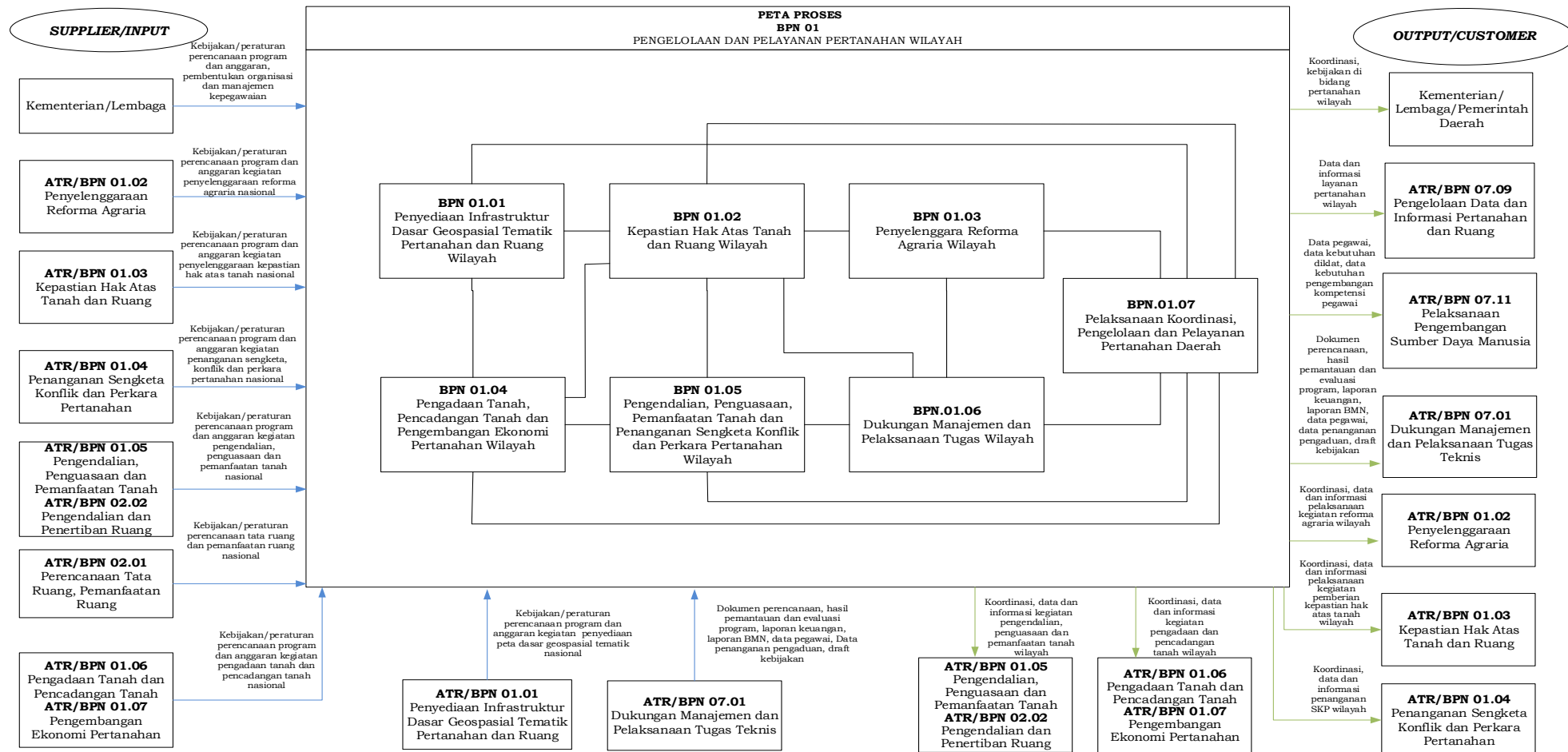
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

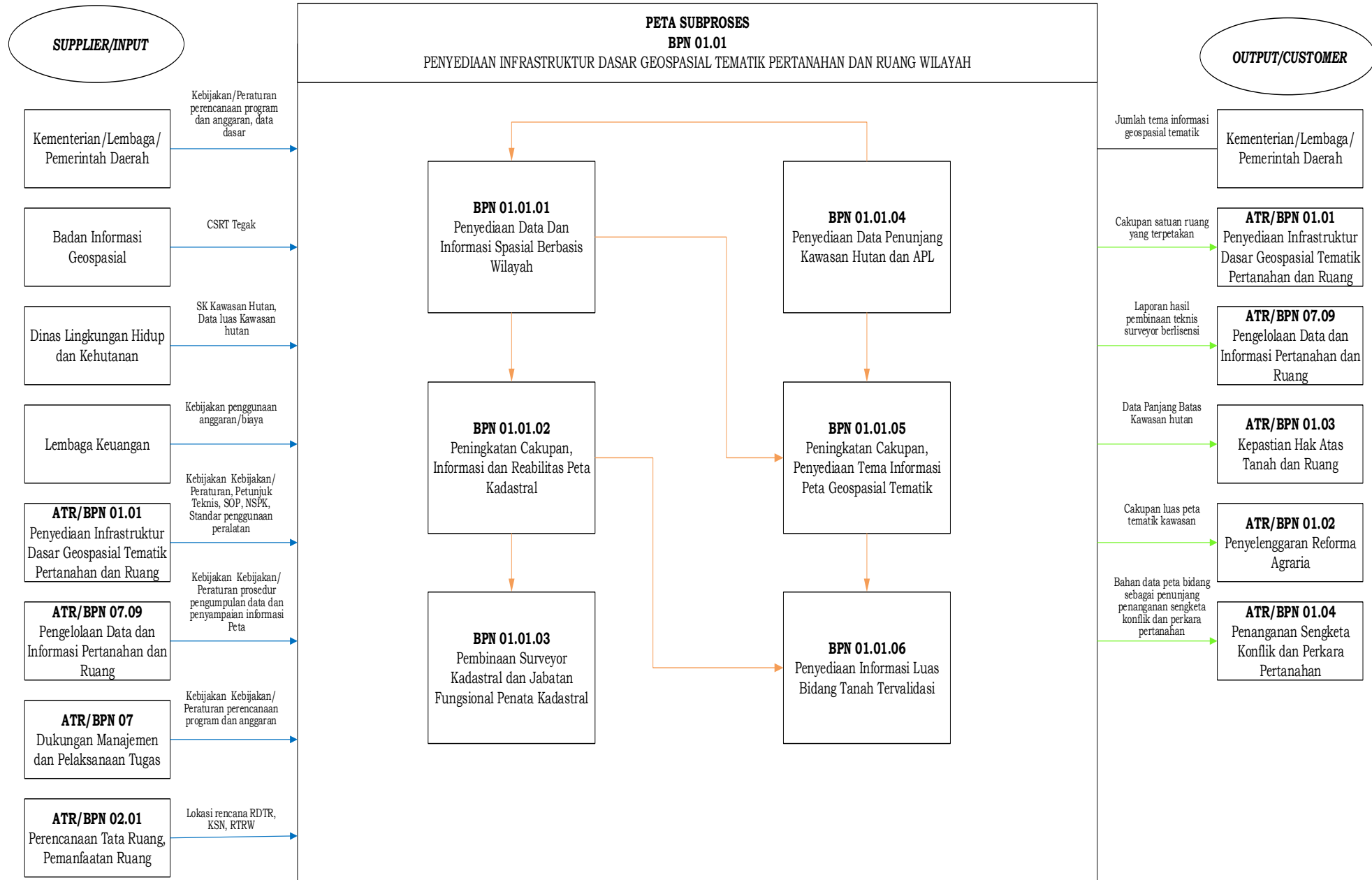
ttd.

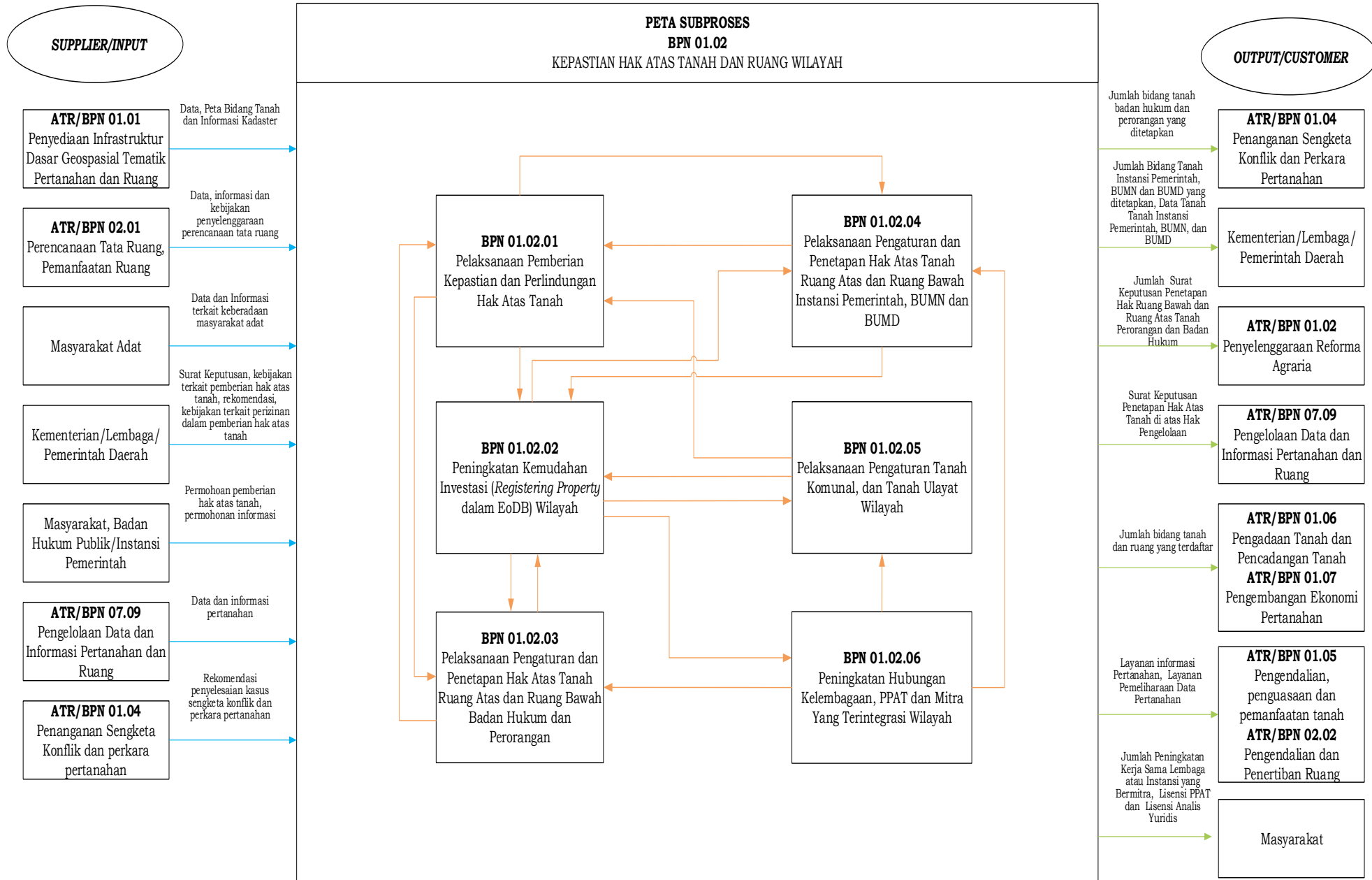
SOFYAN A. DJALIL

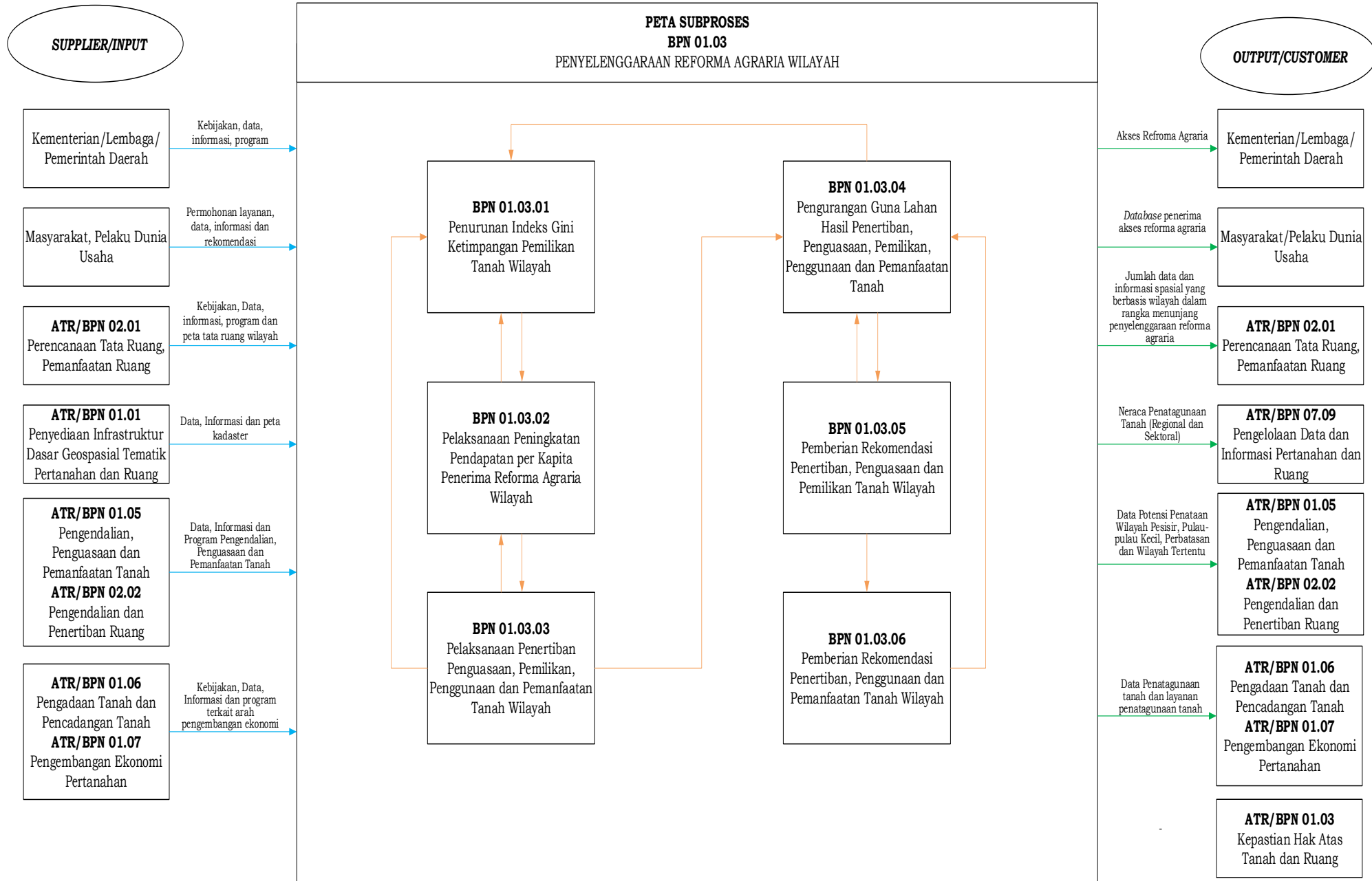
LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

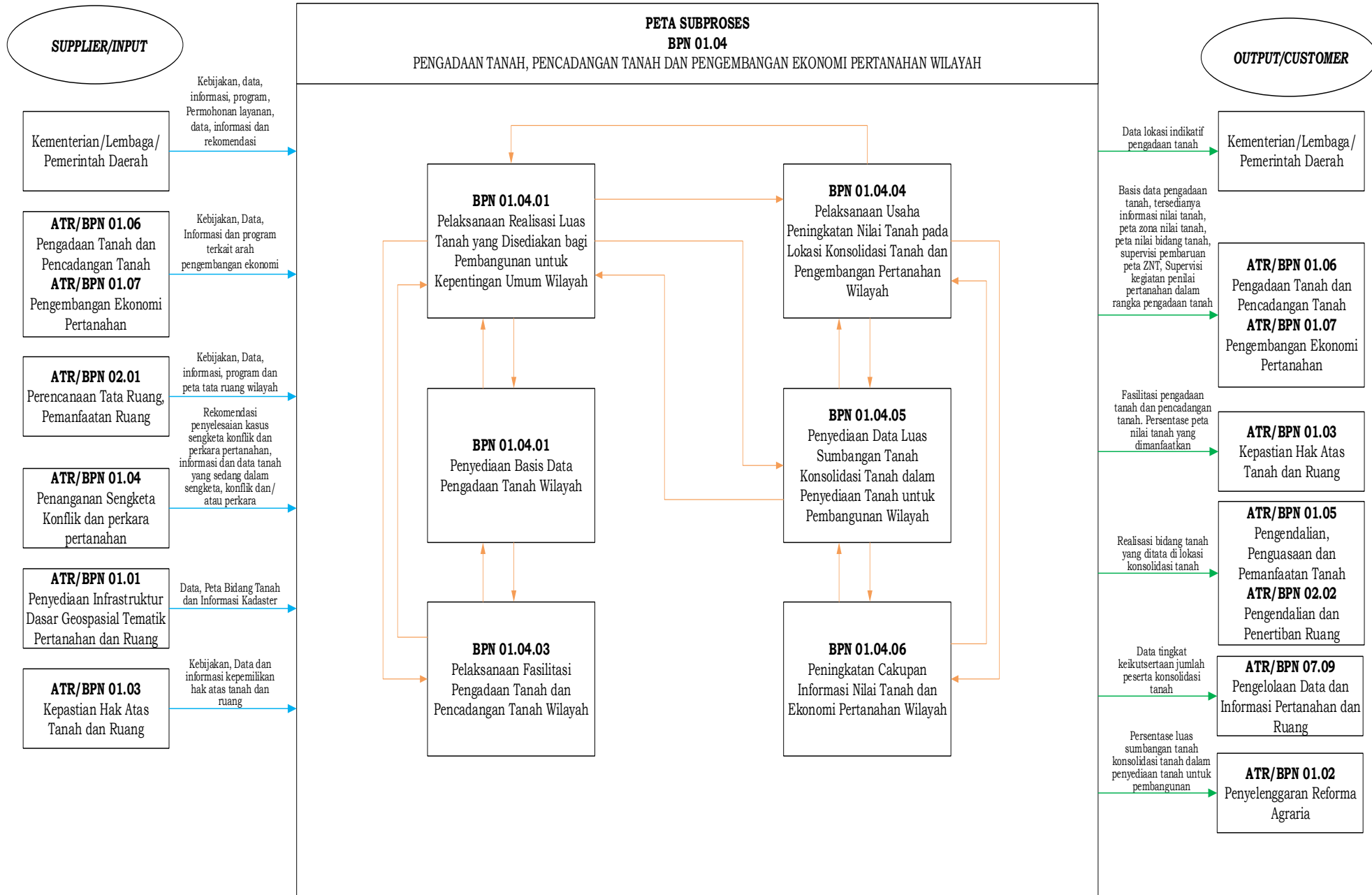
4.1 Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

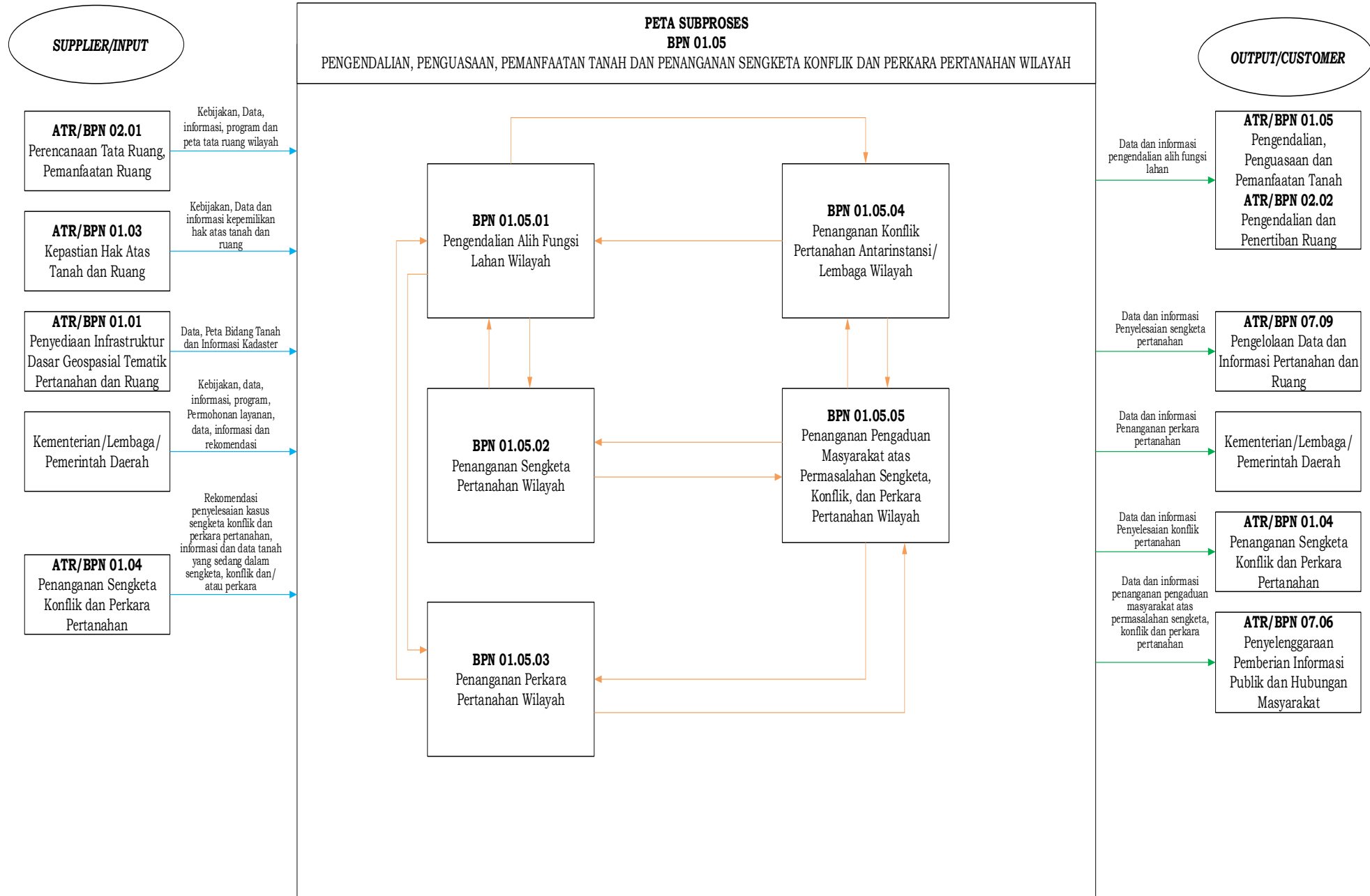


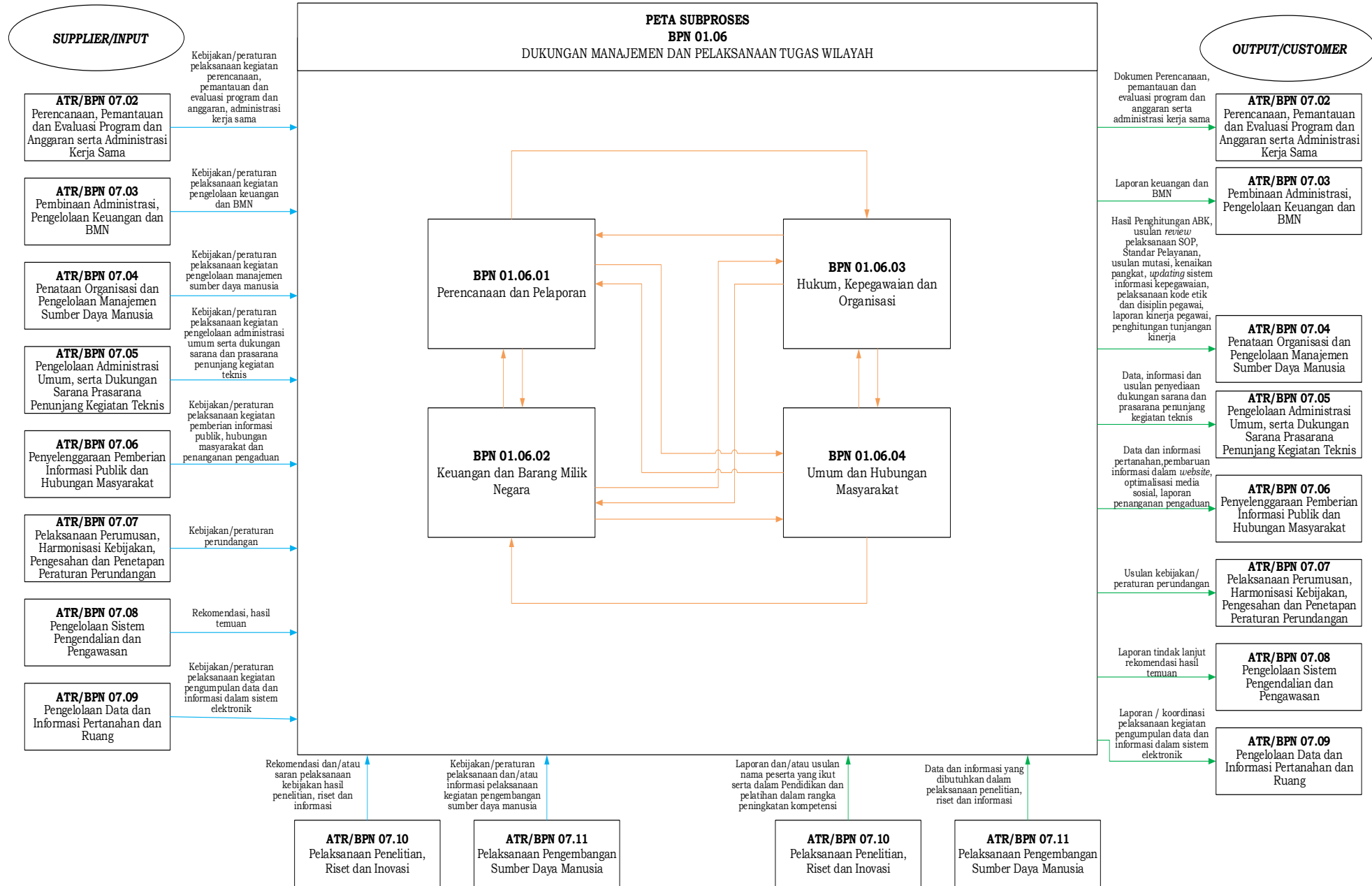




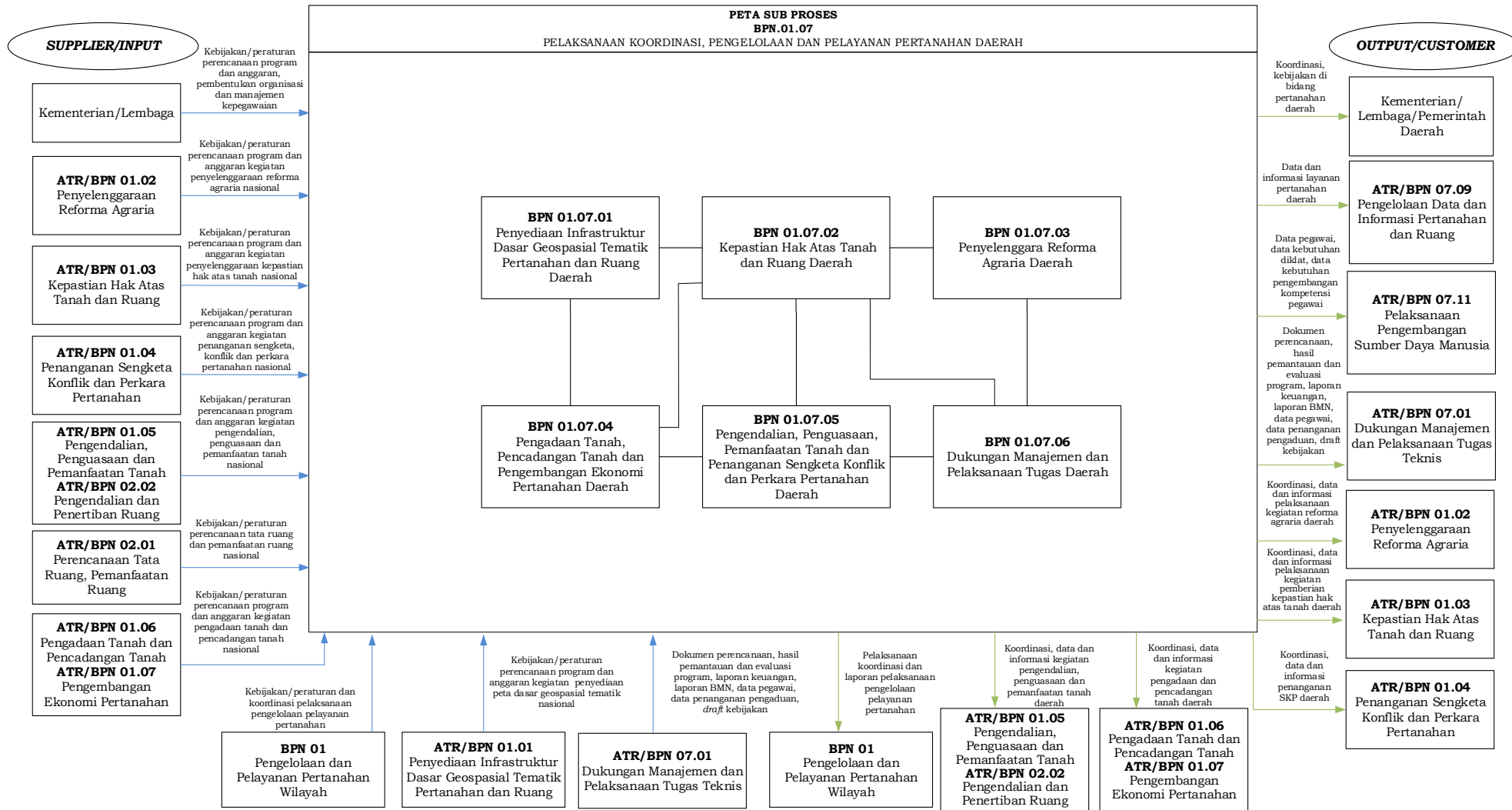








4.2 Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Kantor Pertanahan



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL